

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi proses dan substansi perumusan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta terjadi perubahan yang mendasar. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023 proses dan substansi perumusan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 namun terdapat perubahan yang mendasar yaitu adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta terjadinya bencana nasional non alam Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi dasar dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025. RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 juga merupakan instrumen pengukuran kinerja Pemerintah Daerah, oleh karenanya, upaya mencapai target pembangunan RPJMD yang telah ditetapkan dan disepakati tentunya melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta mendorong peran aktif masyarakat termasuk dunia usaha.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Sukabumi, Februari 2021

WALI KOTA SUKABUMI

ACHMAD FAHMI

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xi

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	8
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	12
1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat .....	13
1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJPD	13
1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RTRW .....	13
1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah.....	14
1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RKPD	14
1.3.6. Hubungan Perubahan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD..	14
1.4. Maksud Dan Tujuan.....	15
1.5. Sistematika .....	16

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	18
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	18
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	18
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis .....	22
2.1.1.3. Topografi dan Kemiringan Lahan .....	22
2.1.1.4. Struktur Geologi .....	25
2.1.1.5. Hidrologi .....	29
2.1.1.6. Klimatologi.....	31
2.1.1.7. Penggunaan Lahan .....	32
2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana.....	36
2.1.2. Demografi.....	39

2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	40
2.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	40
2.2.1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).....	40
2.2.1.2.	Laju Inflasi .....	41
2.2.1.3.	Ketimpangan Kemakmuran .....	42
2.2.1.4.	PDRB Per Kapita.....	43
2.2.1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	45
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial .....	45
2.2.2.1.	Jumlah penduduk .....	46
2.2.2.2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) .....	46
2.2.2.3.	Indeks Pembangunan Manusia.....	47
2.2.2.4.	Tingkat Kemiskinan.....	49
2.2.2.5.	Angka Melek Huruf (AMH) .....	50
2.2.2.6.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) .....	51
2.2.2.7.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) .....	52
2.2.2.8.	Angka Harapan Hidup (AHH) .....	53
2.2.2.9.	Persentase Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I .....	53
2.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	55
2.3.	Aspek Pelayanan Umum .....	56
2.3.1.	Fokus Urusan Layanan Wajib .....	56
2.3.1.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	57
2.3.1.2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar .....	65
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah .....	90
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	90
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur ..	95
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi .....	97
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia .....	100
2.5.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	117
2.6.	Aspek Kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD .....	123
2.6.1.	PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi ...	123
2.6.2.	PD BPR Kota Sukabumi .....	125
2.6.3.	PD Waluya Kota Sukabumi .....	127
2.7.	Aspek Kerjasama Daerah .....	129



2.7.1. Kerjasama Antar Daerah Tahun 2013-2019 .	129
2.7.2. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga .....	130
2.7.3. Kerjasama Dengan Instansi Lain .....	133
2.8. Capaian Kinerja RPJMD Periode 2013-2018 .	136
2.8.1. Pencapaian Misi I RPJMD Tahun 2013-2018	137
2.8.2. Pencapaian Misi II RPJMD Tahun 2013-2018 .....	138
2.8.3. Pencapaian Misi III RPJMD Tahun 2013- 2018 .....	139
2.8.4. Pencapaian Misi IV RPJMD Tahun 2013- 2018 .....	140
2.8.5. Pencapaian Misi V RPJMD Tahun 2013-2018 .....	142
2.9. Kondisi Pasca Pandemi Covid-19 .....	167
2.10. Capaian <i>Sustainable Development Goal's</i> .....	169
2.10.1. Kondisi Umum Capaian Target TPB.....	170
2.10.2. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial .....	174
2.10.3. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi.....	181
2.10.4. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup.....	184
2.10.5. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan .....	186

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	189
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	190
3.1.1.1. Pendapatan Daerah.....	194
3.1.1.2. Belanja Daerah.....	200
3.1.1.3. Pembiayaan Daerah.....	203
3.1.2. Neraca .....	204
3.1.3. Kinerja Pendanaan Non APBD .....	208
3.1.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .....	208

3.1.3.2. Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). .....	209
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .	210
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran .....	213
3.2.2. Analisis Pembiayaan .....	216
3.3. Kerangka Pendanaan .....	221
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja .....	221
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan .....	229
3.3.3. Kebijakan Alokasi Anggaran .....	231
3.3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya .	233

#### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

4.1. Permasalahan Pembangunan .....	242
4.2. Isu-isu Strategis .....	256
4.2.1. Isu /Kebijakan Nasional .....	257
4.2.1.1. Pandemi COVID-19 .....	257
4.2.1.2. Perubahan RPJMN .....	261
4.2.2. Isu-Isu Internasional .....	262
4.2.2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau <i>Sustainable Development Goals</i> .....	263
4.2.2.2. Kerjasama Internasional.....	264
4.2.3. Krisis Global .....	264
4.2.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD .....	266
4.2.5. Isu Strategis terkait Pemenuhan Kebutuhan Dasar .....	268
4.2.6. Perumusan Isu Strategis RPJMD.....	270

#### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

5.1. Visi .....	274
5.2. Misi .....	276
5.2.1. Misi 1 .....	276
5.2.2. Misi 2 .....	278
5.2.3. Misi 3 .....	280
5.2.4. Misi 4 .....	282

5.3.	Tujuan dan Sasaran .....	285
5.3.1.	Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi Ke- 1 RPJMD .....	288
5.3.2.	Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi Ke- 2 RPJMD .....	289
5.3.3.	Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi Ke- 3 RPJMD .....	290
5.3.4.	Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi Ke- 4 RPJMD .....	291
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	303
6.2.	Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial .....	326
6.2.1.	Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kota .....	326
6.2.2.	Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota.....	328
6.2.3.	Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Kota.....	330
6.2.3.1.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.....	331
6.2.3.2.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya.....	332
6.2.3.3.	Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.....	332
6.3.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018- 2023 .....	333
6.4.	Program Pembangunan Daerah .....	361
<b>BAB VII</b>	<b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b> .....	365
<b>BAB VIII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	369

**BAB IX PENUTUP**

9.1.	Kaidah Pelaksanaan .....	377
9.2.	Pedoman Transisi.....	378

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Daerah .....	19
Tabel 2.2	Luas dan Jenis Batuan di DAS Cimandiri .....	25
Tabel 2.3	Luas Potensi Gerakan Tanah di Daerah .....	27
Tabel 2.4	Curah Hujan Daerah.....	31
Tabel 2.5	Potensi Gempa di Kota Sukabumi .....	36
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kec. di Daerah Tahun 2015-2019 .....	39
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah Tahun 2014 - 2019 .....	40
Tabel 2.8	LPE Daerah dan LPE Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 .....	41
Tabel 2.9	PDRB Daerah Tahun 2013-2019 (dalam jutaan rupiah).....	44
Tabel 2.10	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Tahun 2013-2018 .....	81
Tabel 2.11	Perkembangan PDRB ADHB Daerah Tahun 2013-2019 .....	90
Tabel 2.12	Struktur Ekonomi Daerah Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2019 (Persen) .....	93
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Daerah Tahun 2013-2019.....	95
Tabel 2.14	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim Berinvestasi di Daerah tahun 2013-2018 .....	98
Tabel 2.15	Rasio Ketergantungan Penduduk di Daerah Tahun 2013-2019 .....	101
Tabel 2.16	Tabel Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2013-2019 .....	102
Tabel 2.17	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	118
Tabel 2.18	Kinerja Pendapatan PDAM Tirta Bumi Wibawa Tahun 2013-2019 .....	124
Tabel 2.19	Perhitungan Laba Rugi PDAM Tirta Bumi Wibawa Tahun 2013-2019 .....	124

Tabel 2.20	Kinerja PD BPR Kota Sukabumi Tahun 2013-2019 .....	126
Tabel 2.21	Pencapaian Kinerja PD Waluya Kota Sukabumi Tahun 2017-2019 .....	127
Tabel 2.22	Kerjasama Antar Daerah Tahun 2013-2019 .....	129
Tabel 2.23	Kerjasama dengan pihak ketiga .....	130
Tabel 2.24	Kerjasama Antar Daerah Tahun 2013-2019 .....	134
Tabel 2.25	Nilai Capaian Misi I RPJMD pada Tahun 2014-2018 .....	137
Tabel 2.26	Nilai Capaian Misi 2 RPJMD pada Tahun 2014-2018 .....	139
Tabel 2.27	Nilai Capaian Misi 3 RPJMD Tahun 2014-2018 ..	140
Tabel 2.28	Nilai Capaian Misi IV RPJMD pada Tahun 2014-2018 .....	142
Tabel 2.29	Nilai Capaian Misi V RPJMD pada Tahun 2014-2018 .....	143
Tabel 2.30	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 .....	144
Tabel 2.31	Capaian TPB Daerah .....	171
Tabel 2.32	Kondisi Baseline Indikator TPB dalam Pilar Sosial .....	175
Tabel 2.33	Kondisi Baseline Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi .....	182
Tabel 2.34	Kondisi Baseline Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup .....	185
Tabel 2.35	Kondisi Baseline Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan .....	187
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015-2019 .....	191
Tabel 3.2	Rata-Rata Petumbuhan Neraca Pemerintah Daerah.....	205
Tabel 3.3	Rekapitulasi Pendanaan TJSPL/PKBL BUMD dan BUMN Daerah Tahun 2013 – 2018 .....	210
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Tahun 2015-2019 .....	215

Tabel 3.5	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Tahun 2015-2019 .....	216
Tabel 3.6	Defisit Riil Anggaran Daerah Tahun 2015-2019 ..	217
Tabel 3.7	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Tahun 2015-2019 .....	219
Tabel 3.8	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 2015-2019 .....	220
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019-2020.....	224
Tabel 3.10	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2023 .....	226
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 .....	230
Tabel 3.12	Realisasi dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023 .....	232
Tabel 4.1	Perumusan Isu Strategis RPJMD .....	271
Tabel 5.1	Perwujudan Visi Perubahan RPJMD .....	275
Tabel 5.2	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2019 S/D 2020 .....	292
Tabel 5.3	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD 2021 S/D 2023 .....	298
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Perubahan RPJMD .....	305
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 .....	310
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 per tahun .....	316
Tabel 6.4	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019 s.d 2020 .....	350
Tabel 6.5	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 s.d 2023 .....	356
Tabel 6.8	Rencana Proyek Strategis Daerah Tahun 2020 - 2023 .....	362

Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2020 .....	367
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 .....	368
Tabel 8.1	Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2019 s.d 2020 .....	371
Tabel 8.2	Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2021 s.d 2023 .....	372
Tabel 8.3	Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2019 s.d 2020 .....	373
Tabel 8.4	Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021 s.d 2023 .....	375



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan .....	15
Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Daerah Menurut Kecamatan .....	20
Gambar 2.2	Peta Administrasi Daerah .....	21
Gambar 2.3	Peta Topografi Daerah .....	23
Gambar 2.4	Peta Kemiringan Lereng Daerah .....	24
Gambar 2.5	Peta Geologi Daerah .....	26
Gambar 2.6	Peta Rawan Gerakan Tanah di Daerah .....	28
Gambar 2.7	Peta Daerah Aliran Sungai Daerah .....	30
Gambar 2.8	Penggunaan Tutupan lahan di Daerah Tahun 2018 .....	32
Gambar 2.9	Peta Rawan Gunung Api Kota Sukabumi .....	37
Gambar 2.10	Peta Rawan Gempa Daerah .....	38
Gambar 2.11	Laju Inflasi Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 .....	42
Gambar 2.12	Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 .....	43
Gambar 2.13	Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 .....	45
Gambar 2.14	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah .	47
Gambar 2.15	Grafik Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 .....	49
Gambar 2.16	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2019 .....	50
Gambar 2.17	Capaian AMH Daerah Tahun 2013-2019 .....	51
Gambar 2.18	Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Daerah Tahun 2013-2019 .....	52
Gambar 2.19	Perkembangan Angka HLS Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 ...	52

Gambar 2.20	Perkembangan AHH Daerah Tahun 2013-2019 .....	53
Gambar 2.21	Persentase Keluarga PraSejahtera dan Keluarga Sejahtera-I di Daerah Tahun 2013- 2019 .....	55
Gambar 2.22	Sebaran Pasien Terkonfirmasi di Kota Sukabumi .....	167
Gambar 2.23	Kaitan Antara Aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan dengan Pencapaian TPB .....	170
Gambar 2.24	Capaian TPB Daerah .....	172
Gambar 2.25	Grafik Capaian Indikator TPB Daerah .....	173
Gambar 2.26	Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 .....	174
Gambar 2.27	Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Sosial .....	174
Gambar 2.28	Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Ekonomi .....	182
Gambar 2.29	Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah Terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Lingkungan Hidup .....	184
Gambar 2.30	Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan .....	186
Gambar 3.1	Perkembangan Porsi Pos Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019 .....	194
Gambar 3.2	Realisasi Penerimaan PAD Daerah Tahun 2015-2019 .....	196
Gambar 3.3	Perkembangan Porsi Pos Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019 .....	196
Gambar 3.4	Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Daerah Tahun 2015-2019 .....	197
Gambar 3.5	Perkembangan Porsi Pos Dana Perimbangan Daerah Tahun 2015-2019 .....	198

Gambar 3.6	Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015-2019 .....	199
Gambar 3.7	Perkembangan Porsi Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015-2019 .....	199
Gambar 3.8	Persentase Perkembangan Porsi Pos Belanja Daerah Tahun 2015-2019 .....	200
Gambar 3.9	Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Tahun 2015 – 2019 .....	202
Gambar 3.10	Realisasi Belanja Langsung Daerah tahun 2015 – 2019 .....	203
Gambar 3.11	Perkembangan Persentase Komponen Belanja Langsung Daerah Tahun 2015-2019 .....	203
Gambar 3.12	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015 - 2019.....	204
Gambar 3.13	Perkembangan Pendanaan APBN Melalui Tugas Pembantuan di Daerah Tahun 2015 – 2019.....	208
Gambar 5.1	Perencanaan Terintegrasi Pencapaian Misi Ke-1 .....	277
Gambar 5.2	Perencanaan Terintegrasi Misi 2 .....	279
Gambar 5.3	Perencanaan Terintegrasi Misi 3 .....	281
Gambar 5.4	Perencanaan Terintegrasi Misi 4 .....	283
Gambar 5.5	Prioritas Pembangunan dan Misi dalam Pencapaian Visi perubahan RPJMD .....	284
Gambar 5.6.	Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 1 RPJMD .....	288
Gambar 5.7.	Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 2 RPJMD .....	289
Gambar 5.8.	Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 3 RPJMD .....	290
Gambar 5.9.	Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 4 RPJMD .....	291
Gambar 6.1	Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD dan Penjabarannya ke RKPD .....	308
Gambar 6.2	Tema atau Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2018-2023 .....	309

## DAFTAR TABEL

Tabel 6.6	Program Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan Tahun 2019 dan yang Diproyeksikan Tahun 2020.....	1
Tabel 6.7	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2021-2023 .....	17
Tabel 7.3	Realisasi dan Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Daerah.....	30
Tabel 7.4	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Daerah Tahun 2021-2023 .....	68
Tabel 8.5	Indikator Kinerja Kunci Realisasi 2019 dan Target 2020.....	88
Tabel 8.6	Indikator Kinerja Kunci Target 2021 s.d 2023.....	104



**PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan jangka menengah daerah merupakan terjemahan dari visi, misi, dan program Wali Kota yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan antar dokumen perencanaan agar dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan daerah diperlukan penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
  - c. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

dan

WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 - 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

5. Rencana ...



5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
  10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
  11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
  12. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
  13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
  14. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) RPJMD dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025.
- (2) Selain mengacu pada RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPJMD memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat.

(3) Sistematika ...

- (3) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran keuangan Daerah;
  - d. permasalahan dan isu strategis;
  - e. Visi, Misi, tujuan, dan sasaran;
  - f. strategi, arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
  - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
  - h. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - i. penutup.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (4) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi RPJMD.
- (5) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

(6) Ketentuan ...

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
5. Pasal 8 dihapus.
6. Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Februari 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd


DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 1/16/2021.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI



Hj. LULU YULIASARI, S.H.

NIP. 19710703 199703 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2018-2023

## I. UMUM

Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 di Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

RPJMD Tahun 2018-2023 disusun guna mewujudkan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan agar dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta provinsi.

Selain itu, terdapat perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut RPJMD Tahun 2018-2023 perlu dilakukan penyesuaian guna mengakomodir perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk perubahan RPJMD secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD Tahun 2018-2023 beserta perubahannya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perubahan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan RKPD pada setiap tahun anggaran masa yang akan datang.

II. Pasal ...

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Dihapus.

Angka 6

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 64

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2018-2023.

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2018-2023

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, visi dan misi Wali Kota terpilih harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan

dokumen .....

dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Dokumen RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa bakti 2018-2023 yaitu Achmad Fahmi dan Andri Setiawan Hamami yang dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi pada tanggal 20 September 2018. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 yang saat ini memasuki fase keempat, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai pedoman perencanaan pembangunan Daerah yang harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

RPJMD bukan dokumen perencanaan yang bersifat statis, namun bersifat dinamis yang dapat dilakukan perubahan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan. Berdasarkan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan .....

Perubahan yang mendasar sebagaimana yang dimaksud pada point c yakni mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dilakukan karena memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat 1 point c yaitu terjadi perubahan yang mendasar akibat pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana non alam pada tingkat nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan adanya perubahan kebijakan nasional dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta peraturan teknis turunannya.

Berawal di penghujung tahun 2019 diberitakan ada virus misterius menyerupai SARS telah muncul di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei salah satu Provinsi di China. Pada tanggal 30 Januari 2020, Badan Dunia untuk Kesehatan (WHO) menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus corona varian baru yang kemudian diberi nama *Corona Virus Disease* 2019 atau COVID-19. Hanya dalam waktu singkat COVID-19 kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia tidak terkecuali Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 diumumkan adanya kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia dan dalam durasi waktu kurang dari satu bulan jumlah penderita berlipat ganda menjadi ribuan tersebar di 34 (tiga puluh empat) Provinsi. Sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020, tercatat sebanyak 169.195 (seratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima) orang terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah yang sembuh adalah 122.802 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua) orang dan meninggal sebanyak 7.261 (tujuh ribu dua ratus enam puluh satu) orang (sumber: Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat).



COVID-19 telah melahirkan dampak sosial-ekonomi yang sangat masif secara global. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pandemi ini telah menghadirkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar bukan hanya dari aspek penyakitnya tetapi juga kebijakan yang semestinya ditargetkan untuk mencegah penyebarannya. Kebijakan pembatasan sosial (*social distancing* dan *physical distancing*) misalnya telah membawa implikasi melemahnya sektor informal yang aktivitas ekonominya tidak dimungkinkan untuk segera beradaptasi dengan kebijakan penanganan COVID-19 tersebut (Winanti dan Masûdi, 2020).

Penanganan COVID-19 dan dampaknya membutuhkan kapasitas sumber daya yang sangat besar. Ini dibutuhkan dalam rangka penyediaan segala fasilitas dan sistem pelayanan kesehatan, serta mengelola dampak sosial dan ekonomi sebagai konsekuensi dari kebijakan untuk menahan penyebaran wabah, misalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pengerahan sumber daya yang luar biasa besar dilakukan baik untuk menangani wabahnya sendiri maupun untuk menyelamatkan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan berbagai bentuk subsidi ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan, maka Pemerintah bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu *refocussing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penghitungan kembali proyeksi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Penyesuaian anggaran tentu berdampak pada capaian target-target indikator kinerja pembangunan. Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan penyesuaian atau perubahan target-target pembangunan dalam RPJMN pada Rancangan Awal RKP

Tahun 2021 terutama indikator makro ekonomi nasional untuk Tahun 2020 dan proyeksi target pembangunan Tahun 2021.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama Tahun 2020 ini.

Substansi RPJMD yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program menjadi nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 tahun 2020 beserta indikator kinerjanya; dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, *top down*, dan *bottom up*. Perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam pendekatan politik artinya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Pendekatan teknokratis dilakukan dengan cara atau metode dan kerangka berpikir ilmiah, pendekatan ini akan melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait seperti kalangan akademisi.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terhadap pembangunan. Partisipasi dari pemangku kepentingan pembangunan seperti masyarakat, organisasi sosial masyarakat, dan filantropi bisnis diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Pendekatan atas bawah (*top down*) dan pendekatan bawah atas (*bottom up*) artinya perencanaan pembangunan disesuaikan dengan kewenangan pada setiap jenjang pemerintahan, yang disesuaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada setiap tingkat pemerintahan.

Penyusunan perubahan RPJMD juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif, dan spasial.
  - a. pendekatan holistik-tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
  - b. pendekatan integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
  - c. pendekatan spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
2. menerapkan kebijakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk program dan kegiatan strategis atau *money follow programme*.
3. menerapkan cara baru, yaitu:
  - a. kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *Pentahelix* – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*);

b. kolaborasi .....

- b. kolaborasi pendanaan pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Dana Masyarakat atau Umat, dan CSR;
- c. inovasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan perubahan RPJMD dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD.

Penyusunan perubahan RPJMD diawali dengan tahap persiapan yang menghasilkan draft rancangan awal perubahan RPJMD. Draft ini disusun dan disempurnakan kembali berdasarkan hasil konsultasi publik kemudian dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD dan dikonsultasikan ke Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Rancangan awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal perubahan Renstra Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi masukan untuk perumusan rancangan perubahan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang perubahan RPJMD.

Hasil musrenbang perubahan RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir perubahan RPJMD. Rancangan akhir perubahan RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Perda tentang perubahan RPJMD. Setelah disetujui, maka Raperda tentang perubahan RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat. Hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat menjadi dasar penyempurnaan Ranperda tentang perubahan RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda tentang Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

Perubahan RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RPJMD menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. media untuk mengimplementasikan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. penjabaran pelaksanaan RPJPD periode atau tahap keempat;
3. perwujudan dari rencana tata ruang wilayah Daerah tahun 2011-2031;
4. pedoman akhir dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah;
5. pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan Daerah;
6. pedoman arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Daerah
7. instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Wali Kota dan kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan
8. instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di perubahan RPJMD dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan perubahan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan .....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
22. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Non Alam;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9



- tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029;
  35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
  36. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 tahun 2000 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Sukabumi;
  37. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005-2025;
  38. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi tahun 2011-2031;
  39. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Penyusunan perubahan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan pada RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029, serta RTRW Daerah Tahun 2011-2031.

### **1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat**

Penyusunan perubahan RPJMD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan dalam perubahan RPJMD dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat yang juga sedang dilakukan perubahan.

### **1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJPD**

RPJPD memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan dan merupakan pedoman bagi penyusunan perubahan RPJMD. Penyusunan rancangan perubahan RPJMD berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJPD tahap ketiga, serta berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pada RPJPD tahap keempat yang ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif serta terpadunya antara sektor jasa dan pertanian. Lembaga dan pranata telah tersusun dan tertata serta berfungsi dengan baik. Kondisi ini didukung dengan kemampuan iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian lebih efisien dan produktivitas tinggi.

### **1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RTRW**

Penyusunan perubahan RPJMD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2011-2031. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah

daerah dengan kebijakan pembangunan yang harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah kota, program pengembangan wilayah kota, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

#### **1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah**

Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam perubahan RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

#### **1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RKPD**

Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD harus berpedoman pada perubahan RPJMD yang artinya harus selaras dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD. Selain itu rencana program dan kegiatan prioritas tahunan Daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD.

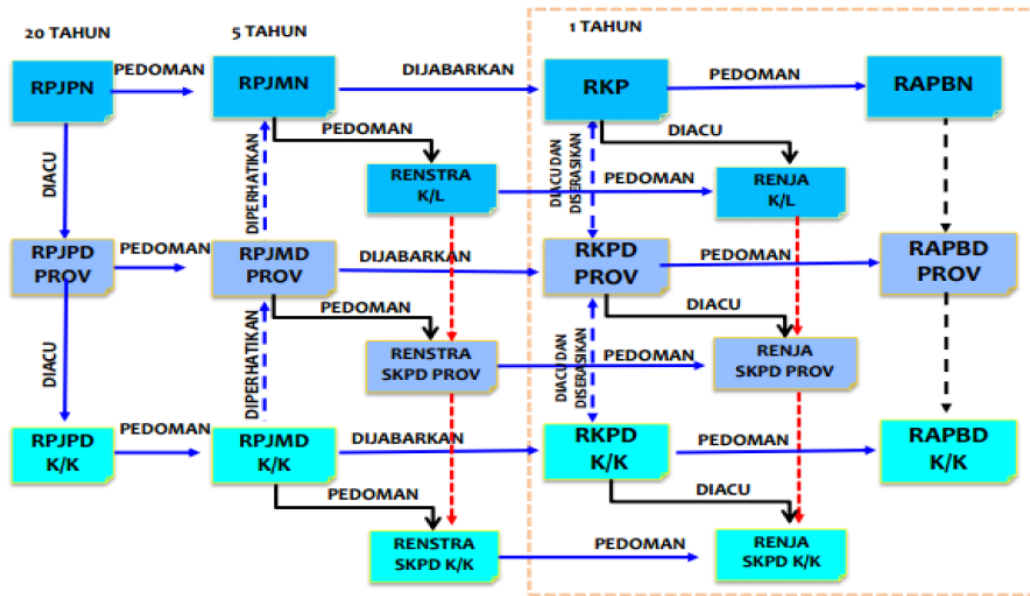
#### **1.3.6. Hubungan Perubahan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD**

Penyusunan perubahan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, yang bertujuan untuk memastikan

bahwa .....

bahwa pembangunan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan, hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan disajikan pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1**  
**Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**  
(Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017)

#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Perubahan RPJMD adalah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif, dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut adanya perubahan yang mendasar terkait kebijakan nasional dan percepatan penanganan COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan penyusunan perubahan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;

2. menetapkan .....

2. menetapkan pedoman untuk penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang berbatasan.

### **1.5. SISTEMATIKA**

Sistematika perubahan RPJMD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu terdiri atas 9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** memuat latar belakang dan gambaran umum penyusunan perubahan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi secara indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH** memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub bab.

**BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH** memuat permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB V VISI, MISI,  
TUJUAN, DAN  
SASARAN**

menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

**BAB VI STRATEGI,  
ARAH KEBIJAKAN,  
DAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN  
DAERAH**

memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

**BAB VII KERANGKA  
PENDANAAN  
PEMBANGUNAN DAN  
PROGRAM  
PERANGKAT  
DAERAH**

memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

**BAB VIII KINERJA  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN  
DAERAH**

memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan tahun 2023.

**BAB IX PENUTUP**

memuat kaidah pelaksanaan perubahan RPJMD serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 3 (tiga) aspek utama yang penting yang menjadi indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang perlu dianalisis yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Gambaran umum kondisi Daerah menjadi dasar didalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

#### **2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

Analisis pada aspek geografis perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Secara rinci analisis geografis Daerah dilakukan terhadap:

##### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Karakteristik lokasi dan wilayah Daerah mencakup luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan.

##### **2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Wilayah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 Daerah terbagi dalam 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Daerah mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh)

kecamatan .....

kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Cibeureum.

Berdasarkan posisi geografisnya, Daerah berbatasan dengan beberapa Kecamatan di kabupaten Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
3. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
4. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Wilayah administrasi Daerah terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum. Jarak terjauh dari Balai Kota Sukabumi adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 (tujuh) km. Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 2.1 sedangkan persentase luas wilayah Daerah per kecamatan disajikan pada Gambar 2.1 dan peta administrasi wilayah Daerah disajikan pada Gambar 2.2 dibawah ini.

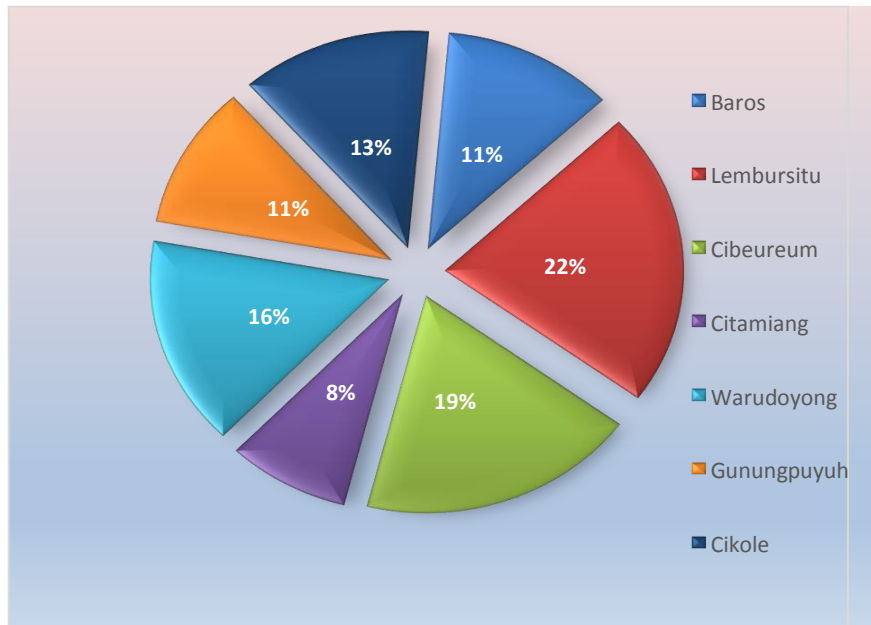
**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Daerah**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>
1	Baros	5,583
2	Lembursitu	10,692
3	Cibeureum	9,122
4	Citamiang	4,004
5	Warudoyong	7,563
6	Gunungpuyuh	5,151
7	Cikole	6,216
<b>LUAS TOTAL</b>		<b>48,332</b>

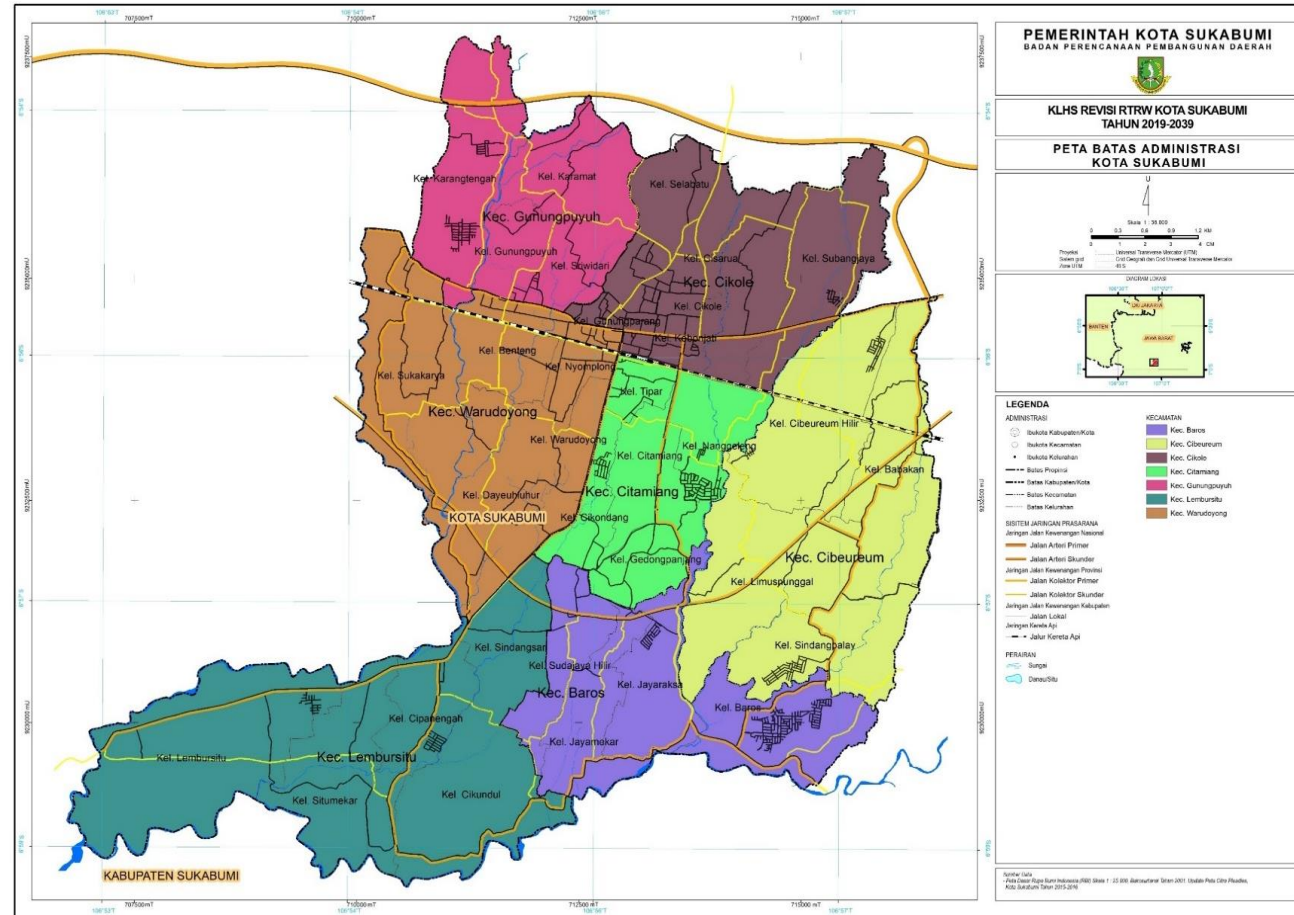
*Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun, 2019*

Gambar 2.1.....





**Gambar 2.1**  
**Persentase Luas Wilayah Kota Sukabumi Menurut Kecamatan**  
*(Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun, 2019)*



**Gambar 2.2**  
**Peta Administrasi Daerah**  
(Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019)

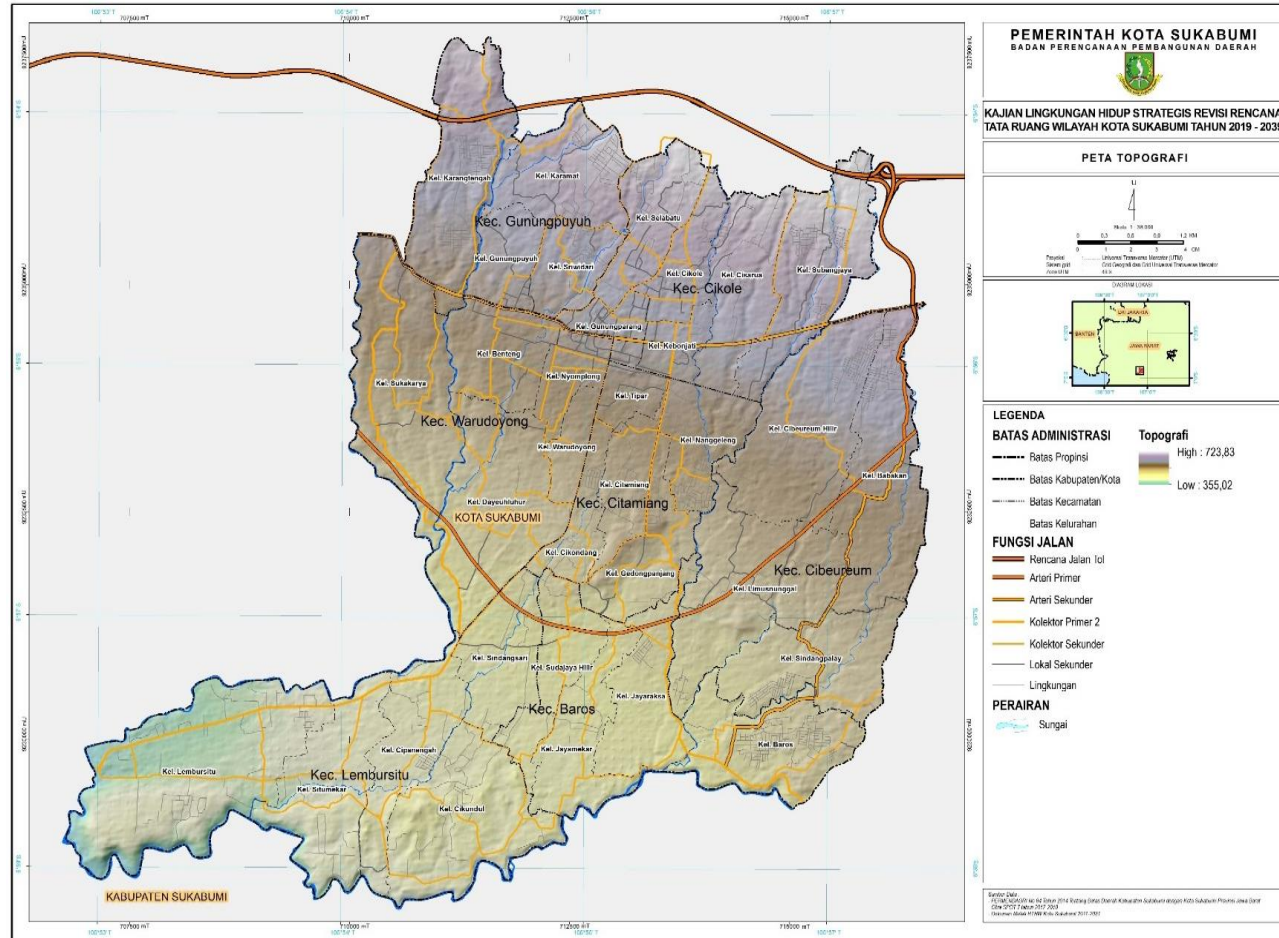
2.1.1.2. Letak.....

#### **2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**

Wilayah Daerah terletak pada bagian selatan tengah Provinsi Jawa Barat, pada titik koordinat  $106^{\circ} 45' 50''$  BT -  $106^{\circ} 45' 10''$  BT sampai dengan  $6^{\circ} 49' 29''$  LS -  $6^{\circ} 50' 44''$  LS, secara geografis Kota Sukabumi terletak di antara pusat pertumbuhan mega urban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung)  $\pm 96$  (sembilan puluh enam) KM dan Jarak dari Ibu Kota Negara (Jakarta)  $\pm 120$  (seratus dua puluh) KM. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Letak Daerah yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dengan Ibu Kota Negara (Jakarta) serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja. Secara ekonomis hal tersebut menguntungkan Kota Sukabumi, karena dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan baik dari sektor jasa, perdagangan dan sektor lainnya.

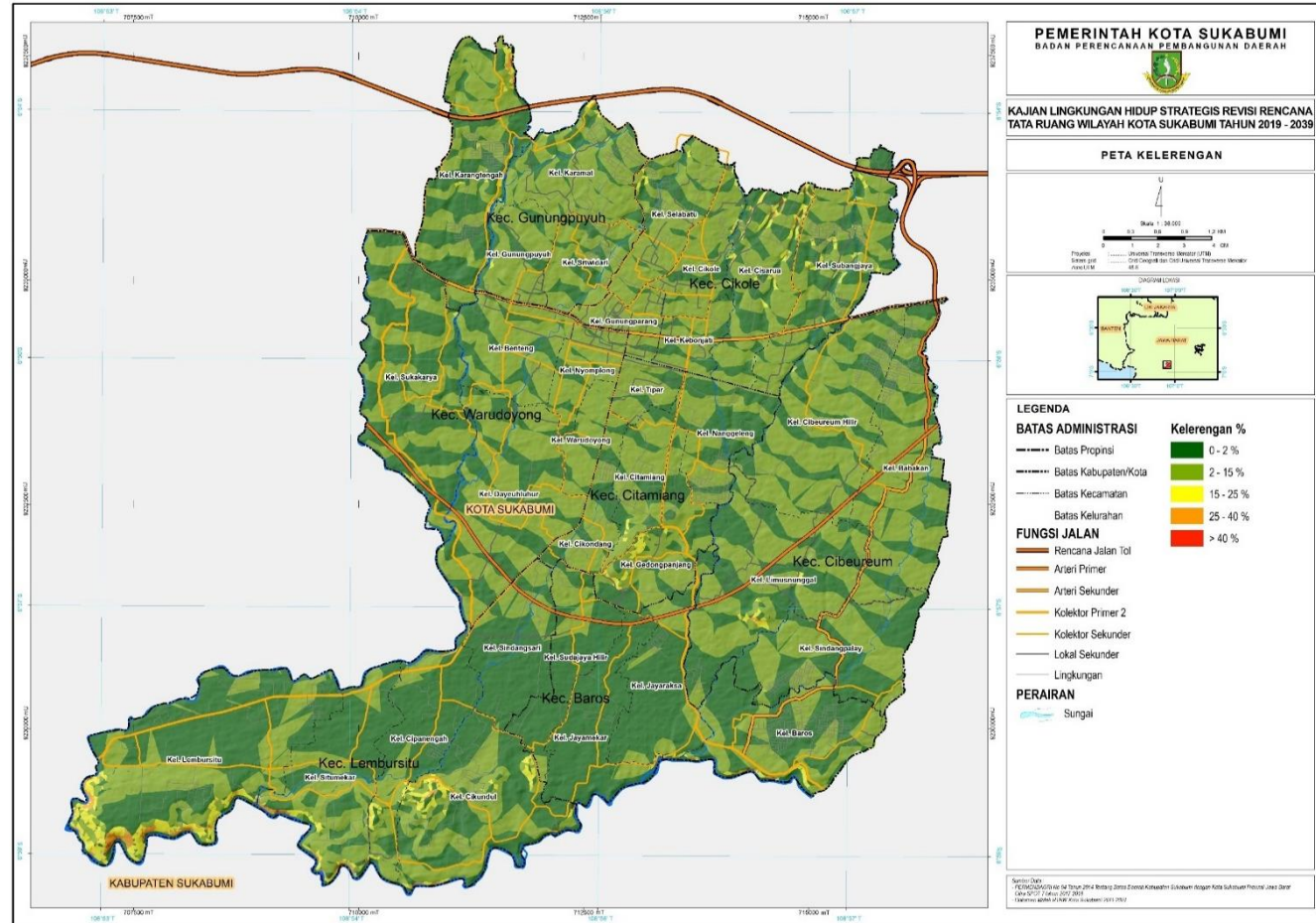
#### **2.1.1.3. Topografi dan Kemiringan Lahan**

Wilayah Daerah merupakan lereng selatan dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya mencapai 584 (lima ratus delapan puluh empat) meter di atas permukaan laut. Dengan bentuk bentang alam yang relatif datar sampai bergelombang dengan kemiringan lahan (lereng) diperkirakan relatif beragam. Adapun kondisi topografi dan kemiringan lereng di wilayah Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan 2.4 berikut ini.



**Gambar 2.3**  
**Peta Topografi Daerah**  
(Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019)

Gambar 2.4 .....



**Gambar 2.4**  
**Peta Kemiringan Lereng Daerah**  
(Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019)

2.1.1.4. Struktur.....

#### 2.1.1.4. Struktur Geologi

Susunan litologi batuan di Daerah dan sekitarnya didominasi oleh singkapan batuan vulkanik yaitu produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango berumur holosen. Secara regional, stratigrafi wilayah ini ditandai oleh batuan sedimen dari formasi walat berumur oligosen awal merupakan satuan tertua yang dapat dijumpai di daerah ini. Formasi walat ditutupi oleh batuan sedimen dari Formasi Rajamandala dengan kisaran umur dari oligosen akhir sampai miosen awal. Satuan ini selanjutnya ditutupi oleh Formasi Jampang yang berumur miosen awal. Satuan batuan sedimen ini tersingkap di bagian selatan-tenggara dan barat-barat daya dari wilayah Kota Sukabumi.

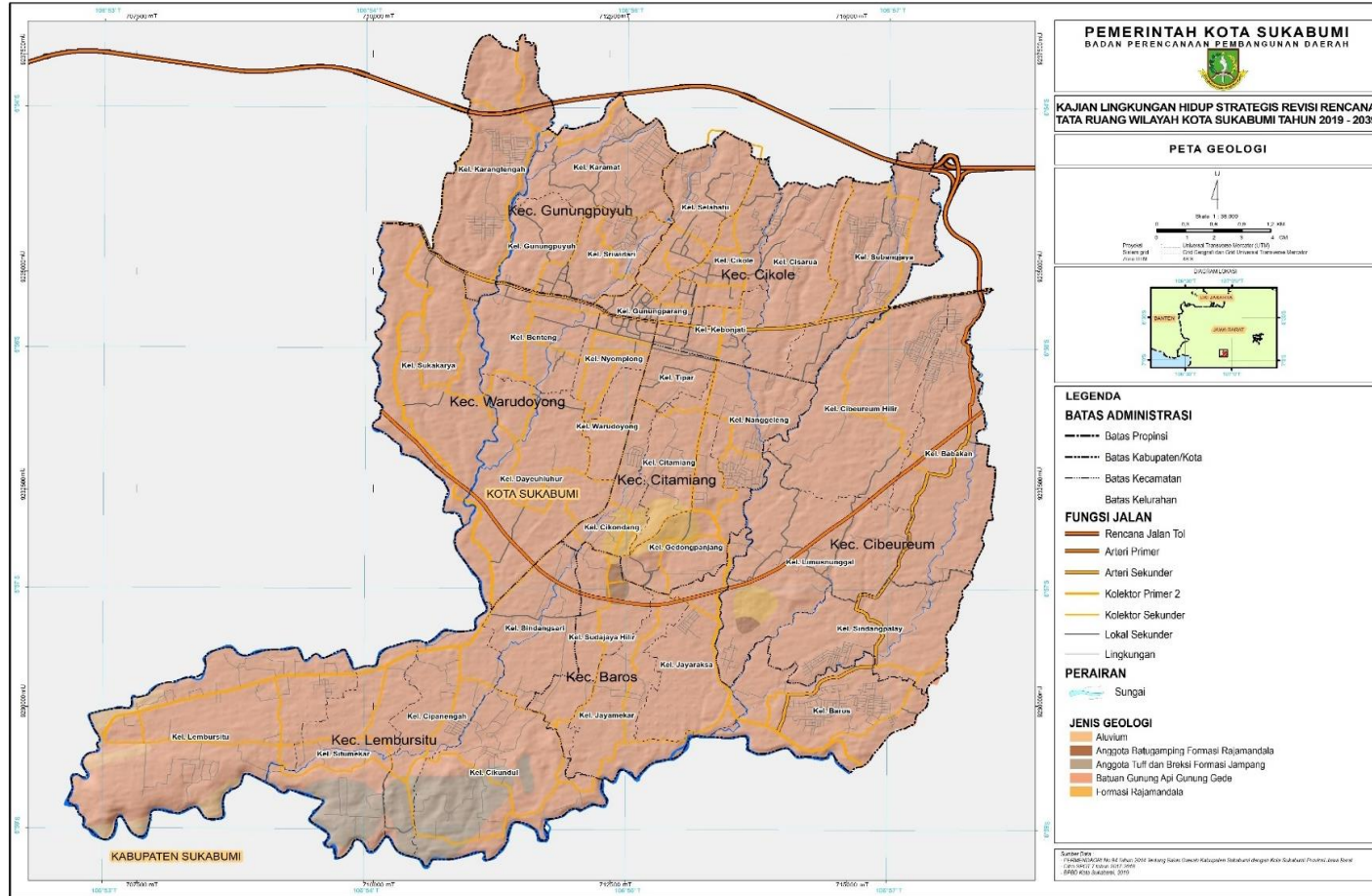
Adapun batuan dasar yang menyusun wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Kecamatannya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.5 dibawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Luas dan Jenis Batuan di DAS Cimandiri**

NO	KECAMATAN	SIMBOL	FORMASI	LUAS (Ha)
1	Baros	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	548,34
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	8,32
		Tmor	Formasi Rajamandala	1,55
2	Cibeureum	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	894,63
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	3,65
		Tmor	Formasi Rajamandala	15,09
3	Cikole	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	620,81
4	Citamiang	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	350,85
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	0,34
		Tmor	Formasi Rajamandala	49,21
5	Gunungpuyuh	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	513,60
6	Lembursitu	Qa	Aluvium	38,53
		Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	876,39
		Tmjt	Anggota Tuff dan Breksi Formasi Jampang	155,24
7	Warudoyong	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	756,39

Sumber : KLHS Revisi RTRW Kota Sukabumi, 2020





**Gambar 2.5**  
**Peta Geologi Daerah**  
(Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019)

Berdasarkan.....

Berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah, Daerah termasuk kedalam kisaran zona kerentanan gerakan tanah menengah, rendah sampai sangat rendah. Kerentanan gerakan tanah pada tiga kelas ini memungkinkan terjadinya longsor terutama pada lereng-lereng terjal dan pada saat curah hujan tinggi. Adapun luas gerakan tanah di Daerah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3. dan secara spasial disajikan pada Gambar 2.6 dibawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Luas Potensi Gerakan Tanah di Daerah**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>POTENSI RAWAN GERAKAN TANAH</b>	<b>LUAS (Ha)</b>
1	Baros	Menengah	136,59
		Rendah	352,22
		Sangat Rendah	69,47
2	Cibeureum	Rendah	913,37
3	Cikole	Menengah	114,64
		Rendah	506,17
4	Citamiang	Rendah	358,70
		Sangat Rendah	41,73
5	Gunungpuyuh	Menengah	147,56
		Rendah	366,04
6	Lembursitu	Menengah	124,15
		Rendah	334,04
		Sangat Rendah	611,90
7	Warudoyong	Rendah	722,92
		Sangat Rendah	33,43

Sumber : KLHS Revisi RTRW Kota Sukabumi, 2020

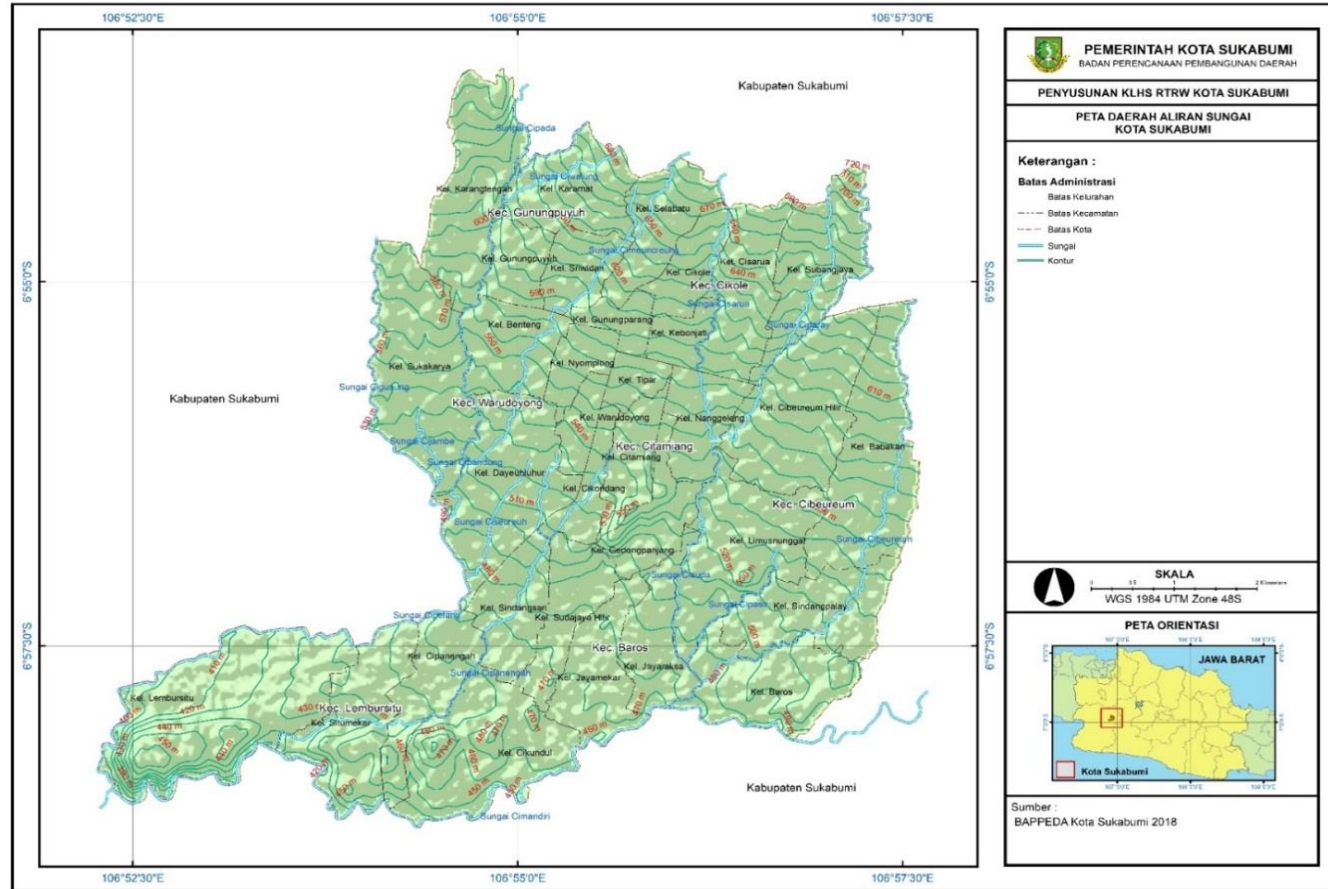
Gambar 2.6.....





#### **2.1.1.5. Hidrologi**

Kondisi air tanah di Daerah dan sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari secara umum cukup tersedia. Sumbernya berasal dari air tanah, mata air dan air tanah tertekan. Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai-sungai yang melewati Daerah disajikan dalam Gambar 2.7 dibawah ini.



**Gambar 2.7**  
**Peta Daerah Aliran Sungai Daerah**  
(Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019)

**2.1.1.6. Klimatologi**

Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, wilayah Daerah sangat dipengaruhi oleh iklim tropika khatulistiwa. Suhu udara rata-rata di wilayah Daerah berkisar antara 26°C–28°C. Intensitas hujan harian rata-rata merupakan jumlah hujan selama setahun dibagi dengan jumlah hari hujan dalam tahun tersebut. Perhitungan intensitas curah hujan di Daerah menggunakan stasiun terdekat yaitu Stasiun Cimandiri yang berada di dalam dan sekitar DAS Cimandiri. Curah hujan minimum umumnya terjadi pada musim bulan Agustus. Curah hujan harian pada Stasiun Cimandiri dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4  
Curah Hujan Daerah**

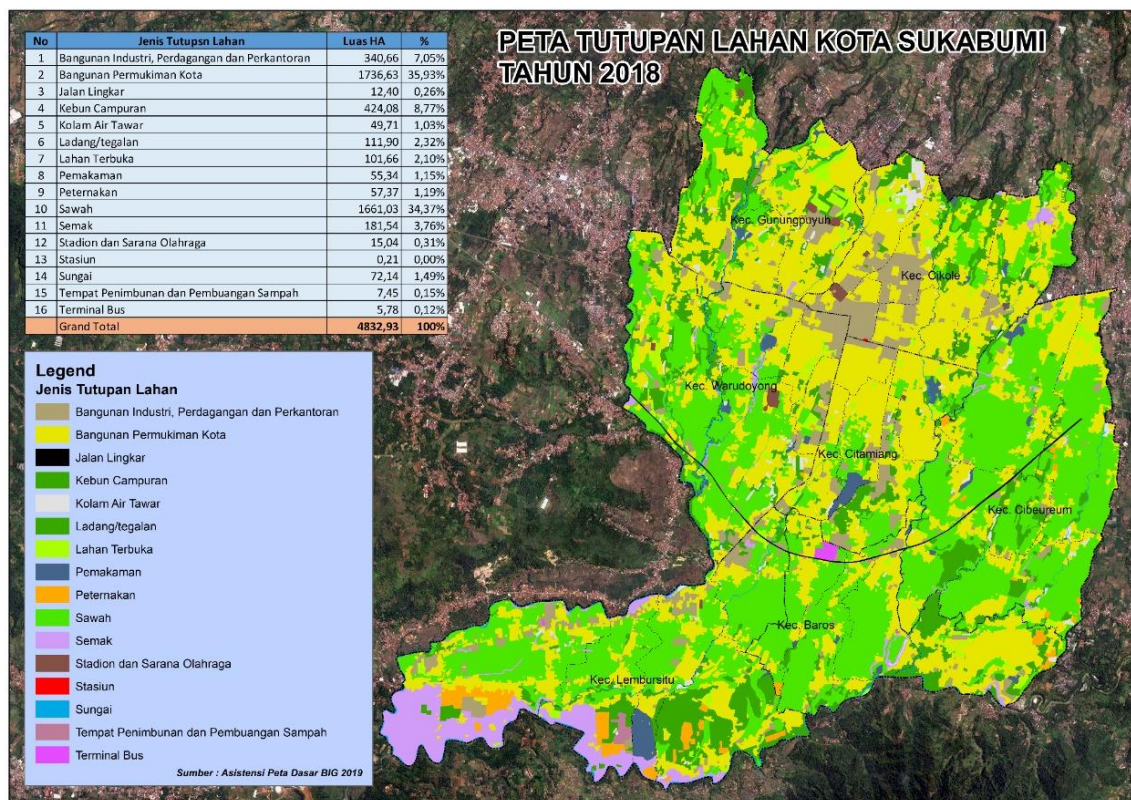
Tgl	Bulan												Tahunan
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	0	11	23	0	0	0	0	0	0	0	29	2	
2	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0	49	6	
3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	
4	6	8	3	3	0	1	0	0	0	2	9	13	
5	1	0	9	16	51	7	0	0	0	0	3	0	
6	9	7	65	15	0	0	0	0	6	0	0	5	
7	4	16	111	4	0	0	0	0	0	0	0	32	
8	0	12	23	61	0	0	0	0	6	0	11	8	
9	39	23	7	2	0	0	0	0	16	0	13	2	
10	4	8	4	15	0	0	0	0	0	0	6	5	
11	19	0	2	0	2	0	0	0	0	0	29	3	
12	10	11	11	0	0	0	0	0	0	0	46	0	
13	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4	5	
14	4	5	15	0	0	0	0	0	0	0	17	9	
15	27	2	20	8	0	0	0	0	0	9	3	126	
16	7	60	0	15	12	0	0	0	0	21	3	1	
17	6	0	10	2	26	0	0	0	0	7	0	44	
18	2	0	1	4	11	0	0	0	0	0	11	0	
19	12	0	3	17	61	0	0	0	0	0	0	13	
20	11	19	1	9	37	0	0	0	6	0	5	0	
21	21	0	0	11	3	13	0	0	10	0	0	0	
22	20	3	0	2	8	0	0	0	0	4	2	0	
23	14	4	0	4	0	25	0	0	2	1	0	0	
24	5	1	60	26	5	23	0	0	0	0	0	7	
25	8	2	41	0	0	30	0	0	0	5	1	4	
26	7	6	52	9	0	9	0	0	0	14	0	14	
27	41	7	35	0	11	5	0	0	46	7	6	2	
28	5	41	2	0	6	0	0	0	0	0	13	1	
29	21		0	0	0	0	0	0	0	0	51	5	
30	19		0	0	0	0	0	0	0	1	16	7	
31	18		82		0		0	0		4		1	
Hujan Maks.	41	60	111	61	61	30	0	0	46	21	51	126	126
Jml Curah Hujan	349	250	593	223	233	113	0	0	103	75	351	317	2607
Jml Hari hujan	27	20	24	18	12	8	0	0	8	11	22	24	174
Jml Hujan (1-15)	132	107	306	124	53	8	0	0	39	11	243	218	
Jml Data Kosong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jml Hujan (16-31)	217	143	287	99	180	105	0	0	64	64	108	99	
Jml Data Kosong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2019

2.1.1.7. Penggunaan .....

### 2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Daerah berdasarkan pada hasil pengamatan lapangan dan intepretasi dari foto citra didominasi oleh kegiatan sawah, bangunan permukiman kota, kebun campuran, dan bangunan industri, perdagangan dan perkantoran. Penggunaan lahan sawah merupakan yang terbesar yaitu seluas 1.661,03 Ha atau seluas 34,37% dari total luas Daerah. Penggunaan lahan untuk bangunan permukiman kota seluas 1.736,63 Ha atau 35,93% dari luas wilayah kota, sedangkan bangunan industri, perdagangan dan perkantoran seluas 340,66 Ha (7,05%).



**Gambar 2.8**  
**Peta Tutupan Lahan di Daerah Tahun 2018**  
 (Sumber : Bappeda Kota Sukabumi, 2018)

#### a. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di Daerah terdiri dari atas kawasan pertanian, perikanan, sentra insdutri kecil dan menengah, pariwisata, permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.



1. kawasan pertanian

Kawasan pertanian terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian yang termasuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B0 seluas 425,33 Ha yang terletak di Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Warudoyong, dan Kecamatan Gunungpuyuh.

2. kawasan perikanan

Kawasan perikanan meliputi balai benih ikan di Kecamatan Warudoyong dan kawasan penelitian Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBAT) di Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole.

3. kawasan sentra industri kecil dan menengah

Kegiatan industri di wilayah Daerah diarahkan untuk mendukung kegiatan perekonomian di wilayah Daerah maupun potensi sektor primer di wilayah sekitarnya. Kegiatan industri yang diarahkan di wilayah Daerah adalah sentra industri kecil dan menengah. Sentra industri kecil dan menengah dikembangkan di Kecamatan Warudoyong untuk mendukung kegiatan perekonomian di wilayah Daerah dan penyerapan tenaga kerja.

4. kawasan pariwisata

Kawasan pariwisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata dan juga kawasan yang karena sifat dan sumberdaya yang ada di dalamnya (yaitu sumberdaya budaya, alam dan buatan), makan kawasan ini sengaja dideliniasi sebagai kawasan pariwisata.

Jenis kegiatan wisata di Daerah meliputi wisata budaya, wisata edukasi, wisata alam, agrowisata, yaitu :

- a) Kawasan wisata cikundul (KAC) Kawasan Agroeduwisata Cikundul), Kawasan Cikundul tersebut merupakan kawasan peternakan dan pertanian.
- b) Kawasan pariwisata Air Panas Cikundul di Kecamatan Lembursitu.
- c) Ekowisata Villa Cantik di Kecamatan Warudoyong.

d) Taman .....

- d) Taman rekreasi Santa di Kecamatan Citamiang.
  - e) Wisata sungai Cimandiri di Kecamatan Lembursitu.
  - f) Kawasan pariwisata Rengganis di Kecamatan Gunungpuyuh
  - g) Kawasan vihara widhi sakti di Kecamatan Warudoyong
  - h) Museum Pegadaian.
  - i) Wisata kompleks Lapang Merdeka, Alun-Alun, dan Pendopo.
5. kawasan permukiman

Kawasan permukiman terdiri dari kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, olahraga, transportasi, ruang terbuka non hijau (RTNH), dan kawasan peruntukkan ruang bagi sektor informal.

6. kawasan pertahanan dan keamanan

kawasan pertahanan dan keamanan yaitu SETUKPA Lemdiklat POLRI di Kecamatan Gunung Puyuh sebagai kawasan pendidikan bagi calon perwira POLRI.

**b. Kawasan Lindung**

Jenis kawasan lindung di Kota Sukabumi meliputi :

1. kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat di Kota Sukabumi salah satunya adalah sempadan sungai. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai. Kawasan sempadan sungai diarahkan pada sepanjang kiri kanan sungai yang melintasi Kota Sukabumi yaitu sungai cibandung, cibereum, cibitung, cigunung, cimandiri, cipada, cipanengah, cipelang, cipelang leutik, cisaray, cisarua, cisuda, ciwalung Luas kawasan sempadan sungai untuk sungai-sungai yang ada di Kota Sukabumi yaitu seluas 183,00 Ha.

2. kawasan rawan bencana

Terdapat tiga kawasan rawan bencana di Daerah yaitu rawan bencana gempa bumi, rawan bencana gunung api, rawan bencana gerakan tanah. Berdasarkan peta sesar cimandiri, wilayah selatan Sukabumi adalah wilayah yang paling dekat dengan sesar. Akan tetapi, hamper seluruh Kota Sukabumi terpapar oleh ancaman bendaca gempa bumi. Selanjutnya, ancaman bencana gunung api di Daerah berupa aliran lahar dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang mengalir melalui tuga sungai, yaitu sungai Cibeureum, Cipelang, dan Cigunung. Terakhir, mengenai potensi terhadap ancaman bencana gerakan tanah bersifat local di beberapa wilayah di bagian utara Daerah, yaitu Kelurahan Subangjaya, Cisarua, dan Karangtengah, serta di bagian selatan Daerah yaitu di Kelurahan Lembursitu dan sedikit di Kelurahan Situmekar, Cikundul, Jayamekar, dan Limusnunggal.

3. kawasan cagar budaya

Kriteria kawasan lindung untuk cagar budaya yaitu tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan situs yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi bangunan pada kawasan ini tidak dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan.

Di Kota Sukabumi pada saat ini terdapat kawasan dan bangunan cagar budaya, meliputi :

- a) Kawasan Jl. Kaswari – Jl Kenari dan Jl. Bhayangkara
- b) Kawasan perdagangan Jl. Ahmad Yani
- c) Kawasan Jl. Stasiun – Jl. Otista
- d) Kawasan alun-alun, Jl. Perintis Kemerdaan dan Jl. Veteran
- e) Kawasan Pendopo Kabupaten Sukabumi
- f) Kawasan Jl. Siliwangi
- g) Kawasan Museum Pegadaian
- h) Kawasan Jl. Odeon – Jl. Pajagalan
- i) Kawasan Jl. Suryakencana
- j) Kawasan Jl. R. Samsudin SH – Jl. Ir. Juanda – Jl. RE Martadinata
- k) Kawasan BBAT



l) Kawasan Kota Paris

4. ruang terbuka hijau (RTH)

Kawasan ruang terbuka hijau berdasarkan kepemilikan terdiri dari RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. Ruang terbuka publik antara lain meliputi taman (taman lingkungan skala RT, RW, Kecamatan, dan Kota), pemakaman, taman kota, dan jalur hijau jalan.

**2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana**

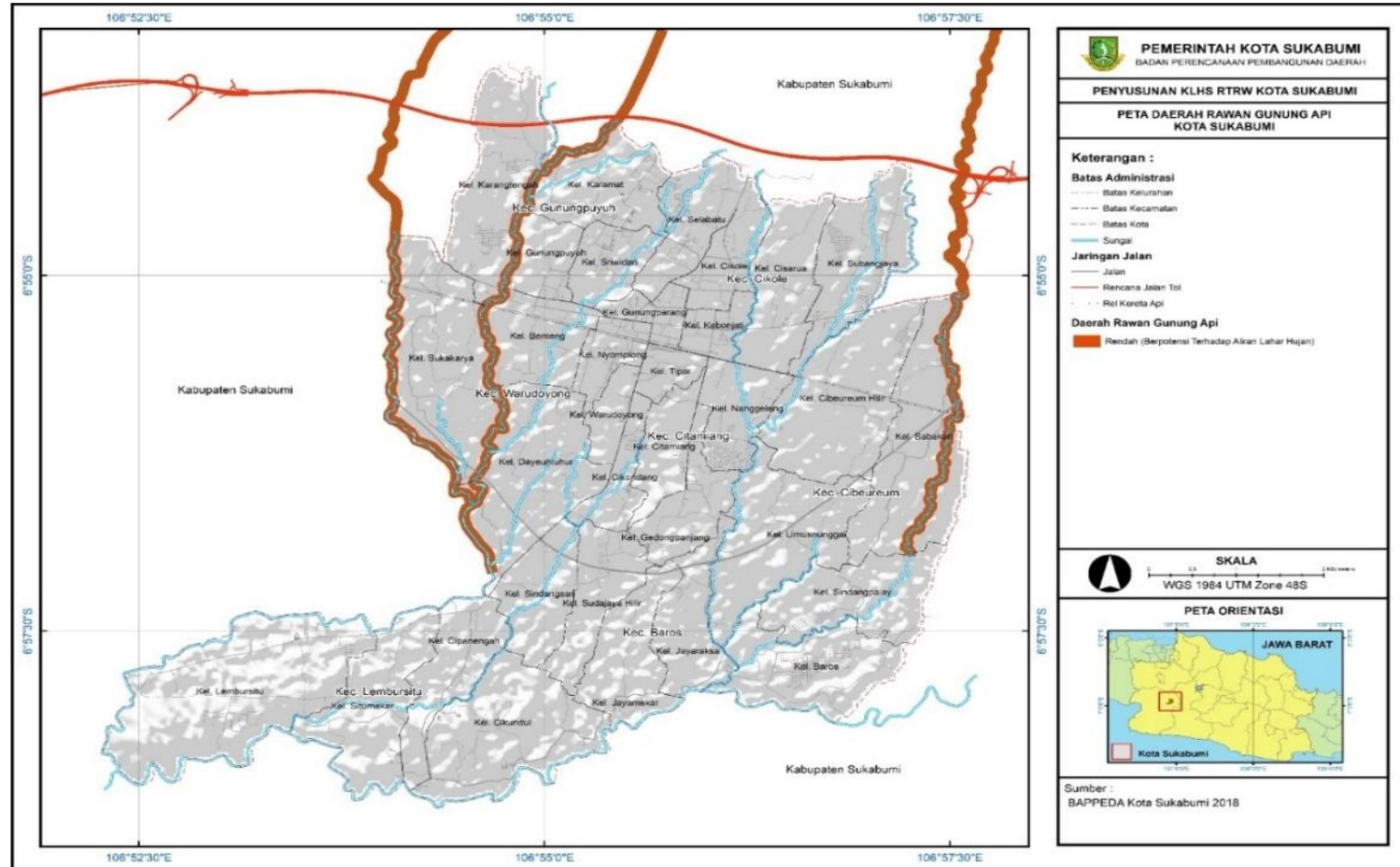
Wilayah Daerah merupakan salah satu di antara daerah yang cukup rawan letusan gunung berapi karena letaknya relatif dekat dengan Gunung Gede Pangrango. Selain itu wilayah Daerah juga rawan gempa bumi karena terletak di sesar atau patahan Cimandiri. Daerah potensi gempa di Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.5 sedangkan peta rawan letusan gunung berapi serta peta rawan gempa disajikan berturut-turut pada Gambar 2.9 dan Gambar 2.10 berikut ini.

**Tabel 2.5**  
**Potensi Gempa di Kota Sukabumi**

No	Kecamatan	Potensi gempa	Luas (Ha)
1	Baros	Daerah Aman	97,69
		Daerah Rawan Gempa	462,78
2	Cibeureum	Daerah Aman	835,26
		Daerah Rawan Gempa	96,94
3	Cikole	Daerah Aman	644,37
4	Citamiang	Daerah Aman	382,96
5	Gunungpuyuh	Daerah Aman	514,23
6	Lembursitu	Daerah Aman	49,10
		Daerah Rawan Gempa	1.046,25
7	Warudoyong	Daerah Aman	758,23
		Daerah Rawan Gempa	1,41

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019

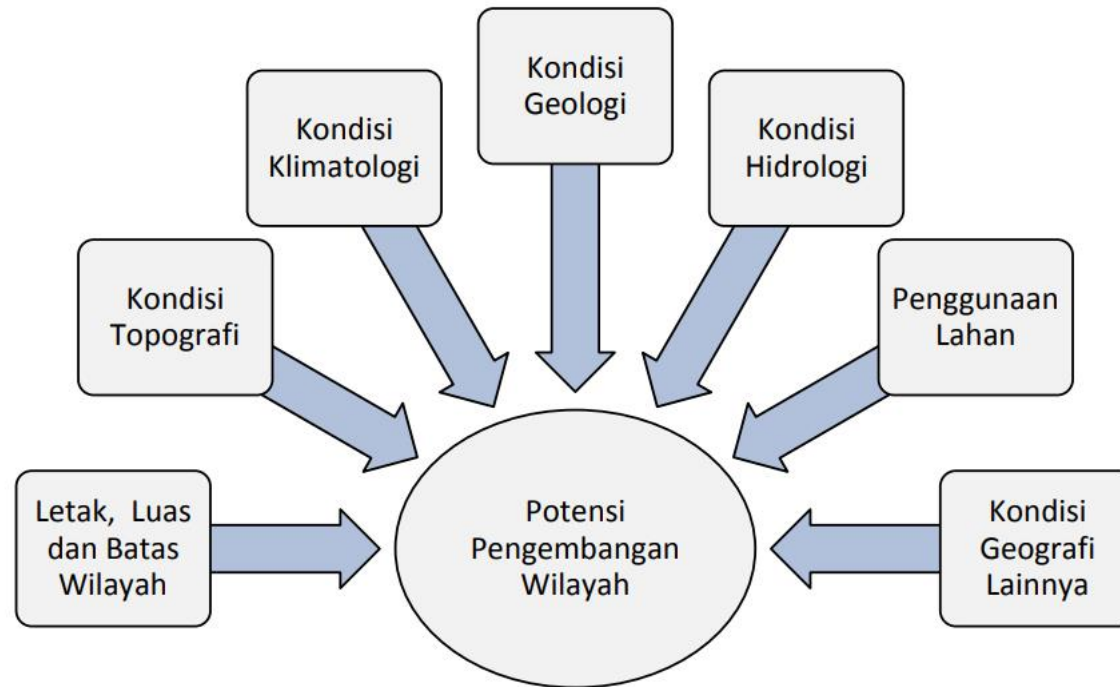
Gambar 2.9 .....



**Gambar 2.9**  
**Peta Rawan Gunung Api Kota Sukabumi**  
(Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019)

Gambar 2.10.....

Berikut disajikan kerangka pemikiran antara kondisi geografi Daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya :



**Gambar 2.10**  
**Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya**  
(Sumber : PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)

### 2.1.2. Demografi

Letak Daerah sangat strategis karena berada pada jalur lintasan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dengan Ibu Kota Negara, serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, sehingga menjadikan Daerah sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

Jumlah penduduk Daerah tahun 2019 adalah 348.945 (tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima) jiwa yang terdiri atas 175.391 (seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu) jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 50,26% (lima puluh koma dua puluh enam persen) dan 173.554 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat) jiwa penduduk perempuan atau sebesar 49,74% (empat puluh sembilan koma tujuh puluh empat persen) dengan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,06 (seratus satu koma nol enam). Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Daerah tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.6 berikut ini.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Daerah Tahun 2015- 2019**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Ribuan)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Baros	18.991	18.584	37.575	102,19
2	Lembursitu	20.522	20.685	41.207	99,21
3	Cibeureum	21.705	21.194	42.899	102,41
4	Citamiang	27.180	27.054	54.234	100,47
5	Warudoyong	30.263	29.404	59.667	102,92
6	Gunungpuyuh	24.878	24.287	49.165	102,43
7	Cikole	31.852	32.346	64.198	98,47
	Tahun 2019	175.391	173.554	348.945	101,06
	Tahun 2018	173.376	171.421	344.797	101,14
	Tahun 2017	169.392	166.474	335.866	101,75
	Tahun 2016	166.971	164.003	330.974	101,81
	Tahun 2015	162.311	159.017	321.328	102,07

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019 Disdukcapil Kota Sukabumi

Dari .....

Dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Daerah mengalami penambahan tiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk Daerah Tahun 2014-2019 disajikan pada Tabel 2.7 berikut ini.

**Tabel 2.7**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah Tahun 2014 - 2019**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk pertahun (%)</b>
1	2014	320.572	1,02
2	2015	321.328	0,98
3	2016	330.974	0,94
4	2017	335.866	0,84
5	2018	344.797	0,77
5	2019	348.945	0,73

*Sumber : Kota Sukabumi dalam Angka, 2019*

## **2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olah raga.

### **2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu:

1. laju pertumbuhan ekonomi (LPE; %);
2. laju inflasi (%);
3. ketimpangan kemakmuran (gini ratio);
4. PDRB perkapita (ADHB); dan
5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT).

#### **2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

Pertumbuhan ekonomi Daerah senantiasa bergerak positif. Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2013-2019 menunjukkan tren yang fluktuatif, mengalami perlambatan pada tahun 2015 dan 2017. Perlambatan ekonomi dari tahun 2015 salah satunya adalah sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak

sebagai .....

sebagai akibat dicabutnya subsidi pemerintah pada tahun 2013. Langkah ini berakibat kepada berbagai kategori lapangan usaha ekonomi di Daerah. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Daerah berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, tahun 2015, 2017 dan tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi Daerah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel 2.8 berikut ini.

**Tabel 2.8**  
**LPE Daerah dan LPE Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2013-2019**

No	Kota/Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE/%)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Sukabumi	5,41	5,43	5,14	5,64	5,43	5,51	5,49
2	Jabar	6,33	5,09	5,05	5,66	5,33	5,66	5,07

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2020

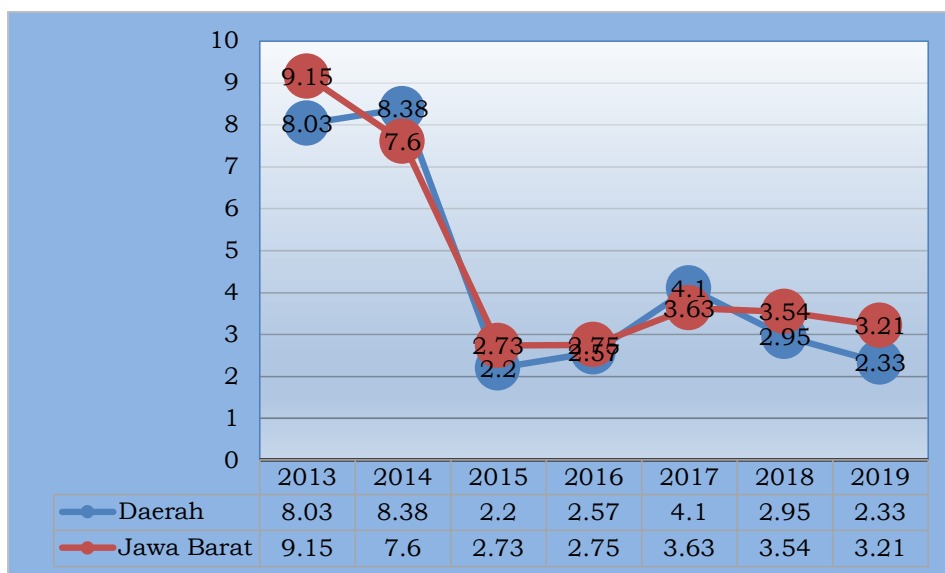
#### **2.2.1.2. Laju Inflasi**

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan atau *demand* dan penawaran atau *supply*. Daerah merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kota di Provinsi Jawa Barat yang merupakan lokasi pemantauan laju inflasi dan indeks harga konsumen.

Angka inflasi di Daerah pada tahun 2013-2014 cenderung tinggi yaitu 8,03%-8,38% akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang diikuti kenaikan tarif dasar listrik dan harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang mendorong inflasi meningkat pada tahun 2013 dan 2014. Angka inflasi di Daerah dapat dikendalikan pada tahun-tahun berikutnya dan mencapai 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) pada tahun 2019. Walau sempat mengalami kenaikan angka inflasi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,10 (empat koma sepuluh), rata-rata angka inflasi di Daerah berada di bawah angka inflasi Provinsi Jawa

Barat .....

Barat. Penyebab kenaikan inflasi di Daerah dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta pada kelompok pengeluaran kesehatan. Untuk mengendalikan laju inflasi tersebut, koordinasi dan intensitas komunikasi terus ditingkatkan oleh Bank Indonesia dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota di Jawa Barat melalui Forum Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID sebagai upaya untuk menahan laju inflasi agar tetap terkendali. Laju Inflasi di Daerah dan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2019 disajikan pada Gambar 2.11 berikut ini.



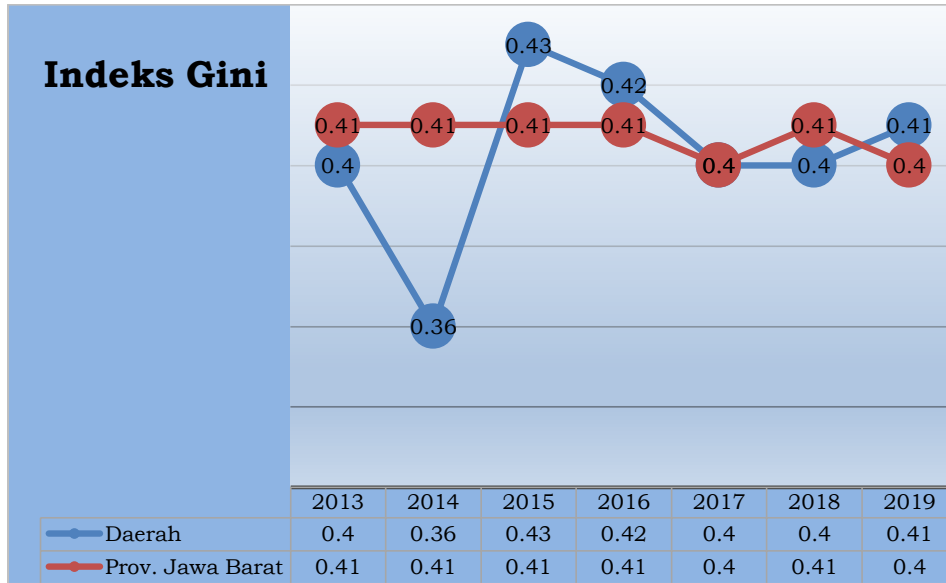
**Gambar 2.11**  
**Laju Inflasi Daerah dan Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2013-2019**

(Sumber : BPS Kota Sukabumi)

### 2.2.1.3. Ketimpangan Kemakmuran

Pada tahun 2013-2019, indeks Gini Daerah menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Indeks Gini tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai angka 0,43 (nol koma empat puluh tiga). Angka ini relevan dengan kondisi kemiskinan yang mengalami kenaikan di tahun yang sama. Pada tahun 2016 indeks Gini Daerah telah menurun meskipun secara angka berada pada 0,42 (nol koma empat puluh dua) dan masih berada di atas indeks Gini Provinsi Jawa Barat. Meskipun masih masuk dalam ketimpangan moderat, namun hal ini harus menjadi perhatian khusus. Ketimpangan yang tinggi

akan menyebabkan lebih rawan terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh. Perkembangan indeks Gini Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 disajikan pada Gambar 2.12 berikut ini.



**Gambar 2.12**  
**Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Sukabumi**  
**Dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019**  
(Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020)

#### 2.2.1.4. PDRB Per Kapita

Produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran makro rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun dalam suatu wilayah tertentu dan biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Daerah tahun 2019 mencapai Rp. 12.384.001.280.000,- (dua belas trilyun tiga ratus delapan puluh empat milyar satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau mengalami pertumbuhan 7,96% (tujuh koma sembilan puluh enam persen) dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp. 11.471.248.900.000,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Nilai pertumbuhan yang dimiliki oleh PDRB atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga selain peningkatan produksi. Nilai PDRB Daerah atas dasar harga konstan

(tahun .....



(tahun dasar 2010) tahun 2019 sebesar Rp. 8.659.534.250.000,- (delapan trilyun enam ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,49% (lima koma empat puluh sembilan persen), dari Rp. 8.208.782.390.000,- (delapan trilyun dua ratus delapan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) di tahun 2018. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan produksi barang atau jasa yang nyata terjadi dan telah mengeliminir faktor kenaikan harga, sehingga mencerminkan LPE yang sesungguhnya tercipta. Jika dicermati, pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku bergerak dengan lebih cepat dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan. Hal tersebut menunjukkan besarnya dampak perubahan harga atau inflasi terhadap perekonomian. Sekilas perekonomian tampak tumbuh dengan pesat padahal kenyataannya peningkatan produksi sebenarnya yang terjadi tidaklah setajam itu karena tergerus oleh faktor inflasi. Maka dari itu, untuk menilai pertumbuhan riil digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB Daerah Tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel 2.9 berikut ini.

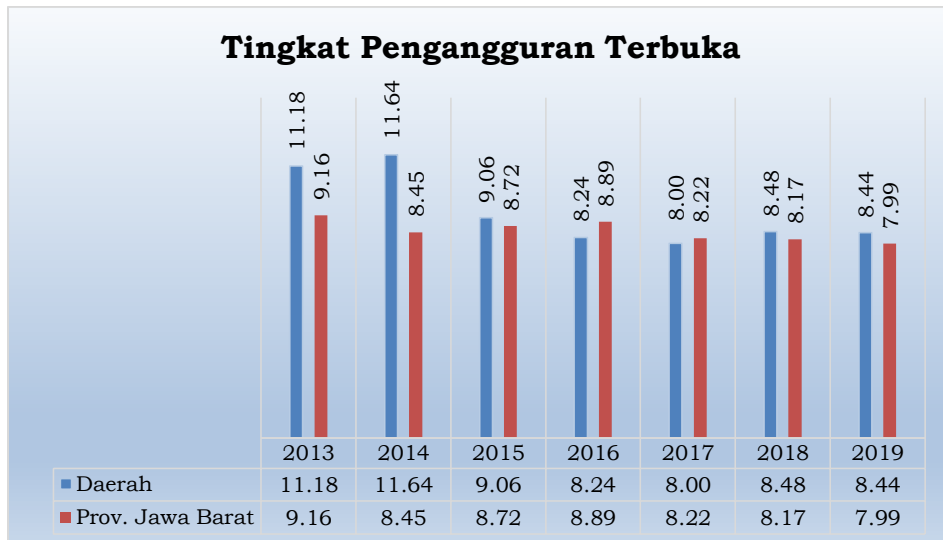
**Tabel 2.9**  
**PDRB Daerah Tahun 2013-2019**  
**(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Penilaian	
	ADHB	ADHK
2013	7.309.646,73	6 301 682,60
2014	8.140.751,03	6.643.603,95
2015	8.971.328,27	6 985 333,28
2016	9 718 687,89	7.379.481,72
2017	10 549 217,87	7 780 422,68
2018	11 471 248.90	8 208 782,39
2019	12 384 001,28	8 659 534,25

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2020

### 2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat pengangguran di Daerah dalam kurun waktu 2013-2019 menurun sebesar 24,51% (dua puluh empat koma lima puluh satu persen) dari 11,18% (sebelas koma satu delapan persen) pada tahun 2013 menjadi 8,44% (delapan koma empat empat persen) pada tahun 2019. Walaupun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 TPT Daerah berada di atas Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2016-2017 TPT Daerah menurun bahkan berada di bawah Provinsi Jawa Barat, tetapi Daerah mengalami kenaikan kembali di dua tahun berikutnya. Capaian TPT Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 di sajikan pada Gambar 2.13 berikut ini.



Gambar 2.13  
Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah dan  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019  
(Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2020)

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial diukur melalui 8 (delapan) indikator yaitu:

1. jumlah penduduk;
2. laju pertumbuhan penduduk (LPP; %);

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
4. tingkat kemiskinan (%)
5. angka melek huruf (AMH);
6. angka rata-rata lama sekolah (RLS);
7. angka harapan lama sekolah (HLS);
8. angka harapan hidup (AHH); dan
9. persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I.

#### **2.2.2.1. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Daerah tahun 2019 adalah 348.945 (tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima) jiwa, meningkat sebesar 28.373 (dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) jiwa dari jumlah penduduk tahun 2014 yaitu sebesar 320.572 (tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua) jiwa atau persentase peningkatan jumlah penduduk tahun 2014-2019 sebesar 8,13% (delapan koma tiga belas persen). Adapun rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan terus menurun dari 102,77% (seratus dua koma tujuh puluh tujuh persen) pada tahun 2015 menjadi 101,06% (seratus satu koma nol enam persen) pada tahun 2019.

Kepadatan penduduk di Daerah pada tahun 2019 adalah 7.220 (tujuh ribu dua ratus dua puluh) jiwa/km<sup>2</sup>, artinya setiap 1 km<sup>2</sup> dihuni oleh penduduk sebanyak 7.220 (tujuh ribu dua ratus dua puluh) s.d 7.221 (tujuh ribu dua ratus dua puluh satu) jiwa, meningkat 8,87% (delapan koma delapan tujuh persen) apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Tahun 2015 sebesar 6.648 (enam ribu enam ratus empat puluh delapan) jiwa/km<sup>2</sup>.

#### **2.2.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**

Laju pertumbuhan penduduk Daerah pada kurun waktu tahun 2014-2019 menurun dari 1,02 (satu koma nol dua) pada tahun 2014 menjadi 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) pada tahun 2019.

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Daerah dalam kurun waktu 2014–2019 disajikan pada Gambar 2.14 berikut ini.



Gambar 2.14  
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah  
(Sumber: Kota Sukabumi dalam Angka 2019)

### 2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan manusia terindikasikan oleh beberapa indikator kinerja, yang paling banyak dipakai adalah penggunaan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM atau disebut juga *Human development index* atau HDI yang diperkenalkan oleh *United Nation Developmen Programme* (UNDP). UNDP mengukur pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar yaitu :

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Nilai capaian IPM dapat digunakan untuk membandingkan keberhasilan dalam upaya pembangunan manusia antar daerah atau negara.

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan metodologi dalam perhitungan IPM, ada beberapa alasan yang melandasi perubahan metodologi perhitungan yaitu:

1. beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat

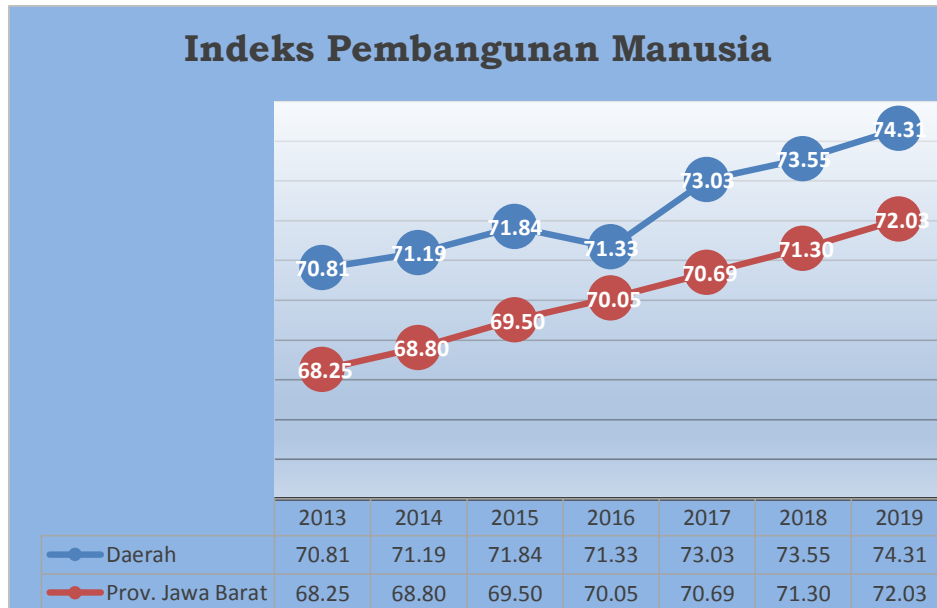
menggambarkan .....

menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik;

2. produk domestik bruto atau PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; dan
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Dua perubahan yang dilakukan yaitu perubahan indikator dan perubahan metode perhitungan. Perubahan indikator yang dilakukan yaitu: Angka Melek Huruf atau AMH pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah atau HLS dan Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto atau PNB per kapita. Sedangkan metode perhitungan berubah dari metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Nilai IPM Daerah pada kurun waktu Tahun 2013-2019 terus menunjukkan peningkatan dan berada di atas nilai IPM Provinsi Jawa Barat. IPM Daerah sudah berhasil masuk dalam kategori tinggi pada tahun 2013 dengan angka 70,81 (tujuh puluh koma delapan satu), sedangkan Provinsi Jawa Barat baru masuk dalam kategori tinggi pada tahun 2016. Pada tahun 2019, IPM Daerah sudah mencapai angka 74,31 (tujuh puluh empat koma tiga satu). Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013-2019 disajikan pada Gambar 2.15 berikut ini.



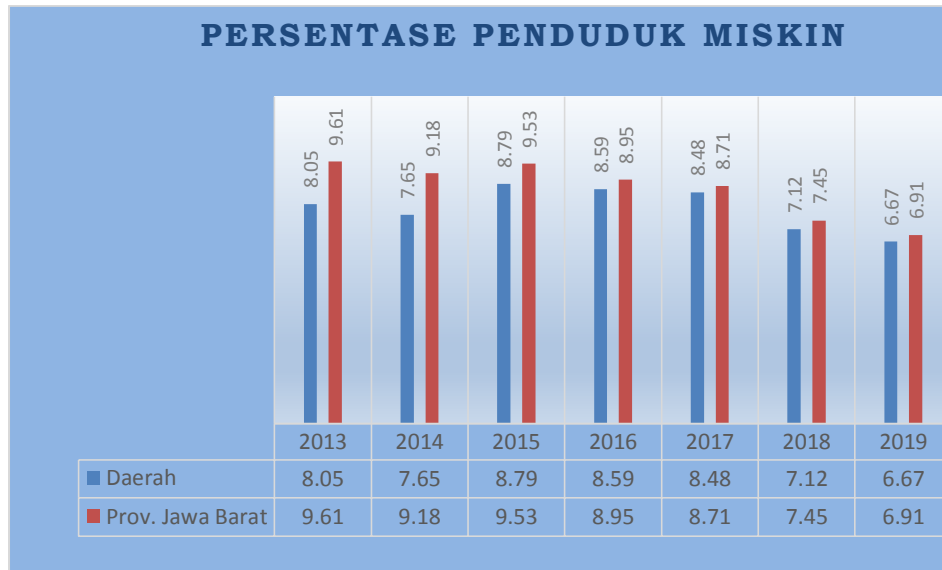
Gambar 2.15  
Grafik Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2013-2019  
(Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2020)

Berdasarkan gambar diatas IPM Kota Sukabumi dari tahun ke tahun masih di atas IPM Provinsi dan Nasional.

#### 2.2.2.4. Tingkat Kemiskinan

Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 mencapai 25.200 (dua puluh lima ribu dua ratus) jiwa, menurun menjadi 21.870 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh) jiwa pada tahun 2019. Pemerintah Daerah dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 8,05% (delapan koma nol lima) pada tahun 2013 menjadi 6,67% (enam koma enam puluh tujuh persen) pada tahun 2019. Artinya pada periode tahun 2013 sampai 2019 Pemerintah Daerah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,38% (satu koma tiga puluh delapan persen).

Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat, Daerah memiliki tingkat kemiskinan di bawah Provinsi Jawa Barat. Persentase penduduk miskin di Daerah dan Provinsi Jawa Barat serta perbandingan persentase penduduk miskin Daerah dengan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.16 berikut ini.

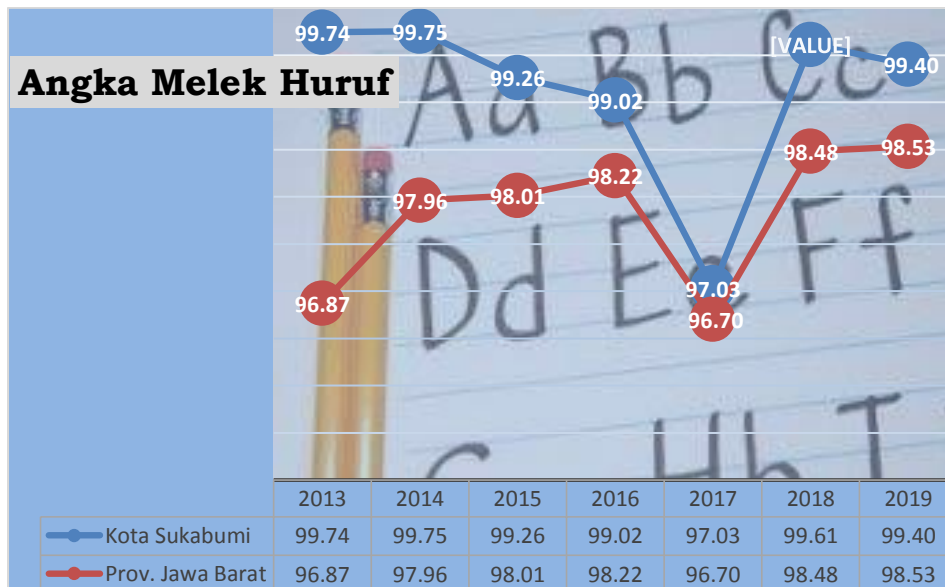


Gambar 2.16  
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin  
di Daerah dan Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2013-2019  
(Sumber : BPS Kota Sukabumi,2020)

**2.2.2.5. Angka Melek Huruf (AMH)**

Angka melek huruf atau AMH merupakan proporsi penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. AMH Daerah dalam kurun waktu 2013-2019 sudah mencapai rata-rata di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) artinya terdapat lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas di Daerah yang bisa membaca dan menulis. Pencapaian AMH Daerah berada di atas capaian AMH Provinsi Jawa Barat yang berada di kisaran 96-98% di Tahun 2013-2019 sebagaimana disajikan pada Gambar 2.17 berikut ini.

Gambar 2.17 .....



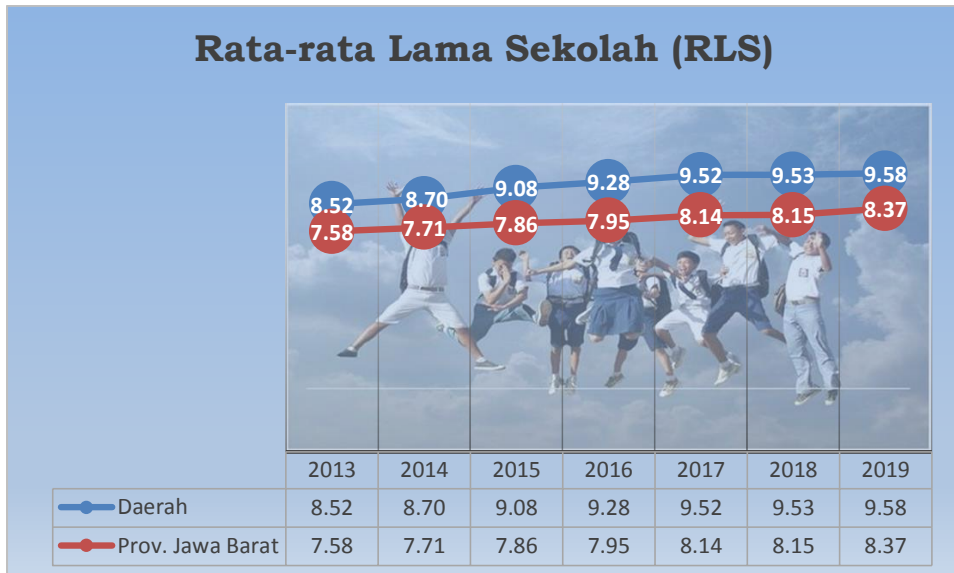
Gambar 2.17  
Capaian AMH Daerah Tahun 2013-2019  
(Sumber : Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2020)

**2.2.2.6. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-rata lama sekolah atau RLS merupakan ukuran untuk menghitung jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Pencapaian RLS Daerah cenderung terus mengalami peningkatan pada Tahun 2013 hingga Tahun 2019. Pada Tahun 2013, RLS Kota Sukabumi sebesar 8,52 (delapan koma lima puluh dua) Tahun. Pada Tahun 2019 RLS Kota Sukabumi mencapai 9,58 (sembilan koma lima puluh delapan) Tahun berarti selama rentang 6 tahun terjadi peningkatan sebesar 1,06 (satu koma nol enam). Nilai RLS Kota Sukabumi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan dengan daerah-daerah sekitarnya seperti Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Capaian RLS di Daerah disajikan pada Gambar 2.18 berikut ini.

Gambar 2.18 .....

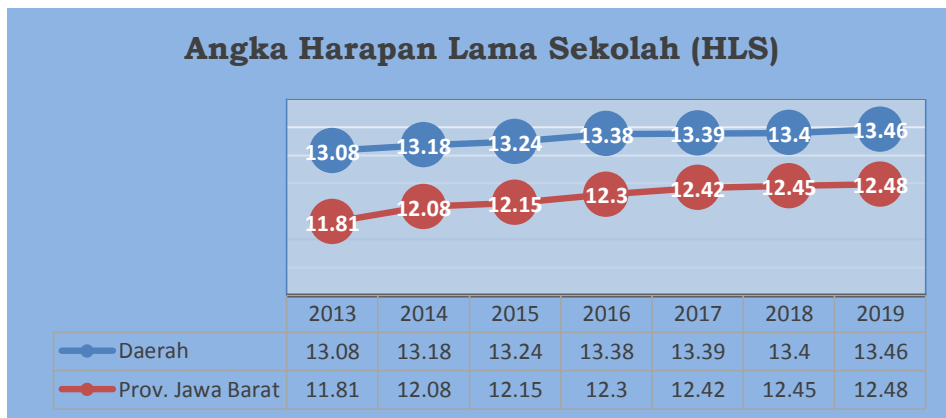




Gambar 2.18  
 Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Daerah  
 Tahun 2013-2019  
 (Sumber : Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2020)

**2.2.2.7. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan lama sekolah atau HLS Daerah pada tahun 2019 mencapai 13,46 (tiga belas koma empat puluh enam) tahun, meningkat 2,91% (dua koma sembilan satu persen) dari angka HLS tahun 2013 yaitu 13,08 (tiga belas koma nol delapan) tahun. Angka HLS sebesar 13,46 (tiga belas koma empat enam) tahun menunjukkan bahwa harapan lama sekolah anak di Daerah sudah masuk pada jenjang pendidikan tinggi dan sudah melampaui angka HLS Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2013-2019. Perkembangan HLS Daerah dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.19 berikut ini.

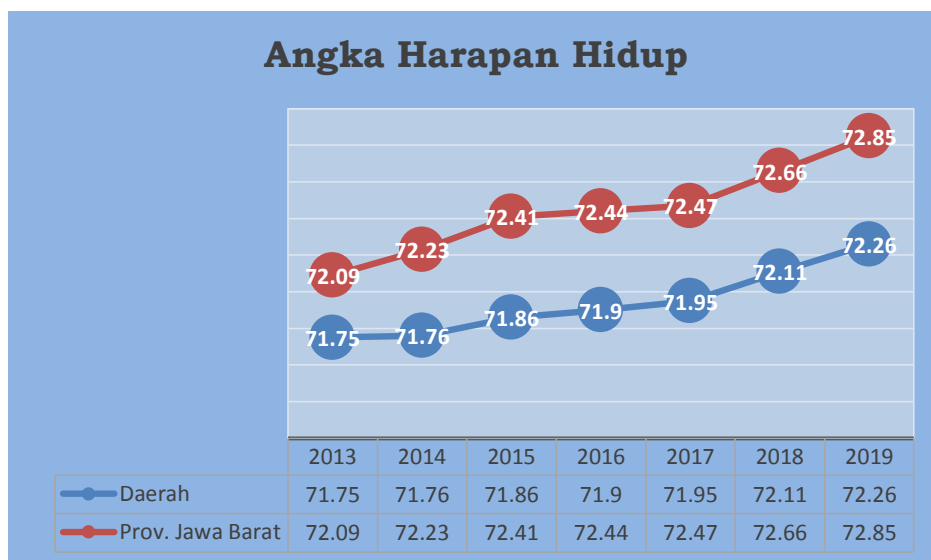


Gambar 2.19  
 Perkembangan Angka HLS Kota Sukabumi dan  
 Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019  
 (Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020)

Dari tabel dan gambar diatas, terlihat bahwa peningkatan HLS Daerah tahun 2013-2019 relevan dengan peningkatan HLS Provinsi Jawa Barat, merupakan dampak dari program dan kegiatan di sektor pendidikan.

**2.2.2.8. Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka harapan hidup atau AHH dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, nilai AHH Daerah terus mengalami peningkatan dari 71,75 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh lima) pada tahun 2013 menjadi 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 0,71% (nol koma tujuh puluh satu persen). Namun demikian, AHH Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2019 masih berada di bawah AHH Provinsi Jawa Barat. Nilai AHH Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 disajikan serta grafik perkembangan nilai AHH Daerah tahun 2013-2019 disajikan pada Gambar 2.20 berikut ini.



Gambar 2.20  
Perkembangan AHH Daerah Tahun 2013-2019  
(Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020)

**2.2.2.9. Persentase Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I**

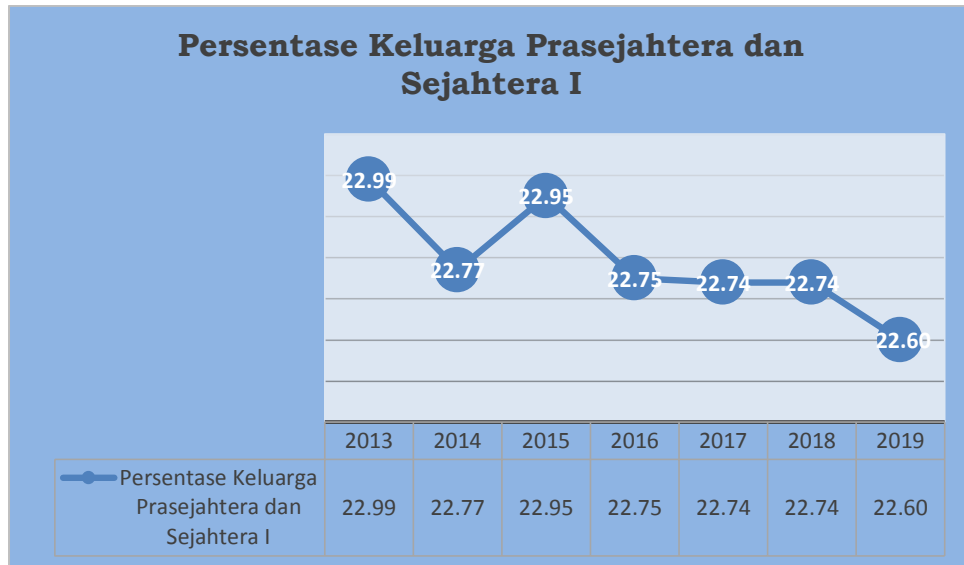
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera atau KPS, keluarga

sejahtera .....

sejahtera I atau KS-I, keluarga sejahtera II atau KS-II, keluarga sejahtera III atau KS-III, dan keluarga sejahtera III plus atau KS-III plus. Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 (dua puluh satu) indikator dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari :

1. pemenuhan kebutuhan dasar;
2. pemenuhan kebutuhan psikologi;
3. kebutuhan pengembangan; dan
4. kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya.

Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I. Kelompok inilah yang kemudian menjadi bagian dari target BKKBN dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pokok atau pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pengajaran agama. Mereka yang dikategorikan sebagai KPS adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria KS-I. Selanjutnya KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu satu atau lebih indikator pada tahapan KS-II. Persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I di Daerah dalam kurun waktu 2013-2019 menurun sebesar 1% (satu persen) dari 22,99% (dua puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) pada tahun 2013 menjadi 22,60% (dua puluh dua koma enam puluh persen) pada tahun 2019. Persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I di Daerah tahun 2013-2019 disajikan pada Gambar 2.21 berikut ini.



Gambar 2.21  
Persentase Keluarga Prasejahtera dan  
Keluarga Sejahtera-I di Daerah Tahun 2013-2019  
(Sumber : DPPKBPPPAPM Kota Sukabumi, 2020)

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Daerah selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kota Seni Budaya. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahun 2016, Wayang Sukuraga telah ditetapkan sebagai kesenian khas budaya Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga terus menyelenggarakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pagelaran seni budaya agar dapat mempertahankan kesenian dan kebudayaan Daerah, juga untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Maka dari itu, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Sebagai upaya penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat juga telah berdiri stadion olahraga Suryakencana di Jalan Pabuaran. Dalam kompleks stadion olahraga Suryakencana, berdiri kokoh gedung olahraga dan lapangan sepak bola yang representatif. Keberadaan stadion ini banyak melahirkan atlet olahraga prestasi. Daerah juga banyak mengantarkan atlet olahraga prestasi ke berbagai kejuaraan olahraga

prestasi .....

prestasi baik pada level regional Jawa Barat maupun nasional termasuk Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat dan Pekan Olahraga Nasional.

### **2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Daerah mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah:

1. urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum konkuren baik wajib maupun urusan pilihan.

#### **2.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib**

Urusan.....

Urusan wajib dibagi menjadi dua yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar.

### **2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu:

1. urusan pendidikan;
2. urusan kesehatan;
3. urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
4. urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. urusan sosial.

#### **1. Urusan Wajib Pendidikan**

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib pendidikan, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Pendidikan Anak Usia Dini**

Persentase capaian Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 fluktuatif, namun secara umum meningkat 14,5% (empat belas koma lima persen) dari 55,36% (lima puluh lima koma tiga enam persen) pada tahun 2013 menjadi 73,21% (tujuh puluh tiga koma dua puluh satu) pada tahun 2019. Persentase capaian PAUD tertinggi dicapai pada Tahun 2014 yaitu 82,49% (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan persen).

##### **b. Angka Melek Huruf**

Indikator persentase penduduk yang berusia >15 (lima belas) tahun melek huruf atau tidak buta aksara pada tahun 2013-2019 rata-rata mencapai diatas 99% (sembilan puluh sembilan persen) artinya 99% (sembilan puluh sembilan persen) penduduk Daerah berusia >15 (lima belas) tahun sudah tidak buta aksara.

##### **c. Angka Partisipasi Murni**

Angka partisipasi murni atau APM pada jenjang pendidikan SD di Daerah pada tahun 2019 sudah mencapai 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) artinya masih terdapat 0,5% (nol koma lima persen) anak berusia 7-12 tahun yang belum bersekolah. Nilai APM pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD meningkat 19,86% (Sembilan belas koma delapan puluh enam persen) dari tahun 2015 sebesar 79,73% (tujuh puluh Sembilan koma tujuh puluh tiga persen) menjadi 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) pada tahun 2019.

APM pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP di Daerah pada tahun 2019 sudah mencapai 97% (sembilan puluh tujuh persen) artinya masih terdapat 3% (tiga persen) anak berusia 13-15 tahun yang belum bersekolah SMP. Nilai APM pada jenjang pendidikan SMP meningkat 27,18% (dua puluh tujuh koma delapan belas persen) dari tahun 2015 sebesar 70,63% (delapan puluh satu koma nol enam persen) menjadi 97% (sembilan puluh enam koma empat persen) pada tahun 2019.

Pada tahun 2017, urusan pendidikan menengah atas kembali menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi sedangkan pemerintah kabupaten/kota fokus untuk mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal atau kesetaraan. Dengan adanya alih kelola ini diharapkan mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi.

d. Angka Putus Sekolah

Pada tahun 2019, sudah tidak terdapat lagi terdapat anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun yang putus sekolah baik pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD maupun pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP.

e. Angka Kelulusan

Tingkat kelulusan siswa pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP pada tahun 2019 sudah mencapai 100% (seratus persen), sedangkan Angka

kelulusan pendidikan menengah atas menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.

f. Angka Melanjutkan

Persentase jumlah siswa sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI di tahun 2019 yang melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP mencapai 96,54%, (sembilan puluh enam koma lima puluh empat persen) menurun 15,03% (lima belas koma nol tiga persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 111,57% (seratus sebelas koma lima puluh tujuh persen).

g. Guru yang Memenuhi Kualifikasi Strata-1 atau Diploma-IV

Kualitas pendidikan akan tercipta bila didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang mumpuni, hal ini dapat dilihat dari persentase guru yang berkualifikasi pendidikan S-1 atau D-IV pada tahun 2019 sudah mencapai 95,67% (sembilan puluh lima koma enam puluh tujuh persen), meningkat 12,71% (dua belas koma tujuh puluh satu persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 82,96% (delapan puluh dua koma sembilan puluh enam persen).

## **2. Urusan Wajib Kesehatan**

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib kesehatan, yaitu sebagai berikut:

a. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Daerah cenderung fluktuatif pada kurun waktu tahun 2013-2019 dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 100% (seratus persen). Dalam hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi.

b. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan



Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2019 mencapai 100% (seratus persen), meningkat sebesar 7,86% (tujuh koma delapan puluh enam persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 92,14% (sembilan puluh dua koma empat belas persen). Hal ini dapat dicapai berkat kerjasama yang optimal dari semua pihak terutama bidan praktek swasta, rumah sakit baik pemerintah dan swasta dan Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas di dalamnya.

c. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization*

Capaian cakupan kelurahan *universal child immunization* atau UCI pada tahun 2019 adalah 100% (seratus persen). Imunisasi merupakan langkah preventif untuk meminimalisasi terjadinya kondisi sakit pada anak. Semakin banyak kelurahan yang masuk kategori UCI maka akan semakin besar perlindungan terhadap balita dari penyakit. Strategi yang dilakukan petugas di antaranya adalah *sweeping* langsung terhadap anak bayi dan BALITA yang menjadi sasaran imunisasi dan digerakannya kembali masyarakat peduli imunisasi serta optimalisasi peran pengawas atau wakil *supervisor* atau wasor imunisasi yang terus memantau dan mengevaluasi capaian program secara rutin.

d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Selama kurun waktu tahun 2013-2019, BALITA yang mengalami gizi buruk *Stunting* yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan seluruhnya mendapatkan penanganan sesuai standar yaitu 100% (seratus persen).

e. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), didapat dari perhitungan persentase jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2019 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) mencapai 100% (seratus persen), orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.

f. Cakupan .....

f. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD selama kurun waktu 2013-2019 sudah mencapai 100% (seratus persen), artinya keseluruhan penderita DBD yang ditemukan mendapatkan penanganan sesuai standar.

g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pada tahun 2019, persentase masyarakat miskin yang berkunjung ke sarana kesehatan strata 1 mencapai 100% (seratus persen).

h. Cakupan Kunjungan Bayi

Kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi yang mendapat pelayanan paripurna minimal 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali pada usia 29 hari-2 bulan, 1 (satu) kali pada usia 3-5 bulan, 1 (satu) kali pada usia 6-8 bulan, dan 1 (satu) kali pada usia 9-11 bulan sesuai standar. Cakupan ini untuk mengetahui efektivitas, *continuum of care*, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Dihitung dengan membandingkan jumlah bayi yang mendapat pelayanan minimal 4 (empat) kali dengan jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi tahun 2019 sebesar 100% (seratus persen). Peningkatan pencapaian ini disebabkan oleh sinergitas, koordinasi, dan pencapaian program yang sudah semakin baik sehingga berpengaruh terhadap pencapaian peningkatan kunjungan bayi.

### **3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu sebagai berikut:

a. Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik

Ketersediaan infratraktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Daerah pada tahun 2019 adalah 85,26 (delapan puluh lima koma dua puluh

enam persen) km atau sebesar 85,26 (delapan puluh lima koma dua puluh enam persen) dari keseluruhan panjang jaringan jalan di Daerah yaitu 115,74% (seratus lima belas koma tujuh puluh empat persen), meningkat 1,20% (dua koma enam persen) dari capaian tahun 2018.

b. Rumah Tangga Bersanitasi

Untuk aspek tempat tinggal, diketahui bahwa rumah tinggal yang bersanitasi di Daerah pada tahun 2019 berjumlah 89.590 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh) unit rumah dari total 105.927 (seratus lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) unit rumah atau sebesar 83,23% (Delapan puluh tiga koma dua puluh tiga persen). Capaian rumah tangga bersanitasi pada tahun 2019 menurun 1,34% (satu koma tiga puluh empat persen) dari capaian tahun 2018. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi yaitu:

- 1) fasilitas air bersih;
- 2) pembuangan tinja;
- 3) pembuangan air limbah; dan
- 4) pembuangan sampah.

Penurunan kinerja yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian pembangunan rumah tinggal di Daerah masih belum memenuhi aspek dasar yang dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui bantuan penyediaan MCK dan *septic tank* komunal terutama di kawasan kampung yang kumuh.

c. Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh yang masih ada di Daerah pada tahun 2019 adalah seluas 1,1367 km<sup>2</sup> (satu koma seribu tiga ratus enam puluh tujuh) km<sup>2</sup> dari total wilayah Daerah atau sebesar 1,89% (satu koma delapan puluh sembilan persen). Persentase kawasan kumuh di Daerah terus mengalami penurunan sejalan dengan pelaksanaan program pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

d. Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Luas .....

Luas ruang terbuka hijau (RTH) di Daerah tahun 2019 adalah 47,28Ha (empat puluh tujuh koma dua puluh delapan) Ha dari 48,00231 luas wilayah Daerah atau sebesar 0,98% (nol koma sembilan puluh delapan persen), meningkat 15,51% (lima belas koma lima puluh satu persen) dari capaian tahun 2018 sebesar 31,77% (tiga puluh satu koma tujuh puluh tujuh persen).

#### **4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Pemukiman**

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib perumahan rakyat dan pemukiman, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**

Jumlah rumah tangga di Daerah yang menggunakan air bersih pada tahun 2019 adalah sebanyak 91.519 (sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan belas) kepala keluarga dari total 109.963 (seratus Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh tiga) kepala keluarga atau sebesar 83,23% (delapan puluh tiga koma dua puluh tiga persen). Capaian ini menurun sebesar 3,16% (tiga koma enam belas persen) dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 86,39% (delapan puluh enam koma tiga puluh sembilan persen). Penurunan yang signifikan yaitu sebesar 10,93% (sepuluh koma Sembilan puluh tiga persen) terjadi apabila dibandingkan dengan capaian rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2013 yaitu sebesar 94,16% (sembilan puluh empat koma enam belas persen).

##### **b. Lingkungan Pemukiman Kumuh**

Kawasan kumuh yang masih ada di Daerah pada tahun 2019 adalah seluas 1,1367 km<sup>2</sup> (nol koma sembilan ribu seratus satu) km<sup>2</sup> dari total wilayah Daerah atau sebesar 1,89% (satu koma delapan puluh sembilan persen). Persentase kawasan kumuh di Daerah terus mengalami penurunan sejalan dengan pelaksanaan program pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

##### **c. Rumah Layak Huni**

Jumlah rumah layak huni di Daerah pada tahun 2019 adalah sejumlah 100.687 (seratus ribu enam ratus delapan puluh tujuh) unit rumah atau sebesar 97,42% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua persen) dari total jumlah unit rumah di Daerah sebesar

103.353 (seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga) unit. Kondisi rumah layak huni di Daerah terus meningkat setiap tahun dengan persentase peningkatan sebesar 4,21% (empat koma dua puluh satu persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 93,21% (sembilan puluh tiga koma dua puluh satu persen).

## **5. Urusan Sosial**

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib sosial, yaitu sebagai berikut:

- a. Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak Potensial yang telah menerima jaminan sosial

Pada tahun 2018, jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah 1.215 (seribu dua ratus lima belas) orang atau sebesar 73,99% (tujuh puluh tiga koma sembilan puluh sembilan persen) dari keseluruhan penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yaitu sebesar 1.642 (seribu enam ratus empat puluh dua) orang. Capaian tahun 2018 menurun 20% (dua puluh persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 92,68% (sembilan puluh dua koma enam puluh delapan persen), namun demikian, upaya peningkatan pelayanan sosial terus ditingkatkan.

- b. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi di Daerah pada tahun 2018 adalah 19 (sembilan belas) unit, menurun sebanyak 8 (delapan) unit dari capaian tahun 2017 yang mencapai 27 (dua puluh tujuh) unit.

- c. Jumlah PPKS yang mendapat bantuan di Daerah pada tahun 2018 adalah sejumlah 54.426 (lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam) orang dari total penyandang PPKS yaitu 99.240 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh) orang atau sebesar 54,84% (lima puluh empat koma delapan puluh empat persen). Capaian pada tahun 2018 meningkat

sebesar .....

sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua puluh lima persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 41,78% (empat puluh satu koma tujuh puluh delapan persen).

- d. Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah

Jumlah korban bencana alam dan sosial sebanyak 62 (enam puluh dua) orang pada tahun 2019. Dari sebanyak 62 (enam puluh dua) orang korban bencana tercapai sebesar 100% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya setelah tanggap darurat bencana di Daerah

- e. Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarganya pada tahun 2019 mencapai 100%, dari sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) telah direunifikasi dengan keluarganya

- f. Pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan

Dari jumlah pekerja sosial profesional dan atau tenaga kerja sosial dan atau relawan sosial yang ada di Daerah, 50 (lima puluh) orang atau 140% (seratus empat puluh persen) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina.

### **2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Terdapat 17 (tujuh belas) jenis urusan wajib non pelayanan dasar yaitu sebagai berikut:

1. urusan lingkungan hidup;
2. urusan kepemudaan dan olah raga;
3. urusan penanaman modal;
4. urusan koperasi dan UKM;
5. urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

6. urusan .....

6. urusan tenaga kerja;
7. urusan pangan;
8. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau KB;
10. urusan perhubungan;
11. urusan komunikasi dan informatika;
12. urusan pertanahan;
13. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. urusan budaya;
15. urusan statistik;
16. urusan kearsipan; dan
17. urusan perpustakaan.

### **1. Urusan Lingkungan Hidup**

Pada urusan lingkungan hidup, terdapat 4 (empat) indikator yaitu sebagai berikut:

#### **a. Terlaksananya pengelolaan sampah di Daerah**

Penanganan sampah pada tahun 2019 adalah 329.139 (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan) m<sup>3</sup> atau sebesar 88,67% (delapan puluh delapan koma enam puluh tujuh persen) dari 371.178 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan) m<sup>3</sup> sampah yang diproduksi. Capaian pada tahun 2019 meningkat 7,06% (tujuh koma nol enam persen) dari capaian tahun 2013

#### **b. Kebersihan**

Indikator kebersihan diperoleh dari kondisi kebersihan pasar tradisional di Daerah yang memenuhi kriteria Adipura yang capaiannya selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu 2013–2018, artinya 5 (lima) pasar tradisional di Daerah memenuhi kriteria Adipura.

#### **c. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk**

Daya tampung TPS terhadap keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah 438,75 (empat ratus tiga puluh delapan

koma tujuh puluh lima) m<sup>3</sup> permil. Kondisi ini menurun 25% (dua puluh lima persen) dari capaian tahun 2017.

d. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan di Daerah sudah berjalan baik dengan capaian rata-rata tahun 2013-2018 adalah 100% (seratus persen). Pada tahun 2018 terdapat 6 (enam) kasus permasalahan lingkungan dan seluruhnya dapat ditangani.

e. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Dari semua usaha/ kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 berupa pemeriksaan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 30 (tiga puluh) usaha/ kegiatan yang dilaksanakan taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

## **2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Indikator pada urusan kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah gelanggang olahraga yang terdapat di Daerah adalah 2 (dua) unit atau sebesar 0,0058% (nol koma nol nol lima puluh delapan persen). Kondisi ini sebenarnya sama setiap tahun dengan jumlah gelanggang atau balai remaja yang ada yaitu 2 (dua) unit, namun yang membedakan adalah peningkatan jumlah penduduk sehingga cakupan pelayanan dari gelanggang atau balai remaja tersebut mengalami penurunan.
- b. Jumlah lapangan olahraga yang terdapat di Daerah pada tahun 2018 mencapai 252 (dua ratus lima puluh dua) unit atau dengan kata lain cakupan pelayanannya terhadap jumlah penduduk Daerah adalah 0,73% (nol koma tujuh puluh tiga persen), meningkat secara signifikan dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 113,33% (seratus tiga belas koma tiga puluh tiga persen) namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 menurun sebesar 23% (dua puluh tiga persen).
- c. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Sebanyak .....



Sebanyak 109.355 (seratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima) pemuda (umur 16-30 tahun) di Daerah sebesar 0,23% (nol koma dua puluh tiga persen) atau sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) orang berwirausaha di Daerah.

- d. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan  
partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan capaian sebesar 1,16% (satu koma enam belas persen) merupakan pemuda berumur 16-30 tahun di Daerah sebanyak 109.355 pada tahun 2019 sebanyak 1.274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat) yang aktif menjadi anggota pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial
- e. Peningkatan prestasi olahraga  
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional pada tahun 2019 Daerah mendapatkan 27 medali dari 12 cabang olah raga
- f. Persentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan  
Dari 156 (seratus lima puluh enam) jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya memiliki Kompetensi 88 (delapan puluh delapan) jumlah Pelatih Olah Raga telah memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan, indikator ini dengan capaian sebesar 56,41% (lima puluh enam koma empat puluh satu persen) di tahun 2019.

### **3. Urusan Penanaman Modal**

Indikator pada urusan penanaman modal adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai realisasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Pada tahun 2019, nilai PMDN mencapai Rp. 11.471.248,900,000,- (sebelas trilyun empat ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), dengan persentase kenaikan sebesar 27,52% (dua puluh tujuh koma lima puluh dua persen dari tahun 2013. Adapun capaian pada tahun 2013 mencapai 11,40 % (sebelas koma empat puluh persen).

#### **4. Urusan Koperasi dan UKM**

##### **a. Koperasi Aktif**

Persentase koperasi aktif di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2019 cenderung fluktuatif dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 61,45% (enam puluh satu koma empat puluh lima persen), secara umum meningkat sebesar 4,06% (empat koma nol enam persen) dari tahun 2013.

##### **b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Persentase usaha mikro dan kecil di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 cenderung fluktuatif dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 85,66% (delapan puluh lima koma enam puluh enam persen), secara umum meningkat sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari tahun 2013. Persentase usaha mikro dan kecil tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 86,68% (delapan puluh enam koma enam puluh delapan persen) dan capaian terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 32,64% (tiga puluh dua koma enam puluh empat persen).

#### **5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

##### **a. Kepemilikan KTP**

Cakupan kepemilikan KTP di Daerah telah mencapai 100% (seratus persen) pada tahun 2019, meningkat sebesar 17,84% (tujuh belas koma delapan empat persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 82,16% (delapan puluh dua koma enam belas persen).

##### **b. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk**

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 (seribu) penduduk pada tahun 2019 dengan capaian 97,64% ( Sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat persen) dari 110.881 Jumlah penduduk, usia 0 – 18 tahun 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran 2018

#### **6. Urusan Tenaga Kerja**

##### **a. Pelayanan Kebersertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja atau Buruh**

Persentase pekerja atau buruh yang mendapat kebersertaan jaminan sosial pada tahun 2018 mencapai 98% (sembilan puluh

delapan persen), meningkat secara signifikan sebesar 101% (seratus satu persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 48,56% (empat puluh delapan koma lima puluh enam persen).

b. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan di Daerah terus mengalami peningkatan setiap tahun. Capaian pada tahun 2018 adalah 94,71% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh satu persen) meningkat secara signifikan sebesar 214,33% (dua ratus empat belas koma tiga puluh tiga persen) dari capaian tahun 2013 yaitu 30,13% (tiga puluh koma tiga belas persen).

c. Tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam Daerah

Sejumlah 5.239 (lima ribu dua ratus tiga puluh Sembilan) orang pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2019 dari Jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 5.312 (lima ribu tiga ratus dua belas) dengan capaian penyerapan sebesar 98.62% (Sembilan puluh delapan koma enam puluh dua persen)

d. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial

Sebanyak 20 (dua puluh) di tahun 2019 kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh mediator Hubungan Industrial dengan capaian 100% (seratus persen) dengan melibatkan tripartite

## **7. Urusan Pangan**

a. Regulasi Ketahanan Pangan

Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) regulasi ketahanan pangan yaitu Keputusan Wali Kota Nomor 228 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

b. Ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)

Jumlah cadangan pangan Daerah pada tahun 2019 Daerah untuk beras dan jagung sebanyak 69.748.000 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu) kg dari 33.928.000 (tiga

puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu) kg jumlah kebutuhan pangan masyarakat Daerah dengan capaian sebesar 205,58 % (dua ratus lima koma lima puluh delapan persen ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan.

## **8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2018 mencapai 15% (lima belas persen). Kondisi ini secara umum meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 9,57% (sembilan koma lima puluh tujuh persen) namun lebih rendah dari capaian tahun 2017 sebesar 27,03% (dua puluh tujuh koma nol tiga persen).

### **b. Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 (lima belas) Tahun ke Atas**

Penduduk perempuan berusia 15 (lima belas) tahun ke atas di Daerah sudah melek huruf dengan capaian tahun 2014-2018 sebesar rata-rata 100% (seratus persen) meningkat 0,9% (nol koma sembilan persen) dari capaian tahun 2013.

### **c. Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 (lima belas) Tahun ke Atas**

Penduduk perempuan berusia 15 (lima belas) tahun ke atas di Daerah sudah melek huruf dengan capaian tahun 2014-2018 sebesar rata-rata 100% (seratus persen) meningkat 0,9% (nol koma sembilan persen) dari capaian tahun 2013.

### **d. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota**

Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi di Daerah pada tahun 2019 sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) anak atau dengan capaian 0,02 % (nol koma nol dua persen) dari Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) di Daerah

### **e. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**

Perempuan yang mengalami kekerasan di Daerah pada tahun 2019 sebanyak 31 (tiga puluh satu) per 100.000 jumlah penduduk

perempuan dengan rasio kekerasan terhadap perempuan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen)

## **9. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau KB**

### **a. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluhan Keluarga Berencana di Setiap Kelurahan**

Rasio petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB dan penyuluhan keluarga berencana atau PKB di setiap kelurahan pada tahun 2018 mencapai 173,68 (seratus tujuh puluh tiga koma enam puluh delapan), sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017.

### **b. Prevalensi Peserta KB Aktif**

Prevalensi peserta KB aktif di Daerah tahun 2018 sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan pasangan usia subur. Kondisi ini menurun secara umum apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu 78,53% (tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga persen) dengan tingkat penurunan sebesar 4,4% (empat koma empat persen) namun meningkat sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 74,4% (tujuh puluh empat koma empat persen).

### **c. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**

Jumlah peserta KB Aktif Modern di Daerah pada tahun 2019 sebesar 43.142 (empat puluh tiga ribu seratus empat puluh dua) peserta dari jumlah usia subur sebesar 57.695 ( lima puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh lima) peserta dengan Persentase pemakaian kontrasepsi Modern sebesar 74,77% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh tujuh persen)

### **d. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**

5.546 (lima ribu lima ratus empat puluh enam) jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani dari 57.695 (lima puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh lima) jumlah yang harus terlayani pasangan usia subur. Persentase kebutuhan ber-KB yang

tidak .....

tidak terpenuhi sebesar 9,61% (Sembilan koma enam puluh satu persen)

## **10. Urusan Perhubungan**

- a. Cakupan pelayanan angkutan darat di Daerah adalah 43,48% (empat puluh tiga koma empat puluh delapan persen) dimana terdapat 2.092 (dua ribu sembilan puluh dua) angkutan darat untuk melayani 4.812 (empat ribu delapan ratus dua belas) orang penumpang angkutan darat. Kondisi ini meningkat sebesar 17,45% (tujuh belas koma empat puluh lima persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 37,02% (tiga puluh tujuh koma nol dua persen).
- b. Indikator Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang)  
Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap di tahun 2019 sepanjang 98,68 KM<sup>2</sup> (sembilan puluh delapan koma enam puluh delapan) dibanding panjang seluruh jalan di daerah 115,74 KM<sup>2</sup> (seratus lima belas koma tujuh puluh empat), dengan persentase capaian sebesar 85,26% (delapan puluh lima koma dua puluh enam persen)

## **11. Urusan Komunikasi dan Informatika**

- a. Laman Milik Pemerintah Daerah  
Pemerintah Daerah sudah memiliki laman resmi yaitu [www.sukabumikota.go.id](http://www.sukabumikota.go.id). Laman ini berisi informasi tentang Pemerintah Daerah.
- b. Pameran atau *Expo*  
Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah mengadakan 16 (enam belas) kali pameran atau *expo*, capaian ini lebih kecil daripada capaian tahun 2017 yaitu sebesar 17 (tujuh belas) kali.

## **12. Urusan Pertanahan**

- a. Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemda  
Luas lahan milik Pemerintah Daerah yang sudah memiliki sertifikat adalah 69% (enam puluh empat persen) yaitu seluas

1.676.886 (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam) m<sup>2</sup> dari total luas lahan milik pemerintah seluas 2.442.301 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus satu) m<sup>2</sup>.

b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Persentase penyelesaian kasus tanah negara di Daerah selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2018.

c. Penyelesaian Ijin Lokasi

Persentase penyelesaian izin lokasi di Daerah selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2019. Artinya setiap permohonan izin lokasi di Daerah selalu terlayani.

d. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Persentase penyelesaian kasus tanah negara di Daerah selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2019.

### **13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK aktif

Persentase PKK aktif di Daerah sudah mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu 2015-2019, meningkat secara umum dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 85,14% (delapan puluh lima koma empat belas persen).

b. Posyandu

Persentase Posyandu aktif di Daerah sudah mencapai 100% (seratus persen) pada tahun 2019 sebesar 453 (empat ratus lima puluh tiga) posyandu aktif yang merupakan jumlah total posyandu yang ada dengan capaian 100% (seratus persen).

### **14. Urusan Budaya**

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Jumlah festival seni dan budaya yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah 4 (empat) kali, meningkat sebesar 55,5% (lima

puluh lima koma lima persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 9 (sembilan) kali per tahun.

b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Di Daerah terdapat 31 (tiga puluh satu) sarana penyelenggaraan seni dan budaya, meningkat signifikan sebesar 520% (lima ratus dua puluh persen) secara umum dari capaian tahun 2013 yaitu 5 (lima) buah. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya paling banyak terdapat pada tahun 2015 yaitu 59 (lima puluh sembilan) buah.

c. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Di Daerah terdapat 12 (dua belas) benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari 18 (delapan belas) benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada atau dengan kata lain capaiannya sebesar 67% (enam puluh tujuh persen). Secara umum kondisi ini meningkat 11,66% (sebelas koma enam puluh enam persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 60% (enam puluh persen).

## **15. Urusan Statistik**

Terdapat 2 (dua) indikator kunci dalam pelaksanaan urusan statistik yaitu adanya Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota. Setiap tahun, BPS menerbitkan Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota.

## **16. Urusan Kearsipan**

a. Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku

Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku . Capaian untuk pengelolaan arsip tahun 2019 juga dengan capaian sebesar 100% (seratus persen). Penerapan pengelolaan arsip secara baku meningkat setiap tahun dengan persentase peningkatan 233,33% (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari capaian tahun 2013 yaitu 30% (tiga puluh persen).

b. Kegiatan .....



b. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan

Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau SDM pengelola kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 6 (enam) kali, meningkat 500% (lima ratus persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 1 (satu) kali.

c. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban

Beberapa faktor agar tersedianya arsip sebagai bahan alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban antara lain: persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik, persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN. Daerah pada tahun 2019 memenuhi kategori hal tersebut dengan capaian sebesar 50,8% (lima puluh koma delapan persen)

## **17. Urusan Perpustakaan**

a. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan pada tahun 2019 mencapai 93,36% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam persen) meningkat 118,89% (seratus delapan belas koma delapan puluh sembilan persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 42,65% (empat puluh dua koma enam puluh lima persen).

b. Pengunjung Perpustakaan

Persentase pengunjung perpustakaan Daerah pada tahun 2018 mencapai 98,82% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua persen) meningkat 154,75% (seratus lima puluh empat koma tujuh puluh lima persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 37,79% (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan persen)

c. Nilai Budaya Baca

Jumlah pengunjung adanya kenaikan dari dari Tahun 2018 sebesar 181.030 orang dan pada Tahun 2019 sebesar 188.047 orang, dinas perpustakaan terus berupaya melakukan kegiatan sosialisasi

promosi .....

promosi, pembinaan kepada masyarakat, sekolah- sekolah untuk meningkatkan gemar membaca mulai dari usia dini. Kebiasaan membaca dengan capaian Daerah yang masih sebesar 2,90% (dua koma Sembilan puluh persen) Daerah terus berusaha agar minat baca ini terasah sejak dini melalui Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengadakan Festival literasi lomba meriu buku siswa dan guru, jambore literasi budaya baca dari tingkat Sekolah Dasar (SD) , Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Guru pendamping dari sekolah sekolah

### **2.3.2. Urusan Pilihan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Daerah melaksanakan 6 (enam) urusan pilihan yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

#### **1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

##### **a. Produksi Perikanan**

Produksi perikanan di Daerah tahun 2018 adalah sebesar 85,42% (delapan puluh lima koma empat puluh dua persen) menurun sebesar 1,94% (satu koma sembilan puluh empat persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 87,36% (delapan puluh tujuh koma tiga puluh enam persen).

##### **b. Konsumsi Ikan**

Konsumsi ikan di Daerah sudah mencapai 160,42% (seratus enam puluh koma empat puluh dua persen) meningkat 105,66% (seratus lima koma enam puluh enam persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).

c. Jumlah .....

c. Jumlah Total Produksi Perikanan

Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Daerah pada tahun 2019 sebanyak 1366.27 ton

**2. Urusan Pilihan Pertanian**

a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Produktivitas padi di Daerah mencapai 7,03 (tujuh koma nol tiga) ton/ha pada tahun 2018. Capaian produktivitas padi di Daerah sangat fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2013-2018 dikarenakan besarnya pengaruh dari dampak perubahan iklim atau DPI. Secara umum provitas tanaman padi meningkat 8,8% (delapan koma delapan persen) dari capaian provitas padi tahun 2013 yaitu 6,46 (enam koma enam puluh empat) ton/ha. Capaian provitas tanaman padi tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) ton/ha

b. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi pertanian terhadap PDRB juga terus menurun dalam kurun waktu tahun 2013-2019 walaupun sempat meningkat pada tahun 2015. Hal ini disebabkan perhitungan kontribusi pertanian terhadap PDRB dilihat dari sektor *on farm* dimana produksi pertanian cenderung menurun sejalan dengan berkurangnya luas lahan pertanian. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2019 mencapai 3,50% (tiga koma lima puluh persen). walaupun nilai ini cenderung masih kecil dibandingkan sektor PDRB lainnya terhadap pendapatan perkapita, dengan lahan pertanian terbatas Pemerintah Daerah terus berusaha mendukung sektor pertanian melalui kebijakan agar lahan pertanian di Daerah tidak alih fungsi

c. Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Pertanian dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan serta Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Daerah dengan luas panen 3.755 ha untuk pertanian, di tahun 2019 produksi pertanian pangan per hektar per tahun sebanyak 22.726 ton per tahun dengan produktivitas pertanian per hektar per tahun sebesar 6.052 ton/ha.

### **3. Urusan Pariwisata**

#### **a. Kunjungan Wisatawan**

Kunjungan wisatawan di Daerah pada tahun 2018 mencapai 188.928 (seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) orang, pencapaian ini secara umum meningkat sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari kunjungan wisatawan tahun 2013 sebesar 141.000 (seratus empat puluh satu ribu) orang. Namun demikian jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 menurun sebesar 23.785 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima) orang atau sebesar 11,18% (sebelas koma delapan belas persen) dari jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 sebesar 212.713 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga belas) orang. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Daerah didorong dengan peningkatan akses transportasi dengan beroperasinya kembali moda transportasi kereta api .

#### **b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB**

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu 2015-2019 dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 2,93%.

#### **c. Tingkat hunian akomodasi**

Kunjungan wisatawan di Daerah pada tahun 2019 yang berkunjung, singgah dan inap merupakan potensi bagi PAD, kontribusi para wisatawan didalam sewa inap kamar, dari jumlah kamar yang tersedia 14.868 kamar di Daerah kamar yang terjual sebanyak 682,32% (enam delapan dua koma tiga puluh dua persen) atau 101.448 kamar telah terjual.

### **4. Urusan Perindustrian**

#### **a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB**

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Daerah cenderung mengalami penurunan Pertumbuhan Industri di Kota Sukabumi Tahun 2019 sebesar 0,55% yang disebabkan oleh masih banyaknya Industri Kecil Menengah yang memproduksi secara musiman dengan capaian pada tahun 2019. Menurunnya kontribusi

sektor .....

sektor industri terhadap PDRB Daerah sejalan dengan turunnya pertumbuhan industri di Daerah.

b. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri di Daerah cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2013-2018 dengan capaian tahun 2018 adalah 1,58% (satu koma lima puluh delapan persen) menurun sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) dari pertumbuhan industri tahun 2013 yaitu sebesar 5,98% (lima koma sembilan puluh delapan persen).

## **5. Urusan Perdagangan**

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Daerah terus menurun dalam kurun waktu tahun 2013-2019 dengan capaian tahun 2019 sebesar 38,92% (tiga puluh delapan koma Sembilan puluh dua persen) menurun 6,78% (enam koma tujuh puluh delapan persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 45,7% (empat puluh lima koma tujuh persen).

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Perkembangan sektor perdagangan mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yang dapat dilihat dari indikator nilai ekspor bersih perdagangan dalam US \$.

## **6. Urusan Transmigrasi**

Persentase transmigran swakarsa atau peserta transmigrasi dengan keinginan sendiri selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2019.

Capaian indikator kinerja kunci Daerah tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel 2.10 berikut ini.

**Tabel 2.10**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Tahun 2013-2019**

No.	IKK	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>								
<b>1. Urusan Wajib Pendidikan</b>								
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); %	55,36	82,49	62,94	80,02	67,72	63,4	73,21
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara); %	99,74	99,76	100	100	100	99,61	100
3	APM(APM) SD/MI/Paket A; %	94,33	84,75	76,07	96,38	96,75	99,4	99,5
4	APM(APM) SMP/MTs/Paket B; %	81,06	71,29	70,63	96,13	96,5	96,4	97
5	APM(APM) SMA/SMK/MA/Paket C; %	100,77	73,89	62,34	97,85			
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; %	0	0	0	0,01	0,003	0	0
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs; %	0,29	0,23	0,02	0,13	0,07	0	0
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA; %	0,72	0,16	0,2	0,04			
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI; %	100	100	100	100	100	100	100
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs; %	99,98	100	100	100	100	100	100
11	Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA; %	100	100	99,7	100			
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; %	111,57	109,82	107,57	115,37	112,4	110,2	96,54
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; %	121,13	121,43	131,48	134,37	N/A	N/A	N/A

No. ....

No.	IKK	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV; %	82,96	27,63	88,57	90,53	92	93	95,67
<b>2. Urusan Wajib Kesehatan</b>								
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; %	100	98,63	95,98	97,25	96,13	100	100
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; %	92,14	93,65	98,3	98,97	96,84	97.9	100
3	Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI); %	75,76	96,97	100	93,94	100	96.97	100
4	Cakupan BALITA gizi buruk mendapat perawatan; %	100	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; %	91,15	85,25	92,04	100	116,1	144.82	100
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; %	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; %	100	73,43	95,14	69,02	103,3	100	100
8	Cakupan kunjungan bayi; %	71,86	92,18	96,95	93,99	97,43	97,83	100
<b>3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>								
1	Panjang jalan kota dalam kondisi baik; %	64,16	93,93	98,23	81,94	79,25	84,06	85,26
2	Rumah tangga bersanitasi; %	95,87	69,71	86,94	89,84	92,78	84,57	83,23
3	Kawasan kumuh; %	26,87	2,79	2,87	2,84	2,04	1,89	1,89
4	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB; %	2,93	79,87	23	31,7	32	31,77	47,28

No. ....

No.	IKK	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>4. Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman</b>								
1	Rumah tangga pengguna air bersih; %	94,16	92,64	84,2	85,97	94,21	86,39	83,23
2	Lingkungan pemukiman kumuh; %	26,87	2,79	2,87	2,84	2,04	1,89	1,89
3	Rumah layak huni; %	93,21	95,51	95,51	95,98	95,98	97,04	97,42
<b>5. Urusan Sosial</b>								
1	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial; %	N/A	1,52	5,08	17,1	92,68	73,99	N/A
2	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi; buah	18	19	19	27	27	19	N/A
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; %	11,14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	PMKS yang memperoleh bantuan sosial; %	148,17	16,18	36,99	59,03	41,78	54,84	N/A
5	Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
6	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
7	Pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	140



No.	IKK	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>								
<b>1. Urusan Lingkungan Hidup</b>								
1	Penanganan sampah; %	81,61	84,52	83,65	81,86	84,04	88,2	88,67
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal; %	36,76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Kebersihan; %	N/A	50	100	100	100	100	N/A
4	Tempat pembuangan sampah atau TPS per satuan penduduk; TPS/mil	2,18	0,12	3,73	592,79	584,19	438,75	N/A
5	Penegakan hukum lingkungan ; %	100	100	100	100	100	100	N/A
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
<b>2. Urusan Kepemudaan dan Olah raga</b>								
1	Gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta); permil	0,0056	0	0,006	0,006	0,006	0,0058	N/A
2	Lapangan olahraga; permil	0,3904	32,28	0,15	0,21	0,29	0,73	N/A
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,16
4	Peningkatan prestasi olahraga; Medali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27
5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	56,41

No. ....

No.	IKK	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>3. Urusan Penanaman Modal</b>								
1	Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah); %	11,4	85,14	182,39	-66, 24	30,63	280,43	38,92
<b>4. Urusan Koperasi dan UKM</b>								
1	Koperasi aktif ; %	57,39	61,38	44,56	60,71	61,15	61,23	61,45
2	Usaha mikro dan kecil; %	81,92	32,64	86,68	85,43	85,53	85,66	
<b>5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>								
1	Kepemilikan KTP; %	82,16	89,93	92,72	94,46	91,12	99,08	100
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; %	922,9	923	922,57	925,27	504,24	513,7	97,64
<b>6. Urusan Tenaga Kerja</b>								
1	Pelayanan kepersertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh;%	N/A	48,56	48,59	54,5	49,88	98	N/A
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja; %	66,41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Pencari kerja yang ditempatkan; %	30,13	80,01	81,02	86,02	89,39	94,71	98,62
4	Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
<b>7. Urusan Pangan</b>								
1	Regulasi ketahanan pangan; buah	5	Ada	Ada	Ada	1	1	N/A
2	Ketersediaan pangan utama; ton	239.265,27	382,29	237.707,26	210.505,96	210.517,80	190.201,77	N/A

No. ....

No.	IKK	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah; %	9,57	15,42	17,95	27,03	27,03	15	N/A
2	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas; %	99,09	100	100	100	100	100	N/A
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan; %	34,05	35,56	59,36	35,82	34,52	59,14	N/A
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,02
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan); %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,02
<b>9. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB</b>								
1	Rasio petugas lapangan KB atau PLKB dan penyuluhan KB atau PKB di setiap kelurahan; %	N/A	1,83	1,74	0,94	173,68	173,68	N/A
2	Prevalensi peserta KB aktif; %	78,53	72,6	73,57	73,2	74,4	75	N/A
3	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I; %	23,03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR); %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74,77
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need); %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,61
<b>10. Urusan Perhubungan</b>								
1	Angkutan darat; %	37,02	2,27	48,93	31,82	43,48	43,48	N/A

No. ....

No.	IKK	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85,26
<b>11. Urusan Komunikasi dan Informatika</b>								
1	Web site milik pemerintah daerah; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Pameran atau <i>expo</i> ; kali	2	4	21	16	17	16	N/A
<b>12. Urusan Pertanahan</b>								
1	Luas lahan bersertifikat milik Pemda; %	68,66	57,59	57,23	56,54	60,19	64	69
2	Penyelesaian kasus tanah negara; %	100	100	100	100	100	100	100
3	Penyelesaian ijin lokasi; %	100	100	100	100	100	100	100
4	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100	100	100
<b>13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>								
1	PKK aktif; %	85,14	88,72	100	100	100	100	100
2	Posyandu;%	100	92,73	100	100	100	100	100
<b>14. Urusan Budaya</b>								
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya; kali	9	5	7	6	10	10	4
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya; buah	5	2	59	51	31	31	N/A
3	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; %	60	0	100	100	67	67	N/A
4	Terlestarikannya Cagar Budaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48,24
<b>15. Urusan Statistik</b>								
1	Buku "Kota dalam angka"; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kota"; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No. ....

No.	IKK	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>16. Urusan Kearsipan</b>								
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku; %	30	84,38	100	87,5	87,88	100	100
2	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan; kali	1	1	2	4	6	6	N/A
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,8
<b>17. Urusan Perpustakaan</b>								
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah;%	42,65	20,94	20,94	94,85	94,84	93,36	93,36
2	Pengunjung perpustakaan; %	38,79	34,72	55,39	95,6	92,21	98,82	N/A
3	Nilai Budaya Baca; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,9
<b>C. URUSAN PILIHAN</b>								
<b>1. Urusan Kelautan dan Perikanan</b>								
1	Produksi perikanan; %	87,36	102,01	102,63	103,81	85,21	85,42	N/A
2	Konsumsi ikan; %	78	100	97,16	100,79	164,32	160,42	N/A
3	Jumlah Total Produksi Perikanan ; %	87,36	102,01	102,63	103,81	85,21	85,42	N/A
<b>2. Urusan Pertanian</b>								
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar; ton/ha	6,46	6,41	7,47	7,69	6,12	7,03	N/A
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; %	3,6	3,25	4	3,94	3,82	3,59	3,5

No. ....

No.	IKK	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun; ton/ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.052
<b>3. Urusan Pariwisata</b>								
1	Kunjungan wisatawan; orang	141.000	86.431	127.235	116.790	212.713	188.928	N/A
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB; %	0,1	47,7979	2,7181	2,7693	2,84	2,9	2,93
3	Tingkat hunian akomodasi; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	628,32
<b>4. Urusan Industri</b>								
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB; %	5,48	5,1362	5,4212	5,1973	5,14	5,11	N/A
2	Pertumbuhan Industri ; %	5,98	2,3695	1,886	2,0194	2,02	1,58	N/A
<b>5. Urusan Perdagangan</b>								
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB; %	45,7	42,97	41,109	40,0577	39,41	39,09	38,92
2	Ekspor Bersih Perdagangan; US\$	-227.363.676	-1.536.953	-9.787.652.700	-1.908.889.300	1.298.244	1.965.131	N/A
<b>6. Urusan Transmigrasi</b>								
1	Transmigran swakarsa ; %	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kota Sukabumi

## 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

PDRB ADHB Daerah terus menunjukkan pertumbuhan, pada tahun 2013 PDRB ADHB Daerah masih berada pada angka Rp.7.300.000.000.000,- (tujuh trilyun tiga ratus milyar rupiah) dan terus meningkat hingga menjadi Rp. 12.300.000.000.000,- (dua belas trilyun tiga ratus milyar rupiah) pada tahun 2019. Perkembangan PDRB ADHB Daerah Tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel 2.11 berikut ini.

**Tabel 2.11**  
**Perkembangan PDRB ADHB Daerah Tahun 2013-2019**

No	Tahun	PDRB ADHB (dalam jutaan rupiah)
1	2013	7.309.646,73
2	2014	8.140.751,03
3	2015	8.971.328,27
4	2016	9 718 687.89
5	2017	10 549 217.87
6	2018	11 471 248.90
7	2019	12 384 001.28

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2020

Dilihat .....

Dilihat dari segi kewilayahan, Daerah saat ini masih memiliki potensi di wilayah-wilayah pengembangan yang dapat difungsikan sebagai sentra-sentra pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam peningkatan industri, pelayanan jasa, dan perdagangan komoditas pertanian guna mewujudkan kemandirian pangan. Potensi yang terdapat pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menunjukkan semakin besarnya peluang untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis terpadu, mulai dari budidaya, agroindustri, dan pengembangan pemasarannya, sejalan dengan perkembangan penduduk dan perkembangan kota.

Potensi sektor industri di Daerah secara umum belum banyak memberikan kontribusi pada perekonomian Daerah. Namun dalam hal penyerapan tenaga kerja, tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor ini cukup penting dan masih bisa ditingkatkan. Selain perusahaan industri besar dan sedang yang secara reguler paling banyak menyerap tenaga kerja yang antara lain adalah industri tekstil dan pakaian jadi, serta berbagai jenis industri menengah dan kecil, akhir-akhir ini telah muncul kelompok baru yang dikenal dengan sektor industri kreatif yang dapat menjadi alternatif dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan di Daerah ke depan.

Pada sektor industri menengah, kecil, dan mikro nonformal sebagaimana pada umumnya di berbagai daerah, membutuhkan pembenahan dan pengelolaan yang serius. Mengingat peran sektor ini makin meningkat dari sisi jumlah maupun volume usaha, di samping sebagai alternatif penyerapan tenaga kerja yang dapat diandalkan pada saat aktivitas sektor formal melemah.

Potensi yang cukup besar ada di sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang menjadi kontributor utama pada tahun 2016. Pengembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran akan berdampak pada perkembangan sektor pariwisata, karena merupakan sektor pendukungnya. Peluang pengembangan sektor pariwisata ke depan akan semakin besar sejalan dengan perkembangan kota dan rencana pengembangan jaringan jalan, antara lain rencana pembangunan jalan tol Ciawi-Padalarang yang melintasi Wilayah Sukabumi dan sekitarnya.



Potensi lainnya adalah di sektor perdagangan nonformal, yang terdiri atas Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kelompok usaha atau jasa lainnya, mencakup pedagang keliling, warung makanan atau sembako, dan jasa layanan publik. Sektor ini menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan telah terbukti tahan terhadap guncangan krisis.

Sementara itu, sektor yang mengalami laju pertumbuhan negatif adalah pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, terutama pada subsektor tanaman bahan makanan. Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh negatif. Dengan demikian, fokus pembangunan ekonomi Daerah, seyogyanya diarahkan pada sektor-sektor jasa yang telah disebutkan sebelumnya, tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya sebagai penunjang.

Dilihat dari basis ekonomi atau *economic base*, Daerah memiliki sejumlah sektor basis, yaitu sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa keuangan, dan sektor jasa-jasa lainnya. Hal ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi terhadap setiap sektor, dan memilih sektor mana di Daerah yang akan dijadikan sektor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonominya.

Struktur ekonomi yang ditunjukkan dari PDRB Daerah pada tahun 2019, didominasi oleh sektor tersier, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling dominan dan memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Daerah, mencapai 38,64% .( tiga puluh delapan koma enam puluh empat persen) pada tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa corak perekonomian yang ada di Daerah lebih mengarah pada sektor jasa dan perdagangan besar, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,71% (sepuluh koma tujuh puluh satu persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,95% (sepuluh koma sembilan puluh lima persen), Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan sektor tersier jauh mengungguli sedangkan sektor primer dan sekunder Pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah sektor yang terus mengalami pelambatan pada enam tahun terakhir .Struktur ekonomi Daerah

menurut .....

menurut kelompok sektor atas dasar harga berlaku tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel 2.12 berikut ini.

**Tabel 2.12**  
**Struktur Ekonomi Daerah Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2019 (Persen)**

No	Kelompok Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Sektor Primer</b>	<b>4,06</b>	<b>4,00</b>	<b>3,93</b>	<b>3,82</b>	<b>3,60</b>	<b>3,50</b>	<b>3,43</b>
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,06	4,00	3,93	3,82	3,60	3,50	3,43
	Pertambangan dan Penggalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>12,05</b>	<b>11,15</b>	<b>12,13</b>	<b>12,19</b>	<b>12,23</b>	<b>12,36</b>	<b>12,46</b>
	Industri Pengolahan	5,58	5,42	5,23	5,19	5,11	5,11	5,08
	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22	0,22	0,21
	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
	Konstruksi	6,16	6,51	6,61	6,66	6,77	6,90	7,05
3	<b>Sektor Tersier</b>	<b>83,89</b>	<b>84,85</b>	<b>83,94</b>	<b>84,00</b>	<b>84,17</b>	<b>84,15</b>	<b>84,10</b>
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	41,81	41,11	40,03	39,39	39,12	38,92	38,64
	Transportasi dan Pergudangan	9,31	9,82	10,60	10,70	10,60	10,83	10,77
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,54	2,72	2,77	2,84	2,90	2,93	3,02
	Informasi & Komunikasi	3,52	3,60	3,58	3,72	3,79	3,75	3,77
	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,17	9,94	10,29	10,66	10,94	10,94	10,95
	Real Estate	1,12	1,11	1,12	1,11	1,12	1,13	1,14
	Jasa Perusahaan	1,54	1,65	1,66	1,68	1,70	1,65	1,79
	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,25	5,83	5,71	5,50	5,24	5,13	4,87
	Jasa Pendidikan	3,38	3,63	3,77	3,82	4,00	3,99	4,11
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	1,63	1,68	1,73	1,77	1,76	1,82
	Jasa Lainnya	2,73	2,71	2,72	2,85	2,99	3,12	3,22

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2020

Selain itu, sejak tahun 2013 terdapat pola penurunan kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Daerah dari rata-

rata .....

rata 4% (empat persen) menjadi hanya sekitar 3% (tiga persen). Penurunan kontribusi sektor primer pada perekonomian Daerah sepenuhnya disumbangkan oleh penurunan persentase sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada sektor sekunder, yang mengalami penurunan secara persisten sejak tahun 2013 adalah sektor industri pengolahan dari awalnya sebesar 5,58% (lima koma lima delapan persen) pada tahun 2013 menjadi sebesar 5,08% (lima koma nol delapan persen) pada tahun 2019. Pada sektor tersier, sektor yang secara signifikan mengalami penurunan adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Pada tahun 2013, sektor tersebut memberikan kontribusi di atas 41,81% (empat puluh satu koma delapan puluh satu persen). Walaupun sektor tersebut merupakan sektor dengan kontribusi terbesar di Daerah namun kontribusinya dari tahun ke tahun terus menurun.

Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan secara persisten sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 adalah sektor konstruksi dari 6,16% (enam koma enam belas persen) pada tahun 2013 menjadi 7,05% (tujuh koma nol lima persen) pada tahun 2019, sektor transportasi dan pergudangan dari 9,31% (sembilan koma tiga puluh satu persen) pada tahun 2013 menjadi 10,77% (sepuluh koma tujuh puluh tujuh persen) pada tahun 2019, dan sektor jasa perusahaan dari 1,54% (satu koma lima puluh empat persen) pada tahun 2013 menjadi 1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan persen) pada tahun 2019. Pertumbuhan masing-masing lapangan usaha di Daerah pada kurun waktu tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.13 berikut ini.

**Tabel 2.13**  
**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha**  
**Daerah Tahun 2013-2019**

NO	Kategori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,49	4,66	1,90	0,38	-0,98	1,49	2,23
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Industri Pengolahan	3,70	3,93	2,71	3,77	4,35	5,25	3,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,27	3,76	2,98	7,50	4,76	2,57	3,76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	-1,03	1,91	3,62	3,10	3,83	5,60
6	Konstruksi	7,89	9,80	5,82	6,88	7,52	7,70	7,09
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,01	5,65	3,73	4,44	4,70	4,94	4,72
8	Transportasi dan Pergudangan	4,33	3,65	7,49	6,46	4,75	5,74	7,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,67	8,77	7,87	7,45	7,28	7,39	7,01
10	Informasi dan Komunikasi	7,45	11,67	10,13	12,41	10,35	9,62	8,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,47	2,63	7,59	8,42	6,56	5,21	5,58
12	Real Estate	2,06	5,23	5,58	6,44	7,99	7,74	8,16
13	Jasa Perusahaan	7,05	8,18	7,70	7,61	7,88	7,23	7,37
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-3,70	-3,52	1,21	1,37	0,20	0,51	0,21
15	Jasa Pendidikan	7,30	10,76	8,43	7,44	8,73	6,04	6,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,70	13,63	11,25	9,13	8,74	8,01	7,49
17	Jasa Lainnya	4,88	6,50	7,30	8,69	9,88	8,80	9,15
	<b>PDRB ADHK (%)</b>	<b>5,41</b>	<b>5,43</b>	<b>5,14</b>	<b>5,64</b>	<b>5,43</b>	<b>5,51</b>	<b>5,49</b>

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2020

#### **2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur**

Salah satu aspek dalam tata kelola perkotaan adalah *Infrastructure and Service Management* atau Infrastruktur dan Pengelolaan Pelayanan. Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkotaan karena infrastruktur adalah suatu sarana yang mendukung perkembangan suatu kota, baik perkembangan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam

Penyediaan Infrastruktur, pengertian infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pengertian penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Salah satu manfaat infrastruktur adalah untuk meningkatkan perekonomian suatu kota. Kota yang memiliki potensi ekonomi dapat dikembangkan dengan pembangunan infrastruktur agar ekonomi daerah tersebut berkembang.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan. Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan. Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten/kota, panjang jalan negara di Daerah pada tahun 2019 mencapai 8,50 (delapan koma lima nol) km, panjang jalan provinsi mencapai 33,55 (tiga puluh tiga koma lima lima) km, sementara panjang jalan Daerah mencapai 185,16 (seratus delapan puluh lima koma satu enam) km dengan rincian: sepanjang 127,05 (seratus dua puluh tujuh koma nol lima) km memiliki kondisi jalan baik, sepanjang 66,48 (enam puluh enam koma empat delapan) km memiliki kondisi jalan sedang, sepanjang 30,10 (tiga puluh koma satu nol) km memiliki kondisi jalan rusak serta sepanjang 3,58 (tiga

koma lima delapan) km memiliki kondisi jalan rusak berat. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang sangat besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.

Pelayanan transportasi umum masyarakat Daerah dilaksanakan melalui perusahaan angkutan dalam kota dan luar kota. Pada tahun 2017, tercatat ada 19 (sembilan belas) tujuan perjalanan bus yang diberangkatkan dari Terminal Bus Sukabumi. Tujuan yang paling banyak diminati oleh penduduk Daerah adalah Bandung. Pada tahun tersebut, tercatat ada 276.888 (dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan) penumpang yang diberangkatkan menuju Bandung. Rute lain yang cukup padat adalah Kota Sukabumi–Kampung Rambutan. Jumlah penumpang yang diberangkatkan menuju Kampung Rambutan tercatat sebanyak 30.070 (tiga puluh ribu tujuh puluh) orang.

Kereta api merupakan sarana transportasi yang relatif murah bagi masyarakat Daerah. Tanggal 15 Desember 2008 jalur tersebut mulai dibuka kembali dengan rute Sukabumi-Bogor dan rute Sukabumi-Cianjur. Pada tahun 2017, jumlah penumpang yang diangkut sebanyak 591.826 (lima ratus sembilan puluh satu delapan ratus dua puluh enam) orang dengan jumlah pendapatan PT. Kereta Api Stasiun Sukabumi mencapai Rp. 7.790.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

### **2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

Terus membaiknya perekonomian, baik domestik maupun global, serta positifnya prospek perekonomian daerah ke depan, mendorong semakin besarnya peluang investasi yang dapat masuk ke Daerah, namun demikian peluang tersebut harus didukung pula oleh penciptaan situasi dan kondisi Daerah yang kondusif bagi investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi merupakan kondisi yang sifatnya multidimensi dan menjadi bahan pertimbangan

bagi .....

bagi para investor untuk berinvestasi. Beberapa faktor pendorong iklim berinvestasi tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.14 berikut ini.

**Tabel 2.14**  
**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim Berinvestasi di Daerah Tahun 2013-2018**

No	Indikator/Satuan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pelanggaran Perda (kali)	633	2914	1281	2126	1488	1720
2	Penyelesaian Pelanggaran Perda (persen)	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Demo/Unjuk Rasa (aksi)	27	20	31	42	47	31
4	Pajak Daerah (Milyar Rp.)	21,156	28,399	29,688	41,565	43,365	55,741
5	Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	9,926	10,889	10,975	8,795	8,795	8,331
6	Jumlah Jenis Pajak Daerah (buah)	9	9	9	9	9	9
7	Jumlah Jenis Retribusi Daerah (buah)	12	12	12	11	11	12
8	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)	2	2	3	6	7	8
9	Jumlah Layanan Perizinan (buah)	32 Perizinan dan 6 non perizinan	32 Perizinan dan 6 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	38 perizinan dan 3 non perizinan
10	Jumlah SOP terkait Pemberian Layanan Perizinan (buah)	32 Perizinan dan 6 non perizinan	32 Perizinan dan 6 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	38 perizinan dan 3 non perizinan

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019

Ketentraman, ketertiban, dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Pada kurun waktu tahun 2013-2018 terdapat rata-rata 1.694 (seribu enam ratus sembilan puluh empat) kasus pelanggaran perda namun seluruhnya dapat ditangani dengan persentase penanganan sebesar 100% (seratus persen). Selain pelanggaran Perda, kejadian lain yang berpotensi dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban adalah adanya aksi demo atau unjuk rasa. Jumlah unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2018 adalah 31 (tiga puluh satu) aksi, meningkat sebesar 14% (empat belas persen) dari jumlah demo atau unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2013 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) aksi namun menurun sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari jumlah demo atau unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 47 (empat puluh tujuh) aksi.

Iklim investasi di Daerah dapat juga dilihat dari jenis serta penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dalam kurun waktu tahun 2013-2018 terdapat 9 (sembilan) jenis pajak daerah. Jumlah penerimaan dari 9 (sembilan) pajak daerah tersebut terus mengalami peningkatan dengan capaian penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 55.741.000.000,- (lima puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah), meningkat 163% (seratus enam puluh tiga persen) dari penerimaan pajak daerah tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 21.156.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta rupiah). Adapun jenis retribusi daerah yang ada di Daerah ada 12 (dua belas) jenis dengan jumlah penerimaan retribusi dalam kurun waktu tahun 2013-2018 fluktuatif dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018 adalah Rp. 8.331.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), menurun sebesar 16% (enam belas persen) dari penerimaan retribusi daerah tahun 2013 yaitu Rp. 9.926.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).

Rasa aman dan kemudahan regulasi menjadi faktor yang menentukan dan mempengaruhi iklim berinvestasi. Jumlah Perda

yang .....



yang mendukung investasi pada tahun 2018 terdapat 8 (delapan) buah perda, meningkat 300% (tiga ratus persen) dari jumlah Perda yang mendukung iklim investasi pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) buah. Selain itu, dengan adanya Keputusan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah dimana Pelayanan Perizinan tersebut meliputi izin gangguan atau HO, izin usaha jasa kontruksi atau IUJK, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin tanda daftar industri atau TDI, izin usaha industri atau IUI, izin reklame, dan izin pengambilan air bawah tanah. Jumlah layanan perizinan yang ada pada tahun 2018 adalah 38 (tiga puluh delapan) layanan perizinan dan 3 (tiga) layanan non perizinan, yang masing-masing sudah dilengkapi dengan standar operasional prosedur atau SOP terkait pemberian layanan perizinan dengan jumlah pada tahun 2018 adalah 38 (tiga puluh delapan) SOP terkait pemberian layanan perizinan dan 3 (tiga) SOP terkait pemberian layanan non perizinan.

#### **2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia atau SDM yang unggul merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan daya saing daerah sehingga fokus kepada kualitas SDM merupakan hal penting dalam pembangunan daerah. Salah satu indikator untuk melihat kondisi SDM adalah rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 (enam puluh lima) tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Daerah Tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel 2.15 berikut ini.

**Tabel 2.15**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk di Daerah**  
**Tahun 2013-2019**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>NILAI RASIO KETERGANTUNGAN</b>
1	2013	35,68
2	2014	35,23
3	2015	47,62
4	2016	47,63
5	2017	46,89
6	2018	45,95
7	2019	48,16

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2019*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan penduduk di Daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dimana rasio ketergantungan penduduk mencapai 48,16 (empat puluh delapan koma enam belas) artinya dari setiap 100 orang produktif harus menanggung 48 s/d 49 orang yang tidak produktif. Hal ini sedikit berbeda dengan keadaan rasio ketergantungan tahun 2018 dimana setiap 100 orang produktif harus menanggung 45 s/d 46 orang yang tidak produktif.

Berikut disajikan Tabel 2.16 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

**Tabel 2.16**  
**Tabel Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja**  
**Tahun 2013-2019**

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
<b>1.1.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>							
1	laju pertumbuhan ekonomi (LPE; %);	5,41	5,43	5,14	5,64	5,43	5,51	5,49
2	laju inflasi (%);	8.03	8.38	2.20	2.57	4.10	2.95	2.33
3	ketimpangan kemakmuran (gini ratio);	0.40	0.36	0.43	0.42	0.40	0.40	0.41
4	PDRB perkapita (ADHB); dan	7.309.646,73	8.140.751,03	8.971.328,27	9.718.687,89	10.549.217,87	11.471.248,90	12.384.001,28
5	Tingkat pengangguran terbuka (TPT).	11.18	11.64	9.06	8.24	8.00	8.48	8.44
<b>1.2.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>							
1	laju pertumbuhan penduduk (LPP; %);	N/A	1.02	0.98	0.94	0.84	0.77	0.73
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM);	70.81	71.19	71.84	71.33	73.03	73.55	74.31
3	tingkat kemiskinan (%)	8.05	7.65	8.79	8.59	8.48	7.12	6.67
4	angka melek huruf (AMH);	99.74	99.75	99.26	99.02	97.03	99.61	99.40
5	angka rata-rata lama sekolah (RLS);	8.52	8.70	9.08	9.28	9.52	9.53	9.58
6	angka harapan lama sekolah (HLS);	13.08	13.18	13.24	13.38	13.39	13.40	13.46
7	angka harapan hidup (AHH); dan	71.75	71.76	71.86	71.90	71.95	72.11	72.26

NO .....

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8	persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I.	22,99	22,77	22,95	22,75	22,74	22,74	22,60
<b>2</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>A.</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>							
<b>1.</b>	<b>Urusan Wajib Pendidikan</b>							
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); %	55,36	82,49	62,94	80,02	67,72	63,4	73,21
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara); %	99,74	99,76	100	100	100	99,61	100
3	APM(APM) SD/MI/Paket A; %	94,33	84,75	76,07	96,38	96,75	99,4	99,5
4	APM(APM) SMP/MTs/Paket B; %	81,06	71,29	70,63	96,13	96,5	96,4	97
5	APM(APM) SMA/SMK/MA/Paket C; %	100,77	73,89	62,34	97,85			
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; %	0	0	0	0,01	0,003	0	0
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs; %	0,29	0,23	0,02	0,13	0,07	0	0
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA; %	0,72	0,16	0,2	0,04			
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI; %	100	100	100	100	100	100	100
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs; %	99,98	100	100	100	100	100	100
11	Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA; %	100	100	99,7	100			

NO .....

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; %	111,57	109,82	107,57	115,37	112,4	110,2	96,54
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; %	121,13	121,43	131,48	134,37	N/A	N/A	N/A
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV; %	82,96	27,63	88,57	90,53	92	93	95,67
<b>2.</b>	<b>Urusan Wajib Kesehatan</b>							
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; %	100	98,63	95,98	97,25	96,13	100	100
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; %	92,14	93,65	98,3	98,97	96,84	97.9	100
3	Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI); %	75,76	96,97	100	93,94	100	96.97	100
4	Cakupan BALITA gizi buruk mendapat perawatan; %	100	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; %	91,15	85,25	92,04	100	116,1	144.82	100
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; %	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; %	100	73,43	95,14	69,02	103,3	100	100
8	Cakupan kunjungan bayi; %	71,86	92,18	96,95	93,99	97,43	97,83	100
<b>3.</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>							

NO .....

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang jalan kota dalam kondisi baik; %	64,16	93,93	98,23	81,94	79,25	84,06	85,26
2	Rumah tangga bersanitasi; %	95,87	69,71	86,94	89,84	92,78	84,57	83,23
3	Kawasan kumuh; %	26,87	2,79	2,87	2,84	2,04	1,89	1,89
4	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB; %	2,93	79,87	23	31,7	32	31,77	47,28
<b>4.</b>	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman</b>							
1	Rumah tangga pengguna air bersih; %	94,16	92,64	84,2	85,97	94,21	86,39	83,23
2	Lingkungan pemukiman kumuh; %	26,87	2,79	2,87	2,84	2,04	1,89	1,89
3	Rumah layak huni; %	93,21	95,51	95,51	95,98	95,98	97,04	97,42
<b>5.</b>	<b>Urusan Sosial</b>							
1	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial; %	N/A	1,52	5,08	17,1	92,68	73,99	N/A
2	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi; buah	18	19	19	27	27	19	N/A
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; %	11,14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	PMKS yang memperoleh bantuan sosial; %	148,17	16,18	36,99	59,03	41,78	54,84	N/A

NO .....

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
6	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
7	Pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	140
<b>B.</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>							
<b>1.</b>	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>							
1	Penanganan sampah; %	81,61	84,52	83,65	81,86	84,04	88,2	88,67
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal; %	36,76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Kebersihan; %	N/A	50	100	100	100	100	N/A
4	Tempat pembuangan sampah atau TPS per satuan penduduk; TPS/mil	2,18	0,12	3,73	592,79	584,19	438,75	N/A
5	Penegakan hukum lingkungan ; %	100	100	100	100	100	100	N/A

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
<b>2.</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olah raga</b>							
1	Gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta); permil	0,0056	0	0,006	0,006	0,006	0,0058	N/A
2	Lapangan olahraga; permil	0,3904	32,28	0,15	0,21	0,29	0,73	N/A
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,16
4	Peningkatan prestasi olahraga; Medali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27
5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	56,41
<b>3.</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>							
1	Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah); %	11,4	85,14	182,39	-66, 24	30,63	280,43	38,92
<b>4.</b>	<b>Urusan Koperasi dan UKM</b>							
1	Koperasi aktif ; %	57,39	61,38	44,56	60,71	61,15	61,23	61,45



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	Usaha mikro dan kecil; %	81,92	32,64	86,68	85,43	85,53	85,66	
<b>5.</b>	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>							
1	Kepemilikan KTP; %	82,16	89,93	92,72	94,46	91,12	99,08	100
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; %	922,9	923	922,57	925,27	504,24	513,7	97,64
<b>6.</b>	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>							
1	Pelayanan kepersertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh;%	N/A	48,56	48,59	54,5	49,88	98	N/A
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja; %	66,41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Pencari kerja yang ditempatkan; %	30,13	80,01	81,02	86,02	89,39	94,71	98,62
4	Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
<b>7.</b>	<b>Urusan Pangan</b>							
1	Regulasi ketahanan pangan; buah	5	Ada	Ada	Ada	1	1	N/A
2	Ketersediaan pangan utama; ton	239.265,27	382,29	237.707,26	210.505,96	210.517,80	190.201,77	N/A
<b>8.</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah; %	9,57	15,42	17,95	27,03	27,03	15	N/A
2	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas; %	99,09	100	100	100	100	100	N/A

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan; %	34,05	35,56	59,36	35,82	34,52	59,14	N/A
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,02
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan); %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,02
<b>9.</b>	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan KB</b>							
1	Rasio petugas lapangan KB atau PLKB dan penyuluhan KB atau PKB di setiap kelurahan; %	N/A	1,83	1,74	0,94	173,68	173,68	N/A
2	Prevalensi peserta KB aktif; %	78,53	72,6	73,57	73,2	74,4	75	N/A
3	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I; %	23,03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR); %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74,77
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need); %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,61
<b>10.</b>	<b>Urusan Perhubungan</b>							
1	Angkutan darat; %	37,02	2,27	48,93	31,82	43,48	43,48	N/A

NO .....

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85,26
<b>11.</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>							
1	Web site milik pemerintah daerah; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Pameran atau <i>expo</i> ; kali	2	4	21	16	17	16	N/A
<b>12.</b>	<b>Urusan Pertanahan</b>							
1	Luas lahan bersertifikat milik Pemda; %	68,66	57,59	57,23	56,54	60,19	64	69
2	Penyelesaian kasus tanah negara; %	100	100	100	100	100	100	100
3	Penyelesaian ijin lokasi; %	100	100	100	100	100	100	100
4	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100	100	100
<b>13.</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>							
1	PKK aktif; %	85,14	88,72	100	100	100	100	100
2	Posyandu;%	100	92,73	100	100	100	100	100
<b>14.</b>	<b>Urusan Budaya</b>							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya; kali	9	5	7	6	10	10	4
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya; buah	5	2	59	51	31	31	N/A

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; %	60	0	100	100	67	67	N/A
4	Terlestarikannya Cagar Budaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48,24
<b>15.</b>	<b>Urusan Statistik</b>							
1	Buku "Kota dalam angka"; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kota"; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>16.</b>	<b>Urusan Kearsipan</b>							
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku; %	30	84,38	100	87,5	87,88	100	100
2	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan; kali	1	1	2	4	6	6	N/A
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,8
<b>17.</b>	<b>Urusan Perpustakaan</b>							
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah;%	42,65	20,94	20,94	94,85	94,84	93,36	93,36
2	Pengunjung perpustakaan; %	38,79	34,72	55,39	95,6	92,21	98,82	N/A
3	Nilai Budaya Baca; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,9
<b>C.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>							
<b>1.</b>	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>							
1	Produksi perikanan; %	87,36	102,01	102,63	103,81	85,21	85,42	N/A
2	Konsumsi ikan; %	78	100	97,16	100,79	164,32	160,42	N/A

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	Jumlah Total Produksi Perikanan ; %	87,36	102,01	102,63	103,81	85,21	85,42	N/A
<b>2.</b>	<b>Urusan Pertanian</b>							
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar; ton/ha	6,46	6,41	7,47	7,69	6,12	7,03	N/A
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; %	3,6	3,25	4	3,94	3,82	3,59	3,5
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun; ton/ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.052
<b>3.</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>							
1	Kunjungan wisatawan; orang	141	86.431	127.235	116.79	212.713	188.928	N/A
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB; %	0,1	477,979	27,181	27,693	2,84	2,9	2,93
3	Tingkat hunian akomodasi; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	628,32
<b>4.</b>	<b>Urusan Industri</b>							
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB; %	5,48	51,362	54,212	51,973	5,14	5,11	N/A
2	Pertumbuhan Industri ; %	5,98	23,695	1,886	20,194	2,02	1,58	N/A
<b>5.</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>							
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB; %	45,7	42,97	41,109	400,577	39,41	39,09	38,92
2	Ekspor Bersih Perdagangan; US\$	-227.363.676	-1.536.953	9.787.652.700	1.908.889.300	1.298.244	1.965.131	N/A
<b>6.</b>	<b>Urusan Transmigrasi</b>							

NO .....

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Transmigran swakarsa ; %	100	100	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
<b>3.1.</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>							
1	Perkembangan PDRB ADHB Daerah Tahun 2013-2019	7.309.646,73	8.140.751,03	8.971.328,27	9 718 687.89	10 549 217.87	11 471 248.90	12 384 001.28
<b>3.1.1</b>	<b>Struktur Ekonomi Daerah Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku</b>							
	<b>Sektor Primer</b>	<b>4,06</b>	<b>4,00</b>	<b>3,93</b>	<b>3,82</b>	<b>3,60</b>	<b>3,50</b>	<b>3,43</b>
1	a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,06	4,00	3,93	3,82	3,60	3,50	3,43
	b. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>12,05</b>	<b>11,15</b>	<b>12,13</b>	<b>12,19</b>	<b>12,23</b>	<b>12,36</b>	<b>12,46</b>
2	a. Industri Pengolahan	5,58	5,42	5,23	5,19	5,11	5,11	5,08
	b. Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22	0,22	0,21
	c. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
	d. Konstruksi	6,16	6,51	6,61	6,66	6,77	6,90	7,05
	<b>Sektor Tersier</b>	<b>83,89</b>	<b>84,85</b>	<b>83,94</b>	<b>84,00</b>	<b>84,17</b>	<b>84,15</b>	<b>84,10</b>
3	a. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	41,81	41,11	40,03	39,39	39,12	38,92	38,64
	b. Transportasi dan Pergudangan	9,31	9,82	10,60	10,70	10,60	10,83	10,77
	c. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,54	2,72	2,77	2,84	2,90	2,93	3,02
	d. Informasi & Komunikasi	3,52	3,60	3,58	3,72	3,79	3,75	3,77

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	e. Jasa Keuangan dan Asuransi	10,17	9,94	10,29	10,66	10,94	10,94	10,95
	f. Real Estate	1,12	1,11	1,12	1,11	1,12	1,13	1,14
	g. Jasa Perusahaan	1,54	1,65	1,66	1,68	1,70	1,65	1,79
	h. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,25	5,83	5,71	5,50	5,24	5,13	4,87
	i. Jasa Pendidikan	3,38	3,63	3,77	3,82	4,00	3,99	4,11
	j. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	1,63	1,68	1,73	1,77	1,76	1,82
	k. Jasa Lainnya	2,73	2,71	2,72	2,85	2,99	3,12	3,22
<b>3.1.2</b>	<b>Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Daerah</b>							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,49	4,66	1,90	0,38	-0,98	1,49	2,23
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Industri Pengolahan	3,70	3,93	2,71	3,77	4,35	5,25	3,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,27	3,76	2,98	7,50	4,76	2,57	3,76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	-1,03	1,91	3,62	3,10	3,83	5,60
6	Konstruksi	7,89	9,80	5,82	6,88	7,52	7,7	7,09
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,01	5,65	3,73	4,44	4,70	4,94	4,72
8	Transportasi dan Pergudangan	4,33	3,65	7,49	6,46	4,75	5,74	7,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,67	8,77	7,87	7,45	7,28	7,39	7,01
10	Informasi dan Komunikasi	7,45	11,67	10,13	12,41	10,35	9,62	8,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,47	2,63	7,59	8,42	6,56	5,21	5,58
12	Real Estate	2,06	5,23	5,58	6,44	7,99	7,74	8,16

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
13	Jasa Perusahaan	7,05	8,18	7,70	7,61	7,88	7.23	7,37
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-3,70	-3,52	1,21	1,37	0,20	0.51	0,21
15	Jasa Pendidikan	7,30	10,76	8,43	7,44	8,73	6.04	6,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,70	13,63	11,25	9,13	8,74	8.01	7,49
17	Jasa Lainnya	4,88	6,50	7,30	8,69	9,88	8.8	9,15
<b>PDRB ADHK (%)</b>		<b>5,41</b>	<b>5,43</b>	<b>5,14</b>	<b>5,64</b>	<b>5,43</b>	<b>5.51</b>	<b>5,49</b>
<b>3.2</b>	<b>Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur</b>							
<b>3.3</b>	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>							
<b>3.3.1</b>	<b>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim Berinvestasi di Daerah</b>							
1	Pelanggaran Perda (kali)	633	2914	1281	2126	1488	1720	N/A
2	Penyelesaian Pelanggaran Perda (persen)	100	100	100	100	100	100	N/A
3	Jumlah Demo/Unjuk Rasa (aksi)	27	20	31	42	47	31	N/A
4	Pajak Daerah (Milyar Rp.)	21,156	28,399	29,688	41,565	43,365	55,741	N/A
5	Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	9,926	10,889	10,975	8,795	8,795	8,331	N/A
6	Jumlah Jenis Pajak Daerah (buah)	9	9	9	9	9	9	N/A
7	Jumlah Jenis Retribusi Daerah (buah)	12	12	12	11	11	12	N/A
8	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)	2	2	3	6	7	8	N/A

NO .....



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Jumlah Layanan Perizinan (buah)	32 Perizinan dan 6 non perizinan	32 Perizinan dan 6 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	38 perizinan dan 3 non perizinan	N/A
10	Jumlah SOP terkait Pemberian Layanan Perizinan (buah)	32 Perizinan dan 6 non perizinan	32 Perizinan dan 6 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	38 perizinan dan 3 non perizinan	N/A
<b>3.4</b>	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>							
1	Rasio Ketergantungan Penduduk di Daerah	35,68	35,23	47,62	47,63	46,89	45,95	48,16

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2020

## **2.5. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Terdapat 29 (dua puluh Sembilan) jenis pelayanan dasar sebagaimana disajikan pada Tabel 2.17 berikut ini.

**Tabel 2.17**  
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Program	Capaian 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>SPM PENDIDIKAN</b>					
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah WNI usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	56%	DISDIKBUD
2.	Pendidikan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Jumlah WNI usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	105%	DISDIKBUD
3.	Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah WNI usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3,3%	DISDIKBUD
<b>SPM KESEHATAN</b>					
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Dinas Kesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Dinas Kesehatan

No. .....

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Program	Capaian 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan
7.	Pelayanan kesehatan balita	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19,98%	Dinas Kesehatan
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	67,72%	Dinas Kesehatan
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
12.	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan

No. ....

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Program	Capaian 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
<b>SPM PEKERJAAN UMUM</b>					
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum	90,85%	DPUPRKP2
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK)	96,78%	DPUPRKP2
<b>SPM PERUMAHAN RAKYAT</b>					
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/ kabupaten	- Program Pengembangan Perumahan - Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana Alam	100%	DPUPRKP2

No. ....

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Program	Capaian 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah kabupaten/ kota	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	100%	DPUPRPKP2
<b>SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
20	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase tingkat gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang tertangani	100%	DINAS SATPOL PP
21	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Pelayanan informasi rawan bencana	100%	BPBD
22	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD
23	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	BPBD
<b>SPM SOSIAL</b>					

No. ....

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Program	Capaian 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
25	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	Dinas Sosial
26	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	Dinas Sosial
27	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	Dinas Sosial
28	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	Dinas Sosial
29	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	Dinas Sosial

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2020

## **2.6. ASPEK KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH ATAU BUMD**

Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD. Pada hakikatnya BUMD mempunyai peran yang strategis dalam era otonomi daerah saat ini. Daerah memiliki 3 (tiga) BUMD yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;
2. PD BPR Kota Sukabumi; dan
3. PD Waluya.

### **2.6.1. PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi**

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan suatu perusahaan yang berdiri sendiri dan berbentuk badan hukum, terlepas dari administrasi anggaran umum Pemerintah Daerah. Fungsi PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah sebagai penyedia air bersih atau air minum untuk masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut kegiatan perusahaan meliputi:

1. pelayanan air bersih atau air minum melalui perpipaan beserta perangkatnya;
2. pelayanan air bersih atau air minum melalui non perpipaan; dan
3. usaha lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja pendapatan serta perhitungan laba rugi PDAM Tirta Bumi Wibawa tahun 2013-2019 disajikan masing-masing pada Tabel 2.18 dan Tabel 2.19 berikut ini.



**Tabel 2.18**  
**Kinerja Pendapatan PDAM Tirta Bumi Wibawa Tahun 2013-2019**

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Pendapatan Operasional</b>							
	a. Pendapatan Air (dalam juta)	17.815,4	17.946,7	18.641,3	19.404,7	19.355,2	22.220,5	24.390,7
	b. Pendapatan Non Air	1.899,8	2.010,5	1.457,2	1.308,4	1.120,5	1.931,4	1.524,2
	<i>Jumlah</i>	<i>19.715,2</i>	<i>19.957,3</i>	<i>20.098,5</i>	<i>20.713,1</i>	<i>20.475,8</i>	<i>24.151,9</i>	<i>25.914,9</i>
2	<b>Pendapatan Non - Operasional</b>							
	(Bunga Deposito, Jasa Giro, Jasa Sewa Rumah Dinas, Piutang Rekening Air, Rupa-rupa dan Pendapatan Diluar Usaha Lainnya)	162,5	361,9	225,2	274,9	158,9	1.290,6	1.179,6
	<b>Jumlah Total</b>	<b>19.877,8</b>	<b>20.319,3</b>	<b>20.323,8</b>	<b>20.988,1</b>	<b>20.634,7</b>	<b>25.442,5</b>	<b>27.094,5</b>

*Sumber : PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi*

**Tabel 2.19**  
**Perhitungan Laba Rugi PDAM Tirta Bumi Wibawa Tahun 2013-2019**

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan Usaha	19.715,2	19.957,3	20.098,5	20.713,1	20.475,8	24.151,9	27.094,5
2	Beban Langsung Usaha	5.532,8	5.783,8	6.857,3	6.110,5	5.993,4	6.749,7	13.450,1
	<b>Labar/Rugi Kotor Usaha</b>	<b>14.182,3</b>	<b>14.173,5</b>	<b>13.241,2</b>	<b>14.602,6</b>	<b>14.482,2</b>	<b>17.402,2</b>	<b>19.189,4</b>
3	Beban Tidak Langsung Usaha	13.768,2	13.828,6	12.095,3	13.625,6	12.573,8	16.772,1	17.985,5
	<b>Labar/Rugi Usaha</b>	<b>414,1</b>	<b>344,8</b>	<b>1.145,8</b>	<b>976,9</b>	<b>1.908,4</b>	<b>630,1</b>	<b>1.2043,9</b>
4	Pendapatan/Beban di Luar Usaha	155,9	314,3	213,6	223,4	152,6	134,7	165,3
	<b>Labar/Rugi Sebelum Pajak</b>	<b>570,1</b>	<b>659,2</b>	<b>1.359,5</b>	<b>1.200,4</b>	<b>2.061,1</b>	<b>764,8</b>	<b>2.218,1</b>
5	Pajak PPH 29	-	-	180,09	-	-	-	-
	<b>Labar/Rugi Bersih</b>	<b>570,1</b>	<b>659,2</b>	<b>1.179,4</b>	<b>1.200,4</b>	<b>2.061,1</b>	<b>764,8</b>	<b>1.737,0</b>

*Sumber : PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi*

Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

1. PDAM .....

1. PDAM Tirta Bumi Wibawa belum dapat memenuhi kepastian mengenai kualitas dan kontinuitas kepada pelanggan;
2. tingkat kehilangan air masih tinggi sebesar disebabkan jaringan serta jenis pipa transmisi dan distribusi sudah tua dan tidak memadai ; dan
3. keterbatasan dana untuk meningkatkan kinerja aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam menghadapi permasalahan dalam pemberian pelayanan, Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa tetap berupaya melakukan peningkatan kinerja PDAM Tirta Bumi Wibawa melalui beberapa upaya sebagai berikut:

1. upaya untuk memenuhi aspek kualitas dan kontinuitas air yaitu dengan meningkatkan kompetensi SDM dan fasilitas pengujian laboratorium secara bertahap dalam mendukung kualitas air yang didistribusikan sesuai ketentuan serta meningkatkan kapasitas debit air, memperbaiki fasilitas jaringan, dan perpompaan, memperbaiki bocoran pipa pada jaringan transmisi dan distribusi;
2. melakukan efektivitas produksi dengan pengadaan dan pemasangan meter induk produksi serta melakukan rehabilitasi jaringan pipa transmisi dan distribusi; dan
3. pelepasan aset tidak produktif, peningkatan efektivitas penagihan, dan penyertaan modal secara berkesinambungan untuk mengatasi keterbatasan dana.

#### **2.6.2. PD BPR Kota Sukabumi**

Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai usaha simpan pinjam dengan tujuan untuk memberikan pinjaman bagi kalangan ekonomi lemah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, PD BPR menjalankan usaha-usaha sebagai berikut:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk itu;

2. menyalurkan .....

2. menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan pegawai yang mempunyai penghasilan tetap; dan
3. menempatkan dananya yang belum tersalurkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan pada bank lain.

PD BPR mempunyai sasaran yang ingin dicapai yaitu berkembangnya usaha yang sehat dan efisien. Adapun kinerja PD BPR pada tahun 2013 – 2019 disajikan pada Tabel 2.20.

**Tabel 2.20**  
**Kinerja PD BPR Kota Sukabumi Tahun 2013-2019**

No	Uraian	Angka Tahun ... (Dalam Juta)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Realisasi Dana	15.599,2	13.459,3	13.590,5	14.888,1	15.938,9	17.689,9	21.776,4
2	Realisasi Kredit	21.712,8	19.897,9	18.836,4	18.816,3	18.246,4	19.423,3	22.617,5
3	Realisasi Pendapatan	6.174,4	5.683,3	5.486,5	5.660,1	5.368,7	5.485,0	6.113,9
4	Realisasi Biaya	4.351,6	3.822,6	4.184,5	4.220,1	4.922,6	4.329,3	4.693,2
5	Realisasi Laba Kotor	1.823,0	1.861,0	1.302,0	1.440,0	446,1	1.155,8	1.420,8
6	Realisasi Laba Bersih	1.535,4	1.589,8	1.116,5	1.230,0	382,5	991,9	1.201,5
7	Realisasi PAD	844,5	874,3	614,0	676,4	210,3	545,5	660,8

Sumber : PD BPR Kota Sukabumi

Kinerja PD BPR mengalami peningkatan pada tahun 2018, baik dalam realisasi dana, kredit, pendapatan, biaya, laba kotor, laba bersih sehingga realisasi PAD pun meningkat. Terdapat beberapa hambatan yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut :

1. sulitnya mencari tenaga pemasaran yang berpengalaman;
2. suku bunga kredit BPR lebih tinggi dari suku bunga kredit usaha rakyat;
3. rendahnya kualitas SDM BPR khususnya tenaga analis kredit dan Pemasaran; dan
4. beralihnya Debitur BPR ke bank umum yang ditunjuk sebagai pelaksana KUR.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan PD BPR untuk mengatasi hambatan di atas adalah sebagai berikut :

1. menurunkan suku bunga kredit dari 18% (delapan belas persen) menjadi 15% (lima belas persen);

2. membuat produk kredit baru yaitu kredit sertifikasi guru dan produk tabungan anak sekolah;
3. mengikut sertakan karyawan BPR mengikuti pelatihan analisis kredit dan merketing pada lembaga pelatihan LPPI jakarta; dan
4. menawarkan *top up* pinjaman pada debitur yang bagus.

### 2.6.3. PD Waluya Kota Sukabumi

PD Waluya merupakan BUMD yang berbentuk perusahaan atau korporasi. Perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1996 pada tanggal 28 November 1996 dengan nama Perusahaan Daerah Waluya Farma. Dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan masyarakat, mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah, dan terciptanya lapangan kerja, Perusahaan Daerah Waluya Farma berubah menjadi Perusahaan Daerah WALUYA (PD. WALUYA) pada tanggal 30 Desember 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, yang bergerak dalam bidang usaha :

1. perdagangan besar farmasi atau PBF dan pedagang besar alat kesehatan atau PBAK;
2. bidang kesehatan atau apotek; dan
3. usaha dagang dan jasa lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pencapaian kinerja PD Waluya tahun 2017-2019 disajikan pada Tabel 2.21 berikut ini.

**Tabel 2.21**  
**Pencapaian Kinerja PD Waluya Kota Sukabumi**  
**Tahun 2017-2019**

NO	URAIAN	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019
1	Aktiva Lancar	1.097.419.166	411.936.232	361.733.033
2	Aktiva Tetap	1.219.039.030	360.795.070	222.476.110
<b>3</b>	<b>Total Aktiva</b>	<b>2.316.458.196</b>	772.731.302	<b>584.209.143</b>
4	Hutang Jangka Pendek	3.050.179.717	3.691.782.237	3.691.782.237
5	Modal dan cadangan	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
6	Akumulasi Laba/rugi	(8.233.721.521)	(10.419.050.935)	(10.607.573.094)
<b>7</b>	<b>Total Pasiva</b>	<b>2.316.458.196</b>	772.731.302	<b>584.209143</b>

NO	URAIAN	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019
8	Penjualan Laba Bersih	737.477.813	843.209.600	780.154.700
9	Harga Pokok Penjualan	255.449.252	593.107.664	315.051.500
10	Laba atau Rugi Kotor	482.028.561	250.101.936	465.103.200
11	Biaya Penjualan	13.330.183	16.200.000	9.650.000
12	Biaya Umum dan Administrasi	757.435.495	720.596.068	652.402.775
13	Laba atau Rugi Operasi	(288.737.117)	(486.694.132)	(196.949.575)
14	Pendapatan Biaya dan Lain-lain	-	-	-
15	Pendapatan lain-lain	351.696	3.003.008	8.837.531
16	biaya Lain-lain	698.580	474.133	410.115
17	Jumlah Pendapatan biaya dan biaya Lain-lain	346.884	2.528.875	8.427.416
18	Laba atau Rugi Sebelum Pajak	(289.084.001)	(484.165.257)	(188.522.159)
19	Taksiran Pajak	-	-	-
<b>20</b>	<b>LABA / ( RUGI ) BERSIH</b>	<b>(289.084.001)</b>	<b>(484.165.257)</b>	<b>(188.522.159)</b>

Sumber : PD Waluya

Terdapat beberapa hambatan PD. WALUYA yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut :

1. dengan adanya perpindahan poli poli di Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH. Resep Umum (tunai) terjadi penurunan penjualan di Apotik;
2. adanya Peraturan BPJS Kesehatan untuk pembagian rujukan ke Rumah Sakit Tipe A , Tipe B, Tipe C, Tipe D dan Tipe E, berdampak penurunan pada penjualan.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan PD. WALUYA untuk mengatasi hambatan di atas adalah sebagai berikut:

1. kerjasama dengan Rumah Sakit Tipe B, Tipe C, Tipe D dan Tipe E untuk menjemput Resep BPJS (Optik) “
2. letak Lokasi usaha Perusahaan Daerah Waluya Kota Sukabumi yang strategis belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Rencana kerjasama dengan Rumah Sakit R. Syamsudin, SH. dalam pemenuhan kebutuhan Khusus Poli, BPJS Program

Rujukan .....

Rujukan Balik, BPJS P23 Rumah Sakit dan Khusus Pasien rawat inap tunai.

## 2.7. ASPEK KERJASAMA DAERAH

Pasal 195 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

### 2.7.1. Kerjasama Antar Daerah Tahun 2013-2019

Dalam memenuhi aspek kerjasama antar daerah maka kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2013-2019 sebagai berikut meliputi:

**Tabel 2.22**  
**Kerjasama Antar Daerah Tahun 2013-2019**

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
<b>Kerjasama Antar Daerah</b>			
1	Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik	06/MoU/Adm.Pemb .&KD/2014 – 180/Pj.41-Huk/2014	Penyelarasan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di kedua daerah dalam hal penyediaan pelayanan publik
2	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat	119/83/Otdaksm	Penyelenggaraan Transisional Urusan Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3	Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	562/2835/435.104 /2015	Penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum di Lokasi UPT
4	Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	44/PK/2016 - 560/406/Disnaker	Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah di Lokasi/Kawasan Pohorua Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
5	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten	119/178/KB/KS/IX /2017 -	Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
	Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur	050/71/KB/Pemhuk/2017 - 06/MoU/Ekbang&KD/2017 - 510/Pj.49- Hukham/2017 - 188/19/Huk/2017	
6	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung	08/MoU/Ekbang&KD/2017 - 119/3470-Bag.KS	<i>Best practices</i> antar aparatatur pemerintah atau <i>city sharing</i> , menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah
7	Kerja Sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi	130/1618-Diskominfo - 489/295/kominfo/2017	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi <i>Smart City</i> Kota Bandung di Kota Sukabumi
8	Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi	510.8/01/Perj.KS/BPBD/2019 dan 367.1/05/DPK/2019	Dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dan Kota sukabumi
9	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Daerah Sukabumi Provinsi Jawa Barat	100/ pem - phwt / 35. IX / 2019 08 /PKS / Ekbang & KD/2019	Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran di Kawasan Transmigrasi Taluduti Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato
10	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi	134.4/MoU- 19/Bagper/2019 dan 15/MoU/Ekbang&KD/2019	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan publik yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di kedua daerah
11	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat	20/MoU/Ekbang&KD/2020	Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing Daerah guna meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang berkeadilan.

Sumber : Bagian Ekbang dan KD Setda Kota Sukabumi

### 2.7.2. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Berbagai kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang telah dilakukan dari tahun 2013-2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.23**  
**Kerjasama dengan pihak ketiga**

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
<b>Kerjasama Dengan Pihak Ketiga</b>			
1	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan PT. ASKES Cabang Sukabumi	01/MoU/Adm.Pemb.&KD/2013 - 005/MoU/2013	Kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
2	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan PT. TASPEN (Persero)	04/MoU/Adm.Pemb.&KD/2013	Kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
3	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. BUDI BAKTI	04/PKS/Adm.Pemb &KD/2013	Penyelenggaraan Pasar Raya Ramadhan Tahun 2013 M/1434 H di Kota Sukabumi.
4	Perjanjian Kerjasama antara Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Daerah dengan Pemerintah Daerah	02/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014 - 41/PC-IPSI/SMI/I /2014	Perpanjangan Penyediaan Tenaga Pengajar/Pelatih Pencak Silat Pada Jenjang SD, SMP, SMA/SMK Negeri/Swasta di Kota Sukabumi.
5	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. BUDI BAKTI	08/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014	Penyelenggaraan Pasar Raya Ramadhan Tahun 2014 M/1435 H di Kota Sukabumi
6	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi	11/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014- 580.4/02/U/BP/20 14	Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
7	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Birru Wa Taqwa	12/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014- 30/BMT- BWT/XI/2014	Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
8	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Nurul Ummah	13/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014	Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
9	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Amanah Umat	4/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014 - 01.04/B/KBMT- Amat/XI/2014	Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
10	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Syamsul Ulum	5/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014 - 033/B.1/KBMT- SU/XI/2014	5/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 033/B.1/KBMT-SU/XI/2014
11	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi	2/MoU/Adm.Pemb. &KD/2014 - 155/I.O/F/II/2014	Kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
12	Nota Kesepahaman antara Politeknik Negeri Jakarta dengan Pemerintah Daerah	3/MoU/Adm.Pemb. &KD/2014 - 340/PL3/HK/2014	Kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
13	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Daerah dan PT. Telekomunikasi Indonesia	5/MoU/Adm.Pemb. &KD/2014 - K.TEL.066/HK.840/ DTB-/2014	Penyediaan Layanan Information Communication and Technology atau ICT Telkom untuk Daerah Cyber City
14	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Darutaqwa	01/PKS/Adbang&K D/2015	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Daerah
15	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan CV. Beton Team Work	02/PKS/Adm.Bang. &KD/2015 - 007/BTW/PLM/01/ 2015	Penataan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga di Area Lapang Merdeka Daerah
16	Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. BUDI BAKTI	03/PKS/Adbang&K D/2015	Penyelenggaraan Pasar Raya Ramadhan Tahun 2015 M/1436 H di Kota Sukabumi
17	Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah	09/PKS/Adbang&K D/2015 - 580.4/216/BP/201 5	Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
18	Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Birru Wa Taqwa	10/PKS/Adbang&K D/2015 - 21/BMT- BWT/12/2015	10/PKS/Adbang&KD/2015 - Nomor 21/BMT-BWT/12/2015
19	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Ex-depot Pertamina Sukabumi antara PT.	037/K20200/2015- SO - 06/PKS- SM/Admbang&KD/	Adapun lahan yang disewa tersebut akan digunakan sebagai tempat penampungan sementara para



No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
	Pertamina (Persero) dengan Pemerintah Daerah	2015	pedagang Ex-Pasar Pelita
20	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan PT. Indosat	01/MoU/Adbang&K D/2016 - 728/HOD-HODA/LGL/16	Kerjasama Pengembangan Program <i>Smart City</i> di Kota Sukabumi
21	Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Indosat, Tbk	04/PKS/Adbang&K D/2016 - 5100002358	Pemanfaatan Lahan Untuk Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kota Sukabumi.
22	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Darutaqwa	06/PKS/Adbang&K D/2016	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Kota Sukabumi
23	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Supra Primatama Nusantara	09/PKS/Adbang&K D/2016	Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Sukabumi.
24	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Darutaqwa	31/PKS/Ekban&K D/2017	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Kota Sukabumi
25	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Kota Sukabumi	01/MoU/Ekban&K D/2019 dan 0002/UP-R/MOU/I/2019	Kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
26	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Universitas IBN Khaldun Bogor Tanggal: 11 Februari 2019	02/MoU/Ekban&K D/2019 dan 468/K.12/UIKA/2019	Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
27	Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan Institut Pertanian Bogor	03/MoU/Ekban&K D/2019	Penyelenggaraan dan mengembangkan PSDKU IPB Kampus Sukabumi
28	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi	04/Mou/Ekban & KD/2019 dan 544/I.O/F/2019	Kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
29	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Institut Manajemen Wiyata Indonesia (IMWI)	05/Mou/Ekban&K D/2019 dan 151/IMWI/MoU/04/2019	Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
30	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi (STIKES)	06/Mou/Ekban & KD/2019 dan 074/250/IV/STIKES/2019	Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
31	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persatuan Guru Republik Indonesia Sukabumi (STIE PGRI)	07/Mou/Ekban & KD/2019 dan 1660/PKS/STIE-PGRI/KL/VI/2019	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
32	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasim Sukabumi (STIE PASIM)	08/Mou/Ekban & KD/2019 dan 059/ai/SK/STIE-PASIM/KL/IV/2019	Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
33	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi (STAI Sukabumi)	09/Mou/Ekban & KD/2019	Kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para pihak demi kemajuan bersama.
34	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul Ulum (STAI SYAMSUL ULUM)	10/Mou/Ekban & KD/2019 dan 085/SKP/03.07/04/2019	Kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama
35	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	11/Mou/Ekban & KD/2019 dan 639/B.8/STISIP-SU/IV/2019	Kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para pihak

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
	Syamsul 'Ulum (STISIP SYAMSUL 'ULUM)		demi kemajuan bersama
36	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Politeknik Sukabumi	11/Mou/Ekbang & KD/2019 dan 639/B.8/STISIP-SU/IV/2019	Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
37	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI Sukabumi)	13/Mou/Ekbang & KD/2019 dan 173/STKIP-PGRI/KL/2019	Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
38	Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kota Sukabumi dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia	01.a / PKS / Ekbang & KD / 2019	Meningkatkan akses pelayanan bidang kesejahteraan dan Sosial kepada masyarakat kota sukabumi
39	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)	02/PKS/Ekbang & KD/2019 dan 1103/B18/HK/2019	Program Diklat Calon Kepala Sekolah Tahun 2019
40	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan Institut Pertanian Bogor	04/PKS/Ekbang&KD/2019	Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) IPB di Kota Sukabumi
41	Kerja Sama Pemerintah Kota Sukabumi dengan PT. Darutaqwa	07/PKS/Ekbang&KD/2019	Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Kota Sukabumi
42	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan PT. Sentra Teknologi Terapan	19/MoU/Ekbang&KD/2019 dan 003/VIII/MoU/PTSTT/2019	Kerja sama di bidang Penelitian, Pengembangan, sosialisasi, pendampingan, dan Implementasi Metoda Tempat olah sampah Setempat Untuk Listrik Kerakyatan
43	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan PT. Sentra Teknologi Terapan Nomor : 19/MoU/Ekbang&KD/2019	003/VIII/MoU/PTSTT/2019	Kerja sama di bidang Penelitian, Pengembangan, Sosialisasi, Pendampingan, dan Implementasi Metoda Tempat Olah Sampah Setempat Untuk Listrik Kerakyatan
44	Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Universitas Gadjah Mada	21/MoU/Ekbang&KD/2019	Membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara para pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya para pihak untuk mengoptimalkan pembangunan di Kota Sukabumi

Sumber : Bagian Ekbang dan KD Setda Kota Sukabumi

### 2.7.3. Kerjasama Dengan Instansi Lain

Berbagai kerjasama Pemerintah Daerah dengan Instansi lain yang telah dilakukan dari tahun 2013-2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.24**  
**Kerjasama Antar Daerah Tahun 2013-2019**

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
<b>Kerjasama Dengan Instansi Lain</b>			
1	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat	02/MoU/Adm.Pemb &KD/2013 - KEP/416/DL/3/2013 - PRJ-003/PW10/1/2013	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
2	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Institut Pertanian Bogor (IPB)	03/MoU/Admpemk d/2013 - 15/IT3/KsM/2013	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3	Kesepakatan Bersama antara Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah	15/BKS/MoU/04/2013 - 05/MoU/Adm.Pemb &KD/2013	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial dalam Program Kesejahteraan Sosial Terpadu
4	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Daerah	07/HUK/2013 - 06/MoU/Adm.Pemb &KD/2013	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu Menuju Kota Sejahtera
5	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik Daerah	07/MoU/Adm.Pemb &KD/2013 - 050/MoU/BPS Kota SMI/2013	Kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6	Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Pemerintah Daerah	2013-10/MoU/Adm.Pem & KD/2013	Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Percontohan pada Pemerintah Kota Sukabumi
7	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Padjadjaran Bandung	11/MoU/Adm.Pemb &KD/2013	Dalam Pelaksanaan Tugas di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
8	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisakti	001/SPJ/STIET/XI/2013	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
9	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah	105/PKS/cb/PLPBK/2013 - 02/PKS/Adm.Pemb &KD/2013	Pelaksanaan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas
10	Pendidikan dan Pelatihan Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pusat	03/PKS/Adm.Pemb &KD/2013-87A/PP.4/2013	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Spesialisasi atau DTSS Pelayanan Perpajakan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2013
11	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah	162/NPK/cb/2013-09/PKS/Adm.Pemb. &KD/2013	Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2013
12	Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	13/PKS/Adm.Pemb. &KD/2013 - PRJ-21/PW 10/1/2013	Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi
13	Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Sukabumi	07/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014 - 0053.SP/040/AREA SKI/2014	Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Wilayah Kota Sukabumi.
14	Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	16/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014 - 242/KTR/V-	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
	Kesehatan Cabang Sukabumi	02/1214	Kota Sukabumi
15	Nota Kesepahaman antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi dengan Pemerintah Daerah	W.11.PAS.PAS21.PK.01.07.01-1261 - 07/MoU/Adm.Pemb.&KD/2014	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi, Sesuai Dengan Fungsi dan Kewenangan Masing-masing.
16	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0607 Kota Sukabumi	01/MoU/Adbang&K D/2015 - B/71/I/2015	Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki para pihak dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Daerah
17	Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi dengan Pemerintah Daerah	12/PKS/Adbang&K D/2015 - 930/KTR/V-02/1215	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk memenuhi kewajiban secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
18	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi	12/PKS/Adbang&K D/2015 - 930/KTR/V-02/1215	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi
19	Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Daerah	HK.201/1/7/STTD.2015 - 05/PKS/Adbang&K /2015	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat
20	Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Wali Kota	17.21/MoU/1/09/2016 - 02/MoU/Adbng&KD /2016	Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
21	Perjanjian Kerjasama antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah	01 Tahun 2016 - Nomor 01/PKS/Adbang&K D/2016	Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI Rahmatan Lil'Alamin Berbasis IC pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di Daerah
22	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Tim Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi di Luar Domisili/Multikampus Institut Pertanian Bogor di Sukabumi	06/PKS/Adbang&K D/2016 - B-3545/0.2.14/GS.I/11/2016	Dukungan kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi di Luar Domisili/Multikampus Institut Pertanian Bogor di Daerah
23	Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah	238/WPB.13/BD.03 /2016 - 08/PKS/Adbang&K D/2016	Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
24	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi	11/PKS/Adbang&K D/2016 - 314/KTR/V-02/2016	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
25	Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah	20/KOMINFO/HK.03.02/05/2017 - 04/MoU/Ekban&K D/2017	Kerjasama dalam implementasi gerakan menuju 100 <i>Smart City</i> di Daerah
26	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa	05/MoU/Ekban&K D/2017 - MoU-16/PW10/3/2017	Pengembangan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i> di lingkungan Pemerintah Daerah
27	Nota Kesepahaman antara Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) dengan Pemerintah Daerah	817/BBRVBD/II.1/RH.01.01/12/2017 - 10/MoU/Ekban&K D/2017	Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
28	Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Dengan PT. PLN	01/PKS/Ekban&K D/2019 dan 0012/AGA.01/UP3.	Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Wilayah Kota Sukabumi

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
	(Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sukabumi	SKI/2019	
29	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi	06 / PKS / Ekbang & KD / 2019 dan Nomor : B-04/M.2.13/Gs.1/08 /2019	Pelaksanaan Koordinasi Dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Ruang Lingkup Penyelesaian permasalahan hukum yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi dengan Antara Digital Media	09/PKS/Ekbang & KD/2019	Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan pendapat umum dalam mendukung pembangunan Nasional
31	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Koperasi Karyawan – PLN SKI	17 Desember 2019 nomor: 11/PKS/Ekbang&KD/2019	Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bergulir Program Kredit Anyelir Bagi Wirausaha Baru Sukabumi Kece
38	Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi	12 / PKS / Ekbang & KD / 2019 dan Nomor : 520/KTR/V-02/2019	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
39	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi	13 / PKS / Ekbang & KD / 2019 dan Nomor : 547/KTR/V-02/1219	Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
40	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat	14/MoU/Ekbang&KD/2019	Meningkatkan kualitas produk industri kecil menengah di Kota Sukabumi melalui standarisasi dan sertifikasi mutu halal
41	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat	530 / 348 / KOPDAGRIN /IV / 2019 / 9 APRIL 2019 dan 133A / SK / LPPOM / MUI-JB / IV / 2019	Sertifikasi Halal untuk Industri Kecil dan Menengah di Kota Sukabumi
42	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Kantor Pertanahan Kota Sukabumi	206/PKS-32-72/IV/2019	Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah.
43	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Dompot Anak Bangsa	22/MoU/Ekbang&KD/2019	Optimalisasi peran dunia usaha dalam pencapaian Misi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Sumber : Bagian Ekbang dan KD Setda Kota Sukabumi

## 2.8. CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE 2013-2018

Pengukuran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Daerah didasarkan pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Kebijakan .....

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun

2013 – 2018 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018.

### **2.8.1. Pencapaian Misi I RPJMD Tahun 2013-2018**

Misi I RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa dan Berilmu didukung oleh 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai. Pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah;
2. meningkatnya aktivitas masyarakat dalam kehidupan beragama dan kesetiakawanan sosial;
3. meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan;
4. terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas;
5. terwujudnya pendidikan budi pekerti, wawasan kebangsaan, dan kearifan lokal bagi masyarakat; dan
6. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca.

Capaian Misi I RPJMD pada tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.25 berikut ini.

**Tabel 2.25**  
**Nilai Capaian Misi I RPJMD pada Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Jumlah Indikator	Belum Memenuhi Target		Cukup Memenuhi		Memenuhi Target	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2014	13	0	0,00	0	0,00	13	100,00
2	2015	7	0	0,00	0	0,00	7	100,00
3	2016	9	0	0,00	1	11,11	8	88,89

4	2017	9	0	0,00	2	22,22	7	77,77
5	2018	9	1	11,11	1	11,11	7	77,77

Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2014-2015 seluruh target pada Misi I berhasil dicapai. Persentase ketercapaian indikator Misi I pada tahun 2016–2018 cenderung mengalami penurunan dengan persentase sebesar 88,89% (delapan puluh delapan koma delapan puluh sembilan persen) pada tahun 2016 dan 77,77% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen) pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2016 dan 2018 terdapat 1 (satu) indikator yang termasuk ke dalam kategori cukup memenuhi target dengan persentase masing-masing 11,11% (sebelas koma sebelas). Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori belum memenuhi target.

### **2.8.2. Pencapaian Misi II RPJMD Tahun 2013-2018**

Misi 2 RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil, Profesional, Mendengar, dan Melayani Masyarakat Dengan Ikhlas, didukung 9 (sembilan) sasaran yang akan dicapai, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. meningkatnya mutu pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu;
3. meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan publik;
4. meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi;
5. meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
6. meningkatnya penegakan dan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak; dan
7. meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan.

Capaian Misi II RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.26 berikut ini.

Tabel .....

**Tabel 2.26**  
**Nilai Capaian Misi 2 RPJMD pada Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Jumlah Indikator	Belum Memenuhi Target		Cukup Memenuhi		Memenuhi Target	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2014	18	1	5,55	1	5,55	16	88,90
2	2015	15	1	6,67	-	-	14	93,33
3	2016	14	1	7,14	-	-	13	92,86
4	2017	14	0	0,00	0	-	14	100,00
5	2018	14	1	7,14	-	-	13	92,86

Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2013-2016 mayoritas indikator telah berhasil memenuhi target RPJMD. Terdapat masing-masing 1 (satu) indikator yang tidak berhasil mencapai target pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2017, seluruh indikator sudah memenuhi target. Namun pada Tahun 2018, kembali terdapat 1 (satu) indikator belum memenuhi target.

### **2.8.3. Pencapaian Misi III RPJMD Tahun 2013-2018**

Misi III RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Lebih Baik dan Berkualitas diukur melalui 17 (tujuh belas) sasaran yang akan dicapai, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi, dan daya saing di setiap jenjang pendidikan;
2. meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
3. meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat;
4. terkendalinya kasus penyakit menular;
5. terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
6. meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan;
7. meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat;
8. meningkatnya kemandirian masyarakat dalam promotif dan preventif bidang kesehatan; dan
9. meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standar;

j. terkendalinya .....



- j. terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera;
- k. meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan;
- l. meningkatnya kualitas dan kuantitas potensi pemberdayaan masyarakat;
- m. terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi;
- n. meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota;
- o. meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota; dan
- p. meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan.

Capaian Misi III RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.26 berikut ini.

**Tabel 2.27**  
**Nilai Capaian Misi 3 RPJMD Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Jumlah Indikator	Belum Memenuhi Target		Cukup Memenuhi		Memenuhi Target	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2014	50	4	8,00	5	10,00	41	82,00
2	2015	43	4	9,30	1	2,33	38	88,37
3	2016	44	2	4,55	0	0,00	42	95,55
4	2017	45	0	0,00	2	4,55	43	95,45
5	2018	45	1	2,22	1	2,22	43	95,55

Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target pada tahun 2014-2018 dengan jumlah masing-masing 4 (empat) indikator pada tahun 2014 dan 2015, 2 (dua) indikator pada tahun 2016, dan 1 (satu) indikator pada tahun 2018. Pada tahun 2017, semua indikator sudah tercapai. Adapun tingkat ketercapaian indikator yang memenuhi target semakin meningkat tiap tahun dari 82,00% (delapan puluh dua koma nol nol persen) pada tahun 2014 menjadi 95,55% (sembilan puluh lima koma lima puluh lima persen) pada tahun 2018.

#### **2.8.4. Pencapaian Misi IV RPJMD Tahun 2013-2018**

Misi .....

Misi IV RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah diukur melalui 17 (tujuh belas) sasaran yang akan dicapai. Pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku;
2. meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN;
3. meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja;
4. meningkatnya partisipasi angkatan kerja;
5. meningkatnya penyerapan tenaga kerja ;
6. meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha;
7. meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi;
8. meningkatnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UKM;
9. meningkatnya iklim usaha perdagangan yang kondusif;
10. meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah;
11. meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha bidang agribisnis;
12. meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk agribisnis;
13. meningkatnya masyarakat kota sukabumi yang mengkonsumsi makanan non beras dan terigu;
14. tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata;
15. terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan dan mengembangkan budaya;
16. meningkatnya pembinaan lembaga atau kelompok seni dan budaya; dan
17. meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi.

Capaian Misi IV RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.28 berikut ini.

Tabel .....

**Tabel 2.28**  
**Nilai Capaian Misi IV RPJMD pada Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Jumlah Indikator	Belum Memenuhi Target		Cukup Memenuhi		Memenuhi Target	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2014	38	4	10,53	3	7,89	31	81,58
2	2015	28	3	10,71	2	7,14	23	82,14
3	2016	28	3	10,71	2	7,14	23	82,14
4	2017	30	0	00,00	1	3,33	29	96,67
5	2018	30	0	00,00	0	0,00	30	100

Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

Mayoritas indikator pada Misi IV RPJMD pada tahun 2014-2018 sudah memenuhi target >80% (delapan puluh persen) meskipun masih ada beberapa indikator yang belum memenuhi target. Dari tabel terlihat bahwa ada peningkatan persentase indikator yang memenuhi target dari 81,58% (delapan puluh satu koma lima puluh delapan persen) pada tahun 2014 menjadi 100% (seratus persen) pada tahun 2018.

#### **2.8.5. Pencapaian Misi V RPJMD Tahun 2013-2018**

Misi V RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan Kota diukur melalui 6 (enam) sasaran strategis yaitu:

1. meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam penanganan resiko bencana;
3. meningkatnya pembinaan politik daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan;
4. terwujudnya kerukunan antar dan inter umat beragama sebagai perwujudan nilai-nilai agama;
5. meningkatnya penanganan persampahan perkotaan; dan
6. meningkatnya kebersihan dan keindahan kota.

Capaian Misi V RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.29 berikut ini.

**Tabel 2.29**  
**Nilai Capaian Misi V RPJMD pada Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Jumlah Indikator	Belum Memenuhi Target		Cukup Memenuhi		Memenuhi Target	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2014	17	-	-	-	-	17	100,00
2	2015	14	-	-	-	-	14	100,00
3	2016	15	-	-	-	-	15	100,00
4	2017	16	-	-	-	-	16	100,00
5	2018	18	-	-	-	-	18	100,00

*Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018*

Pada misi 5, seluruh indikator telah masuk dalam kategori memenuhi target atau sebesar 100% (seratus persen).

Capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.30 berikut ini.

**Tabel 2.30**  
**Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018**

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Misi 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Sumber Daya Manusia yang Beriman , Bertaqwa dan Berilmu</b>																	
1	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah	Program kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar Pemerintah dan Pemda	Indeks reformasi birokrasi	N/A	51,22	53,27	57,27	61,27	65,27	51,22	N/A	50,7	67,92	68,03	68,79	indeks	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Kategori Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	A	A	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	nilai
2	Meningkatnya aktifitas masyarakat dalam kehidupan beragama dan kesetiakawanan sosial.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kenaikan ZIS.	20,66%	22,30%	23,94%	25,58%	27,22%	28,86%	20,66	20,57	24,74	21	70,11%	98,42%	%	Sekretariat Daerah
3	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.	Program pembinaan lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan	Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang mendapat bantuan dari Pemda	N/A	70%	75%	80%	85%	90%	60,00	62,00	72,00	80,00	63,10%	24,00%	%	Sekretariat Daerah

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
4	Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas	80%	82%	84%	86%	88%	90%	80,00	83,00	93,00	100,00	82,04%	107,00%	%	BKPSDM
		Program pendidikan kedinasan	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan	85%	100%	100%	100%	100%	100%	85,00	97,00	102,30	100,00	97,67%	99,00%	%	BKPSDM
5	Terwujudnya pendidikan budi pekerti, wawasan kebangsaan dan kearifan lokal bagi masyarakat.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Cakupan sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum berbasis budi pekerti	N/A	8	11	14	17	21	N/A	12	15	24	17	17	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase siswa yang mendaftar ke SMP yang memiliki ijasah Madrasah Diniyah	40%	40%	50%	100%	100%	100%	40	100,00	71,00	100,00	100%	100%	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
6	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca.	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000	30.000	77.596	50.145	106.342	105.276	181.030	orang/tahun	Dispusip
<p><b>Misi 2 :Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil, Profesional, Mendengar dan Melayani Masyarakat Dengan Ikhlas</b></p>																	
1	Meningkatnya mutu pengawasan dan pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	opini	Inspektorat
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program perencanaan bidang ekonomi	Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD	80	80	80	90	90	90	80	82,19	86,76	91,82	95,54	94,83	%	Bappeda

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan publik.	Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah	51	51	51	51	51	51	51	51	54,04	56,3	62,09	61,62	%	BPKD
			Persentase peningkatan PAD	15	15	15	15	15	15	15	9,5	7,11	6,65	21,59	0,92	%	
4	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi.	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Jumlah OPD yang telah menerapkan e-Gov (terintegrasi)	N/A	N/A	N/A	7	12	13	N/A	N/A	N/A	7	26	38	OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.	Program kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar Pemerintah dan Pemda	nilai rata-rata IKM	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B	nilai	Sekretariat Daerah
		Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah	Jumlah Kelurahan yang berkategori:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		Tingkat Kewilayahan	1. Swasembada	7	7	10	15	18	20	7	3	8	9	13	12	Kelurahan	
			2. Swakarya	21	21	19	15	13	11	21	18	25	24	17	18	Kelurahan	
			3. Swadaya	5	5	4	3	2	2	5	12	0	0	3	3	Kelurahan	
6	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum untuk kepastian hukum	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan kaidah dan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	90	90	90	90	90	90	90	90	100	232,93	89,20	%	Sekretariat Daerah	
7	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	78,76	85	90	92	95	98	78,76	89,93	92,72	94,46	98,5	96,55	%	Disdukcapil
			Cakupan penerbitan kartu keluarga	90	93	94	95	96	98	90	N/A	105,57	97,87	97	94,32	%	
			Cakupan penerbitan akta kelahiran	89,19	90	92	94	96	98,00	89,19	92,3	100,28	92,57	94,84	97,99	%	
			Cakupan penerbitan akta kematian	-	40	50	60	70	80	40	N/A	139	73,08	81	64,64	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
8	Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan kearsipan daerah.	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah OPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku	N/A	1	2	3	4	5	N/A	1	2	3	4	5	OPD	Dispusip	
			Persentase kearsipan daerah berbasis digital	N/A	N/A	5	10	15	20	N/A	N/A	5	10	15	20	%	Dispusip	
<b>Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Lebih Baik dan Berkualitas</b>																		
1	Meningkatnya mutu , relevansi dan daya saing pelayanan pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM(APM) SD/MI/ Paket A	99,7	99,8	99,85	99,9	99,93	99,95	99,7	84,75	79,73	96,38	96,7	97,2	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			APM(APM) SMP/MTs/ Paket B	98,6	98,8	99,0	99,2	99,5	99,70	98,60	71,29	70,63	96,13	96,5	96,4	%		
		Program Pendidikan Menengah	APM(APM) SMA/SMK/ Paket C	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,56	62,34	97,73	97,8	92,87		%
			Angka Melanjutkas (AM) SMA/SMK/MA ke perguruan tinggi	20	23	26	29	31	34,00	N/A	N/A	26,27	29,56	31,4	49,7	%		
		Program manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase kepemilikan kartu cerdas siswa drop out dan miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		%

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
			Presentase siswa rawan DO SMA, SMK dan MA.	<18	<18	<18	<18	<18	<18	<18	15	7,14	5,72	5,72	0,11	%	
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	9,53	9,56	9,6	9,7	9,72	9,73	9,53	9,53	9, 57	9,75	9,71	9,73	Tahun	
2	Meningkatnya kinerja pendidik, tenaga kependidikan dan pengawas pendidik.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah kualifikasi S2	9	10	11	11,5	12	12,5	9	12	13,75	13,8	8,1	8,2	%	
3	Meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu	130	130	135	130	125	120	130	N/A	127,31	97,64	116,47	116,73	per 100,000 KH	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka kematian bayi	9,5	9,5	10	9,5	9	8,5	9,5	7,11	7,96	7,65	6,82	5,86	per 1000 KH	Dinas Kesehatan
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	N/A	N/A	11	11	10,5	10	11	N/A	5,43	6,46	6,31	3,88	%	
			Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	N/A	N/A	10	9	8	7	10	N/A	4,59	5,57	7,75	6,05	%	
4	Terkendalinya kasus penyakit menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular	100	100	100	100	100	100	100	N/A	120,91	108,64	107,87	109,29	%	
5	Terwujudnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	45	50	55	60	65	70	70	N/A	53,73	88,13	126,15	135,71	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1. Program pelayanan Kesehatan untuk penduduk miskin 2. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya, 3. Program Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah Rumah Sakit yang di fasilitasi Pemerintah Daerah	0	0	1	0	0	0	N/A	N/A	1	N/A	1	0	unit	
6	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	0	0	100	100	100	100	N/A	N/A	119,72	89,4	100	100,24	%	Dinas Kesehatan
7	Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	95,71	101,45	103,3	100,13	100	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	kesehatan masyarakat		yang berkualitas sesuai kebutuhan														
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan legalitas dan keamanan produk makanan PIRT	100	100	100	100	100	100	100	66,00	104,4	100,11	108,65	100	%	
8	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam promotif dan preventif bidang kesehatan	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri	3	N/A	5	10	15	20,00	5	N/A	3,00	12,12	15,15	20,00	%	
9	Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standar	Program Pangadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase pencapaian nilai akreditasi rumah sakit versi 2012	N/A	50	50	60	70	80	N/A	N/A	80	87,7	96,23	96,23	%	RSUD R. Syamsudin, SH
10	Terkendalinya pertumbuhan pendu-duk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera	Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Program Keluarga Berencana	Rata-rata usia nikah pertama wanita	21,30	21,30	21,30	21,32	21,32	21,32	21,3	23,23	23,28	23,35	21,32	23,28	tahun	1. Disdukcapil 2. DP2KBP3 APM
		Program Penyiapan tenaga pendamping	Persentase keluarga prasejahtera	25,92	25,45	25,05	24,60	24,15	23,70	23,7	22,77	22,95	22,75	22,7	22,7	%	

No. ....

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		kelompok bina keluarga	dan sejahtera I														
		Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi dan Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	67,10	67,20	67,45	67,60	67,70	67,75	67,1	72,6	73,57	73,20	74,14	75,09	%	
11	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase anggota parlemen perempuan	10	30	30	30	30	30	10	16,67	16,67	17,24	17,14	17,14	%	DP2KBP3 APM
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Partisipasi pekerja Perempuan di Lembaga Eksekutif	14,97	15,37	15,77	16,17	16,57	16,97	14,97	54,68	N/A	27,03	27,21	46,91	%	
			Persentase realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	59	60	65	70	75	80	50	N/A	96,34	91,97	100	100	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35,45	35,5	35,55	35,61	35,69	35,78	35,45	35,56	35,6	35,82	36,01	59,14	%	
12	Meningkatnya kualitas dan kuantitas potensi pemberdayaan masyarakat	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/keurahan	Persentase posyandu strata mandiri	9,62	20	30	40	50	60	9,62	N/A	26,4	30,97	47,57	57,17	%	
			Persentase LPM berprestasi	58,54	58,54	60,98	63,41	65,85	68,29	58,54	N/A	78,05	78,05	75	75	%	
13	Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penanganan PMKS	20	25	30	35	40	45	20,00	16,18	29,00	43,25	41,78	53,60	%	Dinas Sosial



No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
14	Terwujudnya kota yang teratur sesuai penataan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian fungsi lahan dengan dokumen tataruang hasil pengendalian pemanfaatan ruang	60	70	75	80	85	90	60	N/A	75	75	87	93,53	%	DPUPRPKP2
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH : Hutan Kota	3,18 Ha	3,78 Ha	7,08 Ha	9,08 Ha	10,08	11,08	3,18	4,8	7,09	7,09	12,18	12,18	Ha	Dinas Lingkungan Hidup
			Luas RTH : Taman kota dan jalur hijau	15Ha	16,50 Ha	16,67 Ha	16,90 Ha	17,1	17,3	15	15,06	15,82	15,69	20,83	24,68	Ha	
		Program Pengelolaan areal pemakaman	Luas RTH : Lahan pemakaman	34,20Ha	34,3	34,4	34,5	34,6	34,7	34,2	34,2	34,44	34,58	35,87	36,07	Ha	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	83,35	83,5	83,63	83,76	83,89	84,02	83,35	84,5	83,65	84,31	84,5	84,3	%	
		Perogram Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	85,15	86,28	85,42	85,82	86,09	86,49	85,15	95,51	85,42	85,82	96,43	97,29	%	
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	63,63	64,3	65,6	68,3	71	72,3	63,63	83,8	65,6	99,96	70,9	87,57	%	
		Program Perlindungan dan	Jumlah kampung iklim	N/A	1	2	3	4	5	N/A	3	4	4	12	16	Ha	Dinas Lingkungan

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		Konservasi Sumber Daya Alam															Hidup
		Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	jumlah sungai bersih dan terpelihara	2	3	4	5	6	7	2	N/A	4	4	6	7	lokasi	
			jumlah lokasi memenuhi baku mutu udara ambien	4	6	8	10	12	14	4	N/A	8	8	12	14	lokasi	
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kawasan kumuh	160	150	140	100	70	30	160	140	100	N/A	97,76	30	Ha	
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	87,02		88,72	90,42	92,12	93,82	95,52	87,02	77,64	90,42	92,12	97,83	95,52	%	DPUPRKP2		
16	Meningkatnya kualitas dan keterse-diaan infrastruktur pendukung kota	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase kondisi jalan baik	66,49	67,27	69	71	73	75	66,49	67,46	70,09	76,62	79,24	91,98	%	Dishub
			Persentase kondisi jalan lingkungan baik	58,14	64,13	68,93	71,28	73,62	75,14	58,14	64,13	68,93	84,58	98,04	81,99	%	DPUPRKP2

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
17	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase fasilitas perlengkapan jalan :														Dishub
			a. Rambu	50	56	62	68	74	80,00	50,00	71,76	73,69	79,92	84,32	85,96	%	
			b. Marka	40	60	80	100	100	100,00	40,00	76,49	99,38	129,38	539,49	679,49	%	
			c. APILL siap ATCS	67	75	83	92	100	100,00	66,67	91,67	0,00	91,67	91,67	100,00	%	
			d. Cermin Tikungan	38	48	58	68	78	88,00	37,50	87,50	127,50	152,50	137,50	175,00	%	
			e. Pagar Pengaman	13	15	17	19	21	23,00	13,00	51,00	56,00	N/A	69,20	70,70	%	
			f. PJU	79	82	86	90	94	97,00	78,75	87,21	92,81	97,36	97,97	102,26	%	
<b>Misi 4 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah</b>																	
1	Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku	Program Peningkatan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Perizinan tepat waktu	75	75	75	80	80	80,00	75,00	75,51	83,00	94,00	95,00	85,00	%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
2	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Nilai Investasi PMA (juta)	45.978	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	45,900	14,760	0,000	0,000	21.500	15.000	juta rp	
			Nilai Investasi PMDN (juta)	125.919	132.214	133.474	134.733	135.990	137.251	125.919	340.131	915.612	458.449	290.721	2.278.380	juta rp	
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	40	45	50	55	60	65	40,00	64,25	59,99	41,8	99,94	71,34	%	Dinas Tenaga Kerja
4	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		Persentase tenaga berbasis kompetensi	N/A	16	N/A	18	19	20	16,00	26,67	33,33	66,67	98,61	45	%	
5	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1038	5000	5000	5000	5000	5000	1.038	5.789	5.297	5.173	5.107	5.049	orang	
6	Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha.	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase peningkatan IKM Produktif	73	75	77	79	81	83	73,00	73,00	73,03	73,98	74,49	74,89	%	Diskopdagrin
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase peningkatan usaha mikro kecil dan menengah	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,50	0,50	85,04	87,34	0,69	0,92	%	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	Jumlah Pengembangan Pasar Rakyat	1	N/A	1	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	unit	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		Dalam Negeri															
7	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan Koperasi Aktif	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50	61,00	58,50	59,79	46,56	47,34	61,15	61,23	%	
8	Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM	Persentase peningkatan LKM : KSP/ USP Aktif	97,3	97,8	98,3	98,8	99,3	99,8	97,30	98,70	96,25	N/A	95,4	95,58	%	
			Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima penguatan permodalan	N/A	200	200	200	200	200	1.681	211	241	285	92	537	ukm	
9	Meningkatnya iklim usaha Perdagangan yang kondusif	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan Pedagang	1	2	2	2	2	2	1	2	14	N/A	2	3	kawasan	
10	Meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras)	120	125	125	125	125	125	120,00	125,00	220,44	188,35	261,61	128,68	%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
			Stabilitas harga dan pasokan pangan	80	80	80	80	80	80	80,00	90,00	98,53	109,11	97,37	111,74	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
			Tingkat keamanan pangan	78	79	80	80	80	80	78,00	80,69	84	92,29	85,45	78	%	
11	Meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha bidang agribisnis	Program Peningkatan kesejahteraan petani dan program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan	Persentase LKM-PUAP dan LKD-Demapan berklasifikasi sehat	20,83	29,17	50	52	54	56,00	20,83	66,00	50,00	50,00	78,57	56,00	%	
			Tingkat keaktifan dan kemandirian lembaga usaha tani	11,03	13	15,86	20,69	25,52	30,34	11,03	20,15	26,92	33,12	36,84	50,00	%	
12	Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk agribisnis	Program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Tingkat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan	N/A	N/A	0,5	1	1,5	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	%	
		Program pengembangan budidaya perikanan dan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Prosentase pelaku usaha perikanan yang menerapkan CBIB/CPIB	20	N/A	45	55	65	75	20,00	N/A	51,22	50	75	80	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dan program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Provititas padi	6,46	6,39	6,49	6,58	6,58	6,78	6,46	N/A	7,44	7,64	7,10	5,95	ton/ha	
		Program penanggulangan penyakit ternak dan program penerapan teknologi peternakan	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki NKV ( Nomor Kontrol Veteriner)	N/A	N/A	20	40	60	80	N/A	N/A	20	36	80,00	100,00	%	
		Program Penataan dan Pengembangan kawasan agribisnis	Terbangunnya kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC)	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	1	1	1	lokasi	
		Program pengembangan budidaya perikanan	Produktifitas budidaya perikanan	20,64 ton/ha	21,11 ton/ha	21,32 ton/ha	21,53 ton/ha	21,75	21,97	20,64	N/A	22,30	22,16	24,59	21,92	ton/ha	
13	Meningkatnya masyarakat Kota Sukabumi yang mengkonsumsi makanan non beras dan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Skor pola pangan harapan (PPH)	72	74	75	76	77	78	72,00	74,82	75,83	84,6	85,8	79,7	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	terigu																
14	Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata	Program Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Waktu kunjungan wisata	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	2	4	hari	Disporapar
			jumlah wisatawan	95.700	105.770	110.000	115.000	120.000	125.000	95.700	141.300	127.235	117.638	212.713	188.928	orang	
15	Terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan dan mengembangkan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	gedung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya	Program ekonomi kreatif berbasis seni budaya	Jumlah event pagelaran budaya	1	1	6	6	6	6	1	3	4	4	6	6	event	Disporapar
17	Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat regional/ nasional	33,33	33,33	75	80	90	90	33,33	37,00	76	76	75	78	%	



No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
<b>Misi 5 : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan Kota</b>																		
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Program pemeliharaan kamtramtibnas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	N/A	N/A	55	65	80	92,50	N/A	75,00	85,00	85,00	81,00	89,60	%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase unjuk rasa yang terkendali	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pengendalian keamanan lingkungan	N/A	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	100	%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program pemeliharaan kamtramtibnas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	90	95	95	95	95	95	95	90	100	100	100	100	100	%	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Mitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase penurunan tingkat tawuran pelajar	N/A	10	20	30	40	50,00	N/A	34,48	65,51	72,14	72,41	68,97	%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

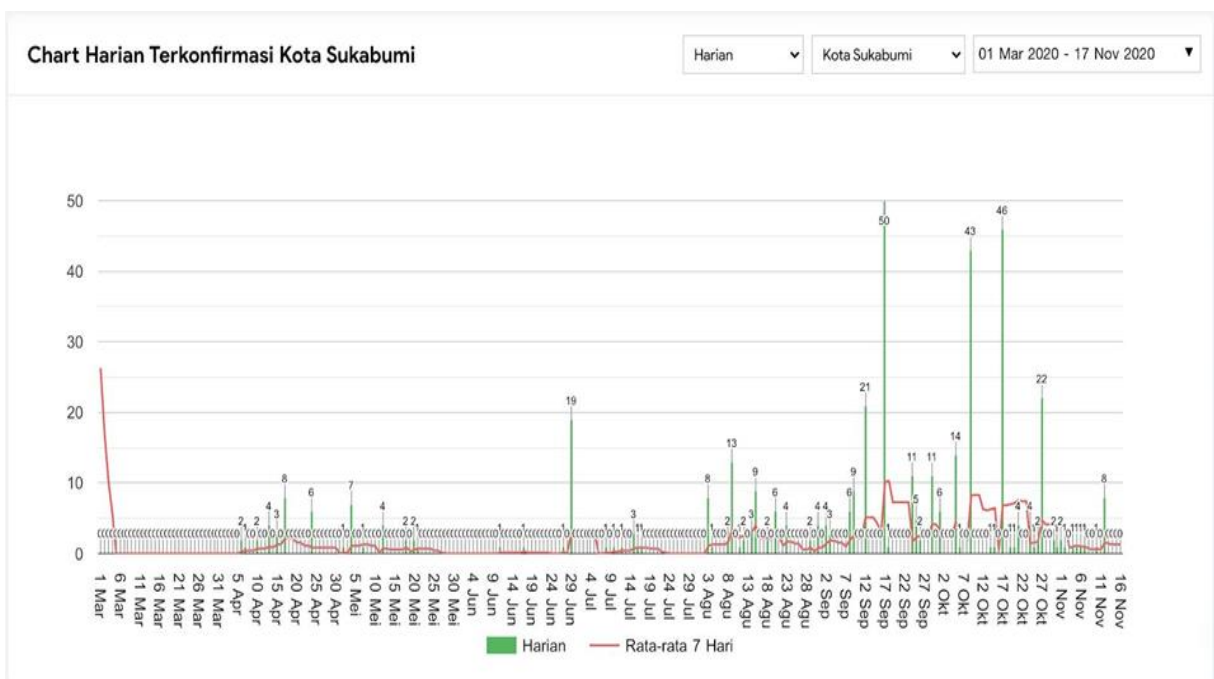
No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
2	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penanganan resiko bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase tingkat kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana	1	1	1,05	1,1	1,16	1,22	1,00	1,00	1,00	1,10	1,16	1,22	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Tertanganinya korban bencana dari kejadian bencana	N/A	80	80	90	90	90,00	N/A	N/A	N/A	100,00	90,00	90,00	%	
			Zona tangguh bencana	N/A	N/A	N/A	1	1	2,00	N/A	N/A	N/A	2,00	1,00	9,00	ZTB	
3	Meningkatnya pembinaan politik daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan	Program Pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada	76,79	77	0	0	0	78,00	76,79	80,26	N/A	N/A	0,00	78,10	%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang terdaftar	45	60	70	80	80	80,00	45,00	62,98	71,90	80,29	81,07	81,94	%	
4	Terwujudnya kerukunan antar dan inter umat beragama sebagai perwujudan nilai-nilai agama	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik inter dan antar umat beragama	22,85	10	10	10	10	10,00	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
5	Meningkatnya penanganan persampahan perkotaan	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase reduksi sampah kota	1,25	1,84	2,55	3,23	3,88	4,51	N/A	N/A	N/A	6,16	6,37	5,86	%	Dinas Lingkungan Hidup
6	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	jumlah jalan tertib sampah	7	8	9	10	11	12	0	0	9	9	12	13	ruas jalan	
			jumlah perumahan tertib sampah	4	5	6	7	8	9	0	0	6	6	8	9	lokasi	
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH taman Kota dan jalur hijau dalam kondisi baik	62	68	73	77	81	86	N/A	N/A	79,2	76,8	86	86	%	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Luas lahan ruang aktivitas perekonomian dan pemerintahan baru	0	0	4,5	2,5	0	0	0	0	3,8	8,7	0	0	ha
7	Meningkatnya biopori dan tanaman yang menyerap air	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah RTH Jalur Hijau	22	22	24	26	28	30	0	0	0	0	28	31	lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah RTH Taman Kota	17	19	21	23	25	27	0	0	0	0	25	47	lokasi	

2.9. KONDISI .....

### 2.9. KONDISI PASCA PANDEMI COVID-19

Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan kesehatan muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, termasuk dampak yang terjadi di Daerah. Per tanggal 17 November 2020, total jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Sukabumi menjadi sebanyak 549 orang. Dari total kasus positif Covid-19 tersebut, 28 pasien saat ini menjalani perawatan dan 387 pasien dinyatakan berhasil sembuh dari penyakit Covid-19. Dan pasien positif yang meninggal sebanyak 5 orang.



**Gambar 2.22**  
**Sebaran Pasien Terkonfirmasi di Kota Sukabumi**

Secara sebaran kasus terkonfirmasi positif di Daerah relatif rendah dengan angka di bawah 10 kasus per hari dalam rentang pengamatan dari 1 Maret 2020 sampai dengan November 2020. Beberapa lonjakan kasus terjadi pada 29 Juni 2020 dan terdapat kenaikan kasus yang cukup tinggi mulai dari 9 September 2020, dan mencapai titik puncak di 17 September 2020 dengan 50 kasus terkonfirmasi. Demikian pula di periode bulan Oktober 2020, kasus harian berada di atas rata-rata dan bahkan mencapai kembali titik puncak 46 kasus positif terkonfirmasi di 17 Oktober 2020.

Di bulan November, tidak terdapat lonjakan pada kasus positif terkonfirmasi kecuali hanya pada tanggal 11 November sebanyak 8 kasus terkonfirmasi sebagai titik tertinggi. Dengan tren kasus terkonfirmasi positif yang mulai melandai di bulan terakhir, diharapkan kasus positif makin menurun, sehingga perhatian khusus Pemerintah Daerah bisa fokus dalam melakukan pemulihan atas dampak covid19 tersebut di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Pemerintah pusat dan Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran dan penularan covid19 tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Keputusan (SK) bernomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam SK Kementerian Kesehatan tersebut, hanya disebutkan PSBB berlangsung untuk masa terpanjang inkubasi virus atau 14 hari. SK Kementerian Kesehatan tersebut merupakan pencetus yang melahirkan kebijakan lanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian memberlakukan penerapan PSBB di seluruh Wilayah Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan PSBB di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona virus Disease* 2019 yang efektif dimulai pada 6 Mei 2020 sampai dengan 30 Mei 2020. Kemudian, dikarenakan tidak terjadinya penurunan kasus konfirmasi positif di Jawa Barat, maka dikeluarkan kembali perpanjangan PSBB sampai dengan 12 Juni sebagaimana ditetapkan dalam Lembaran Keputusan Gubernur Jawa Barat bernomor 443/Kep.287-Hukham/2020.

Daerah menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi dengan mengeluarkan instrumen kebijakan berupa Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid19 di Wilayah Kota Sukabumi. Diantara peraturan yang paling penting terkait dengan PSBB yang kemudian akan memberikan dampak ke beberapa sektor kehidupan masyarakat adalah Pasal 3

ayat 4 yang memberikan pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor;
- kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- kegiatan sosial dan budaya; dan
- pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Pemerintah Daerah juga mengeluarkan kebijakan tambahan untuk memperkuat Peraturan Walikota sebelumnya yaitu Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid19 di Daerah. Dari instrumen kebijakan kedua ini diharapkan masyarakat serius untuk mematuhi aktivitas PSBB dan aparat Pemerintah Daerah memiliki instrumen hukum untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat khususnya di Daerah.

## **2.10. CAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S**

*Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berperan penting sebagai acuan dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan. TPB dapat menjadi instrumen dalam perumusan isu strategis untuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan Program atau KRP, untuk menjamin bahwa KRP yang disusun dapat mendukung pencapaian TPB, mengingat pencapaian TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Terdapat empat pilar utama TPB yakni sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Keempat pilar dijabarkan ke dalam 17 tujuan TPB yang masing-masing tujuan TPB memiliki indikator yang berperan sebagai instrument penilaian

terhadap .....

terhadap pencapaian target Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, isu-isu strategis – yang mencakup aspek ekonomi, sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan – berkaitan erat dengan pencapaian TPB seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.23 berikut ini.



**Gambar 2.23**  
**Kaitan Antara Aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan dengan**  
**Pencapaian TPB**  
(Sumber : Folke, dkk, 2016)

Gambar 2.23 di atas menceritakan bahwa kondisi lingkungan atau *biosphere* merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

### **2.10.1. Kondisi Umum Capaian Target TPB**

Berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator berdasarkan kondisi geografis, terdapat 222 indikator TPB terkait kewenangan kota. Capaian setiap indikator TPB dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 menurut Lampiran Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Capaian TPB digolongkan kedalam lima kategori, yakni “Telah

mencapai .....

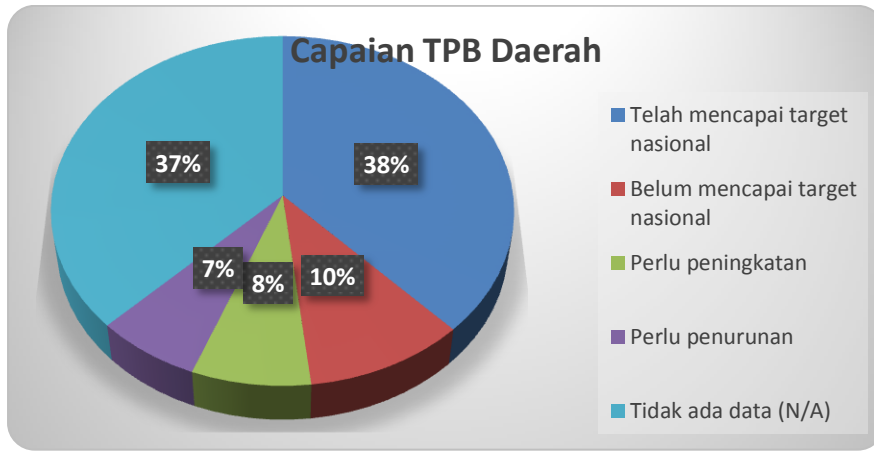
mencapai target nasional”, “Belum mencapai target nasional”, “Perlu peningkatan”, “Perlu penurunan”, serta “Tidak ada data (N/A)”. Rangkuman capaian indikator TPB Kota Sukabumi ditunjukkan pada Tabel 2.31 berikut ini.

**Tabel 2.31**  
**Capaian TPB Daerah**

	<b>TPB</b>	<b>Jumlah indikator</b>	<b>Telah mencapai target nasional</b>	<b>Belum mencapai target nasional</b>	<b>Perlu peningkatan</b>	<b>Perlu penurunan</b>	<b>Tidak ada data (N/A)</b>
1	Tanpa Kemiskinan	25	10	5	5	2	3
2	Tanpa Kelaparan	11	6	1	0	4	0
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	12	4	3	6	9
4	Pendidikan Berkualitas	13	8	3	1	0	1
5	Kesetaraan Gender	14	8	0	0	0	6
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	18	3	4	1	0	10
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	0	0	0	0	2
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	19	0	1	2	0	16
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	13	1	0	2	0	10
10	Berkurangnya Kesenjangan	6	2	1	1	0	2
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	20	7	2	0	2	9
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	5	3	1	0	0	1
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	2	1	0	0	1	0
14	Ekosistem Laut	0	0	0	0	0	0
15	Ekosistem Darat	4	3	0	0	0	1
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	21	9	1	1	0	10
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	15	11	0	1	0	3
<b>Total</b>		<b>222</b>	<b>84</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>83</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2018



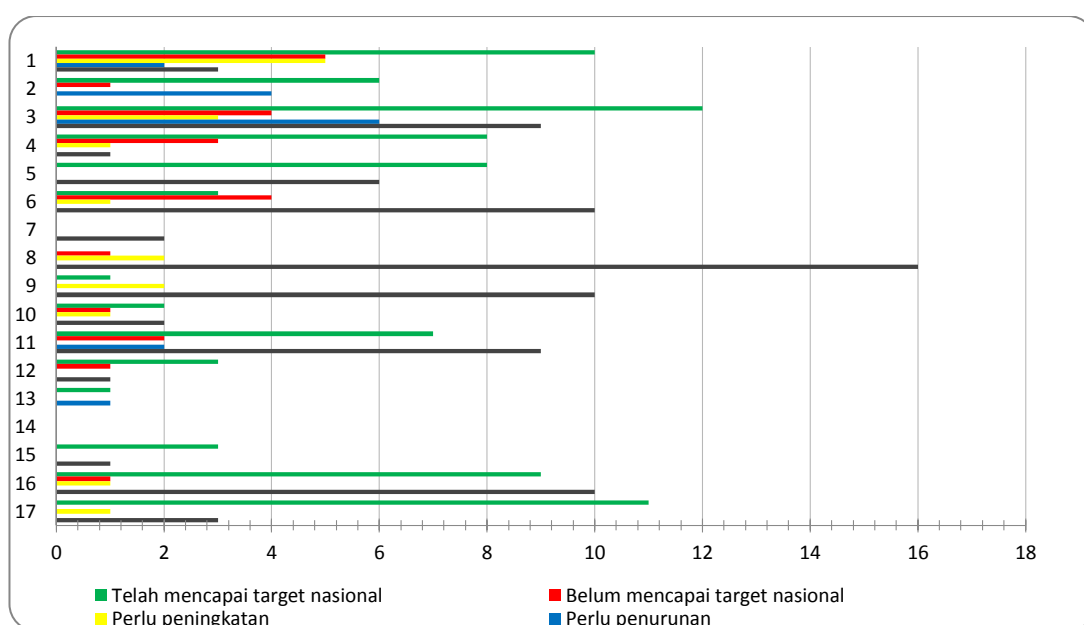


**Gambar 2.24**  
**Capaian TPB Daerah**  
(Sumber : Hasil analisis 2018)

Indikator TPB di Daerah yang telah mencapai target nasional paling banyak adalah tujuan TPB 03 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) dengan jumlah 34 (tiga puluh empat) indikator. Selanjutnya, pencapaian target nasional paling banyak kedua dan ketiga ada pada tujuan TPB 01 dan TPB 16 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) dengan jumlah 25 (dua puluh lima) dan 21 (dua puluh satu) indikator. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbesar dan masih belum diketahui *gap*-nya dengan jumlah terbanyak juga terdapat di TPB 03. Secara lebih rinci, indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbagi atas indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target serta indikator TPB sudah dilaksanakan dan belum mencapai target.

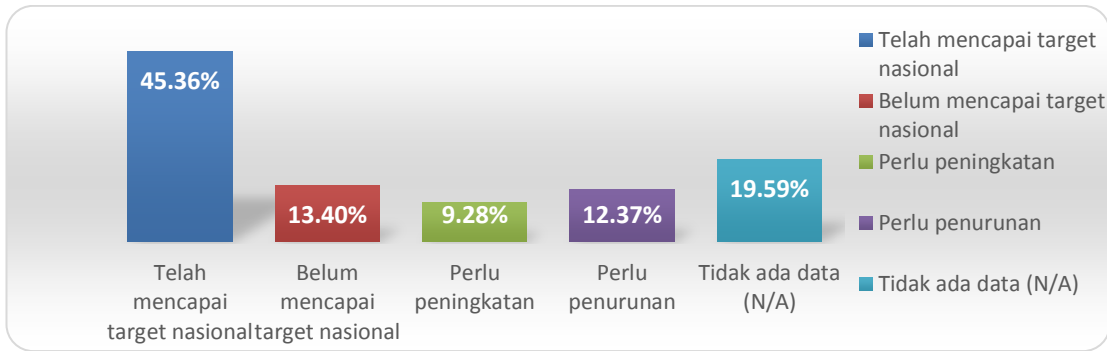
Indikator TPB yang perlu dilakukan penurunan dengan jumlah terbanyak yaitu pada tujuan TPB 02. Selanjutnya, terdapat tujuan TPB dengan indikator yang memiliki kriteria perlu pendataan terbanyak ada pada tujuan TPB 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya). Disisi lain, terdapat indikator TPB yang hanya memiliki kriteria belum diketahui nilai *gap* (N/A), yakni pada tujuan TPB 07 (Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua) dan TPB 15 (Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati). TPB 14

Ekosistem Laut bukan merupakan kewenangan Daerah karena masuk dalam kewenangan tingkat Provinsi. 139 atau 62,61% indikator yang terisi atau diketahui nilai capaiannya, lainnya sebesar 37,38% masih tidak tersedia data sehingga masih banyaknya indikator yang belum terdapat datanya dapat menyebabkan hasil capaian tidak dapat merepresentasikan kondisi Daerah. Total pencapaian indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB beserta dengan rincian masing-masing kelompok capaian disajikan pada Gambar 2.25 berikut ini.



**Gambar 2.25**  
**Grafik Capaian Indikator TPB Daerah**  
(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

Persentase berdasarkan enam kriteria indikator TPB tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.23 dengan persentase terbesar yaitu 45,36% (empat puluh lima koma tiga puluh enam persen) yang dimiliki oleh kriteria indikator yang belum diketahui nilai gapnya (N/A). Adapun persentase terbesar kedua diikuti oleh kriteria indikator belum mencapai target dengan nilai 19,59% (sembilan belas koma lima puluh sembilan persen). Kriteria telah mencapai target hanya mencapai nilai 12,37% (dua belas koma tiga puluh tujuh persen).

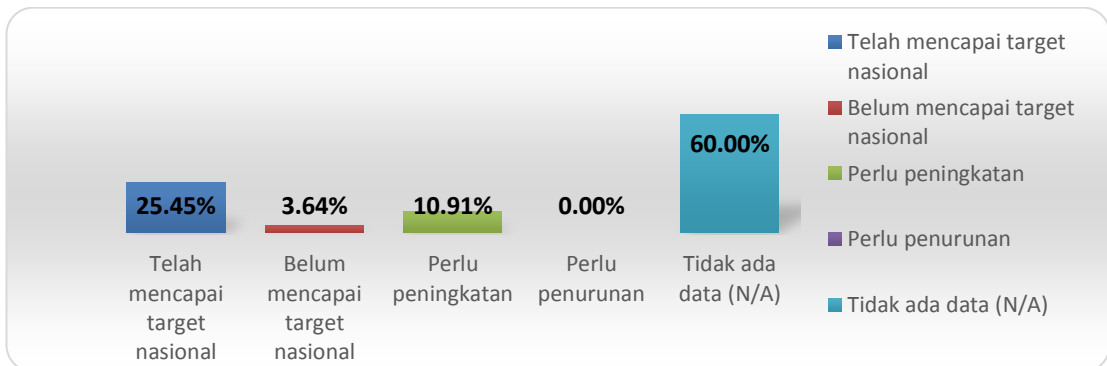


**Gambar 2.26**  
**Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030**

(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

**2.10.2. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial**

Pilar sosial terdiri dari 5 tujuan TPB yaitu TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), dan TPB 5 (Kesetaraan Gender). Pada kewenangan tingkat kota terdapat 95 indikator yang tercakup dalam pilar sosial. Persentase capaian indikator TPB untuk pilar sosial di Kota Sukabumi ditunjukkan pada Tabel 2.27 berikut ini.



**Gambar 2.27**  
**Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Sosial**

(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

Pada pilar sosial, sebanyak 45,36% indikator telah mencapai target nasional, 13,40% indikator belum mencapai target nasional, 9,28% indikator perlu peningkatan, 12,37% perlu penurunan, dan 19,59% indikator tidak tersedia datanya. Banyaknya indikator yang belum mencapai target nasional perlu menjadi perhatian karena merupakan *gap*/permasalahan dalam bidang sosial di Kota Sukabumi. Selain itu, indikator

TPB pilar sosial yang tidak tersedia data capaiannya juga perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kurang dapat diketahui kondisi terkait pilar sosial di Kota Sukabumi secara utuh.

**Tabel 2.32**  
**Kondisi Baseline Indikator TPB dalam Pilar Sosial**

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
1	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	9.30% (2017)
		1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
	1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.4.1.(g) APM(APM) SD/MI/ sederajat.	92,87%
		1.4.1.(h) APM(APM) SMP/MTs/ sederajat.	87,94%
		1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	92,00% (2017)
		1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meninggal: 0,03% jiwa, hilang: 0 jiwa, terluka: 0 jiwa (2017)
		1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	1 kota
		1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	835 orang (2017)
		1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	141 orang (2017)
		1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana	1 kota (2017)

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
		alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	
		1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	114 (sedang) (2017)
		1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp 2761150000 (2017)
		1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0 dokumen (2017)
	1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Rp 3.000.000.000 (APBD), Rp 3.727.350.000 (8238 orang) (2017)
		1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Rp319.910.806.999 (2017)
2	2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Konsumsi pangan : 2142 kkal/ hari (2017)
		2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	2,42% (2017)
		2.1.2* Prevalensi penduduk dengan	Kota Sukabumi tidak ada rawan pangan

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
		kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	
		2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	0,004% (2017)
	2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	7,58%
		2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	0,19%
		2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	12,58%
		2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	77,4%
		2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	79,9
3	3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	116 (2017)
	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran	2,81%

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
	seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000	hidup.	
		3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	2,97
		3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	2,97
	3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,04% (2017)
		3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	199,6808699 (2017)
		3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,003%
		3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	22 kabupaten/kota
		3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Filariasis 26 kasus; Kusta 3 Kasus
		3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	0
	3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	19,9
		3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	1,46% (2017)
		3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	15
	3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	3.5.1(a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	7

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
		3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	0
	3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	93,75
	3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	10.77 per 100000 penduduk (2017)
4	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	SD (Bahasa Indonesia: 73,70; matematika: 74,71; IPA: 65,87), SMP (Bahasa Indonesia: 63,80; matematika: 36,23; bahasa inggris: 48,42; IPA: 40,91) 2017)
		4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	95%
		4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	94%
		4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	102,2%
		4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	10338%
		4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	9.71 tahun (2017)
	4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	56,22%



No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
	dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.		
	4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1* Rasio APM(APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD: 99.75%, SMP: 103.65%, SMA: 103.3% (2017)
	4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,99% (2017)
		4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	100,00% (2017)
	4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	a) SD 100%, SMP 100%; b) SD 6,6%, SMP 36,4%; c) SD 20%, SMP 65,91%; e) SD 100%, SMP 100%; f) SD L 35,4% P 21,2%, SMP L 26,4% P 17,3% (2017)
	4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP,	Jumlah guru: SD: 1623, SMP:

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
	meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	811; SMA: 471, SMK: 651 (2017)
5	5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	40
	5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	160,40% (2017)
	5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	134,25% (2017)
	5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	85,55

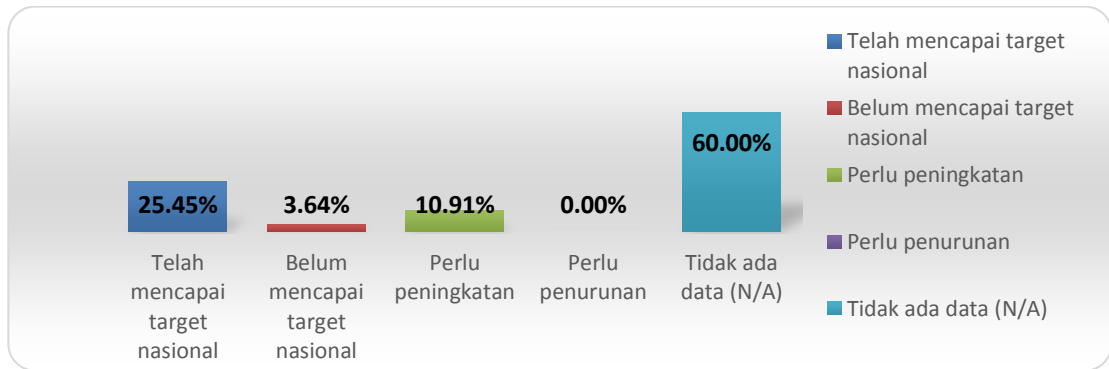
Sumber : Hasil Analisis, 2020

### 2.10.3. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi terdiri dari 5 tujuan TPB yaitu TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Pada kewenangan tingkat kota terdapat 55 indikator yang tercakup dalam pilar ekonomi. Persentase capaian

Indikator .....

indikator TPB untuk pilar ekonomi di Kota Sukabumi ditunjukkan pada Gambar 2.28 berikut ini :



**Gambar 2.28**  
**Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Ekonomi**

(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

Pada pilar ekonomi, sebanyak 25,45% indikator telah mencapai target nasional, 3,64% indikator belum mencapai target nasional, 10,91% indikator perlu peningkatan, dan 60% indikator tidak tersedia datanya. Banyaknya indikator yang tidak tersedia data capaiannya perlu menjadi perhatian karena kurang dapat diketahui kondisi terkait pilar ekonomi di Kota Sukabumi secara utuh.

**Tabel 2.33**  
**Kondisi Baseline Indikator TPB Dalam Pilar Ekonomi**

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
8	8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	laki-laki 22,04 wanita 77,96
		8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	"Total UMKM tahun 2017 : 18446 unit (2017)
	8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp2.158.000 per 8 jam kerja (2017)

No TPB .....

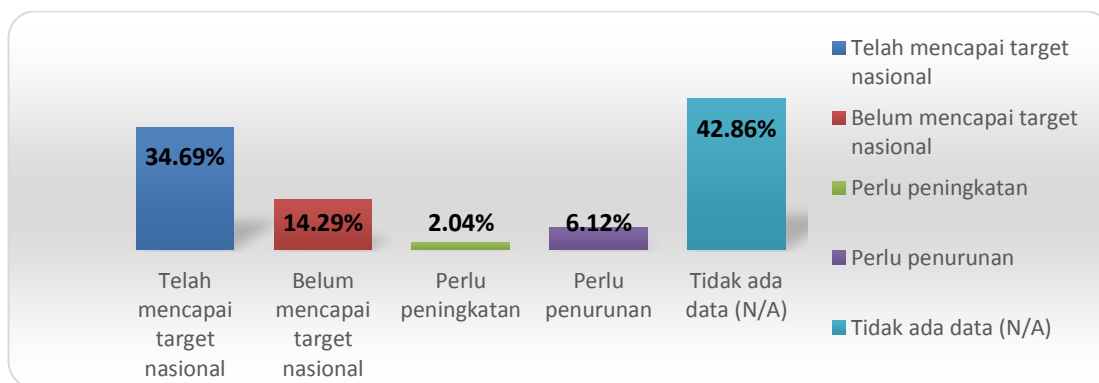
<b>No TPB</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian (Tahun 2019)</b>
<b>9</b>	Secara Signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	231.846 orang (2017)
	9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	85,55%
		9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet	42,47% (2017)
<b>10</b>	10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	9,3% (2017)
<b>17</b>	17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	96,97% (2017)
	17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada
		17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	8836 (2017)
		17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas	96% (2017)

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
		terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	

Sumber : Hasil Analisis, 2020

#### 2.10.4. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

Pilar lingkungan hidup terdiri dari 5 tujuan TPB yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan TPB 15 (Ekosistem Daratan). Pada kewenangan tingkat kota terdapat 49 indikator yang tercakup dalam pilar lingkungan hidup. Persentase capaian indikator TPB untuk pilar lingkungan hidup di Kota Sukabumi ditunjukkan pada Gambar 2.29 berikut ini :



**Gambar 2.29**  
**Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Lingkungan Hidup**  
 (Sumber : Hasil Analisis, 2018)

Pada pilar lingkungan, sebanyak 34,69% indikator telah mencapai target nasional, 14,29% indikator belum mencapai target nasional, 2,04% indikator perlu peningkatan, 6,12% perlu penurunan, dan 42,86% indikator tidak tersedia datanya. Banyaknya indikator pada pilar lingkungan yang belum mencapai target nasional perlu menjadi perhatian karena merupakan *gap*/permasalahan di Kota Sukabumi. Selain itu, indikator TPB yang tidak tersedia data capaiannya juga perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kurang dapat diketahui kondisi terkait pilar lingkungan di Kota Sukabumi secara utuh.

**Tabel 2.34**  
**Kondisi Baseline Indikator TPB Dalam Pilar Lingkungan Hidup**

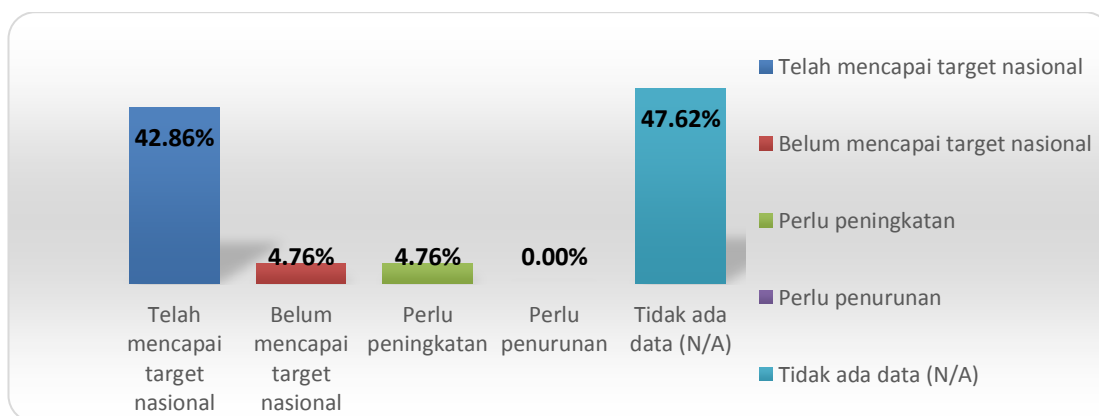
<b>No TPB</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian (Tahun 2019)</b>
<b>6</b>	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	27 desa/kelurahan (2017)
		6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	27 desa/kelurahan (2017)
<b>11</b>	11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	2,75
		11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	2 rute (2017)
	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meninggal : 0,03% jiwa, hilang: 0 jiwa, terluka: 0 jiwa, mengungsi : 0 jiwa (2017)
		11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1 set (2017)
	11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp2.761.150.00 0 (2017)	
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	83,9%

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
12	12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	650 kg/hari
13	13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meninggal: 0,02%, Hilang: 0 jiwa, terkena dampak 0,02%

Sumber : Hasil Analisis, 2020

### 2.10.5. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan tata kelola kelembagaan

Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan hanya terdiri dari 1 tujuan TPB yaitu TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Pada kewenangan tingkat kota terdapat 21 indikator yang tercakup dalam pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. Persentase capaian indikator TPB untuk pilar hukum dan tata kelola kelembagaan di Kota Sukabumi ditunjukkan pada Gambar 2.30 berikut ini :



**Gambar 2.30**  
**Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Hukum dan tata kelola kelembagaan**  
 (Sumber : Hasil Analisis, 2018)

Pada pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, sebanyak 42,86% indikator telah mencapai target nasional, 4,76% indikator belum mencapai target nasional, 4.76% indikator perlu peningkatan, 0% indikator perlu penurunan, dan 76.19% indikator tidak tersedia datanya. Banyaknya indikator yang tidak tersedia data capaiannya perlu menjadi perhatian karena kurang dapat diketahui kondisi terkait pilar hukum dan tata kelolaa kelembagaan di Kota Sukabumi secara utuh

**Tabel 2.35**  
**Kondisi *Baseline* Indikator TPB Dalam Pilar Hukum**  
**Dan Tata Kelola Pemerintahan**

<b>No TPB</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian (Tahun 2019)</b>
<b>16</b>	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	1,02
	16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	0,17
	16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	98,51
		16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	97,8

Sumber : Hasil Analisis, 2020



## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Definisi keuangan negara dalam kedudukan hukum tertinggi tercantum dalam Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang*”. Sedangkan definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*”

Keuangan negara perlu dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum, antara lain :

1. akuntabilitas berorientasi pada hasil;
2. profesionalitas;
3. proporsionalitas;
4. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan
5. pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang keuangan negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut .....

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Penyusunan gambaran keuangan Daerah diperlukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan Daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan Daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Daerah. Selanjutnya belanja Daerah sebagai komponen keuangan Daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi Daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

### **3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

Analisis pengelolaan keuangan Daerah masa lalu digunakan untuk mengetahui pertumbuhan keuangan Daerah dan sebagai dasar dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan Daerah pada tahun-tahun mendatang. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah adalah pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah, sedangkan pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan Daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana Daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek

penerimaan .....

penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah dijabarkan sebagai berikut.

#### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Kinerja pelaksanaan APBD meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015-2019**

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,172,322,521,353</b>	<b>1,199,117,696,711</b>	<b>1,251,030,618,240</b>	<b>1,236,836,372,142</b>	<b>1,338,381,236,989</b>	<b>39.95%</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>295,509,295,867</b>	<b>303,826,659,170</b>	<b>361,188,025,099</b>	<b>354,499,925,441</b>	<b>363,683,852,127</b>	<b>13.86%</b>
1.1.1	Pajak Daerah	28,241,902,200	36,281,560,500	38,417,453,940	42,721,438,880	44,449,308,780	<b>12.59%</b>
1.1.2	Retribusi Daerah	10,242,815,900	8,514,615,640	8,097,229,304	7,803,047,280	8,509,240,250	<b>0.04%</b>
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,714,221,000	3,853,015,468	3,953,494,440	3,535,276,194	3,795,928,632	<b>1.31%</b>
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	253,310,356,767	255,177,467,562	310,719,847,415	300,440,163,087	306,929,374,465	<b>15.17%</b>
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>595,592,523,005</b>	<b>718,582,340,604</b>	<b>727,482,706,958</b>	<b>709,500,946,000</b>	<b>751,118,694,235</b>	<b>5.26%</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	71,807,206,005	65,564,527,204	77,687,628,958	69,156,605,000	68,258,909,235	<b>-1.79%</b>
1.2.2	Dana Alokasi Umum	487,739,457,000	504,731,937,000	495,865,420,000	495,865,420,000	519,590,243,000	<b>1.42%</b>
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	36,045,860,000	148,285,876,400	153,929,658,000	144,478,921,000	163,269,542,000	<b>70.20%</b>
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>281,220,702,481</b>	<b>176,708,696,937</b>	<b>162,359,886,183</b>	<b>172,835,500,701</b>	<b>223,578,690,627</b>	<b>25.75%</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	2,500,000,000	44,900,467,000	3,000,000,000	37,446,400,000	36,727,360,000	<b>0.00%</b>

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	57,138,264,481	58,194,740,937	60,894,392,237	64,776,113,501	71,742,991,033	<b>12.66%</b>
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	95,811,898,000	41,961,649,000	7,500,000,000	39,250,000,000	33,794,565,000	<b>59.06%</b>
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	125,770,540,000	31,651,840,000	90,965,493,946	31,362,987,200	81,313,774,594	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,279,648,405,321</b>	<b>1,268,409,343,775</b>	<b>1,321,576,923,531</b>	<b>1,361,269,946,041</b>	<b>1,498,836,943,637</b>	<b>10.98%</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>527,194,649,881</b>	<b>519,557,166,266</b>	<b>497,699,401,193</b>	<b>517,913,414,206</b>	<b>562,938,219,283</b>	<b>5.37%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	488,456,645,615	476,112,555,116	446,406,298,883	471,334,579,896	514,420,107,304	<b>5.02%</b>
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	150,000,000	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	23,981,104,000	27,265,237,600	42,837,578,760	37,466,658,760	36,989,617,370	<b>12.48%</b>
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7,675,350,000	3,464,000,000	5,568,150,000	6,396,802,000	7,292,000,000	<b>26.59%</b>
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	-	-	

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan dan Kelurahan	825,246,266	715,373,550	715,373,550	715,373,550	736,494,609	<b>7.92%</b>
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6,106,304,000	12,000,000,000	2,172,000,000	2,000,000,000	3,500,000,000	<b>37.05%</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>752,453,755,440</b>	<b>748,852,177,509</b>	<b>823,877,522,338</b>	<b>843,356,531,835</b>	<b>935,898,724,354</b>	<b>15.69%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	69,502,110,690	72,852,114,390	84,955,669,145	100,907,891,398	55,559,420,842	<b>6.99%</b>
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	432,885,790,935	426,817,930,187	473,770,863,167	566,813,963,909	603,895,281,871	<b>15.88%</b>
2.2.3	Belanja Modal	250,065,853,815	249,182,132,932	265,150,990,026	175,634,676,528	276,444,021,641	<b>23.65%</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>107,325,883,968</b>	<b>69,291,647,064</b>	<b>70,546,305,291</b>	<b>124,433,573,899</b>	<b>160,455,706,648</b>	<b>137.50%</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>119,284,823,964</b>	<b>119,927,472,904</b>	<b>80,381,664,131</b>	<b>133,418,932,739</b>	<b>166,189,349,195</b>	<b>116.33%</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>11,958,939,996</b>	<b>50,635,825,840</b>	<b>9,835,358,840</b>	<b>8,985,358,840</b>	<b>5,733,642,547</b>	<b>77.43%</b>

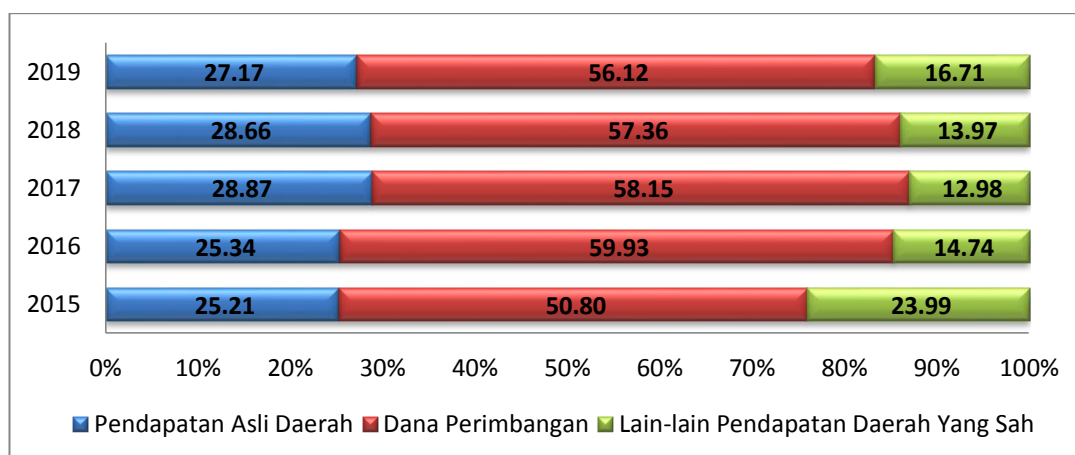
Sumber : BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019

3.1.1.1. Pendapatan .....

### 3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen), pada tahun 2015 dari Rp. 1.172.322.521.353,- (Satu trilyun seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) meningkat menjadi Rp. 1.338.381.236.989,- (satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) pada tahun 2019.

Pendapatan Daerah diperoleh dari tiga pos yaitu pos pendapatan asli daerah, pos dana perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2015-2019, porsi pendapatan Daerah paling tinggi disumbangkan oleh dana perimbangan. Berikut ini perkembangan porsi pos pendapatan Daerah tahun 2015-2019.



**Gambar 3.1**  
**Perkembangan Porsi Pos Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2015-2019**

(Sumber: LRA Daerah Tahun 2015-2019 (diolah))

Porsi dana perimbangan terbesar dalam pendapatan Daerah terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 59,93% (lima puluh Sembilan koma Sembilan puluh tiga persen) dan terendah pada tahun 2015 sebesar 50,80% ( Lima puluh koma delapan puluh persen )

Kontribusi terbesar kedua terhadap pendapatan Daerah tahun 2015-2019 berasal dari porsi pos pendapatan asli daerah. Porsi pos

pendapatan .....

pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan setiap tahun dari 25,21% (dua puluh lima koma dua puluh satu persen) pada tahun 2015 menjadi 27,17% (dua puluh tujuh koma tujuh belas persen) pada tahun 2019. Adapun pendapatan Daerah terkecil berasal dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Porsi lain-lain pendapatan daerah yang sah terbesar terdapat pada tahun 2015 sebesar 23,99% (dua puluh tiga koma Sembilan puluh Sembilan persen) dan porsi terkecil terdapat pada tahun 2017 sebesar 12,98% (dua belas koma Sembilan puluh delapan persen).

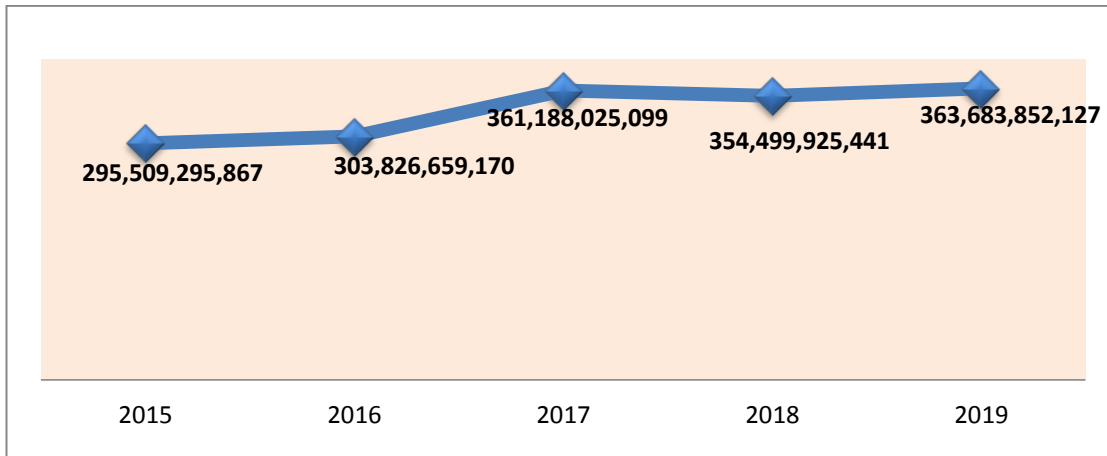
Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa APBD Daerah masih cenderung bertumpu pada pendapatan yang berasal dari dana perimbangan atau dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Aspek kemandirian yang tercermin dari porsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah belum berjalan dengan optimal.

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi asli daerah, ada empat pos dalam PAD yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015 pendapatan asli daerah sebesar Rp. 295.509.295.867,- (dua ratus Sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) kemudian terus meningkat hingga mencapai angka Rp. 363.683.852.127,- (tiga ratus enam puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) pada tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.2.

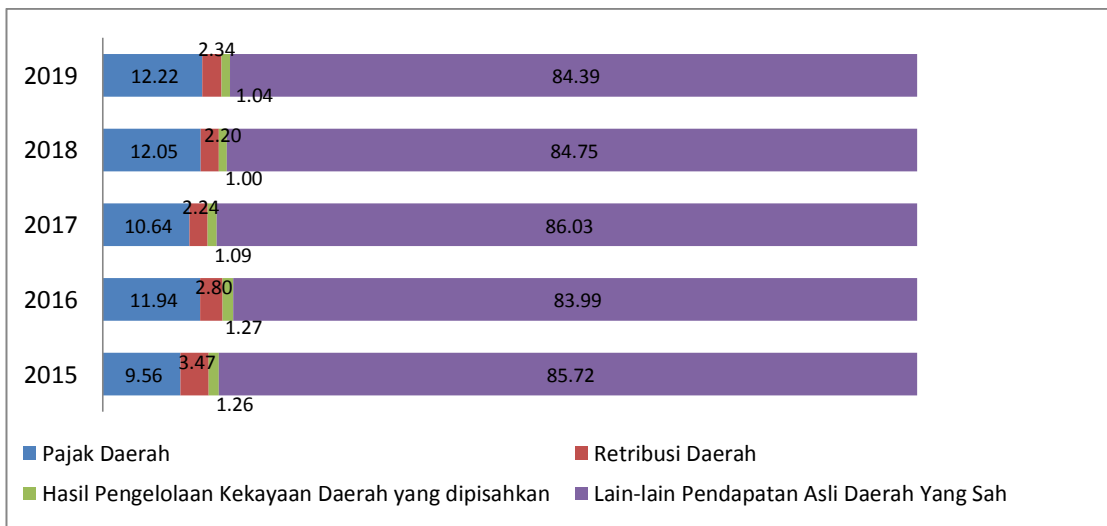




**Gambar 3.2**  
**Realisasi Penerimaan PAD Daerah**  
**Tahun 2015-2019**

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah paling tinggi berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, berikut ini perkembangan kontribusi pos-pos pendapatan asli daerah pada APBD Daerah tahun 2015-2019.



**Gambar 3.3**  
**Perkembangan Porsi Pos Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun 2015-2019**

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

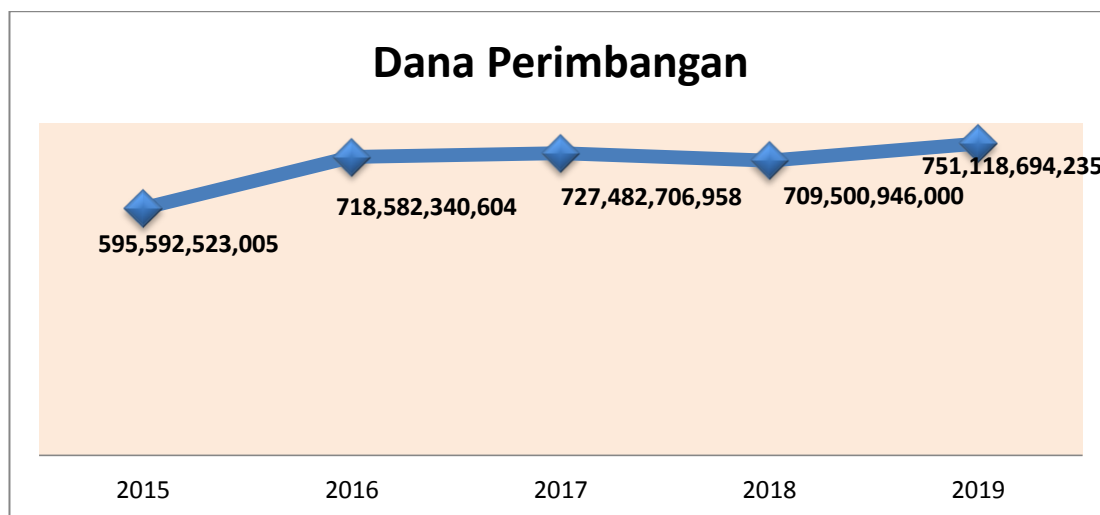
Pada gambar di atas terlihat bahwa porsi lain-lain pendapatan asli daerah menjadi pos dengan kontribusi terbesar, pada kurun waktu tahun 2015-2019 pos ini berkontribusi sebesar 83-86% dari total penerimaan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan pendapatan asli daerah tertinggi kedua adalah pos pajak daerah yang berkontribusi sebesar 9-12% dari total pendapatan asli daerah.

b. Dana .....

**b. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Dalam APBD, pos dana perimbangan terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Setiap sumber memiliki konsep dan tujuan yang berbeda.

Dari Tabel 3.1 di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan pendapatan Daerah yang bersumber dari dana perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tahun 2015-2019 sebesar 5,26% (lima koma dua puluh enam persen). Realisasi penerimaan dana perimbangan pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 595.592.523.005,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima rupiah) dan terus meningkat hingga mencapai jumlah Rp. 751.118.694.235,- (tujuh ratus lima puluh satu milyar seratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) pada tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Gambar 3.4 berikut.

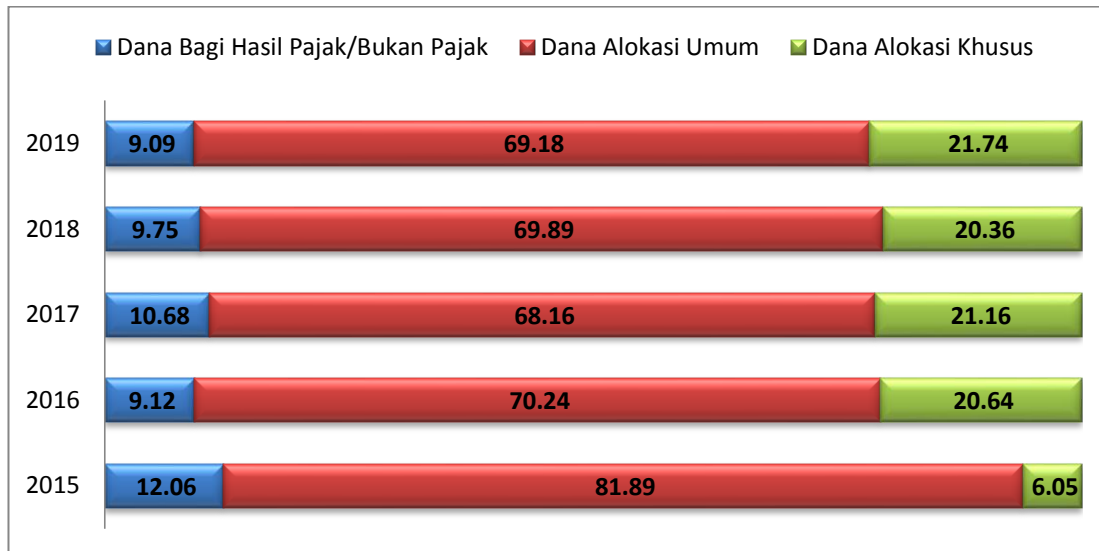


**Gambar 3.4**  
**Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan**  
**Daerah Tahun 2015-2019**  
*(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))*

Pada gambar di atas terlihat bahwa peningkatan penerimaan dana perimbangan Daerah meningkat secara signifikan terjadi pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,86% (lima koma delapan enam persen) dari tahun sebelumnya. Berikut ini

kontribusi .....

kontribusi masing-masing pos dana perimbangan terhadap total penerimaan dana perimbangan Daerah.



**Gambar 3.5**  
**Perkembangan Porsi Pos Dana Perimbangan**  
**Daerah Tahun 2015-2019**  
(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

Pos DAU menjadi pos dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan dana perimbangan di Daerah meskipun terus mengalami penurunan. DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya.

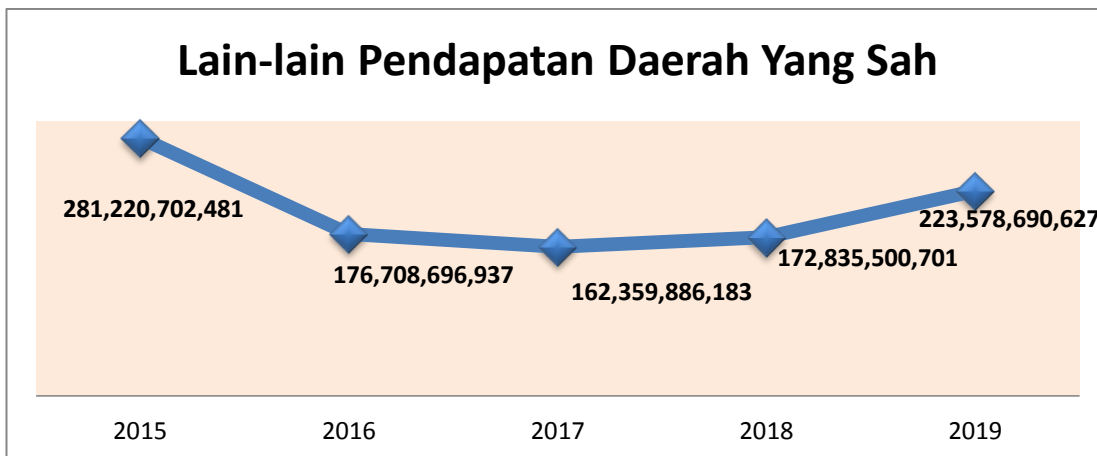
Pos dengan kontribusi terbesar kedua adalah pos DAK yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 6,05% (enam koma nol lima persen) pada tahun 2015 menjadi 21,74% (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen) pada tahun 2019. Sedangkan pos bagi hasil pajak atau bukan pajak relatif stabil di rentang 9-12%.

### **c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah di Daerah

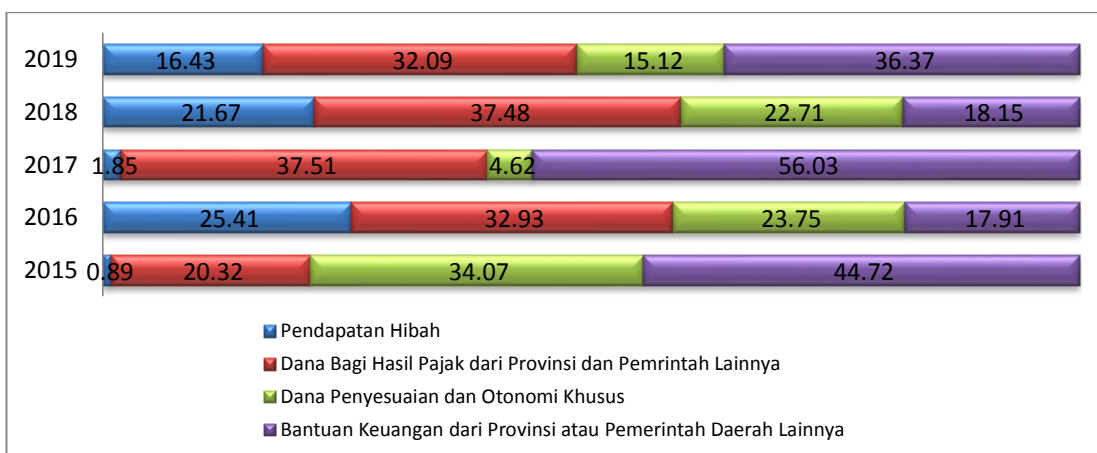
pada .....

pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 25,75% (dua puluh lima koma tujuh puluh lima persen). Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.6 berikut ini, sedangkan perkembangan porsi pos penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.7.



**Gambar 3.6**  
**Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2015-2019**

(Sumber: LRA Daerah Tahun 2015-2019 (diolah))



**Gambar 3.7**  
**Perkembangan Porsi Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2015-2019**

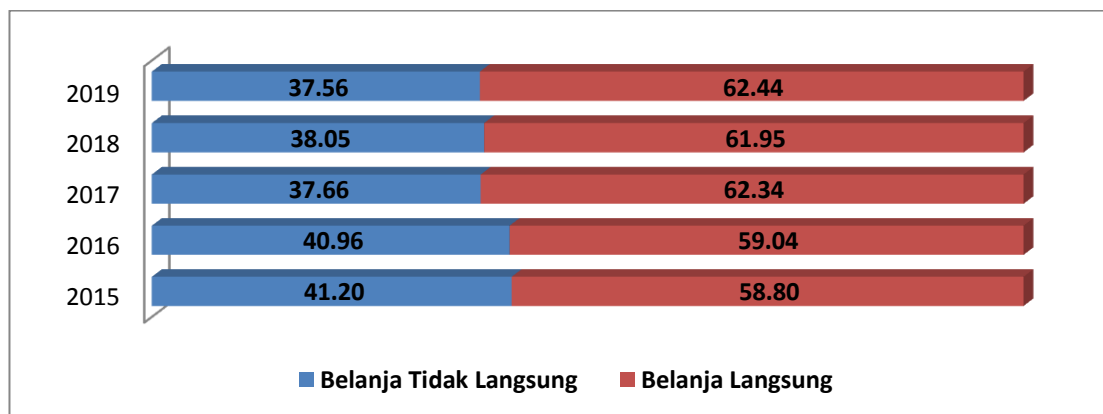
(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

Dari gambar 3.7 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2015-2019, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah lainnya mengalami kenaikan dari 20,32% (dua puluh koma tiga dua persen) pada Tahun 2015, menjadi 32,09% (tiga puluh dua koma no; sembilan persen) pada Tahun 2019 sedangkan dana penyesuaian dan otonomi khusus mengalami penurunan dari 34,07% (tiga puluh

empat koma nol tujuh persen) pada Tahun 2015 menjadi 15,12% (lima belas koma dua belas persen) pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019, Daerah menerima dana hibah sebesar 16,43% (enam belas koma empat puluh tiga persen) dari keseluruhan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### 3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Selama kurun waktu lima tahun dari 2015-2019, belanja daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,98% (sepuluh koma sembilan puluh delapan persen), dengan rincian belanja langsung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 15,69% (lima belas koma enam puluh sembilan persen) per tahun dan belanja tidak langsung meningkat rata-rata 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen) per tahun. Persentase realisasi belanja Pemerintah Daerah disajikan pada Gambar 3.8 sebagai berikut.



**Gambar 3.8**  
**Persentase Perkembangan Porsi Pos Belanja Daerah**  
**Tahun 2015-2019**

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

#### a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

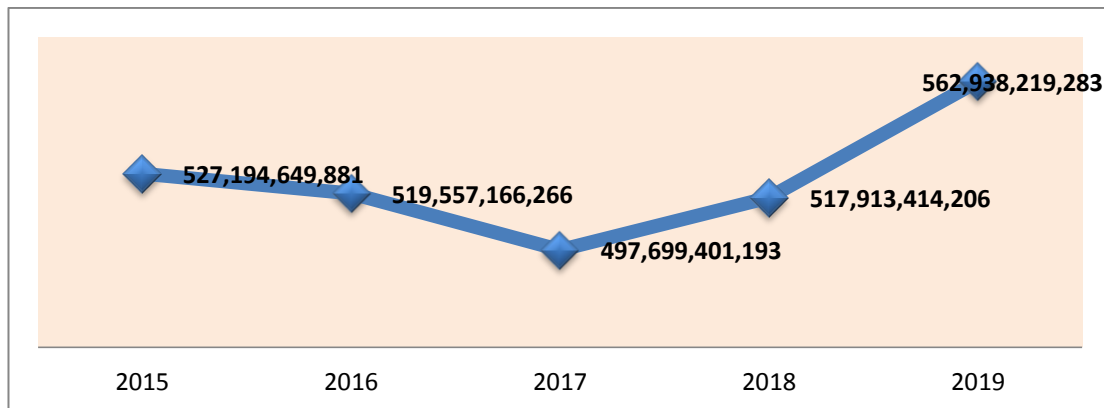
- 1) belanja pegawai, dialokasikan untuk penyediaan gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2) belanja .....

- 2) belanja hibah, dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) belanja bantuan sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) belanja bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang dianggarkan dalam belanja ini dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait;
- 5) belanja tidak terduga, ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa atau tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program atau kegiatan.

Belanja tidak langsung Pemerintah Daerah pada kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen). Pengeluaran terbesar belanja tidak langsung terdapat pada komponen belanja pegawai sebesar 91,29% (sembilan puluh satu koma dua puluh sembilan persen) dan

pengeluaran terendah terdapat pada komponen belanja subsidi sebesar 0,005% (nol koma nol nol lima persen). Realisasi belanja tidak langsung Daerah Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.9.



**Gambar 3.9**  
**Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah**  
**Tahun 2015-2019**

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

**b. Belanja Langsung**

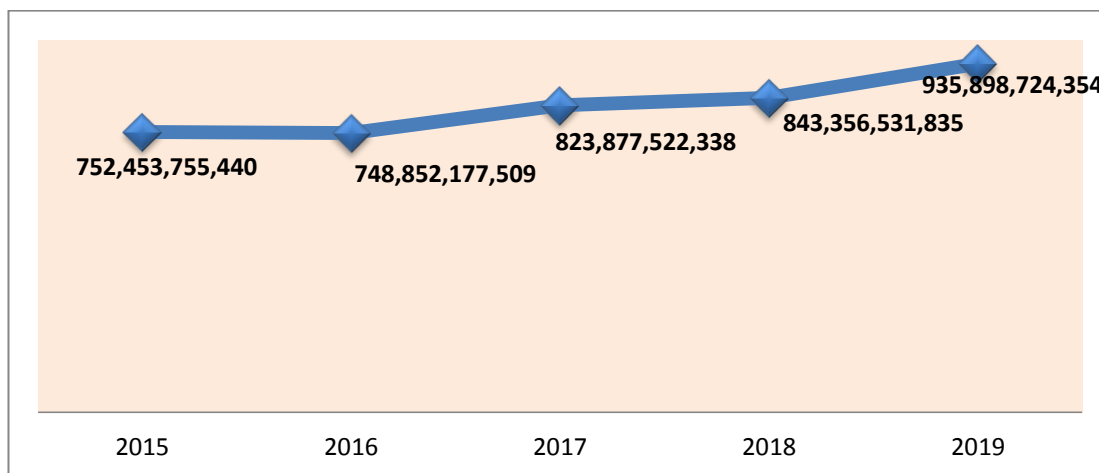
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) belanja pegawai, merupakan pengeluaran untuk honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- 2) belanja barang dan jasa, merupakan pengeluaran untuk pembelian atau pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) belanja modal, merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Proporsi belanja langsung Pemerintah Daerah pada kurun waktu tahun 2015-2019 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,69% (lima belas koma enam puluh sembilan persen). Komponen belanja langsung yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah belanja barang dan jasa sebesar 15,88% (lima belas koma delapan puluh delapan enam persen) diikuti belanja modal yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 23,65% (dua puluh tiga enam puluh lima persen). Adapun komponen belanja langsung

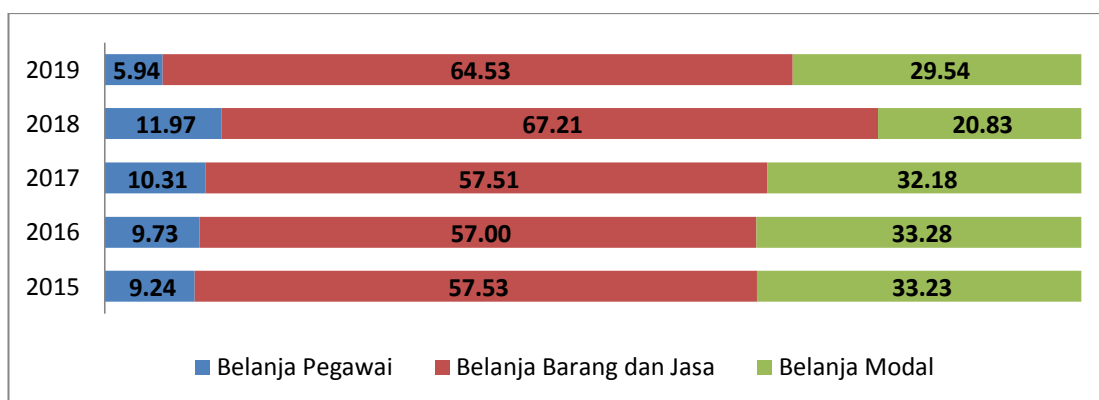
yaitu .....

yaitu belanja pegawai memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,99% (enam koma Sembilan puluh sembilan persen). Realisasi belanja tidak langsung Daerah Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.10 sedangkan perkembangan persentase komponen belanja langsung Daerah disajikan pada Gambar 3.11.



**Gambar 3.10**  
**Realisasi Belanja Langsung Daerah**  
**Tahun 2015-2019**

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))



**Gambar 3.11**  
**Perkembangan Persentase Komponen Belanja Langsung Daerah**  
**Tahun 2015-2019**

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

### 3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

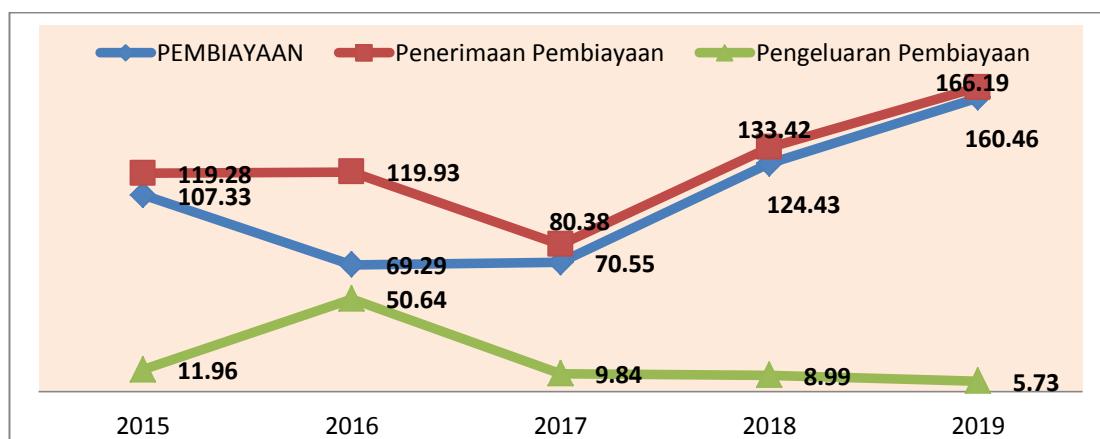
Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil

divestasi .....



divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan Daerah pada kurun waktu Tahun 2015-2019 memiliki rata-rata pertumbuhan 137,50% (seratus tiga puluh tujuh koma lima puluh persen). Penerimaan pembiayaan Daerah Tahun 2015-2019 memiliki rata-rata pertumbuhan 116,33% (seratus enam belas koma tiga puluh tiga persen) sedangkan pengeluaran pembiayaan Daerah Tahun 2015-2019 memiliki rata-rata pertumbuhan 77,43% (tujuh puluh tujuh koma empat puluh tiga persen). Realisasi pembiayaan Daerah disajikan pada Gambar 3.12 berikut ini.



**Gambar 3.12**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2019**  
(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah)- dalam Milyar)

### 3.1.2. Neraca

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur atau pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan neraca Pemerintah Daerah dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Pemerintah Daerah**

No.	U R A I A N	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan
A	<b>ASET</b>				
1	Kas	133.556.565.131	166.327.962.490	92.140.557.031	<b>-10,03%</b>
2	Piutang	27.916.538.875	51.970.138.899	76.906.623.722	<b>67,07%</b>
3	Persediaan	45.070.024.774	27.457.143.112	<b>25.304.722.502</b>	<b>-23,46%</b>
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>206.543.128.780</b>	<b>245.755.244.501</b>	<b>194.351.903.255</b>	<b>-0,97%</b>
B	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>				
1	Investasi Nonpermanen	3.650.000.000	125.000.000	1.050.000.000	<b>321,71%</b>
2	Investasi Permanen	74.609.344.331	80.258.731.669	82.315.016.657	<b>5,07%</b>
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>78.259.344.331</b>	<b>80.383.731.669</b>	<b>83.365.016.657</b>	<b>3,21%</b>
C	<b>ASET TETAP</b>				
1	Tanah	392.293.644.455	394.837.799.296	409.788.395.557	<b>2,22%</b>
2	Peralatan dan Mesin	399.357.505.601	456.624.375.584	560.219.624.759	<b>18,51%</b>
3	Gedung dan Bangunan	447.953.134.284	545.168.165.767	589.714.726.881	<b>14,94%</b>
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	799.189.217.795	851.167.635.117	873.313.528.360	<b>4,55%</b>
5	Aset Tetap Lainnya	40.500.117.971	46.503.582.966	55.414.160.088	<b>16,99%</b>
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	59.583.311.876	10.496.965.905	22.961.600.512	<b>18,18%</b>

No.	U R A I A N	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(802.247.222.031)	(883.748.680.434)	(1.007.869.510.650)	<b>12,10%</b>
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.336.629.709.951</b>	<b>1.421.049.844.201</b>	<b>1.503.542.525.507</b>	<b>6,06%</b>
D	<b>ASET LAINNYA</b>				
1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	
2	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	
3	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.646.430.000	7.646.430.000	7.646.430.000	<b>0,00%</b>
5	Aset Tak berwujud	9.066.392.702	9.820.178.101	12.960.673.661	<b>20,15%</b>
6	Aset Lain-lain	8.875.459.507	9.557.034.150	6.384.790.032	<b>-12,76%</b>
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>25.588.282.209</b>	<b>27.023.642.251</b>	<b>26.991.893.693</b>	<b>2,75%</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.647.020.465.271</b>	<b>1.774.212.462.622</b>	<b>1.808.251.339.112</b>	<b>4,82%</b>
	<b>KEWAJIBAN</b>				
E	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	115.994.448	55.790.405	393.527.590	<b>276,73%</b>
2	Utang Bunga	-	-	-	<b>0,00%</b>
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	<b>0,00%</b>
4	Pendapatan diterima dimuka	475.887.569	760.937.967	841.786.715	<b>35,26%</b>
5	Utang Belanja			819.218.472	<b>27,76%</b>

No.	U R A I A N	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan
		501.962.722	633.411.333		
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	17.779.399.650	14.676.627.816	24.449.283.952	<b>24,57%</b>
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>18.873.244.389</b>	<b>16.126.767.521</b>	<b>26.503.816.729</b>	<b>24,90%</b>
F	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				<b>0,00%</b>
1	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-	-	<b>0,00%</b>
2	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	<b>0,00%</b>
3	Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-	<b>0,00%</b>
4	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.433.642.547	2.683.642.547	-	<b>-75,31%</b>
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>5.433.642.547</b>	<b>2.683.642.547</b>	-	<b>-75,31%</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>24.306.886.936</b>	<b>18.810.410.068</b>	<b>26.503.816.729</b>	<b>9,14%</b>
G	<b>EKUITAS</b>	1.622.713.578.335	1.755.402.052.554	1.781.747.522.383	<b>4,84%</b>
1	Ekuitas	1.622.713.578.335	1.755.402.052.554	1.781.747.522.383	<b>4,84%</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.647.020.465.271</b>	<b>1.774.212.462.622</b>	<b>1.808.251.339.112</b>	<b>4,82%</b>

Sumber : BPKD Kota Sukabumi 2020, diolah

Aset .....

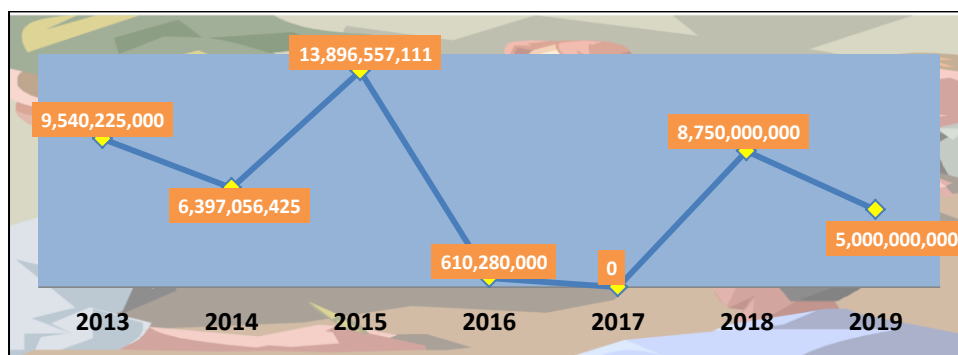
Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dan lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, aset tetap, dan aset lainnya namun tidak termasuk dana cadangan dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

### 3.1.3. Kinerja Pendanaan Non APBD

#### 3.1.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Daerah selain bersumber dari APBD Daerah, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN berupa tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah. Perkembangan realisasi pendanaan APBN berupa tugas pembantuan di Daerah Tahun 2013-2019 disajikan pada Gambar 3.13.



**Gambar 3.13**  
**Perkembangan Pendanaan APBN Melalui Tugas Pembantuan di Daerah Tahun 2013 - 2019**

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Daerah mendapatkan pendanaan dari APBN berupa tugas pembantuan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan perkembangan yang cukup fluktuatif. Jumlah dana tugas pembantuan yang diterima Daerah paling besar terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp. 13.896.557.111,- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah). Pada tahun 2017 Daerah tidak mendapatkan pendanaan melalui tugas pembantuan. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga Menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun mulai Tahun 2018, Daerah kembali menerima pendanaan APBN melalui tugas pembantuan sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

### **3.1.3.2. Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).**

Pendanaan pembangunan non APBD Daerah yang lainnya selain dari APBN adalah program kemitraaan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Sampai dengan saat ini sudah terdaftar sebanyak 2 (dua) mitra PKBL dan TJSL Daerah. Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang berkesinambungan atau *sustainable* serta berdampak positif terhadap masyarakat. Penekanan kepada 3 (tiga)

hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang untuk memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat di prediksi. Program yang dikerjakamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan di Daerah yang bersumber dari TJSLP atau PKBL dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Rekapitulasi Pendanaan TJSLP/PKBL BUMD dan BUMN**  
**Daerah Tahun 2013 - 2018**

TAHUN	REALISASI		JUMLAH TOTAL
	BUMD	BUMN	
	PT Bank BJB.Tbk	PT Bank BNI. Tbk	
2013	250.000.000	-	250.000.000
2014	249.992.500	-	249.992.500
2015	300.192.000	-	300.192.000
2016	290.600.000	-	290.600.000
2017	462.500.000	65.450.000	527.950.000
2018	67.790.000	-	67.790.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.621.074.500</b>	<b>65.450.000</b>	<b>1.686.524.500</b>

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas untuk realiasi program CSR atau TJSLP perusahaan yang bersumber dari BUMD dan BUMN di Daerah selama kurun waktu 6 (enam) tahun untuk anggaran tertinggi dilakukan oleh PT Bank BJB.Tbk dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.1.621.074.500,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

### **3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU**

Pengelolaan keuangan Daerah sudah baik dimana tercermin dari opini laporan keuangan yang sudah masuk dalam kategori WTP (wajar tanpa pengecualian) oleh BPK RI. Kebijakan pengelolaan keuangan pada tahun atau periode sebelumnya dijadikan sebagai

dasar .....

dasar untuk pengelolaan keuangan lima tahun kedepan. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan tersebut terdiri dari :

1. kebijakan pendapatan;
2. kebijakan belanja; dan
3. kebijakan pembiayaan.

**a. Kebijakan Pendapatan**

Kebijakan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan dengan instensifikasi dan ekstensifikasi melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
2. meningkatkan efektivitas dan efesiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya;
3. melakukan upaya penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi yang menunggak melalui tim khusus yang dibentuk oleh Perangkat Daerah terkait;
4. pembuatan peraturan untuk menjaring wajib pajak dan retribusi daerah yang baru.

**b. Kebijakan Belanja**

Belanja daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi belanja

pegawai .....



pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kebijakan belanja daerah terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

1. memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan;
2. memprioritaskan pemenuhan rencana pembangunan RPJMD tahun 2013-2018;
3. sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018;
4. pendukungan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG`s);
5. pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
6. pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji;
7. pengalokasian hibah bansos;
8. pengalokasian anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), belanja operasional sekolah (BOS) pusat, pajak rokok sesuai dengan peruntukan yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
9. mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan penting dan mendesak lainnya.

**c. Kebijakan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah secara substansial meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang, dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal atau investasi, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman. Sementara selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto*.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dan relatif kurang diimbangi dengan sumber pembiayaan yang beragam dan pasti. Untuk kebijakan diarahkan pada pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dari realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2015–2016 menunjukkan terjadinya kenaikan, sedangkan pada tahun pada tahun 2017 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya pelimpahan pegawai Daerah ke Provinsi pasca pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah.

Realisasi .....

Realisasi dan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2015–2019 dan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4. Pada tabel 3.4 total belanja langsung tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2018 namun total belanja tidak langsung tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan pula dibandingkan tahun 2018, hal ini disebabkan sejak tahun 2019 ditetapkan kebijakan menghilangkan honor- honor kegiatan untuk kemudian dialokasikan pada pemberian tambahan penghasilan PNS berbasis kinerja.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah**  
**Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>451.842.328.580</b>	<b>469.770.314.880</b>	<b>386.688.710.210</b>	<b>409.783.425.297</b>	<b>487.170.161.714</b>
1.1	Gaji dan Tunjangan	393.286.061.889	401.262.961.358	327.684.057.130	320.381.693.368	318.090.750.312
1.2	Tambahan penghasilan PNS	56.886.751.550	66.348.046.150	56.808.374.350	86.745.582.150	165.835.983.411
1.3	Insentif pembangunan pemungutan pajak	1.255.146.416	1.810.765.825	1.893.191.434	2.375.244.533	2.899.442.201
1.4	Insentif pembangunan pemungutan retribusi	414.368.725	348.541.547	303.087.296	280.905.246	343.985.790
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>70.992.304.735</b>	<b>79.076.152.825</b>	<b>96.973.114.360</b>	<b>110.857.283.795</b>	<b>66.504.661.686</b>
2.1	Belanja Pegawai	59.505.574.002	65.650.139.375	78.957.447.861	87.879.456.260	47.852.564.633
2.2	Barang jasa					
	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.110.230.900	1.141.745.455	1.210.392.500	1.873.431.000	1.351.575.354
	Belanja pakaian kerja	1.297.755.450	1.269.761.966	1.422.812.750	1.693.016.670	2.235.917.400
	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.071.558.150	3.399.656.090	3.277.657.549	3.656.478.076	3.839.009.341
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.007.186.233	7.614.849.939	12.104.803.700	15.754.901.789	11.225.594.958
<b>Total Belanja</b>		<b>522.834.633.315</b>	<b>548.846.467.705</b>	<b>483.661.824.570</b>	<b>520.640.709.092</b>	<b>553.674.823.400</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015-2019

Tabel 3.5 .....

**Tabel 3.5**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah**  
**Tahun 2015-2019**

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase (%)
1	2015	522.834.633.315	1.051.370.251.647	49,73
2	2016	548.846.467.705	1.202.560.850.714	45,64
3	2017	483.661.824.570	1.163.647.417.015	41,56
4	2018	520.640.709.092	1.225.971.639.881	42,47
5	2019	553.674.823.400	1.295.848.701.130	42,73

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015-2019

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah yang merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hasil analisis pembiayaan daerah yang telah dilakukan, pada tahun 2016 dan 2019, Daerah mengalami defisit masing-masing sebesar Rp.39.545.808.773,- (tiga puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Rp. 75.891.165.423,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), sedangkan pada tahun 2015, 2017, dan 2018 terjadi surplus yang menunjukkan kemampuan pendapatan untuk membiayai semua belanja. Kondisi defisit yang terjadi pada tahun 2016 dan 2019 ditutup dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dana talangan pengadaan pangan, dan dana bergulir. Kondisi defisit riil anggaran secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.6**  
**Defisit Riil Anggaran Daerah Tahun 2015-2019**

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Realisasi Pendapatan Daerah</b>	<b>1,066,745,506,697</b>	<b>1,163,015,041,941</b>	<b>1,216,204,685,623</b>	<b>1,223,767,356,844</b>	<b>1,236,907,802,861</b>
	<b>Dikurangi Realisasi :</b>					
2	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1,057,842,417,761</b>	<b>1,155,744,384,389</b>	<b>1,160,219,417,015</b>	<b>1,185,870,308,688</b>	<b>1,308,065,325,737</b>
3	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>8,260,439,996</b>	<b>46,816,466,325</b>	<b>3,428,000,000</b>	<b>8,526,631,700</b>	<b>4,733,642,547</b>
	<b>Surplus/Defisit Riil</b>	<b>642,648,940</b>	<b>(39,545,808,773)</b>	<b>52,557,268,608</b>	<b>29,370,416,456</b>	<b>(75,891,165,423)</b>

*Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015-2019*

Perencanaan penganggaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya atau SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Data SiLPA lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2015 sampai 2019, nilai SiLPA tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu Rp. 166.189.349.195,- (seratus enam puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah). Komposisi penutup defisit riil anggaran pada kurun waktu Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.8.

**Tabel 3.7**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	118.084.823.964	119.927.472.904	80.381.664.131	133.418.932.739	166.189.349.195
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah	1.200.000.000	-	480.000.000	3.400.000.000	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015-2019

Tabel 3.8 .....



**Tabel 3.8**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 2015-2019**

NO.	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	119,927,472,904		80,381,664,131		133,418,932,739		166,189,349,195		90,298,183,772	
2	Pelampauan penerimaan PAD	- 18,663,734,032	- 15.56	- 8,568,988,389	- 10.66	6,740,254,651	5.05	7,842,365,098	4.72	- 32,737,267,979	- 36.25
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	- 23,715,060,489	- 19.77	- 16,462,316,946	- 20.48	- 27,805,638,277	- 20.84	- 21,284,204,383	- 12.81	- 41,849,697,265	- 46.35
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	- 63,199,390,135	- 52.70	- 11,071,349,435	- 13.77	- 4,856,288,747	- 3.64	372,823,987	0.22	- 26,886,468,884	- 29.78
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	221,805,987,560	184.95	112,664,959,386	140.16	161,357,506,516	120.94	175,399,637,353	105.54	190,771,617,900	211.27
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
7	Kegiatan lanjutan										

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015-2019

### **3.3 KERANGKA PENDANAAN**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja atau pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Dalam perubahan RPJMD 2018-2023, fokus perubahan Analisa kerangka pendanaan mulai pada periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 selama 3 (tiga) tahun kedepan, yang akan digunakan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

#### **3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Berdasarkan capaian kinerja pendapatan Daerah Tahun 2013-2019, maka pendapatan Daerah tahun 2021-2023 walaupun ditengah pandemi COVID-19 diharapkan dapat terus meningkat. Namun demikian proyeksi peningkatan pendapatan daerah Tahun 2021-2023 kenaikannya tidak sebesar hasil proyeksi pendapatan daerah sebelum perubahan RPJMD. Peningkatan kinerja pendapatan Daerah tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan umum pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
  - a. ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
  - b. pembenahan manajemen penerimaan PAD;
  - c. pemasangan *tapping box* untuk wajib pajak secara bertahap;
  - d. melakukan kajian-kajian penerimaan PAD;

e. melakukan.....

- e. melakukan pemeriksaan pajak dan pengawasan internal terhadap pengelola pajak;
  - f. meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tariff; dan
  - g. mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
  3. mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan bagi hasil laba dari BUMD;
  4. mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
  5. mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Belanja Daerah pada perubahan RPJMD untuk periode tahun 2021-2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan fokus pada penanganan COVID-19 dan pasca COVID-19. Kebijakan belanja Daerah hasil perubahan RPJMD tahun 2018–2023 periode tahun 2021-2023 diarahkan untuk:

1. membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Daerah;
2. memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam musrenbang;
4. mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan;

5. mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat; dan
6. memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, potensi siswa, peningkatan kualitas dan kompetensi guru, fungsi kesehatan, dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Mendanai belanja penanganan COVID-19 dan Pasca COVID-19 yang bertumpu pada sektor Kesehatan, Jaring pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah Tahun 2019–2023 disajikan pada Tabel 3.9 dan 3.10 berikut.

**Tabel 3.9**  
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019-2020**

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI	PROYEKSI
		2019	2020
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,338,381,236,989</b>	<b>1,201,470,117,742</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>363,683,852,127</b>	<b>332,877,047,248</b>
1.1.1	Pajak Daerah	44,449,308,780	40,347,044,800
1.1.2	Retribusi Daerah	8,509,240,250	6,372,733,700
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,795,928,632	4,284,853,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	306,929,374,465	281,872,415,748
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>751,118,694,235</b>	<b>706,917,649,221</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	68,258,909,235	79,866,287,221
1.2.2	Dana Alokasi Umum	519,590,243,000	474,164,097,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	163,269,542,000	152,887,265,000
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>223,578,690,627</b>	<b>161,675,421,273</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	36,727,360,000	36,727,360,000
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	71,742,991,033	70,645,496,848
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33,794,565,000	19,863,306,000
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	81,313,774,594	34,439,258,425
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,498,836,943,637</b>	<b>1,289,768,301,514</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>562,938,219,283</b>	<b>570,506,179,397</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	514,420,107,304	499,265,179,828
2.1.2	Belanja Subsidi		
2.1.3	Belanja Hibah	36,989,617,370	35,496,930,170
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	7,292,000,000	7,729,600,000

KODE .....

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI	PROYEKSI
		2019	2020
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan dan Kelurahan	736,494,609	766,064,039
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	27,248,405,360
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>935,898,724,354</b>	<b>719,262,122,117</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	55,559,420,842	57,450,854,217
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	603,895,281,871	502,156,523,210
2.2.3	Belanja Modal	276,444,021,641	159,654,744,690
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,498,836,943,637</b>	<b>1,289,768,301,514</b>
	<b>Surplus / (Defisit) Sebelum Pembiayaan</b>	<b>(160,455,706,648)</b>	<b>(88,298,183,772)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>160,455,706,648</b>	<b>88,298,183,772</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>166,189,349,195</b>	<b>90,298,183,772</b>
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	166,189,349,195	90,298,183,772
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5,733,642,547</b>	<b>2,000,000,000</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.3	Pembentukan Investasi Jangka Pendek	-	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2,683,642,547	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1,050,000,000	
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>160,455,706,648</b>	<b>88,298,183,772</b>
	<b>Surplus / (Defisit) Setelah Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : BAPPEDA dan BPKD Kota Sukabumi, diolah 2020 (Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Tabel 3.10 .....

**Tabel 3.10**  
**Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2023**

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	PROYEKSI		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,324,851,402,800</b>	<b>1,364,563,131,210</b>	<b>1,377,034,296,467</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>368,314,044,927</b>	<b>379,314,044,927</b>	<b>386,314,044,927</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	45,265,761,905	53,265,761,905	57,265,761,905
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9,196,480,900	9,396,480,900	9,696,480,900
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,037,833,800	4,337,833,800	4,537,833,800
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	309,813,968,322	312,313,968,322	314,813,968,322
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>919,809,997,873</b>	<b>948,521,726,283</b>	<b>953,992,891,540</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat:</b>	<b>730,044,797,919</b>	<b>759,155,456,329</b>	<b>766,522,722,000</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>699,155,456,329</b>	<b>728,155,456,329</b>	<b>737,454,106,000</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>537,940,164,329</b>	<b>564,940,164,329</b>	<b>574,238,814,000</b>
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	57,648,571,000	68,648,571,000	68,648,571,000
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	480,291,593,329	496,291,593,329	505,590,243,000
<b>1.2.1.1.2</b>	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>161,215,292,000</b>	<b>163,215,292,000</b>	<b>163,215,292,000</b>
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	83,118,197,000	85,118,197,000	85,118,197,000
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus non Fisik	78,097,095,000	78,097,095,000	78,097,095,000
<b>1.2.1.2</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>30,889,341,590</b>	<b>31,000,000,000</b>	<b>29,068,616,000</b>
<b>1.2.1.3</b>	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	-	-	-
<b>1.2.1.4</b>	<b>Dana Keistimewaan</b>	-	-	-
<b>1.2.1.5</b>	<b>Dana Desa</b>	-	-	-

KODE .....

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	PROYEKSI		
		2021	2022	2023
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>189,765,199,954</b>	<b>189,366,269,954</b>	<b>187,470,169,540</b>
1.2.2.1	Pendapatan bagi hasil;	71,559,629,954	71,559,629,954	71,559,629,954
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	118,205,570,000	117,806,640,000	115,910,539,586
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>36,727,360,000</b>	<b>36,727,360,000</b>	<b>36,727,360,000</b>
1.3.1	Hibah (BOS Pusat)	36,727,360,000	36,727,360,000	36,727,360,000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,354,648,450,759</b>	<b>1,394,860,179,169</b>	<b>1,406,831,344,426</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1,063,714,959,810</b>	<b>1,098,004,773,806</b>	<b>1,104,803,423,477</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	482,864,608,777	490,975,267,187	495,975,267,187
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa*	542,192,609,624	564,871,765,210	564,370,414,881
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	32,878,141,409	35,878,141,409	37,878,141,409
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5,779,600,000	6,279,600,000	6,579,600,000
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal*</b>	<b>288,433,490,949</b>	<b>293,355,405,363</b>	<b>297,527,920,949</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>3,500,000,000</b>	<b>4,500,000,000</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja transfer</b>	-	-	-
2.4.1	belanja bagi hasil	-	-	-
2.4.2	belanja bantuan keuangan	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,354,648,450,759</b>	<b>1,394,860,179,169</b>	<b>1,406,831,344,426</b>

KODE .....



KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	PROYEKSI		
		2021	2022	2023
	<b>Surplus / (Defisit) Sebelum Pembiayaan</b>	<b>(29,797,047,959)</b>	<b>(30,297,047,959)</b>	<b>(29,797,047,959)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>29,797,047,959</b>	<b>30,297,047,959</b>	<b>29,797,047,959</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>31,797,047,959</b>	<b>32,297,047,959</b>	<b>31,797,047,959</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	31,797,047,959	32,297,047,959	31,797,047,959
3.1.2	pencairan Dana Cadangan;	-	-	-
3.1.3	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	-	-	-
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>29,797,047,959</b>	<b>30,297,047,959</b>	<b>29,797,047,959</b>
	<b>Surplus / (Defisit) Setelah Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber Bappeda Kota Sukabumi, diolah 2020 (Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Proyeksi .....

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2021-2023 terlihat bahwa pendapatan Daerah terus menunjukkan peningkatan meskipun porsi terbesar masih bersumber dari dana perimbangan. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan Daerah masih harus tetap difokuskan dalam peningkatan kemandirian Daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah namun tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat ditengah bencana COVID-19.

Pada sisi belanja, porsi belanja Operasi masih menjadi porsi terbesar dalam belanja daerah khususnya untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa. Khusus untuk belanja modal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan sehingga diharapkan proses pembangunan dapat dibiayai dan sesuai dengan rencana yang diharapkan.

### **3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Guna menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah. Kapasitas riil kemampuan daerah disajikan pada Tabel 3.11 berikut.

**Tabel 3.11**  
**Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)	Proyeksi (Rp)			
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	<b>1,338,381,236,989</b>	<b>1,201,470,117,742</b>	1,324,851,402,800	1,364,563,131,210	1,377,034,296,467
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa lebih Riil Perhitungan Anggaran	166,189,349,195	90,298,183,772	31,797,047,959	32,297,047,959	31,797,047,959
4	Penerimaan obligasi daerah	-	-	-	-	-
	<b>Total penerimaan</b>	<b>1,504,570,586,184</b>	<b>1,291,768,301,514</b>	<b>1,356,648,450,759</b>	<b>1,396,860,179,169</b>	<b>1,408,831,344,426</b>
	Dikurangi :					
1	Belanja Tidak Langsung	<b>562,938,219,283</b>	<b>570,506,179,397</b>			
1	Belanja Operasi (dikurangi belanja barang dan jasa ditambah BTT )			524,022,350,186	536,633,008,596	544,933,008,596
2	Pengeluaran Pembiayaan	5,733,642,547	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>935,898,724,354</b>	<b>719,262,122,117</b>	<b>830,626,100,573</b>	<b>858,227,170,573</b>	<b>861,898,335,830</b>

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi, diolah Kembali 2020

### 3.3.3 Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas atau *money follow programme* dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhannya. Adapun kelompok prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga termasuk hal tersebut;
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Realisasi dan Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.12.

**Tabel 3.12**  
**Realisasi dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	Realisasi (Rp)	Proyeksi (Rp)			
		2019	2020	2021	2022	2023
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	935,898,724,354	719,262,122,117	830,626,100,573	858,227,170,573	861,898,335,830
	Prioritas I	133,081,006,491	139,735,056,816	160,369,737,884	161,069,737,884	161,769,737,884
1	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap pemda	34,462,416,667	36,185,537,500	40,132,678,900	40,632,678,900	41,132,678,900
2	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD	17,797,108,000	18,686,963,400	18,513,478,000	18,513,478,000	18,513,478,000
3	Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet)	62,276,318,774	65,390,134,713	73,424,362,644	73,424,362,644	73,424,362,644
4	Belanja Premi Asuransi	8,800,720,550	9,240,756,578	13,038,212,340	13,238,212,340	13,438,212,340
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,190,912,000	6,500,457,600	10,839,308,000	10,839,308,000	10,839,308,000
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,553,530,500	3,731,207,025	4,421,698,000	4,421,698,000	4,421,698,000
	Prioritas II	569,322,270,232	350,953,576,235	375,270,450,200	380,270,450,200	385,270,450,200
	Prioritas III	233,495,447,631	228,573,489,066	294,985,912,489	316,886,982,489	314,858,147,746

Sumber, Bappeda Kota Sukabumi, diolah Kembali 2020

### **3.3.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya**

Sumber pendanaan pembangunan lainnya dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Daerah membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) / *Public Private Partnership* (PPP), CSR/TJSLP, dana umat, dan swasta.

#### **a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Pembangunan Daerah selain bersumber dari APBD Daerah juga memperoleh dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Daerah.

#### **b. Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Daerah yang lainnya adalah Program kemitraaan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah mensinergikan penyelenggaraan program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah. Prinsip pendanaan PKBL dan TJSL adalah rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan PKBL dan TJSL secara mandiri, artinya bahwa pengelolaan pendanaanya pun oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan bagian dari pendapatan Daerah. Penyelenggaraan program PKBL dan TJSL dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. partisipatif .....

1. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
2. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
3. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

Adapun program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL dan PKBL meliputi 8 (delapan) aspek yaitu sebagai berikut :

1. sosial yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
2. lingkungan yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi, dan pemulihan lingkungan;
3. kesehatan yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
4. pendidikan yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;
5. peningkatan daya beli diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, dan pasar tradisional;
6. infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan;

7. sarana dan prasarana keagamaan; dan
8. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, provinsi, dan Daerah.

**c. APBD Provinsi Jawa Barat**

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui pembiayaan dengan APBD Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Daerah sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga antara Daerah dan Provinsi Jawa Barat dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

**d. Obligasi**

Obligasi daerah merupakan alternatif kanal pembiayaan yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan daerah, instrumen ini adalah efek berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat, hanya untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Namun pada dasarnya penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang diajukan harus mempunyai nilai keuntungan secara ekonomis, keuntungan dari sarana prasarana tersebut digunakan untuk membayar pokok hutang beserta bunganya. Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana

dalam .....



dalam jumlah besar. Mekanisme penerbitan obligasi daerah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Obligasi Daerah. Pemerintah Daerah belum pernah menerbitkan obligasi daerah, namun Pemerintah Daerah serius menjajaki kemungkinan penerbitan obligasi daerah.

**e. Pinjaman Bank Daerah**

Dalam pelaksanaan pembangunan pinjaman bank berupa pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah pada prinsipnya diturunkan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah;
2. pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah;
3. pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
4. pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;

5. pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
6. pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
7. pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
8. proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah; dan
9. seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang diantaranya adalah bersumber dari:

1. pemerintah pusat yaitu berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. pemerintah daerah lain;
3. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. masyarakat yaitu berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil dari pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu sebagai berikut :

1. pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;
2. pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan;

3. pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik sebagai berikut :
  - a. menghasilkan penerimaan langsung;
  - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung; dan
  - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Pemerintah Daerah berencana akan melakukan pinjaman daerah dengan sumber pinjaman dari lembaga keuangan bank untuk pendanaan pembangunan.

**f. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama atau PJKP, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
2. skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian atau kontrak kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJKP dan suatu badan usaha;
3. dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan, dan operasi proyek KPBU;
4. perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang atau lebih dari 15 tahun untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
5. basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJKP dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri dari :

1. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan keamanan nasional; dan/atau
5. membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran atau *on schedule-on budget*;

2. menjamin kualitas pelayanan karena kinerja diperjanjikan dalam kontrak;
3. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan *governance* terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan yaitu Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi *availability payment* atau AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam *debottlenecking*, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah; dan
4. *best practice* KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 (sembilan belas) sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi atau *full cost recovery* atau kelayakan marjinal. Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha berjumlah 19 (sembilan belas) yaitu sebagai berikut:

1. infrastruktur transportasi;
2. infrastruktur jalan;
3. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
4. infrastruktur air minum;
5. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
6. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
7. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
8. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
9. infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan;
10. infrastruktur minyak dan gas bumi;
11. infrastruktur konservasi energi;
12. infrastruktur fasilitas perkotaan;
13. infrastruktur kawasan;
14. infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata atau *tourism information center*;

15. infrastruktur .....

15. infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan;
16. infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya;
17. infrastruktur kesehatan;
18. infrastruktur pemasyarakatan; dan
19. infrastruktur perumahan rakyat.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari :

1. kelompok pertama terdiri dari 6 (enam) jenis infrastruktur konektivitas yaitu transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru serta terbarukan, konservasi energi, dan telekomunikasi dan informatika;
2. kelompok kedua terdiri dari 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan yaitu air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, dan perumahan rakyat; dan
3. kelompok ketiga terdiri dari 6 (enam) jenis infrastruktur fasilitas sosial yaitu pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga, dan budaya, kawasan atau *technopark*, dan kesehatan.

## **BAB IV**

# **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

### **4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan pada RPJMD Tahun 2013-2018, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

#### **1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

##### **a. Pendidikan**

Permasalahan pendidikan di Daerah antara lain:

- 1) belum meratanya akses pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru antar Sekolah;
- 2) belum optimalnya mutu pendidikan disebabkan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi minimal B, nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah dan nilai rata-rata ujian nasional masih rendah;
- 3) masih rendahnya minat baca masyarakat dan masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan

standar .....

standar nasional, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya.

**b. Kesehatan**

Permasalahan Kesehatan yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari Angka Harapan Hidup (AHH) masih di bawah capaian Provinsi Jawa Barat dimana pada tahun 2019 Daerah baru mencapai 72,26 sementara Provinsi Jawa Barat sudah mencapai 72,85;
- 2) munculnya *emerging diseases* (wabah penyakit menular baru yang tidak diketahui sebelumnya atau penyakit menular baru yang insidennya meningkat signifikan) seperti *corona virus diseases* 2019, serta timbulnya *re-emerging diseases* (penyakit yang sebelumnya sudah dikontrol, namun muncul kembali menjadi masalah kesehatan yang signifikan) contoh terjadinya peningkatan kasus difteri pada tahun 2018 menjadi 12 kasus. Jumlah seluruh kasus TB tahun 2018 sebanyak 1.535 kasus, Tahun 2019 meningkat menjadi 1.820 kasus. Kasus TB Anak 0-14 tahun juga mengalami peningkatan, tahun 2018 sebanyak 266 kasus menjadi 318 pada tahun 2019;
- 3) meningkatnya angka penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan asma yang bisa menjadi *Comorbid* bagi penderita penyakit menular serta menjadi penyebab kematian tertinggi. Hipertensi pada tahun 2018 sebanyak 4.324 kasus meningkat pada tahun 2019 menjadi 7.241 kasus. Diabetes melitus pada tahun 2018 sebanyak 1.388 kasus meningkat pada tahun 2019 menjadi 2023 kasus;
- 4) masih rendahnya angka jamban sehat, dari 109.963 KK yang ada di Kota Sukabumi, hanya 53.309 KK yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) sehingga angka jamban sehat baru sebesar 48,5% (empat puluh delapan koma lima persen);
- 5) belum optimalnya pencapaian SPM bidang kesehatan, dimana dari 12 (dua belas) indikator SPM baru 5 (lima) yang sudah memenuhi target dan sisanya 7 (Tujuh) SPM belum mencapai target 100% (seratus persen) :



- Pelayanan Bumil 96,97%
  - Pelayanan Kesehatan Balita 78,53%
  - Skrining Kesehatan Usia Produktif 19,98%
  - Pelayanan Kesehatan Lansia 52,52%
  - Pelayanan Kesehatan Hipertensi 9,60%
  - Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus 10,76%
  - Pelayanan Kesehatan ODGJ 83,23%
- 6) masih rendahnya keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga sehat. Pada tahun 2019 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Daerah baru mencapai 0,276 atau baru sekitar 27,6% atau 23.594 keluarga di Daerah termasuk ke dalam keluarga sehat yang diukur dari 12 (dua belas) indikator keluarga sehat, sisanya yaitu sebanyak 54% atau sebanyak 45.853 keluarga termasuk dalam kategori pra sehat dan sebanyak 19% atau 16.083 keluarga termasuk kedalam keluarga tidak sehat.

### **c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Saat ini pembangunan fisik dan infrastruktur masih belum merata terutama di wilayah selatan. Dikarenakan sebagian besar kegiatan pemerintahan, pendidikan, ekonomi dan sosial masyarakat masih berpusat di wilayah utara. Percepatan pembangunan di wilayah selatan ini perlu terus didorong agar dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan untuk infrastruktur perkotaan terdapat beberapa kekurangan diantaranya masih rendahnya fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, yang baru mencapai 1,84% dari total luasan kota, masih jauh apabila dibandingkan dengan amanat Undang-undang penataan ruang yang mencapai 20% dari luasan kota. Satu hal lagi yang masih menjadi kendala untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman dan nyaman adalah adanya fasilitas pedestrian yang berfungsi dengan baik. Hal ini masih jadi kendala karena di Daerah fasilitas pedestriannya masih belum memenuhi persyaratan nyaman bagi pejalan kaki dan beberapa diantaranya masih digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain.

Untuk fasilitas publik, pelayanan air minum PDAM masih menjadi permasalahan dengan rendahnya capaian pelayanan yaitu

baru .....

baru mencapai 20,76% dari debit optimumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat di Daerah belum memperoleh layanan air minum perpipaan PDAM.

Selain persoalan infrastruktur dan fasilitas publik, pada sektor tata ruang juga masih terdapat beberapa permasalahan yaitu dengan masih ditemukannya berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan yang diakibatkan karena kurangnya sanksi dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi. Selain itu, Daerah belum memiliki RDTR yang dapat menjadi acuan pemanfaatan ruang dan zonasi secara lebih detail dalam setiap pengajuan izin usaha dan/atau kegiatan.

#### **d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pada sektor perumahan dan permukiman salah satu permasalahan yang ada yaitu permukiman kumuh, berdasarkan target penanganan kumuh pada SK Kumuh tahun 2015 masih tersisa sekitar 17% yang masih harus dituntaskan. Selain itu angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) juga masih cukup tinggi yaitu mencapai 54,62% dan belum ada kelurahan dengan kategori *Open Defecation Free* (ODF).

Di Daerah jumlah rumah tinggal layak huni (rutilahu) baru mencapai 1.300 rumah dan angka backlog perumahan belum tersedia data yang pasti. Selain itu saat ini untuk perumahan permasalahan yang terjadi yaitu masih rendahnya tingkat serah terima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), yakni baru 5 (lima) PSU serah terima dari pengembang ke pemerintah.

#### **e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Daerah masuk dalam Indeks Rawan Bencana (IRB) tinggi dalam peta IRBI yang dikeluarkan oleh BNPB, untuk itu diperlukan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai terutama bangunan kantor BPBD yang saat ini tidak memadai dan belum tersedianya gudang logistik dan peralatan.

Selain itu, Daerah belum memiliki sistem atau alat deteksi dini terjadinya bencana serta kurang memiliki fasilitas penanggulangan bencana kebakaran, seperti mobil damkar dan hydrant.

Dalam hal pencegahan bencana, permasalahan yang terjadi yaitu belum berjalannya mekanisme pendirian bangunan melalui assesment dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) serta belum adanya sertifikat layak fungsi bangunan.

**f. Sosial**

Permasalahan sosial yang masih ditemui di Daerah adalah:

- 1) belum optimalnya pemberian pelayanan sosial yang meliputi aspek rehabilitasi sosial dasar maupun lanjutan, perlindungan dan jaminan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti anak terlantar, anak disabilitas/berkebutuhan khusus, lansia terlantar, tuna sosial dan penanganan bencana alam maupun sosial serta PPKS lainnya, ditandai dengan :
  - a) belum terdatanya jumlah PPKS secara menyeluruh dan berkesinambungan sehingga tidak dapat menyeimbangi laju kemiskinan dan permasalahan sosial yang cenderung dinamis di masyarakat. Sementara itu data menjadi tolak ukur utama pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial;
  - b) belum terbentuknya sistem dan manajemen penanganan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antar instansi dan profesi sehingga penanganan tidak bersifat sektoral dan terputus, termasuk di dalamnya terkait kebijakan lokal mengenai pelayanan sosial;
  - c) belum tersosialisasi dan teradaptasinya proses pemberian pelayanan sosial oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga masih ditemukan adanya perbedaan pemahaman mengenai pelayanan sosial, hal ini mengakibatkan pelayanan tidak bisa dilaksanakan sesuai standar dan kewenangan sosial;
  - d) belum terfasilitasinya pelayanan sosial dasar maupun lanjutan secara komprehensif (Sesuai SPM pemberian pelayanan resos dasar meliputi aspek bantuan permakanan, sandang, pangan, alat bantu, reunifikasi dengan keluarga) belum memenuhi aspek layanan rehabilitasi sosial lanjutan seperti pemberian layanan data, pengaduan, rujukan dan bimbingan fisik mental spiritual dan sosial dengan tidak adanya rumah singgah khusus penanganan sementara PPKS di Daerah;
- 2) belum optimalnya peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan lembaga kesejahteraan sosial sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, ditandai dengan :

a. belum .....

- a) belum terkoordinasinya Pendataan Kemiskinan (berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) berbasis kewilayahan di Daerah, meliputi data-data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mana data tersebut harus valid, akuntabel dan dilakukan *Updating* data secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang bekerjasama dengan aparat kewilayahan dan pekerja sosial;
- b) belum terkoordinasinya pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan sosial dalam penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh PSKS saat ini.

## **2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada 17 (tujuh belas) urusan wajib non pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

### **a. Tenaga Kerja**

Permasalahan tenaga kerja yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja;
- 2) kualitas tenaga kerja relatif rendah;
- 3) dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.
- 4) masih terdapat pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum;
- 5) belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja.

### **b. Pangan**

Permasalahan pangan yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) peningkatan produksi dan produktivitas pangan yaitu beras belum optimal akibat adanya kecenderungan penurunan luas lahan pertanian produktif sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
- 2) koordinasi dan sinergitas antara Perangkat Daerah dalam hal penyediaan, pengumpulan, dan pengelolaan data yang terkait dengan urusan ketahanan pangan masih belum optimal. Penyajian data dan informasi yang lengkap, akurat, dan *up to date*

untuk .....

untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam hal kebijakan ketahanan pangan, selama ini belum bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat, karena belum terbentuk sistem pengelolaan data ketahanan pangan yang terintegrasi dan *online* antar Perangkat Daerah penanggung jawab teknis atau pemangku kepentingan;

- 3) monitoring dan evaluasi terkait implementasi Surat Wali Kota Nomor 526/516 tanggal 19 Juni 2013 tentang Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan atau *One Day No Rice* (ODTR) belum berjalan secara optimal;
- 4) pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah belum optimal; dan
- 5) volume cadangan pangan tingkat pemerintah belum memenuhi target SPM dan masih adanya kendala dalam sistem pemeliharaan dan peremajaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

**c. Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro**

Permasalahan koperasi, usaha kecil dan mikro yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) kondisi usaha mikro dan kecil (UMK) belum optimal, dimana belum seluruhnya memiliki legalitas usaha;
- 2) pengelolaan koperasi pada umumnya belum dilaksanakan secara profesional, dimana sebagian besar dikelola secara paruh waktu, manajemen organisasi kurang berjalan, dan manajemen bisnis belum maksimal;
- 3) pola kemitraan atau kerjasama antara koperasi dan UMK, dengan pengusaha besar belum optimal baik di bidang permodalan maupun pemasaran;
- 4) perlunya peningkatan dukungan pendanaan untuk promosi produk usaha mikro;
- 5) masih adanya kesan yang berkembang di masyarakat bahwa dana bergulir dari pemerintah dianggap hibah, sehingga menghambat laju perguliran dan penguatan struktur permodalan koperasi dan UMK;
- 6) belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi usaha mikro (PIRT, Sertifikasi Halal);
- 7) belum tersedianya sistem database koperasi dan usaha mikro

yang .....

yang baik;

- 8) kurangnya SDM aparatur urusan koperasi dan UMK, baik secara kuantitas maupun kualitas kompetensinya, serta peningkatan dukungan alokasi anggaran pembangunan bidang koperasi dan UMK.

**d. Penanaman Modal**

Permasalahan penanaman modal yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) luas wilayah Daerah yang relatif kecil dan masih terbatasnya ruang usaha di Daerah, menyulitkan untuk mendatangkan investor yang akan menanamkan modalnya, khususnya untuk sektor industri;
- 2) dengan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan nilai ekonomi secara nasional yang berdampak terhadap Daerah sehingga berpengaruh besar terjadinya penurunan nilai investasi khususnya di Daerah;
- 3) adanya lahan yang sudah dimiliki investor yang tidak sejalan dengan RTRW sehingga tidak bisa dipergunakan berinvestasi karena tidak sesuai peruntukannya.

**e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah meliputi :

- 1) masih ditemukannya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- 2) masih rendahnya pemenuhan hak anak ini dibuktikan dengan capaian status kota layak anak yang masih di level Nindya;
- 3) baru 30% dari total anggaran APBD yang sudah dilakukan analisa anggaran yang berbasis gender dalam perencanaan pembangunan daerah penyusunan analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budgeting Statement* (GBS);
- 4) rendahnya peran serta perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga, jumlah kelompok usaha perempuan tahun 2019 yang masih rendah yaitu sebanyak 29 kelompok usaha jika dibanding dengan jumlah kepala keluarga perempuan di Daerah kelompok usaha perempuan tersebut baru sekitar 1,56%.

**f. Pertanian**

Urusan wajib pertanahan dapat berlangsung cukup baik dan tidak menemui kendala berarti dalam kurun waktu tahun 2013-2019.

**g. Lingkungan Hidup**

Permasalahan lingkungan hidup yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 2) menurunnya kualitas lingkungan;
- 3) belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan sampah;
- 4) adanya potensi berkurangnya RTH publik sebagai dampak dari pengembangan iklim investasi di Daerah; dan
- 5) terbatasnya SDM yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Daerah menjadi kendala dalam penanganan kasus pengaduan pencemaran lingkungan dalam upaya penegakan hukum lingkungan.

**h. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Permasalahan kependudukan dan catatan sipil yang masih ditemui di Daerah meliputi:

- 1) masih terdapat penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan antara lain Kartu Keluarga, KTP-el, KIA, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan/Nikah, Akta Perceraian;
- 2) masih kurang kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya kepada Pemerintah Daerah, untuk akurasi dan validasi data kependudukan yang sangat berguna untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran oleh pemangku kebijakan di Daerah;
- 3) masih banyak Organisasi Perangkat Daerah yang belum melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk perumusan perencanaan anggaran kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- 5) masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai informasi teknologi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

**i. Pemberdayaan Masyarakat**

Permasalahan yang ada terkait pemberdayaan masyarakat adalah belum optimalnya peran lembaga dan organisasi yang ada di masyarakat seperti PKK, posyandu dan LPM. Rata-rata keanggotaan masyarakat dalam LPM atau PKK belum aktif dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Sementara itu kemandirian posyandu di Daerah baru mencapai 57,17% dari total 453 posyandu yang ada diantaranya terkait masih banyak kader posyandu yang belum terlatih.

**j. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) penurunan kualitas keutuhan keluarga yang mengakibatkan tingginya kasus perceraian, di tahun 2019 terdapat 674 kasus perceraian;
- 2) keterbatasan SDM baik aparatur maupun kader di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- 3) peningkatan cakupan PUS peserta KB aktif belum diikuti dengan penurunan unmet need secara proporsional sebagai akibat dari fokus penggarapan program KB di wilayah masih berorientasi pada peningkatan alih cara dibandingkan dengan porsi penggarapan kepada PUS yang tidak ber-KB khususnya kategori PUS Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) ;
- 4) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE dan pemanfaatan kegiatan KB momentum sebagai sarana pembinaan akseptor oleh para PLKB, PKB, TPD/TPK.

**k. Perhubungan**

Permasalahan perhubungan yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) kemacetan yang cukup tinggi;
- 2) belum optimalnya pelayanan angkutan umum massal di Daerah;
- 3) kurangnya penyediaan parkir dalam memenuhi tingginya bangkitan kegiatan di pusat Daerah; dan
- 4) belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus.

**l. Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan komunikasi dan informatika yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) terbatasnya alokasi dana untuk pengembangan jaringan

komunikasi .....



komunikasi dan informasi sehingga pertumbuhan jaringan *Wide Area Network* (WAN), lambat dan harus dilakukan secara bertahap;

- 2) terbatasnya sumberdaya manusia bidang telematika baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- 3) terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 4) masih mahalnya harga bandwidth internet yang berkualitas; dan
- 5) belum tersedianya *data center* yang menjadi sumber pengintegrasian data di Dinas Komunikasi dan Informatika.

**m. Kepemudaan dan Olah Raga**

Permasalahan kepemudaan dan olahraga yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung urusan kepemudaan saat ini hanya terdapat 1 (satu) gedung kepemudaan;
- 2) belum optimalnya pemanfaatan Sarana Olah Raga (SOR) baik di kalangan pemuda maupun masyarakat.

**n. Statistik**

Permasalahan statistik yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral;
- 2) tingkat partisipasi dan distribusi data dari pengguna/Perangkat Daerah terhadap kebutuhan pengguna data yang berkualitas sangat rendah;
- 3) belum optimalnya sistem aplikasi yang memudahkan pengelolaan dan penyelenggaraan data statistik sektoral.

**o. Kebudayaan**

Permasalahan kebudayaan yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) belum adanya pembangunan museum kepurbakalaan dan jarahnitra;
- 2) kurangnya perlindungan pemeliharaan dan penyelamatan warisan budaya tak benda dan hak kekayaan intelektual.

**p. Perpustakaan**

Permasalahan perpustakaan yang ditemui di Daerah adalah:

1) Gedung .....

- 1) Gedung Perpustakaan Umum sebagai perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan di tingkat kota masih jauh dari kondisi ideal dengan masih terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki sebagai penunjang penyelenggaraan pelayanan baik layanan utama maupun layanan ekstensi. Demikian juga sumberdaya manusia yang dimiliki masih sangat terbatas dengan hanya memiliki 3 (tiga) Pustakawan Trampil dan 1 (satu) Pustakawan Ahli, sehingga dalam penyelenggaraan layanan masih dilakukan oleh tenaga sukarela;
- 2) masih terbatasnya perpustakaan dan taman bacaan yang ada sehingga masyarakat masih sulit untuk mendapatkan bahan yang sesuai dengan kebutuhannya, yang adapun masih belum terbina dengan baik karena kendala anggaran dan sarana prasarana dan lebih mengandalkan swadaya masyarakat;
- 3) masih rendahnya budaya literasi masyarakat sehingga masih perlu terus dilakukan sosialisasi, publikasi dan berbagai gerakan dalam rangka untuk meningkatkannya diantaranya dengan lebih mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi dengan komunitas dan pegiat literasi yang ada di masyarakat.

**q. Kearsipan**

Permasalahan kearsipan yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) kurangnya SDM di bidang kearsipan, jumlah tenaga arsiparis saat ini hanya 3 (tiga) orang sedangkan arsiparis minimal yang dibutuhkan adalah 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) arsiparis Perangkat Daerah dan 4 (empat) arsiparis LKD atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 2) gedung depo arsip yang dimiliki saat ini kurang representatif karena tidak memenuhi standar penyimpanan arsip, diantaranya kondisi gedung tidak kedap udara, pencahayaannya kurang, tempat sterilisasi arsip tidak ada, tidak ada ruang pameran, dan tidak ada ruang staf arsip. Selain itu sarana penunjang kurang memadai seperti listrik, jaringan internet dan depot arsip belum dijaga keamanannya selama 24 (dua puluh empat) jam.

**3. Urusan Pilihan**

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pada tahun 2013-2017, Daerah menyelenggarakan 6 (enam) urusan pilihan yaitu urusan pilihan pertanian, kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan ketransmigrasian.

**a. Pertanian**

Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian masih belum bisa dikendalikan meskipun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah ditetapkan sehingga upaya untuk meningkatkan produksi pangan pokok yaitu beras dari dalam Daerah masih belum dapat berjalan optimal.

**b. Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan kelautan dan perikanan yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) tingkat konsumsi ikan daerah masih di bawah realisasi tingkat provinsi dan pusat;
- 2) peningkatan standarisasi budidaya perikanan melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) pada tingkat masyarakat pembudidaya ikan dan CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) pada tingkat BBI serta pelaku usaha pembenihan ikan di Daerah masih perlu ditingkatkan dalam hal fasilitasi sertifikasi maupun pengawasan penerapan di lapangan secara konsisten.

**c. Perdagangan**

Permasalahan perdagangan yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) perlunya peningkatan ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi perdagangan lainnya yang mampu melayani seluruh wilayah di Daerah;
- 2) perlunya sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting dalam menjaga stabilitas distribusi dan harga barang-barang di pasaran;
- 3) perlunya peningkatan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam hal penataan tempat berusaha yang strategis dan representatif, peningkatan pemberdayaan, serta peningkatan kesadaran dalam ketertiban dan kebersihan;

4) perlunya .....

- 4) perlunya peningkatan pembinaan bagi pelaku usaha dalam hal tertib hukum, tertib niaga, dan pelaporan;
- 5) masih rendahnya frekuensi dan tingkat promosi produk Usaha Mikro Kecil sehingga sulit menembus pangsa pasar, baik di dalam maupun luar negeri/ekspor;
- 6) pola kemitraan di bidang pemasaran antara pedagang kecil, menengah dengan pengusaha besar belum optimal;
- 7) potensi pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi investasi dan perdagangan terhadap mekanisme pasar, selain potensi positifnya;
- 8) perlunya penerapan digitalisasi sistem penerimaan retribusi pedagang pasar dan retribusi layanan metrologi legal;
- 9) perlunya peningkatan fasilitasi layanan publik urusan metrologi legal: penambahan SDM aparatur tenaga fungsional penera; belum terbangunnya gedung mandiri yang standar; dan belum tersedianya kendaraan operasional kemetrolagian.
- 10) perlunya penambahan tenaga teknis sesuai tugas dan fungsinya, serta peningkatan dukungan alokasi anggaran pembangunan bidang perdagangan.

**d. Perindustrian**

Permasalahan perindustrian yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana, sehingga produk yang dihasilkan belum dapat bersaing di pasar global;
- 2) belum seluruhnya industri kecil dan menengah (IKM) di Daerah merupakan IKM produktif. IKM produktif di Daerah baru mencapai 74,49%, yang disebabkan masih banyaknya IKM yang memproduksi secara musiman atau sewaktu-waktu apabila ada pesanan;
- 3) Masih terdapatnya kendala-kendala berupa pola kluster industri belum berjalan secara optimal, rendahnya kemampuan akses permodalan, rantai pasok bahan baku belum optimal, masih banyak yang menggunakan teknologi yang relatif sederhana (kualitas kurang berdaya saing), masih kurangnya *skill* kreatifitas para pelaku usaha dalam berinovasi, dan belum optimalnya tingkat akses pemasaran;
- 4) potensi pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi investasi dan

perdagangan .....

perdagangan terhadap daya saing produk IKM, selain potensi positifnya;

- 5) perlunya peningkatan sistem database IKM dan pembinaan bagi IKM dalam hal tertib pelaporan;
- 6) perlunya peningkatan dukungan alokasi anggaran pembangunan bidang perindustrian.

**e. Pariwisata**

Permasalahan pariwisata yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) belum maksimalnya pertumbuhan dan pengembangan Pariwisata Ekonomi Kreatif;
- 2) masih minimnya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang dimiliki mengakibatkan Daerah hanya menjadi transit wisata;
- 3) masih rendahnya sumber daya manusia pengelola destinasi pariwisata milik Daerah;
- 4) kurangnya promosi pariwisata melalui media sosial;
- 5) Kurangnya sarana prasarana destinasi pariwisata unggulan milik Daerah.

**f. Ketrasmigrasian**

Permasalahan ketrasmigrasian yang ditemui di Daerah adalah:

- 1) pembekalan pendidikan untuk meningkatkan potensi pemahaman tinggal di daerah tujuan masih kurang;
- 2) belum teranggarkannya bantuan untuk para transmigran yang sudah menetap dan yang akan diberangkatkan.

**4.2. ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis

diperlukan .....

diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. permasalahan pembangunan Daerah;
2. dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Daerah; dan
3. KLHS RPJMD.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Penyusunan perubahan RPJMD membutuhkan kerangka analisis isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batas-batas administrasi negara, dan situasi nasional. Keterkaitan antar isu strategis dimaksudkan dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritas dalam perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan fakta-fakta. Karena itu, penyusunan perubahan RPJMD yang dikonseptualisasi akan bergerak dari realitas dasar mencakup pembangunan di segala bidang yang diharapkan lebih dapat memperhatikan perkembangan realitas lain menyangkut keadaan yang menggambarkan penciptaan realitas dasar diantara arus eksternalisasi isu global yang mampu mempengaruhi isu nasional dan regional.

#### **4.2.1. Isu/Kebijakan Nasional**

##### **4.2.1.1. Pandemi COVID-19**

Sejak awal tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19). Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara dan pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah menyebar dengan cepat menyebar ke seluruh

provinsi .....

provinsi di Indonesia. Sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 169.195 (seratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima) orang terkonfirmasi positif, 122.802 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua) orang dinyatakan telah sembuh dan 7.261 (tujuh ribu dua ratus enam puluh satu) orang meninggal dunia yang tersebar di 34 Provinsi dan 487 Kabupaten/Kota. Pada tanggal 15 Oktober 2020 Indonesia Pada Peringkat 17 negara dengan angka kematian tertinggi dunia untuk penyebaran Covid-19 dengan angka kematian 35 kematian per juta penduduk. Dikarenakan begitu luasnya dampak pandemi COVID-19, COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah antara lain membatasi interaksi antarmanusia. Pembatasan sosial (*social distancing*) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (*travel ban*), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi turun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun dari sisi penawaran (*supply*). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Semua ini berujung pada penurunan output global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan dampaknya juga berpotensi mengakibatkan gangguan stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dialami hampir seluruh negara yang terdampak COVID-19, tidak terkecuali Indonesia.

Penanganan COVID-19 dan dampaknya membutuhkan kapasitas sumber daya yang sangat besar. Ini dibutuhkan dalam rangka penyediaan segala fasilitas dan sistem pelayanan kesehatan, serta mengelola dampak sosial dan ekonomi sebagai konsekuensi dari kebijakan untuk menahan penyebaran wabah,

misalnya .....

misalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pengerahan sumber daya yang luar biasa besar dilakukan baik untuk menangani wabahnya sendiri maupun untuk menyelamatkan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan berbagai bentuk subsidi ekonomi dan jaring pengaman sosial. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan, maka pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait penanganan covid-19 dari pusat sampai daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

e. Keputusan .....



- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor

177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

- n. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid19 di Wilayah Kota Sukabumi;
- o. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2020, Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid19 di Kota Sukabumi.

#### **4.2.1.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut :

1. peningkatan kualitas Manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMD 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden RI telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, sebagai berikut :

1. pembangunan SDM, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. pembangunan infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. penyederhanaan regulasi, yaitu menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang yaitu Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM;
4. penyederhanaan birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. transformasi ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **4.2.2. Isu-isu Internasional**

##### 4.2.2.1. Tujuan .....

#### **4.2.2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals***

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*” dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target, yaitu:

1. tidak adanya kemiskinan;
2. bebas dari kelaparan;
3. sehat dan sentosa;
4. pendidikan berkualitas;
5. persamaan gender;
6. air bersih dan sanitasi;
7. energi bersih dan terjangkau;
8. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. industri, inovasi, dan infrastruktur;
10. berkurangnya ketimpangan;
11. kota dan komunitas berkelanjutan;
12. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
13. perubahan iklim ditangani;
14. sumberdaya laut dipelihara;
15. ekosistem darat dipelihara;
16. perdamaian, keadilan, dan lembaga yang efektif; dan
17. adanya kerjasama global.

Sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mencapai SDGs/TPB, telah ditetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selaras dengan TPB dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

#### 4.2.2.2. Kerjasama .....

#### **4.2.2.2. Kerjasama Internasional**

Peran konstruktif dan kepemimpinan Indonesia semakin diakui di kancah internasional. Saat ini, Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang semakin meningkat, demokrasi yang dinamis, negara terkemuka dalam perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara atau ASEAN, kerjasama ekonomi asia-pasifik atau APEC, dan anggota dari G-20. Sementara itu, Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan juga telah menginisiasi kerjasama ekonomi dengan beberapa blok perdagangan semisal *Trans Pacific Partnership* (TPP), *Indonesia-EU, Free Trade Area of the Asia Pacific* (FTAAP), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

Indonesia juga telah memasuki era perdagangan bebas wilayah ASEAN dan sekitarnya dalam kerangka *Asean Economic Community* (AEC), *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA), dan juga telah mengisi peran yang cukup signifikan pada level kerjasama global dan multilateral.

Bagi Indonesia keterlibatan ini merupakan sebuah wadah yang jika dioptimalisasi maka Indonesia dapat mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Indonesia berupaya mengatasi tantangan dalam negeri dan pada saat yang sama memainkan peran penting di panggung pembangunan dunia. Pada forum-forum tersebut Indonesia berhasil mengembangkan diri sebagai negara terkemuka dalam mengatasi tantangan pembangunan global yang mempengaruhi kemakmuran dalam negeri. Selain itu, Indonesia ingin mencapai daya saing ekonomi dari sumber daya alam yang terus meningkat, sumber daya manusia yang lebih baik, dan peningkatan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkenaan dengan hal tersebut, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah memanfaatkan keberadaannya di forum-forum global dan regional tersebut sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa. Pemerintah Republik Indonesia saat ini telah melakukan kerja sama pembangunan internasional, dimana kerja sama tersebut merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional.

#### **4.2.3. Krisis Global**

Indonesia akan menghadapi tantangan besar, berbagai isu domestik dan internasional akan terus mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia ke depan. IMF menyatakan perekonomian dunia akan mengalami krisis keuangan terburuk sejak depresi besar tahun 1930-an, perekonomian dunia diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat pandemi covid 19 yang melanda dunia. Pandemi covid 19 memaksa pemerintah dari berbagai Negara untuk menghentikan sementara aktivitas sekolah dan bisnis sehingga mengakibatkan perekonomian mandek, hal ini merupakan kondisi darurat kesehatan yang segera berubah menjadi krisis ekonomi dengan langkah- langkah pembatasan sosial dan perjalanan yang dilakukan untuk meredam penyebaran.

IMF memperingatkan bahwa kontraksi dan pemulihan ekonomi dunia akan mengarah ke skenario terburuk dari yang diperkirakan jika virus Corona bertahan lama atau kembali mencuat. IMF memperkirakan bahwa produk domestik bruto global akan menyusut 3 persen pada tahun 2020. Ekonomi global kemungkinan besar mengarah pada kemerosotan terbesar dalam hampir satu abad terakhir, untuk pertama kalinya sejak *The Great Depression* baik negara maju dan negara berkembang berada dalam resesi dimana ada ketidakpastian tentang durasi, intensitas dan kapan krisis akan berakhir.

Regional Kawasan Berkembang di Asia diproyeksikan menjadi satu-satunya wilayah dengan tingkat pertumbuhan positif pada tahun 2020 sebesar 1,0 persen, 5 persentase poin di bawah rata-rata pertumbuhan pada dekade sebelumnya. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 pada kisaran 2,3 persen, angka ini masuk ke dalam skenario berat ekonomi Indonesia. Sementara itu, skenario terberat yang mungkin terjadi terhadap ekonomi Tanah Air adalah pertumbuhan -0,4 persen. Pemerintah juga memperkirakan ada kenaikan jumlah warga miskin di Indonesia pada tahun 2020 yang jumlahnya bisa mencapai 1,1 juta orang untuk skenario berat dan 3,78 juta orang pada skenario sangat berat. Oleh karena itu, pemerintah akan fokus mendorong jaminan sosial dan bantuan sosial bagi masyarakat.

Tahun 2021, kelompok ekonomi maju diperkirakan tumbuh 4,5 persen sementara pertumbuhan untuk pasar negara berkembang dan kelompok ekonomi berkembang diperkirakan 6,6 persen, dengan asumsi pandemi memudar pada paruh kedua tahun 2020 dan bahwa tindakan kebijakan yang diambil di seluruh dunia efektif dalam mencegah kebangkrutan perusahaan yang meluas, PHK, dan tekanan finansial yang meluas pada sistem. Hal ini akan menjadi rebound terkuat sejak tahun 1980. Namun IMF mengingatkan masih ada resiko yang dapat memicu pertumbuhan tertekan berkepanjangan, kondisinya sangat bergantung pada berapa lama pandemi berlangsung, pengaruhnya terhadap aktivitas serta tekanan di pasar keuangan dan komoditas.

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Daerah, sebagian atau seluruh aspek dalam isu-isu internasional yang telah dijabarkan di atas, dapat dipilih sebagai aspek yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Daerah di tahun mendatang. Hal ini dapat diawali dengan menjadikan isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, peningkatan daya saing serta daya tahan daerah terhadap krisis sebagai isu strategis perubahan RPJMD serta mengkaitkan isu-isu tersebut dengan permasalahan riil di lapangan.

#### **4.2.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD**

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Daerah, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Mengingat pentingnya KLHS perubahan RPJMD, maka hasilnya akan digunakan sebagai salah satu masukan bagi penyusunan perubahan RPJMD.

Dalam kaitan dengan pencapaian target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perumusan isu strategis pada pembangunan Daerah 5 (lima) tahun ke depan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola kelembagaan yang terjadi saat ini berdasarkan hasil dari KLHS perubahan RPJMD. Kondisi eksisting dari keempat kondisi tersebut merupakan kondisi awal atau *baseline* dari Daerah dalam mencapai target dari setiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan di Daerah. Kesenjangan antara kondisi *baseline* dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu dicapai, menjadi dasar untuk perumusan isu strategis dalam pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program. Proses pengkajian isu strategis dilakukan melalui tahapan berikut yaitu:

1. Tahap Identifikasi Isu Strategis

a. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan setiap pilar yang dikelompokkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) isu strategis pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dilakukan proses sintesis terhadap kriteria strategis isu pembangunan berkelanjutan yang berjumlah sebanyak enam kriteria yaitu:

- 1) cakupan dampak luas;
- 2) multi pemangku kepentingan;
- 3) memerlukan kebijakan yang lebih tinggi;
- 4) dampak kumulatif;
- 5) dampak jangka panjang; dan
- 6) antar sektor.

Isu pembangunan berkelanjutan dianggap bersifat strategis apabila memenuhi keenam kriteria tersebut.

b. Identifikasi dan perumusan isu strategis berdasarkan hasil telaahan 6 (enam) muatan KLHS.

2. Tahap Analisis Isu Strategis

Analisis isu strategis dilakukan dengan menggunakan metode *crosscutting* antara hasil identifikasi isu dan telaahan enam muatan KLHS Perubahan RPJMD terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan cara:

a. menghitung .....



- a. menghitung *gap* atau kesenjangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah; dan
- b. sintesis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap isu yang dihasilkan dan muatan KLHS.

Hal tersebut di atas dimaksudkan untuk memperoleh isu strategis yang diprioritaskan penanganannya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah, khususnya dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Sebagaimana proses penyusunan perubahan RPJMD yang dilaksanakan secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan proses penyusunan RPJMD, penyusunan KLHS Perubahan RPJMD juga dilaksanakan secara mutatis mutandis. Berdasarkan Uji Publik I Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD, telah disepakati isu utama, tantangan, dan kondisi pencapaian TPB, yaitu sebagai berikut:

1. tanpa kemiskinan (TPB 1);
2. tanpa kelaparan (TPB2);
3. kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3);
4. air bersih dan sanitasi layak (TPB 6);
5. kota dan pemukiman yang berkelanjutan (TPB 11);
6. penanggulangan perubahan iklim (TPB 13); dan
7. pendidikan berkualitas (TPB 4).

Ketujuh isu utama tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan isu strategis KLHS Perubahan RPJMD.

#### **4.2.5. Isu Strategis Terkait Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu :

1. pendidikan .....

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;  
dan
6. sosial.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis yaitu :

1. pendidikan anak usia dini;
2. pendidikan dasar;
3. pendidikan kesetaraan;
4. pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. pelayanan kesehatan balita;
8. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. pelayanan kesehatan diabetes melitus;
13. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
16. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah;

19. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
20. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
21. pelayanan informasi rawan bencana;
22. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

#### **4.2.6. Perumusan Isu Strategis Perubahan RPJMD**

Perumusan isu strategis Perubahan RPJMD dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis dari berbagai sumber diantaranya yaitu permasalahan pembangunan Daerah, dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Daerah serta KLHS Perubahan RPJMD. Selain hal tersebut, supaya tercipta sinergitas dan konsistensi dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka perumusan isu strategis juga diselaraskan dengan isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJPD serta isu strategis hasil kajian dengan 6 muatan KLHS disajikan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Perumusan Isu Strategis RPJMD**

<b>ISU STRATEGIS</b>			
<b>NO</b>	<b>RPJMD PROVINSI JAWA BARAT</b>	<b>RPJPD</b>	<b>ISU STRATEGIS BERDASARKAN 6 MUATAN KLHS Perubahan RPJMD</b>
1	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	Kualitas dan daya saing SDM yang antara lain ditandai oleh solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat, pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya SDM serta kinerja pengelolaan SDM.	Daya dukung pangan di Daerah sudah melampaui ambang batas daya dukungnya
2	Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	Akses, kualitas dan relevansi pendidikan yang diiringi manajemen pelayanan pendidikan, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat	Daya dukung air di Daerah sebagian besar belum melampaui ambang batas daya dukung
3	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan oleh masyarakat di Daerah dan sekitarnya melalui mekanisme asuransi kesehatan serta upaya promotif dan preventif	Terjadi indikasi konflik tumpang tindih antara kawasan pola ruang dengan kondisi eksisting tahun 2016
4	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	Kegiatan usaha yang berdaya saing dan integrasi vertikal maupun horizontal dalam sistem agribisnis	Proyeksi penduduk Daerah semakin meningkat setiap tahun
5	Reformasi birokrasi	Penguatan kemitraan dengan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional	Timbunan sampah Daerah dominan pada kawasan pemukiman di dataran ekoregion perbukitan vulkanik
6			sumber pencemar parameter BOD, COD, dan TSS meningkat setiap tahun
7			Nilai persentase efisiensi pemanfaatan penyedia pangan dan air bergantung kesesuaian kondisi

ISU .....

<b>ISU STRATEGIS</b>			
<b>NO</b>	<b>RPJMD PROVINSI JAWA BARAT</b>	<b>RPJPD</b>	<b>ISU STRATEGIS BERDASARKAN 6 MUATAN KLHS Perubahan RPJMD</b>
			eksisting terhadap perencanaan pola ruang
8			Terdapat proporsi 20 Indeks Jasa Ekoregion (IJE) di setiap ekoregion dan 20 Indeks Jasa Ekoregion (IJE) di setiap kecamatan
9			Terdapat Indeks Jasa Ekoregion (IJE) maksimum dan 5 Indeks Jasa Ekoregion (IJE) dominan di setiap ekoregion dan 5 Indeks Jasa Ekoregion (IJE) dominan di setiap kecamatan
10			Potensi keanekaragaman hayati di Daerah direpresentasikan dalam pola dan nilai shape index dimana pola shape index cenderung mengikuti pola persebaran RTH Eksisting
11			Potensi rawan bencana gerakan tanah, kebakaran, dan kekeringan terjadi di beberapa wilayah Daerah sedangkan bencana gempa bumi berpotensi tinggi di seluruh wilayah Daerah
12			Wilayah di Daerah hampir seluruh kecamatan memiliki nilai IJE perlindungan terhadap bencana yang tinggi kecuali di wilayah pusat

Sumber : Hasil analisis 2020

Setelah .....

Setelah mempertimbangkan berbagai isu pembangunan maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Perubahan RPJMD karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh Perangkat Daerah sampai tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memperhatikan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan dan fenomena pandemi covid 19, maka dalam Perubahan RPJMD terdapat penambahan isu strategis dari 5 (lima) menjadi 6 (enam) isu strategis Daerah yang teridentifikasi, sebagai berikut:

- 1) kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan;
- 2) infrastruktur dan tata kota;
- 3) daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) kualitas lingkungan hidup;
- 5) penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- 6) dampak pandemi covid 19.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. VISI**

Visi pembangunan jangka menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Visi pembangunan jangka menengah Daerah menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka menengah harus menjawab permasalahan pembangunan Daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Daerah, adalah:

**“Terwujudnya Kota Sukabumi  
yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera”**

Visi tersebut diwujudkan menjadi visi Perubahan RPJMD dan diterjemahkan ke dalam pilar-pilar visi yang dirumuskan dan dijelaskan pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Perwujudan Visi Perubahan RPJMD**

<b>Visi</b>	<b>Pilar-Pilar Visi</b>	<b>Penjelasan Pilar-Pilar Visi</b>
<b>Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius Nyaman dan Sejahtera</b>	<b>Religius</b>	Pembangunan Daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Daerah yang memiliki sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.
	<b>Nyaman</b>	Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Daerah menjadikan Daerah yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas.
	<b>Sejahtera</b>	Suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara adil. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Sumber : Hasil analisis 2020



## 5.2. MISI

Dalam mewujudkan visi Perubahan RPJMD, maka ditetapkan beberapa misi Perubahan RPJMD, yaitu:

1. mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
3. mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar; dan
4. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dan inovatif.

Empat butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan Daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut, maka penjabaran misi di atas dapat dijelaskan dalam sub - sub bab berikut:

### 5.2.1. Misi 1

**Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.**

Pernyataan Misi 1 di atas secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

1. membangun masyarakat yang berkarakter melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
2. mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan lokal;
3. meningkatkan perlindungan sosial serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
4. meningkatkan peran keluarga dalam pembangunan manusia.

Dalam upaya pencapaian Misi 1 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi sebagaimana disajikan pada Gambar 5.1 berikut:



**Gambar 5.1**  
**Perencanaan Terintegrasi Pencapaian Misi 1**  
(Sumber : Hasil analisis 2020)

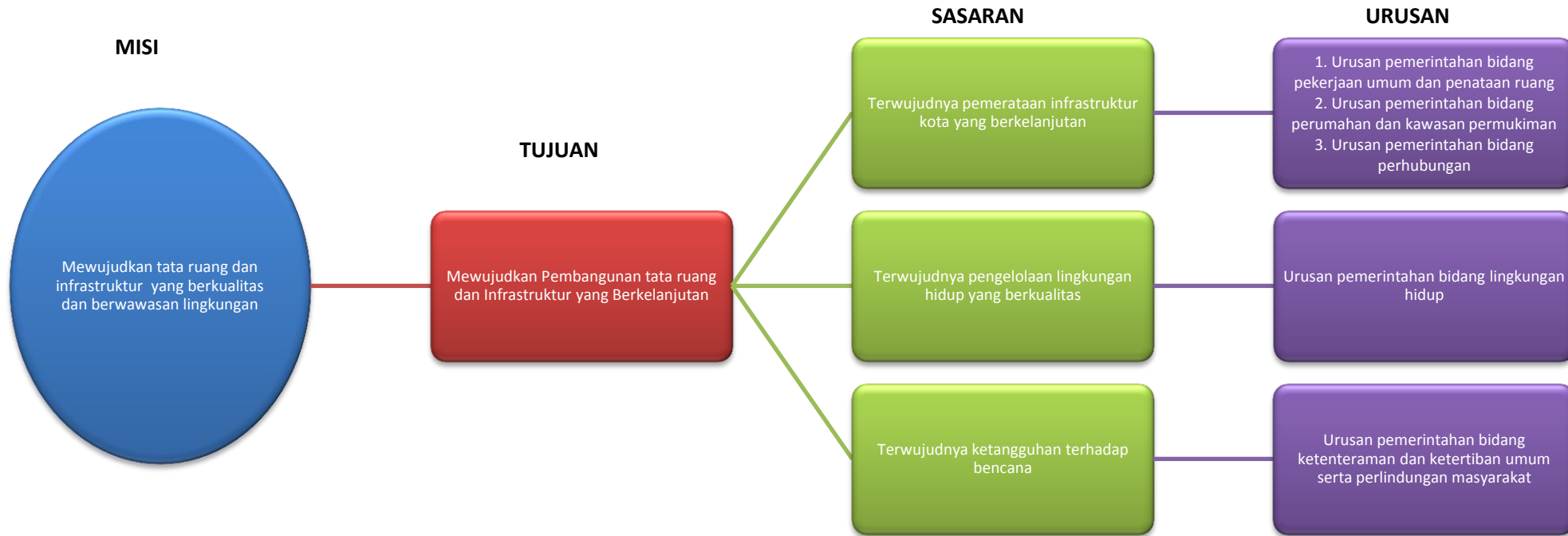
### 5.2.2. Misi 2

#### **Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**

Pembangunan tata ruang dan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di Daerah. Pernyataan Misi 2 tersebut secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

1. membangun infrastruktur kota dan permukiman yang mengacu pada implementasi kebijakan dan perencanaan sesuai *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* serta tetap memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau;
2. mengendalikan pemanfaatan ruang; dan
3. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dalam upaya pencapaian Misi 2 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi sebagaimana disajikan pada Gambar 5.2 berikut:



**Gambar 5.2**  
**Perencanaan Terintegrasi Misi 2**  
(Sumber : Hasil analisis 2020)

5.2.3. Misi 3 .....

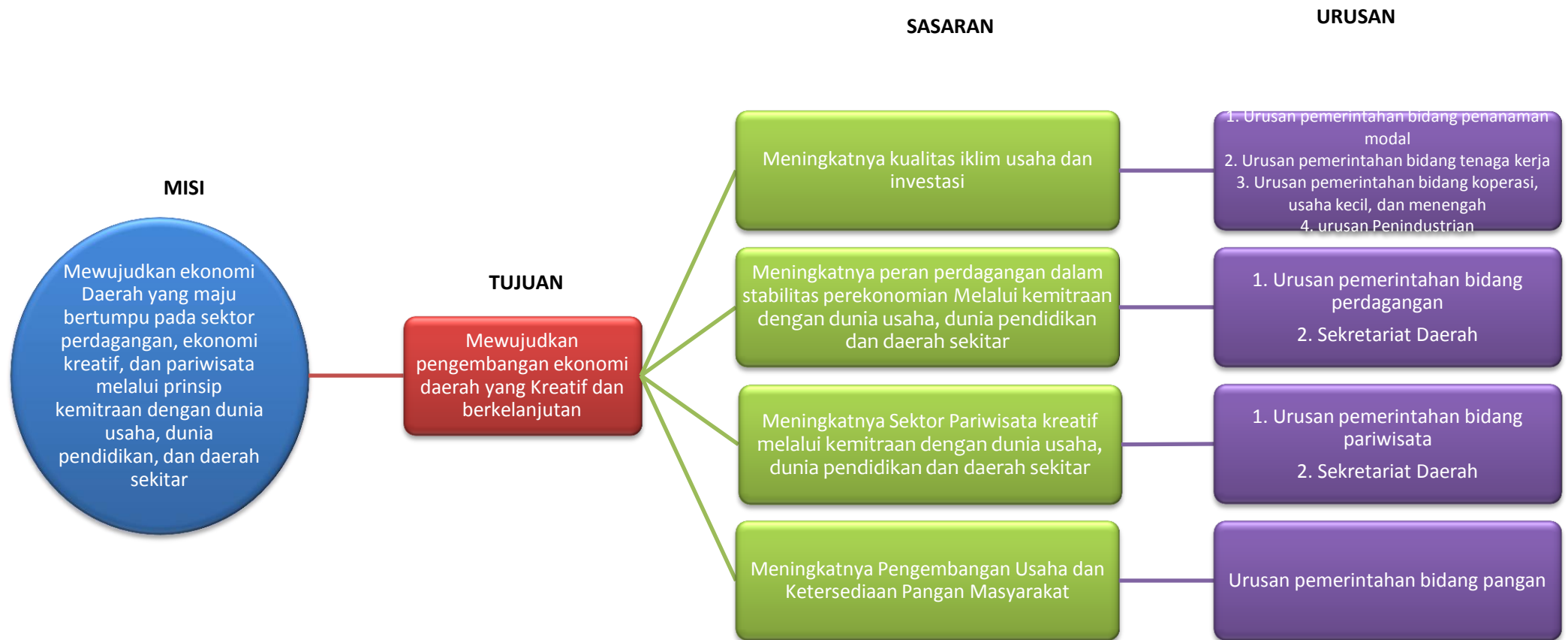
### 5.2.3. Misi 3

**Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar.**

Pernyataan Misi 3 tersebut secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

1. mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan melalui peningkatan iklim investasi dengan menghilangkan semua jenis hambatan atau kendala perijinan dan pengelolaan usaha yang selalu memperhatikan daya dukung potensi wilayah, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta mengutamakan keberpihakan terhadap upaya penumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar;
2. meningkatkan UMKM dan pariwisata kreatif melalui prinsip kemitraan; dan
3. meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam upaya pencapaian Misi 3 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi sebagaimana disajikan pada Gambar 5.3 berikut:



**Gambar 5.3**  
**Perencanaan Terintegrasi Misi 3**  
(Sumber : Hasil analisis 2020)

#### **5.2.4. Misi 4**

**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.**

Pernyataan Misi 4 tersebut menunjukkan komitmen Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah untuk terwujudnya birokrasi bersih, transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi, serta meningkatkan inovasi Daerah. Dalam upaya pencapaian Misi 4 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi sebagaimana disajikan pada Gambar 5.4 berikut:



**Gambar 5.4**  
**Perencanaan Terintegrasi Misi 4**  
(Sumber : Hasil analisis 2020)

Berdasarkan .....



Berdasarkan proses perencanaan terintegrasi yang sudah dirumuskan untuk mencapai masing-masing misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dapat dilihat bahwa pembangunan Daerah sudah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Uraian visi, misi, dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan disajikan dalam bagan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 5.5 berikut:



**Gambar 5.5**  
**Prioritas Pembangunan dan Misi dalam Pencapaian**  
**Visi Perubahan RPJMD**

Dari Gambar 5.5 tersebut dapat dilihat alur perumusan visi sampai dengan prioritas pembangunan. Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Daerah ditopang oleh 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah yang kemudian diterjemahkan dalam 6 (enam) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengalami penambahan yang sebelumnya 5 (lima) menjadi 6 (enam) yaitu penambahan prioritas penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19. Bagan alur tersebut berbentuk seperti bangunan rumah, dimana prioritas pembangunan menjadi pondasi bangunan dan misi pembangunan menjadi pilar-pilarnya yang menopang atap bangunan yaitu visi pembangunan jangka menengah. Hal ini menunjukkan keterkaitan satu sama lain dimana visi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan tidak akan tercapai apabila prioritas pembangunan tidak dilaksanakan dan misi pembangunan jangka menengah tidak tercapai.

### **5.3. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Daerah ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta isu-isu strategis pembangunan Daerah yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasikan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sehingga menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Daerah.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil atau *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran Perubahan RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali

Kota, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan arah kebijakan RPJPD dan menjadi sarana untuk melaksanakan serta mewujudkan sasaran RPJPD.

Proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategis yang berperan dalam pencapaian visi dan misi RPJMD. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan RPJMD.

Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 yakni adanya pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi ditandai antara lain dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Daerah yaitu *refocusing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. *Refocusing* dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Memburuknya berbagai indikator makro ekonomi sampai dengan kuartal II Tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 melanda berbagai negara termasuk Indonesia. Target-target pembangunan Tahun 2020 pada umumnya tidak dapat tercapai. Menyikapi kondisi tersebut, maka Daerah melakukan penyesuaian

target .....

target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran.

Tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, apa yang akan dicapai atau diubah dalam pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Berdasarkan hasil perumusan, penjabaran visi dan misi Perubahan RPJMD terdiri dari 5 (lima) tujuan dengan enam (enam) indikator tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran dengan 19 (sembilan belas) indikator sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian target tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator kinerja pembangunan daerah. Adapun kerangka berpikir logis pencapaian masing-masing misi RPJMD disajikan pada Gambar 5.6 sampai dengan Gambar 5.9 sedangkan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja RPJMD disajikan pada Tabel 5.2.

**5.3.1. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 1 RPJMD**

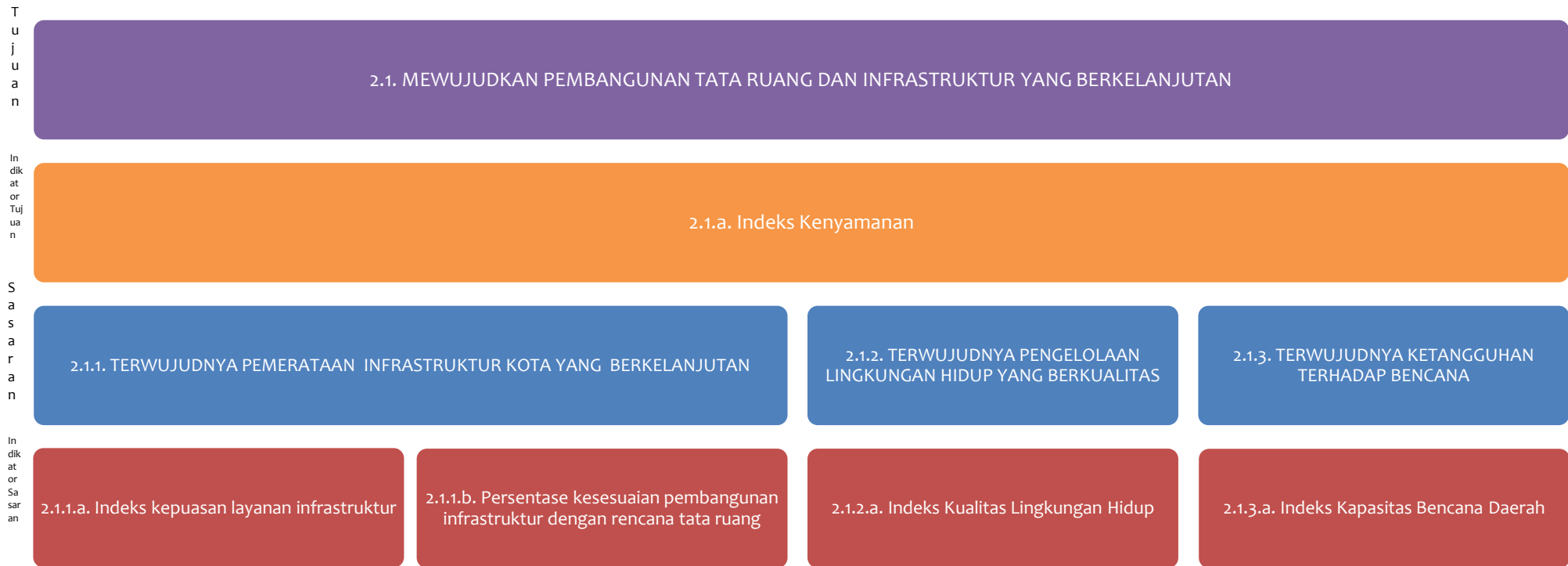
Dalam rangka pencapaian Misi 1 yaitu **Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga**, maka dirumuskan kerangka berpikir logis pencapaian Misi 1 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.6.



**Gambar 5.6.**  
**Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 1 RPJMD**  
*(Sumber : Hasil analisis, 2020)*

### 5.3.2. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 2 RPJMD

Dalam rangka pencapaian Misi 2 yaitu **Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**, maka dirumuskan kerangka berpikir logis pencapaian Misi 2 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.7.



**Gambar 5.7.**  
**Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 2 RPJMD**  
(Sumber : Hasil analisis, 2020)

### 5.3.3. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 3 RPJMD

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar**, maka dirumuskan kerangka berpikir logis pencapaian Misi 3 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.8.



**Gambar 5.8.**  
**Kerangka Berikir Logis Pencapaian Misi 3 RPJMD**  
(Sumber : Hasil analisis, 2020)

**5.3.4. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 4 RPJMD**

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif**, maka dirumuskan kerangka berpikir logis pencapaian Misi 4 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.9.



**Gambar 5.9.**  
**Kerangka Berikir Logis Pencapaian Misi 4 RPJMD**  
*(Sumber : Hasil analisis, 2020)*

Tabel 5.2 .....



**Tabel 5.2**  
**Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD 2019 S/D 2020**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL		2019		2020		
			2017	2018	TARGET	REALISASI	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA</b>									
<b>1</b>	<b>MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA</b>								
<b>1.1</b>	<b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA</b>	<b>a.</b>	<b>Indeks Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>Angka</b>	<b>94,68</b>	<b>94,68</b>	<b>94,98</b>	<b>73,35</b>	<b>73,35</b>
1.1.1	MENINGKATNYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	94,68	94,68	94,98	73,35	73,35
1.1.2	MENINGKATNYA DISIPLIN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	a.	Indeks Rasa Aman	Persen	N/A	N/A	63,7	87,53	64,00
<b>1.2</b>	<b>MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN</b>	<b>a.</b>	<b>Angka Harapan Hidup</b>	<b>Angka</b>	<b>71,95</b>	<b>72</b>	<b>72,05</b>	<b>72,26</b>	<b>72,10</b>
1.2.1	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	a.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,177	0,177	0,207	0,276	0.26

TUJUAN .....

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	KONDISI AWAL		2019		2020
					2017	2018	TARGET	REALISASI	TARGET
1		2		3	4	5	6	7	8
1.3	<b>MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN SERTA MENUMBUHKAN MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA</b>	a.	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>Angka</b>	<b>69,8</b>	<b>69,8</b>	<b>69,81</b>	<b>88,29</b>	<b>69,82</b>
1.3.1	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERMUTU	a.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,79	9,75	9,79	9,58
1.3.2	MENINGKATNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN, MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI OLAHRAGA KOTA SUKABUMI	a.	Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	N/A	N/A	53,63	49,95	51,65
1.4	<b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BAHAGIA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	a.	<b>Indeks Ketahanan Keluarga</b>	<b>Angka</b>	<b>67,76</b>	<b>67,76</b>	<b>67,81</b>	<b>76,63</b>	<b>67,86</b>

TUJUAN .....

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	KONDISI AWAL		2019		2020
					2017	2018	TARGET	REALISASI	TARGET
1		2		3	4	5	6	7	8
1.4.1	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	a.	Indeks Pembangunan Gender	Angka	90.95	91.07	91.07	91.44	91.00
1.4.2	MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	a.	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67,76	67,76	67,81	76,63	67,86
<b>2</b>	<b>MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>								
<b>2.1</b>	<b>MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR KOTA LAYAK HUNI YANG AMAN DAN NYAMAN</b>	<b>a.</b>	<b>Indeks Kota Layak Huni</b>	<b>Angka</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>45,00</b>	<b>49,25</b>	<b>46,00</b>
2.1.1	TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN	a.	Persentase penilaian Aspek Fisik Indeks Layak Huni	Persen	N/A	N/A	41,00	61,92	42,00
		b.	Persentase penilaian Aspek Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	N/A	N/A	41,00	68,20	42,00
		c.	Persentase penilaian Aspek transportasi	Persen	N/A	N/A	51,00	68,86	52,00

TUJUAN .....

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	KONDISI AWAL		2019		2020
					2017	2018	TARGET	REALISASI	TARGET
1		2		3	4	5	6	7	8
		d	Persentase penilaian Aspek Fasilitas	Persen	N/A	N/A	41,00	62,42	42,00
		e.	Persentase penilaian Aspek Utilitas	Persen	N/A	N/A	51,00	74,87	52,00
2.1.2	TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN	a.	Persentase Pengurangan Risiko Bencana	Persen	1,00	1,00	1,25	1,25	1,50
2.1.3	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	42,67	42,67	42,83	49,12	43,30
2.1.4	TERWUJUDNYA KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK	a.	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,21	0,21	0,17	0,52	0,63
<b>3</b>	<b>MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR</b>								
<b>3.1</b>	<b>MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN</b>	<b>a.</b>	<b>Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas</b>	<b>persen</b>	<b>54,57</b>	<b>56,22</b>	<b>57,85</b>	58,57	90,59
3.1.1	MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	N/A	N/A	100,00	1.885,49917	1.763,30

TUJUAN .....

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	KONDISI AWAL		2019		2020
					2017	2018	TARGET	REALISASI	TARGET
1		2		3	4	5	6	7	8
3.1.2	MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN	a.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	39,44	39,44	39,485	38,920	28,64
3.1.3	MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN	a.	Persentase Ketersediaan LP2B	persen	1,90	1,90	3,80	3,60	3,89
		b.	Skor Pola Pangan Harapan	persen	77,90	79,70	78,70	79,70	81,30
		c.	Persentase Keamanan Pangan	persen	85,45	78,00	86,00	89,81	87,00
<b>4</b>	<b>MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF</b>								
<b>4.1</b>	<b>MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>a.</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Skala</b>	<b>68,03</b>	<b>68,79</b>	<b>69</b>	<b>68,83</b>	<b>68,88</b>
4.1.1	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a.	Nilai SAKIP	Skor	74,49	74,49	80	76,07	77,00
		b.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

TUJUAN .....

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	KONDISI AWAL		2019		2020
					2017	2018	TARGET	REALISASI	TARGET
1		2		3	4	5	6	7	8
4.1.2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	a.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	N/A	2,62	2,60	2,61	2,71
		b.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,28	79,28	80,00	83,27	80,50
4.1.3	MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK PUBLIK	a.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2*	2*	2,1	2,43	2,20
<b>4.2</b>	<b>MENINGKATKAN INOVASI DAERAH</b>	<b>a.</b>	<b>Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>550</b>
4.2.1	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	a.	Presentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah	Persen	25	57	60	57	4,50

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Tabel 5.3 .....

**Tabel 5.3**  
**Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD 2021 S/D 2023**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
			2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7		
<b>VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA</b>								
<b>1</b>	<b>MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA</b>							
1.1	<b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERKUALITAS YANG BERAKHLAK MULIA</b>	a.	<b>Indeks rasa aman</b>	<b>Persen</b>	<b>64,30</b>	<b>64,60</b>	<b>64,90</b>	<b>64,90</b>
		b.	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Angka</b>	<b>74,45</b>	<b>74,60</b>	<b>74,75</b>	<b>74,75</b>
1.1.1	MENINGKATNYA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA, PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	74,08	78,02	80,09	80,09
1.1.2	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	a.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.287	0.317	0.367	0.367

TUJUAN .....

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7
1.1.3	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN MERATA	a.	Indeks Pendidikan	Angka	69,82	69,83	69,83	69,83
1.1.4	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA	a.	Indeks Kota Kreatif (IKK)	Angka	27,2	48,8	63,6	63,6
1.1.5	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK	a.	Indeks pembangunan gender	Angka	91,19	91,25	91,31	91,31
1.1.6	MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	a.	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67,91	67,96	68,01	68,01
<b>2</b>	<b>MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>							
<b>2.1</b>	<b>MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN</b>	<b>a.</b>	<b>Indeks kenyamanan</b>	<b>Angka</b>	<b>24.4</b>	<b>24</b>	<b>23.5</b>	<b>23.5</b>
2.1.1	TERWUJUDNYA PEMERATAAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKELANJUTAN	a.	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Angka	78	80	82	82

TUJUAN .....



TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7
		b.	Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	35	40	45	45
2.1.2	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	58,21	59,00	59,78	59,78
2.1.3	TERWUJUDNYA KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA	a.	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	Point	0,51	0,53	0,55	0,55
<b>3</b>	<b>MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR</b>							
<b>3.1</b>	<b>MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG KREATIF DAN BERKELANJUTAN</b>	a.	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>persen</b>	<b>4,45</b>	<b>5,23</b>	<b>5,54</b>	<b>5,54</b>
3.1.1	MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	1.851,46	1.944,04	2.041,24	2.041,24

TUJUAN .....

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7
3.1.2	MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN DAERAH SEKITAR	a.	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	persen	1	2	3	3
3.1.3	MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA KREATIF MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN DAERAH SEKITAR	a.	kontribusi pariwisata terhadap PDRB	persen	1 – 1,14	1,15-1,29	1,30 – 1,44	1,30 – 1,44
3.1.4	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN USAHA DAN KETERSEDIAAN PANGAN MASYARAKAT	a.	Skor Pola Pangan Harapan	persen	79,50	79,99	80,30	80,30
<b>4</b>	<b>MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF</b>							
4.1	<b>MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI</b>	a.	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Skala</b>	<b>68,93</b>	<b>68,98</b>	<b>69,48</b>	<b>69,48</b>

TUJUAN .....

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7
4.1.1	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a.	Nilai SAKIP	Skor	78,00	79,00	80,00	80,00
		b.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
4.1.2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	a.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,81	2,91	3,01	3,01
4.1.3	MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	a.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,30	2,40	2,50	2,50
<b>4.2</b>	<b>MENINGKATKAN INOVASI DAERAH</b>	<b>a.</b>	<b>Skor Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>Predikat</b>	<b>Terinovatif ( ≥ 1001 )</b>	<b>Terinovatif ( ≥ 1001 )</b>	<b>Terinovatif ( ≥ 1001 )</b>	<b>Terinovatif ( ≥ 1001 )</b>
4.2.1	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	a.	Indeks Daya Saing Daerah	<b>Predikat</b>	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2020

## **BAB VI**

# **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

### **6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tentang bagaimana pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah Daerah baik dalam melakukan transformasi, reformasi maupun perbaikan kinerja birokrasi.

Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan Daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Daerah yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Daerah. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan

*(strength) .....*

(*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Dengan demikian Daerah harus bisa memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Rumusan strategi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Perubahan RPJMD disajikan pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Perubahan RPJMD**

Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera				
MISI 1 : mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga				
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
1.1	Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berakhlak mulia	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penerapan nilai nilai agama dan wawasan kebangsaan
		1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
		1.1.3	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
		1.1.4	Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Berbudaya	1. Meningkatkan Kolaborasi antar Stakeholders Penta Helix Dalam Pengembangan Kota Kreatif 2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olah raga
		1.1.5	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak melalui penguatan kebijakan, kelembagaan , SDM dan Sistem Informasi Gender
		1.1.6	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial	1. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga melalui Penguatan Kebijakan, Pengendalian Penduduk dan ketahanan ekonomi keluarga 2. Meningkatkan pemberian pelayanan sosial dengan peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

<b>MISI 2 : mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan</b>				
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>
2.1	Mewujudkan Pembangunan tata ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	2.1.1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan	1. Mendorong terciptanya pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur 2. Mendorong percepatan legalisasi kebijakan infrastruktur dan penataan ruang
		2.1.4	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
		2.1.5	Terwujudnya ketangguhan terhadap bencana	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana
<b>MISI 3 : mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar</b>				
3.1	Mewujudkan pengembangan ekonomi daerah yang kreatif dan berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pelayanan serta dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar 2. Memperluas Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha
		3.1.2	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	1. Meningkatkan kualitas Data, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana Perdagangan serta dukungan Teknologi dan Informasi 2. Meningkatkan perdagangan melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
		3.1.3	Meningkatnya Sektor pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	1. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata 2. Meningkatkan pariwisata melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar 3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kolaborasi dan Harmonisasi dengan Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas kreatif, Pemerintah dan Media dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah.

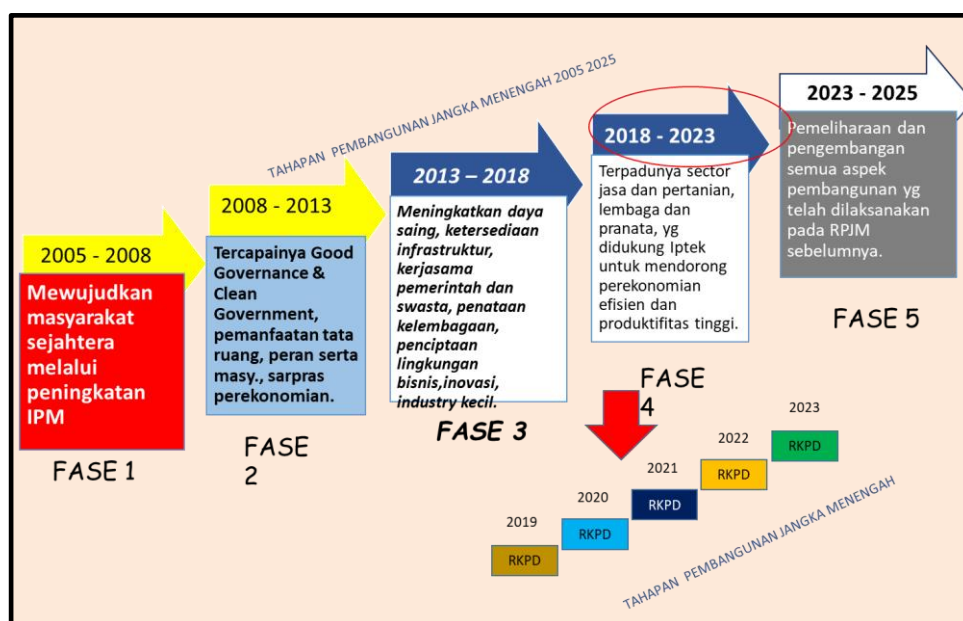
TUJUAN .....

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
		3.1.4	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam  2. Meningkatkan partisipasi pemilik lahan pertanian untuk bergabung dalam LP2B, Pemberian insentif, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia
<b>MISI 4 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i> dan inovatif</b>				
4.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	4.1.1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel
		4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi pelayanan
		4.1.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
4.2	Meningkatkan inovasi daerah	4.2.1	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penguatan ekosistem inovasi guna meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK

Sumber: hasil analisis tahun 2020



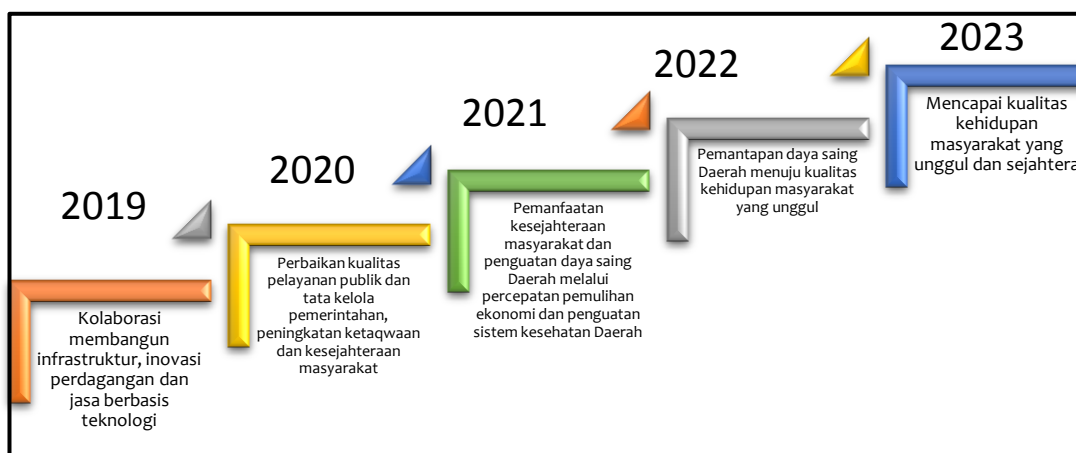
Pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD yang memiliki tema **“Terpadunya sektor jasa dan pertanian, lembaga dan pranata, yang didukung IPTEK untuk mendorong perekonomian efisien dan produktifitas tinggi”**. Tema pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang lebih lanjut akan dijabarkan dalam tema pembangunan setiap tahun dan menjadi pedoman bagi penentuan fokus atau tema pembangunan dalam RKPD. Tema pembangunan lima tahunan dalam setiap periode RPJPD disajikan pada Gambar 6.1.



**Gambar 6.1**  
**Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD dan Penjabarannya ke RKPD**

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus pembangunan akan menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai periode RPJMD. Penerapan tema atau fokus tersebut memberi arah yang jelas bagi pemerintah Daerah setiap tahun dalam rangka pencapaian target pembangunan di RPJMD. Fokus pembangunan tahunan pemerintah Daerah

mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Gambar 6.2 berikut ini.



**Gambar 6.2**  
**Tema atau Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2018-2023**

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijabarkan dalam fokus atau tema pembangunan setiap tahun, maka dirumuskan arah kebijakan yang merupakan penjabaran dari strategi-strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah.

Arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Tabel 6.2 dan 6.3 berikut ini.

**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023**

Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera						
MISI 1 : mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1.1	Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berakhlak mulia	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penerapan nilai nilai agama dan wawasan kebangsaan	1	Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan
					2	Meningkatkan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama
					3	Meningkatkan aktivitas keagamaan
					4	Meningkatkan wawasan dan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat
					5	Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda
					6	Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban
		1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	1	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
					2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan dalam rangka penanganan dan pemulihan pandemi covid-19
					3	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan
		1.1.3.	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata	1	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan
					2	Meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas
					3	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan
					4	mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan berkarakter

TUJUAN .....

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		1.1.4.	Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Berbudaya	1. Meningkatkan Kolaborasi antar Stakeholders Penta Helix Dalam Pengembangan Kota Kreatif	1	Meningkatkan penguatan seni dan budaya lokal
					2	Meningkatkan Kreasi masyarakat
				2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olah raga	3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga
					4	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		1.1.5.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak melalui penguatan kebijakan, kelembagaan , SDM dan Sistem Informasi Gender	1	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
					2	Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
					3	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Pengembangan Sistem Informasi Gender
		1.1.6.	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial	Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga melalui Penguatan Kebijakan, Pengendalian Penduduk dan ketahanan ekonomi keluarga	1	Menyusun Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan sosial
					2	Optimalisasi ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga
				Meningkatkan pemberian pelayanan sosial dengan peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	3	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dalam rangka penanggulangan kemiskinan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan/ atau terdampak Covid-19
					4	Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan Sosial melalui pemberdayaan masyarakat
					5	Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang holistik dan berkelanjutan

MISI 2 : mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
2.1	Mewujudkan Pembangunan tata ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	2.1.1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan	Mendorong terciptanya pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur	1	Meningkatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah
					2	meningkatkan pembangunan infratraktur diwilayah yang tertingggal
					3	meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pembangunan infrastruktur
				Mendorong percepatan legalisasi kebijakan infrastruktur dan penataan ruang	4	Menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang
					5	Menyusun peraturan-peraturan terkait pembangunan infrastruktur dan penataan ruang
					6	meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang
		2.1.4	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1	meningkatkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
					2	meningkatkan pembangunan sanitasi dan pengendalian pencemaran
					3	meningkatkan penyediaan lahan pemerintah untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup
					4	meningkatkan kapasitas sdm sektor lingkungan hidup
		2.1.5	Terwujudnya ketangguhan terhadap bencana	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	1	meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
					2	menyusun kebijakan dalam peningkatan kapasitas penanganan bencana
					3	Merubah paradigma penanggulangan bencana dari konsep emergency response menjadi preventive response

MISI 3 .....

MISI 3 : mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
3.1	Mewujudkan pengembangan ekonomi daerah yang kreatif dan berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pelayanan serta dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar	1	Meningkatkan Investasi dan Penanaman Modal di daerah
					2	Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
					3	Meningkatkan informasi bursa tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja
					4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi
					5	Mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif
					6	Menciptakan Wirausaha muda Baru
					7	Mengembangkan Inkubator Bisnis khususnya dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid-19
					8	Mengembangkan Produk unggulan daerah
		3.1.2	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	1. Meningkatkan kualitas Data, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana Perdagangan serta dukungan Teknologi dan Informasi	1	Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan
				2. Meningkatkan perdagangan melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	2	Penataan Pedagang kaki Lima (PKL)

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		3.1.3	Meningkatnya Sektor pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	1. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata	1	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata
				2. Meningkatkan pariwisata melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	2	Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi
				3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kolaborasi dan Harmonisasi dengan Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas kreatif, Pemerintah dan Media dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah.	3	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital
					4	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas ekonomi kreatif
					5	Meningkatkan peran ABCGM (Academic, Business, Community, Government and Media) Bussines dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah
		3.1.4	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	1	Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA)
				2. Meningkatkan partisipasi pemilik lahan pertanian untuk bergabung dalam LP2B, Pemberian insentif, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia	2	Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

MISI 4 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i> dan inovatif						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
4.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	4.1.1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1	Perluasan implementasi sistem terintegritas
					2	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi
					3	Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
					4	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT
		4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi pelayanan	1	meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik khususnya di era pandemi covid-19
					2	penguatan pelayanan terpadu
					3	peningkatan profesionalisme ASN
					4	penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
		4.1.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	1	Meningkatkan Integrasi Penerapan SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
					2	Meningkatkan Sumber Daya di Sektor SPBE
					3	Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
					4	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SUPER (Sukabumi Participatory Responder)
4.2	Meningkatkan inovasi daerah	4.2.1	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penguatan ekosistem inovasi guna meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	1	Meningkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan
					2	Meningkatkan pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional
					3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi
					4	Implementasi pemanfaatan inovasi

Sumber: hasil analisis tahun 2020

Tabel 6.3 .....



**Tabel 6.3**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 per tahun**

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan					
2	Meningkatkan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama					
3	Meningkatkan aktivitas keagamaan					
4	Meningkatkan wawasan dan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat					
5	Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda					
6	Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban					
7	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
8	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan dalam rangka penanganan dan pemulihan pandemi covid-19					
9	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan					
10	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan					
11	Meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas					
12	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan					
13	mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan berkarakter					
14	Meningkatkan penguatan seni dan budaya lokal					
15	Meningkatkan Kreasi masyarakat					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
16	Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga					
17	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
18	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak					
19	Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak					
20	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Pengembangan Sistem Informasi Gender					
21	Menyusun Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan sosial					
22	Optimalisasi ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
23	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dalam rangka penanggulangan kemiskinan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan/ atau terdampak Covid-19					
24	Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan Sosial melalui pemberdayaan masyarakat					
25	Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang holistik dan berkelanjutan					
26	Meningkatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah					
27	meningkatkan pembangunan infratraktur diwilayah yang tertinggal					
28	meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pembangunan infrastruktur					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
29	Menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang					
30	Menyusun peraturan-peraturan terkait pembangunan infrastruktur dan penataan ruang					
31	meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang					
32	meningkatkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan					
33	meningkatkan pembangunan sanitasi dan pengendalian pencemaran					
34	meningkatkan penyediaan lahan pemerintah untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup					
35	meningkatkan kapasitas sdm sektor lingkungan hidup					
36	meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
37	menyusun kebijakan dalam peningkatan kapasitas penanganan bencana					
38	Merubah paradigma penanggulangan bencana dari konsep emergency response menjadi preventive response					
39	Meningkatkan Investasi dan Penanaman Modal di daerah					
40	Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)					
41	Meningkatkan informasi bursa tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja					
42	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi					
43	Mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif					
44	Menciptakan Wirausaha muda Baru					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
45	Mengembangkan Inkubator Bisnis khususnya dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid-19					
46	Mengembangkan Produk unggulan daerah					
47	Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan					
48	Penataan Pedagang kaki Lima (PKL)					
49	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata					
50	Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi					
51	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital					
52	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas ekonomi kreatif					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
53	Meningkatkan peran ABCGM (Academic, Business, Community, Government and Media) Bussines dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah					
54	Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA)					
55	Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan					
56	Perluasan implementasi sistem terintegritas					
57	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi					
58	Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran					



NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
59	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT					
60	meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik khususnya di era pandemi covid-19					
61	penguatan pelayanan terpadu					
62	peningkatan profesionalisme ASN					
63	penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik					
64	Meningkatkan Integrasi Penerapan SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan					
65	Meningkatkan Sumber Daya di Sektor SPBE					
66	Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat					
67	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SUPER (Sukabumi Participatory Responder)					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
68	Meningkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan					
69	Meningkatkan pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional					
70	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi					
71	Implementasi pemanfaatan inovasi					

Sumber : Hasil Analisis Bappeda (2020)

## **6.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL**

Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan RPJMD. Penerapan pendekatan spasial ini dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi.

Pada dasarnya Tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kota memiliki fungsi :

- a. sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota; dan;
- c. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

### **6.2.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kota**

Kebijakan penetapan struktur ruang wilayah Daerah meliputi:

1. perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara optimal;
2. peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem sirkulasi kota yang optimal;
3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota.

Strategi penetapan struktur ruang wilayah Daerah meliputi:

1. strategi perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara optimal;
2. strategi peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem sirkulasi kota yang optimal, menentukan hierarki pusat kegiatan pelayanan skala regional dan lokal meliputi pusat kegiatan pelayanan dan komersial dan pusat kegiatan wisata;
3. strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan terwujudnya lingkungan permukiman kota yang nyaman dan aman.

Pusat-pusat Pelayanan yang direncanakan di Daerah meliputi:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK), Pusat pelayanan Daerah ditetapkan di 2 lokasi yaitu pusat kota di Kecamatan Cikole dan Kecamatan Cibereum. Pusat pelayanan kota berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan pusat pemerintahan. Pusat pelayanan kota yang direncanakan sampai dengan tahun 2039 adalah Pusat Pelayanan Pusat Kota Cikole dan Cibereum. Pusat Pelayanan Pusat Kota melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Utara, sedangkan Pusat pelayanan Babakan melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Selatan;
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK), Sub pusat pelayanan kota terdiri 5 (lima) sub pusat pelayanan kota yang dikembangkan yaitu : Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu, Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong, Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros, Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang, dan Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh. Pengembangan sub pusat kota berfungsi sebagai penyangga dua pusat pelayanan kota, dan meratakan pelayanan pada skala bagian wilayah kota. Penyebaran sub pusat pelayanan kota juga dimaksudkan

untuk .....

untuk mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar bagian wilayah kota;

3. Pusat Lingkungan (PL), Pusat lingkungan diarahkan pengembangannya di pusat-pusat pelayanan pemerintahan skala kelurahan. Pusat lingkungan diarahkan minimal mempunyai fungsi-fungsi pelayanan skala lingkungan/kelurahan agar dapat memberikan pelayanan pada lingkungan sekitarnya secara optimal.

### **6.2.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota**

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Daerah meliputi:

1. pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan wilayah utara Daerah untuk keberlanjutan lingkungan Daerah;
2. pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
3. pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana;
4. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi Pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan wilayah utara Daerah untuk keberlanjutan lingkungan Daerah meliputi :

1. kerjasama dengan Kabupaten Sukabumi untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku guna menjaga keberlangsungan lingkungan untuk sumber air bersih;
2. melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;
3. membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai hanya untuk kepentingan pariwisata yang tidak merubah fungsi lindung;
4. mengelola kawasan lindung secara terpadu;

5. melakukan .....

5. melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung;
6. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
7. menyelamatkan keutuhan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitatnya), potensi sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber genetiknya;
8. meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau hingga 30 % dari luas wilayah Kota dalam mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan.

Strategi Pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan meliputi :

1. mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah;
2. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota;
3. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif;
4. mengendalikan kegiatan industri yang tidak menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan.

Strategi pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan meliputi :

1. menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat;
2. pembangunan perkotaan harus didasarkan pada DDL/DTL;
3. melarang untuk membangun di kawasan yang memiliki potensi terjadi rawan bencana longsor dan bencana alam;

4. mengintensifkasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau melalui kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau;
5. menata ruang untuk kegiatan perdagangan, perumahan, pertanian, dan pengembangan obyek wisata yang saling bersinergi;
6. mengembangkan lingkungan permukiman dengan kepadatan rendah di wilayah yang termasuk pada daerah rentan bencana;
7. meremajakan dan merehabilitasi lingkungan perumahan yang menurun kualitasnya, dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:

1. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan dengan kawasan budi daya terbangun;
2. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/ Lemdikpol Setukpa POLRI.

### **6.2.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Kota.**

Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi:

1. penguatan kawasan strategis sosial budaya;
2. peningkatan daya saing investasi dan kesempatan ekonomi pada kawasan strategis ekonomi;
3. penguatan keseimbangan ekologis pada kawasan strategis lingkungan hidup.

Strategi Penguatan kawasan strategi sosial budaya, meliputi :

1. mengembangkan kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan

2. mengembangkan .....

2. mengembangkan kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Strategi Peningkatan daya saing investasi dan kesempatan ekonomi kawasan strategis ekonomi meliputi:

1. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan;
2. pengembangan Kawasan Agrowisata dan kawasan pariwisata yang terpadu sebagai daya tarik dan obyek wisata;
3. pengembangan ruang untuk sektor informal;
4. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
5. memberikan insentif dan stimulan untuk mempercepat perwujudan kawasan strategis berupa peningkatan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;

Strategi penguatan keseimbangan ekologis pada kawasan strategis lingkungan hidup, meliputi :

1. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis lingkungan hidup yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
2. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kota yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
3. meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung;
4. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.

#### **6.2.3.1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**



Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Pusat Perekonomian Cibeureum. Kegiatan perekonomian kota yang menjadi pemicu utama pertumbuhan ekonomi di Daerah adalah kegiatan perdagangan dan jasa. Daerah memiliki rencana untuk membuat pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Cibeureum hilir dengan pengembangan kawasan sekitar stasiun baru di Cibeureum dengan konsep TOD (*Transit Oriented Development*). Pengembangan di kawasan ini untuk pelayanan jasa dan perdagangan skala kota regional, selain itu dikembangkannya kawasan perdagangan dan jasa di kawasan ini menunjang terhadap pengembangan kawasan pendidikan dan kawasan perkantoran pemerintah yang dikembangkan pada bagian lain di Kecamatan Cibeureum.

#### **6.2.3.2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya**

Kawasan pusat Daerah merupakan pusat kegiatan utama untuk perdagangan dan jasa di Daerah, Konsep pengembangan kawasan ini adalah *urban renewal* dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan sebagai pusat perekonomian kota dan mempertahankan nilai sejarah kawasan pusat kota dimana dicirikan adanya bangunan-bangunan yang termasuk dalam *heritage*, walaupun pada saat ini ada bangunan-bangunan yang sudah tidak ada. Dengan ditetapkannya sebagai kawasan strategis sosial budaya diharapkan kawasan ini dapat tetap berkembang dengan mempertahankan bangunan-bangunan *heritage* yang masih ada. Pengembangan kawasan ini antara lain meliputi penataan dan relokasi pedagang kaki lima, penataan bangunan dan lingkungan terkait fasilitas pejalan kaki dan parkir kendaraan.

#### **6.2.3.3. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan Strategis Kota (KSK) berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Daerah yaitu berupa Kawasan Ekowisata Cikundul. Di

Kecamatan Cikundul terdapat beberapa lokasi terkait untuk pengembangan wisata, yaitu KAC (Kawasan Agroeduwisata Cikundul), pemandian air panas Cikundul, Hutan Kota Kibitay. Konsep kawasan wisata ini bisa dipadukan dengan membentuk Koridor Wisata Baros – Lembursitu - Warudoyong, dengan Sungai Cimandiri – Cipelang – Cigunung sebagai arterinya. Kesemuanya dikemas dalam balutan Kawasan Wisata Cimandiri. Pengembangan sektor pariwisata ini akan menjadi sumber pemasukan bagi Daerah. Pengembangan sektor wisata ini menjadi sangat penting karena terkait dengan aksesibilitas yang mudah menuju Daerah dengan adanya Tol Bocimi, jalur ganda kereta api dan pembangunan bandara di Kabupaten Sukabumi.

### **6.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018-2023**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan Daerah. Prioritas pembangunan Daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Prioritas pembangunan Daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan sasaran RPJMD. Prioritas pembangunan daerah bersifat strategis, maka penganggaran dan pelaksanaannya diutamakan. Penentuan prioritas pembangunan Daerah juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, namun akibat adanya pandemi covid-19 maka ditambahkan 1(satu) prioritas pembangunan guna mempercepat penanganan dan pemulihan akibat pandemi covid-19. Prioritas pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2018-2023, meliputi:

1. peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia;
2. peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi;

3. Peningkatan .....

3. peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;
4. peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan;
5. pengembangan ekonomi yang berkelanjutan; dan
6. penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19.

Prioritas pembangunan jangka menengah Daerah tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan unggulan yang meliputi:

**1. Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia**

**a. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**

Pencapaian Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk mewujudkan pilar religius dapat dicapai dengan melaksanakan amanah misi pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.

Tujuan misi pertama khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia adalah untuk mewujudkan pemerintahan, masyarakat dan pelaku usaha yang baik dalam melaksanakan kehidupan beragama.

Untuk merealisasikan pencapaian tujuan misi pertama khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia direncanakan oleh perangkat daerah melalui program rutin dan program inovasi perangkat daerah yaitu:

a) Program peningkatan kualitas lembaga keagamaan

Dengan kegiatan antara lain melalui peningkatan kualitas manajemen, peningkatan fasilitas keagamaan, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan basis ekonomi.

b) Program gerakan magrib mengaji

Adalah program pemerintah dalam meningkatkan syiar keagamaan serta ketaqwaan, yang dahulu sudah menjadi kebiasaan masyarakat namun dikhawatirkan terjadi perubahan pola perilaku dan sikap di tengah masyarakat.

c) Program gerakan subuh berjamaah

Adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sasaran program adalah masyarakat dan Aparatur Sipil Negara untuk dapat hadir setiap Jumat subuh di Mesjid Agung dan Ahad subuh berjamaah di Mesjid Al- Ikhlas di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sukabumi dan di Masjid atau Mushola di lingkungan masyarakat sekitar.

d) Program pembiasaan akhlakul karimah

Akhlak memiliki peranan penting dalam membangun hubungan. Akhlak yang baik akan memancarkan energi positif yang bersumber dari yang Maha. Akhlak merupakan hasil dari pengetahuan, sikap dan perilaku yang dilatih terus menerus. Ruang lingkup program ini adalah pembiasaan dalam hubungan manusia dan dirinya, hubungan manusia dengan Tuhan-nya, hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.

e) Program peningkatan toleransi

Setiap masyarakat memiliki kebebasan dan mengamalkan agama yang dianutnya. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam keberagaman merupakan hal penting dalam menjaga modal sosial. Komunikasi yang intens dan berkualitas adalah strategi utama dalam mewujudkan kualitas toleransi. Ruang lingkup toleransi mencakup hubungan struktural sosial dan kultural sosial untuk membangun kebersamaan dan keberagaman dalam nilai-nilai universal.

f) Program *family straightening* (pelatihan pranikah, pelatihan parenting, konseling keluarga)

Keluarga adalah lingkup sosial terkecil dan awal terbentuknya ikatan sosial, struktur sosial yang terbanyak adalah keluarga. Keluarga juga menjadi pembangun struktur sosial yang besar, sehingga untuk memiliki struktur sosial yang kuat dan berkarakter maka keluarga salah satu pintu strategis untuk melakukan perubahan. Keluarga menjadi objek dari program ini dengan ruang lingkup saat akan mengikat keluarga (pra nikah) dan saat membangun keluarga (pasca menikah). Arah program ini adalah bagaimana sebelum menikah memiliki pengetahuan, sikap dan nilai

yang.....

yang luhur dalam berkeluarga. Saat sudah menikah memiliki sikap dan prilaku membangun “rumah ku, surga ku” sehingga keluarga adalah tempat yang menyenangkan untuk setiap anggota keluarga, dan ketika ada permasalahan keluarga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan akhlak dan nilai yang baik.

g) Program promosi kota halal *friendly*

Kota merupakan arena pertemuan dari semua strata sosial, Kota Sukabumi memiliki koneksi langsung dengan wilayah rural (pedesaan) dan wilayah urban (perkotaan). Arena kota menjadi pertemuan nilai-nilai rural dan urban, dengan kondisi seperti itu maka kota harus menjadi penjaga nilai yang kuat, nilai yang kuat berasal dari nilai “Ilah” yang diturunkan dalam ranah sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup sandang, pangan dan papan merupakan arena dari program ini.

**b. Program Peningkatan Literasi**

Program Peningkatan Literasi merupakan program untuk mengembangkan budaya literasi, mengajak warga untuk semakin gemar membaca dengan mengadakan acara-acara menarik di Daerah yang dilaksanakan oleh penggerak perpustakaan keliling.

**c. Uduan Online di dukung oleh Forum Silih Asih Silih Asuh**

Forum Silih Asih Silih Asuh atau Uduan *Online*, merupakan program untuk mendorong kesetiakawanan warga kota untuk saling membantu, silih asih silih asuh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan secara kewenangan maupun secara anggaran sehingga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi untuk berkontribusi secara langsung.

Pemerintah mendorong secara optimal kepedulian masyarakat serta kesetiakawanan sosial. Hal ini penting dilakukan karena dengan dua prinsip tersebut masyarakat diajak untuk terbiasa dengan model partisipatif dalam bermasyarakat. Partisipasi jelas diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemajuan kota tempat tinggalnya.

Mekanisme *online* digunakan dalam program ini adalah untuk mendorong prinsip transparansi serta kecepatan dalam pelaksanaannya. Selain itu melalui program ini, masyarakat perkotaan yang telah relatif terbiasa dengan iklim digitalisasi akan mendapatkan kemudahan dalam berpartisipasi serta ikut peduli dengan anggota masyarakat kota lainnya yang tengah dalam kondisi kesulitan.

**d. Program *Students Camp***

Program *Students Camp*, merupakan program pendidikan holistik yang bertujuan melakukan pembentukan karakter bagi siswa SMP, SMA dan SMK sederajat. Program ini diharapkan akan melahirkan pelajar-pelajar yang dapat berperan sebagai agen-agen perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungannya. Program ini dirancang untuk memperkaya para peserta dengan pelatihan-pelatihan yang merangsang pertumbuhan jiwa kepemimpinan dan wawasan pengetahuan lingkungan para peserta.

Perlu kiranya diketahui bahwa program ini titik tolaknya ada pada bagaimana melakukan pelatihan pada siswa-siswa pilihan yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyebarkan nilai-nilai yang baik bagi siswa-siswa lainnya dari hasil pelatihan.

Pelatihan ini diharapkan untuk membangun rasa persaudaraan antar para pelajar di Daerah, sehingga diharapkan mampu menekan dan meredusir masalah-masalah kenakalan pelajar serta berbagai perilaku negatif lainnya.

**2. Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi**

**Program *Sukabumi Participatory Responder* atau *SUPER***, merupakan sebuah aplikasi resmi milik Pemerintah Daerah yang terintegrasi langsung dengan e-LAPOR yang menawarkan kemudahan bagi warga untuk berinteraksi dengan Pemerintah Daerah baik untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, pengaduan atas pelayanan publik, pertanyaan, dan lain sebagainya.

### **3. Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat**

#### **a. Program Optimalisasi Puskesmas**

Program Optimalisasi Puskesmas, merupakan program untuk peningkatan mutu dan layanan Puskesmas di setiap kecamatan dengan menyediakan dokter spesialis, peralatan medis, layanan peserta BPJS nonstop 24 jam, dan ambulan SIGAP. Dengan tambahan satu perawat di setiap kelurahan atau *home care* sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi pelayanan warga yang memerlukan pengobatan, pertolongan medis di setiap kecamatan agar terhindar dari penumpukan pasien di RSUD sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih optimal.

Program ini turut mengimbangi pertumbuhan Daerah yang cukup signifikan. Kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah dari sisi kuantitas penduduk menuntut perimbangan dari sisi kualitas dan fasilitas sebuah kota. Khusus di bidang kesehatan, program ini diupayakan pemerintah untuk mendorong perimbangan itu terjadi serta upaya optimalisasi.

Program ini dirancang dengan basis puskesmas di setiap kewilayahan, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan diharapkan dapat mengalami peningkatan. Daerah memiliki harapan bahwa peningkatan ini tidak hanya berdampak bagi peningkatan pelayanan kesehatan saja namun juga berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Daerah secara lebih menyeluruh.

#### **b. Program Rumah Singgah**

Pencapaian Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk mewujudkan pilar sejahtera dapat dicapai dengan melaksanakan amanah misi pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.

Tujuan Misi pertama khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas adalah untuk mewujudkan masyarakat

yang dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan memenuhi kebutuhan menjaga kesehatan secara rutin.

Untuk merealisasikan pencapaian tujuan misi pertama khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan sehat direncanakan oleh perangkat daerah melalui program rutin dan program inovasi perangkat daerah salah satunya yaitu program unggulan rumah singgah.

Program rumah singgah merupakan program untuk menyediakan rumah singgah dan tenaga administrasinya bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memeriksakan kesehatan, pengobatan dan perawatan medis setelah dirujuk ke Rumah Sakit di sekitar Kota Bandung.

Program ini dirancang dengan tujuan untuk mengurangi beban dan memudahkan masyarakat Daerah ketika harus memenuhi kebutuhan pengobatan ke rumah sakit rujukan di Kota Bandung khususnya RS Hasan Sadikin. Kesulitan-kesulitan yang sering timbul akibat lokasi pengobatan jauh dari tempat tinggalnya dan tidak mampu untuk membiayainya.

Dengan adanya rumah singgah yang disertai tenaga administrasi maka fungsi fasilitas ini tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara saja bagi pasien yang hendak merujuk namun hal-hal yang biasanya menjadi kesulitan khususnya persoalan administratif pada rumah sakit rujukan dapat ditanggulangi dengan baik.

**c. Kelurahan Sport Center,**

*Kelurahan Sport Center* merupakan program penyediaan ruang terbuka publik dan fasilitas olahraga yang berkualitas di setiap kelurahan.

**4. Peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan**

**a. Program Revitalisasi Pedestrian**

Pencapaian Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk mewujudkan pilar nyaman dapat dicapai dengan melaksanakan amanah misi kedua yaitu

mewujudkan.....



mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Tujuan misi kedua khususnya dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan adalah untuk mewujudkan kenyamanan bagi pedestrian (orang yang menggunakan fasilitas trotoar).

Untuk merealisasikan pencaian tujuan misi kedua khususnya dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan direncanakan oleh perangkat daerah melalui program rutin dan program inovasi perangkat daerah salah satunya yaitu program unggulan revitalisasi pedestrian.

Program unggulan revitalisasi pedestrian yaitu merupakan konsep penataan integrasi kawasan lapang merdeka sehingga dapat menjadi ruang terbuka publik yang lebih nyaman serta dapat menjadi salah satu *landmark* kota; selain kawasan terintegrasi lapang merdeka dan alun-alun juga diprioritaskan untuk revitalisasi pedestrian lainnya yang dapat merubah wajah Daerah atau dilokasi – lokasi pintuk masuk Daerah.

## **5. Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan**

### **a. Program Sukabumi *KECE***

Pencapaian Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk mewujudkan pilar sejahtera dapat dicapai dengan melaksanakan amanah misi ketiga yaitu mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar.

Tujuan misi ketiga khususnya dalam mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor ekonomi kreatif. Untuk merealisasikan pencaian tujuan misi ketiga tersebut, direncanakan oleh perangkat daerah melalui program rutin dan program inovasi perangkat daerah salah satunya yaitu dengan program unggulan Sukabumi Kece.

Program unggulan Sukabumi Kece merupakan program pemberdayaan anak muda melalui pelatihan dan pendampingan wira

usaha baru, sehingga terbentuk wira usaha baru dengan jenis bidang usaha tertentu.

**b. Program Kredit Anyelir**

Program Kredit Anyelir merupakan program bantuan permodalan yang terintegrasi dengan program Sukabumi Kece, diberikan kepada wirausaha baru atau WUB yang telah dinyatakan lulus pelatihan.

**c. Program *Little Sukabumi***

Program *Little Sukabumi* merupakan program pusat layanan informasi, promosi, pusat belanja, dan *display* produk unggulan Daerah yang bersinergi dengan daerah lain yang berfungsi sebagai potensi pasar bagi produk unggulan Daerah.

**d. Program *Sukabumi Creative Hub***

Program *Sukabumi Creative Hub* merupakan program pembangunan ruang kreasi bagi warga dengan menyediakan studio foto, televisi, *fashion*, ruang ICT, galeri seni, serta bioskop mini untuk pemutaran film karya anak bangsa, ruang belajar, kafetaria, radio komunitas anak muda, studio rekaman, dan lain sebagainya.

**e. Program Pendidikan Vokasi**

Program Pendidikan Vokasi, merupakan program pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan keahlian tertentu atau vokasi yang relevan dengan dunia kerja dan usaha.

Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa salah satu kualifikasi penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia adalah pendidikan vokasi, dimana kualifikasi pendidikan ini menekankan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.

Dalam program ini dirancang untuk lebih dapat menyalurkan para calon tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi untuk dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dipelajarinya di masa sekolah. Titik beratnya ada pada upaya pemerintah untuk mempertemukan para lulusan pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Daya serap bagi

para.....

para lulusan pendidikan vokasi ini didorong dengan mengadakan dan menciptakan ruang komunikasi yang lebih intens berupa kegiatan-kegiatan bursa kerja.

Diharapkan dengan upaya dan banyaknya ruang komunikasi yang diciptakan maka para lulusan pendidikan vokasi lebih memiliki peluang untuk menemukan lapangan pekerjaannya. Serta di sisi lain perusahaan-perusahaan di Daerah ataupun di luar itu mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan SDM sesuai bidang yang mereka butuhkan.

**f. Program Sukabumi Artist Association,**

Program *Sukabumi Artist Association* merupakan program yang menjembatani seniman dengan pihak-pihak perusahaan agar karya-karya para seniman di Daerah bisa terpublikasikan, dikenali, dan dinikmati masyarakat yang tidak saja memiliki nilai estetis namun juga memiliki nilai bisnis.

**6. Penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19**

Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) dan gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah, dalam

menetapkan.....

menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Menyikapi kondisi tersebut maka Daerah telah menerbitkan beberapa regulasi dalam rangka penanganan pandemi covid-19 yakni:

- Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/90-BPBD/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease-19* di Kota Sukabumi pada bulan April 2020;
- Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid19 di Wilayah Kota Sukabumi;
- Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid19 di Kota Sukabumi.

#### **a. Kesehatan**

Dampak pandemi Covid-19 di sektor kesehatan yang paling fatal adalah kematian. Terdapat juga dampak penyerta lainnya terkait dengan pengendalian dan penanganan pasien yang terkonfirmasi positif diantaranya proses karantina atau isolasi dan penyembuhan pasien dengan gejala berat akibat efek infeksi Covid-19. Karena itu strategi penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor kesehatan terdiri dari 2 (dua) hal besar, yaitu pencegahan dan yang kedua adalah penyembuhan untuk pasien yang terkonfirmasi positif.

Untuk tahap pencegahan penularan lebih jauh dari Covid-19 adalah dengan menerapkan aktivitas 3M dan 4T sebagaimana dikampanyekan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penerapan 3M dapat dilakukan dengan menjalankan setidaknya 3 (tiga) perilaku disiplin yaitu:

- Memakai masker
- Mencuci tangan
- Menjaga jarak dan menghindari kerumunan

Hal kedua, penerapan kebijakan 4T (*Tracking, Tracing, Testing, Treatment*). *Tracking* adalah penelusuran yaitu ketika terjadi kasus konfirmasi positif Covid-19 ditelusuri sumber penularannya. *Tracing*

adalah.....

adalah pelacakan dilakukan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19. *Testing* adalah pemeriksaan agar bisa mendapatkan perawatan dengan cepat dan bisa menghindari potensi penularan. *Treatment* adalah perawatan dilakukan bagi pasien positif Covid-19.

Penyediaan infrastruktur dalam bentuk fasilitas air, sanitasi, dan alat kebersihan menjadi bagian penting agar staregi 3M dapat benar-benar dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat. Termasuk di dalamnya informasi yang mengulas protokol proses disinfeksi di sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat-tempat publik.

Adapun upaya yang bersifat kuratif bagi pasien yang terkonfirmasi positif dan menunjukkan gejala pernapasan untuk tetap tinggal di rumah, mengisolasi diri, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Daerah memerlukan upaya lebih besar dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam jumlah besar di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Sarana dan prasarana ini meliputi stok Alat Pelindung Diri, ventilator, respirator, bahan dan sarpras medis lainnya. Selain itu perlu kantong-kantong mayat dan tata cara pemakaman yang aman untuk setiap orang yang meninggal akibat infeksi covid-19.

Untuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor kesehatan Pemerintah Daerah sudah menyiapkan program dan kegiatan yang diharapkan mampu menangani permasalahan pandemi covid19 di Daerah. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan, kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dan kegiatan pengadaan bahan habis pakai. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp. 283.490.123.120 (dua ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

b. sektor .....

## **b. Sektor Sosial**

Kasus Covid-19 di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti *Work From Home*, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan.

Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Covid-19 ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek *online*, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan.

Dampak pandemi Covid 19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Berdasarkan penelitian dari LIPI yang terbaru, dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarga korban PHK tersebut.

Dari sisi pengusaha, pandemi Covid 19 menyebabkan terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha. Hasil survei LIPI mencatat 39,4 persen usaha terhenti, dan 57,1 persen usaha mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5 persen yang tidak terdampak. Kemampuan bertahan di kalangan dunia usaha juga mengalami keterbatasan. Sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari tiga bulan. Artinya pada bulan Agustus 2020 usaha mereka akan terhenti. Sebanyak 24% pengusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan, 11% mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan, dan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan.

Sementara dampak Covid 19 pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi. Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya, dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi. Hal ini berdampak 35% usaha mandiri tanpa pendapatan dan 28 persen pendapatan menurun hingga 50 persen.

Dampak Covid 19 juga berdampak pada pekerja bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau pekerja “serabutan” yang bekerja jika ada permintaan bekerja. Hasil survei menunjukkan sebanyak 55% pekerja bebas pertanian dan non-pertanian tidak ada pekerjaan, dan 38% order berkurang. Dilihat dari pendapatan, sebanyak 58% pekerja bebas tidak memiliki pendapatan selama masa pandemi Covid 19 dan 28% pendapatan berkurang sampai 30%.

Masalah Covid-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam seperti pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan *handsanitizer* atau desinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain.

Merujuk pada permasalahan sosial di atas, beberapa terobosan harus dilakukan dalam rangka menekan laju kenaikan angka kemiskinan yang berdampak pada sektor sosial melalui pengoptimalisasian pelayanan rehabilitasi sosial dan pemberian perlindungan serta jaminan sosial pada masyarakat dengan meningkatkan peran serta PSKS (baik individu maupun institusional) sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dalam menghadapi perubahan sosial di lapangan. Oleh karena itu perlu disusun strategi baru yang melahirkan program dan kegiatan yang adaptif dan responsif dengan kondisi yang ada.

Salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid 19 di sektor sosial adalah dengan memberikan bantuan sosial dan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat. Aliran bantuan ini akan disalurkan melalui program-program pemerintah seperti program keluarga harapan, kredit usaha rakyat, kredit ultra mikro, kartu sembako, hingga program bantuan pangan non tunai. Diharapkan bansos dan stimulus akan

meningkatkan .....

meningkatkan daya beli dan memberikan bantuan modal kerja bagi masyarakat untuk memulai kembali usahanya sehingga ekonomi bertahap akan bangkit.

Untuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor social, Pemerintah Daerah sudah menyiapkan program yang diharapkan mampu menangani permasalahan pandemi covid19 di Daerah. Adapun program tersebut adalah program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan sosial dan program penanganan bencana. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp. 7.894.750.000 (Tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

### **c. Sektor Ekonomi**

Penanganan Dampak Covid-19 pada sektor ekonomi dipadupadankan dengan program yang bersumber dari Pusat dan Provinsi. Daerah berfokus kepada UMKM yang bergerak pada kelompok *demand*, *supply* dan koneksi *demand* dan *supply*. Dari sisi *demand* program yang dicanangkan adalah program tumbuh bersama dengan strategi penyebaran konten positif bertujuan agar tidak takut untuk berinteraksi selama protokol kesehatan dilaksanakan dan pemberdayaan ekonomi dengan pembelian produk lokal Daerah. Sisi *supply* akan diintervensi oleh program simpul *space* yang bertujuan untuk penguatan kelembagaan UMKM dengan pendampingan dalam sektor kelembagaan, finansial dan proses bisnis, sedangkan untuk mempertemukan *supply* dan *demand* akan diintervensi oleh program “koneksi” dengan tujuan memaksimalkan hubungan *supply* dan *demand* agar terjadi transaksi.

Selain itu strategi lainnya adalah menstimulasi dan membentuk jiwa wirausaha (*entrepreneur*) untuk para korban PHK dan angkatan kerja yang belum bekerja, melalui pelatihan yang membangun *mindset*, *skill fundamental* bagi *entrepreneur*; akses pembiayaan tanpa anggunan dengan bunga rendah (KUR) dari lembaga keuangan BUMD atau BUMN dan pendampingan usaha dari pihak terkait pemerintah Daerah maupun swasta.

Untuk.....



Untuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor ekonomi Pemerintah Daerah sudah menyiapkan program yang diharapkan mampu menangani permasalahan pandemi covid19 di Daerah. Adapun program tersebut adalah program pelayanan izin usaha simpan pinjaman, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), program pengembangan UMKM, program perizinan dan pendaftaran perusahaan, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pengembangan ekspor, program standarisasi dan perlindungan konsumen, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri , program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp. 42.324.774.000 (Empat puluh dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis sebagaimana disajikan pada Tabel 6.4 berikut.

**Tabel 6.4**  
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Tahun 2019 s.d 2020**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Target tahun 2020	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>SPM PENDIDIKAN</b>						
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah WNI usia 5-6 tahun yang bisa sekolah PAUD	76%	100%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	DISDIKBUD
2	Pendidikan Dasar	Jumlah WNI yang bisa sekolah SD	105%	100%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	DISDIKBUD
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah WNI yang bisa sekolah kesetaraan	55,86%	100%	Program Pendidikan Non Formal	DISDIKBUD
<b>SPM KESEHATAN</b>						
4	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	100%	100%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	100%	100%	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Target tahun 2020	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19,98%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	67,72%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Target tahun 2020	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
13	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Dinas Kesehatan
14	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Dinas Kesehatan
15	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Dinas Kesehatan
<b>SPM PEKERJAAN UMUM</b>						
16	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90,85%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DPUPRKP2
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,78%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DPUPRKP2
<b>SPM PERUMAHAN RAKYAT</b>						

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Target tahun 2020	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/ kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	- Program Pengembangan Perumahan - Program tanggap darurat jalan dan jembatan	DPUPRPKP2
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	DPUPRPKP2
<b>SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						
20	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga yang mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas	100%	100%	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	DINAS SATPOL PP
21	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD
22	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Target tahun 2020	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
23	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	BPBD
<b>SPM SOSIAL</b>						
25	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
26	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
27	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Target tahun 2020	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
28	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
29	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial

Sumber : Bappeda diolah, 2020



**Tabel 6.5**  
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Tahun 2021 s.d 2023**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>SPM PENDIDIKAN</b>							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah WNI usia 5-6 tahun yang bisa sekolah PAUD	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
2	Pendidikan Dasar	Jumlah WNI yang bisa sekolah SD	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah WNI yang bisa sekolah kesetaraan	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
<b>SPM KESEHATAN</b>							
4	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
13	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
14	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
15	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>SPM PEKERJAAN UMUM</b>							
16	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	DPUTR
<b>SPM PERUMAHAN RAKYAT</b>							
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/ kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	DPUTR
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	DPUTR
<b>SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							
20	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga yang mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas	100%	100%	100%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
21	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
22	Peayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
23	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana;	BPBD
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
<b>SPM SOSIAL</b>							
25	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
26	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
27	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
28	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
29	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Sumber : Bappeda diolah, 2020

#### **6.4. Program Pembangunan Daerah**

Program pembangunan Daerah tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan Daerah. Program pembangunan Daerah disajikan dalam 2 (dua) tabel yaitu Tabel 6.6 yang memuat program pembangunan Daerah yang dilaksanakan tahun 2019 dan proyeksi anggaran tahun 2020, Tabel 6.7 memuat program pembangunan Daerah disertai pagu indikatif tahun 2021-2023. Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa perbedaan nomenklatur program berdasarkan permendagri 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya. Adapun lebih rinci mengenai rencana program pembangunan daerah yang disertai target dan pendanaan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada Buku II.

Selain program pembangunan Daerah, terdapat beberapa proyek strategis yang akan dilaksanakan di Daerah yang dibiayai dari berbagai sumber anggaran. Hal ini merupakan cerminan dari aspek kolaborasi dalam hal pendanaan dan menunjukkan adanya pertimbangan efisiensi penentuan program sesuai dengan prioritas pembangunan. Proyek strategis Daerah tahun 2020-2023 disajikan pada Tabel 6.8.

**Tabel 6.8**  
**Rencana Proyek Strategis Daerah Tahun 2020 – 2023**

NO.	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN					TARGET
		APBN	APBD PROV	APBD	KPBU	SWASTA	
1	Pembangunan alun-alun		√				2021-2022
2	Pembangunan <i>creative centre</i>		√				2022
3	Pembangunan gedung pusat budaya		√				2022
4	Penataan Lapang Merdeka		√				2021-2022
5	Pembangunan gedung parkir		√	√			2022-2023
6	Fasilitasi RDF (Persampahan)	√	√	√			2022-2023
7	pembangunan kawasan pusat pemerintahan		√	√			2021-2023
8	Pembangunan pasar Lembursitu		√				2021
9	Kawasan wisata Cikundul		√				2023
10	Penataan sungai Cipelang	√					2020-2022
11	Pembangunan gedung BPBD			√			2022-2023
12	Penataan kawasan wisata rengganis		√				2021-2022
13	Penataan pedestrian 10 ruas jalan 1. jalan A. yani		√	√			2021-2023

NO.	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN					TARGET
		APBN	APBD PROV	APBD	KPBU	SWASTA	
	2. Jalan Ciwangi 3. Jalan Siliwangi 4. Jalan Perintis Kemerdekaan 5. Jalan Suryakencana 6. Jalan Lettu bakri 7. Jalan Sudirman 8. Jalan R.E Martadinata 9. Jalan R. Syamsudin S.H 10. Jalan Otistta						
14	Penataan Sarana Umum Masal (SAUM)		√	√			2022-2023
15	Pembangunan 33 kelurahan Sport center			√			2021-2022
16	Penyusunan RDTR	√		√			2022
17	Pembangunan Kawasan Sungai Cipelang	√		√			2021 - 2023
18	Pengembangan TPA Bersama	√	√	√			2021 - 2023
19	Lanjutan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)			√			2021 - 2022
20	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	√	√	√			2021 - 2023
21	Penanganan Kawasan Kumuh	√	√	√			2021 - 2023
22	Optimalisasi Terminal Tipe A & C	√	√	√			2022-2023



NO.	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN					TARGET
		APBN	APBD PROV	APBD	KPBU	SWASTA	
23	Pembangunan Gapura Batas Kota	√	√	√			2021 - 2023
24	Pembangunan Water Treatment Plant	√		√			2022 - 2023
25	Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	√	√	√			2021 - 2023
26	Pembangunan sarana PJU		√	√			2021 - 2023
27	Revitalisasi Pasar Tradisional		√	√			2021-2023
28	Finalisasi Gedung GOR Merdeka			√			2021

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2020

**Tabel 6.6**  
**Program Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan Tahun 2019 dan yang Diproyeksikan Tahun 2020**

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1</b>	<b>MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA</b>										
TUJUAN											
1.1	<b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA</b>	a.	<b>Indeks Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>Angka</b>	<b>94.68</b>	<b>94.68</b>	<b>73.35</b>	-	<b>73.35</b>	-	-
SASARAN											
1.1.1	<b>MENINGKATNYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	a.	<b>Indeks Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>Angka</b>	<b>94.68</b>	<b>94.68</b>	<b>73.35</b>	-	<b>73.35</b>	-	-
PROGRAM											
1.1.1.1	Program Pembinaan Lembaga Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Keagamaan	a.	Persentase Peningkatan Jamaah Mesjid Jami Kelurahan	Persen	-	-	-	1,256,543,370			BAG. KESRA
1.1.1.2	Program Layanan sosial dan kesejahteraan rakyat	a.	Persentase pelayanan sosial dasar dan keagamaan	Persen	-	-			100	1,103,856,450	BAG. KESRA
1.1.1.3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	a.	Persentase Kegiatan Keagamaan Swadaya Masyarakat	Persen	-	-	80	7,670,447,630			BAG. KESRA
1.1.1.4	Program Pembinaan Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan	a.	Persentase Kegiatan Keagamaan Swadaya Masyarakat	Persen	-	-			80	6,326,574,800	BAG. KESRA
1.1.1.5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	a.	Persentase Unjuk Rasa yang disebabkan konflik antar dan inter umat beragama	Persen	≤ 10	≤ 10	≤ 10	143,455,000	≤ 10	42,900,000	KESBANGPOL
1.1.1.6	Program Pembinaan Lembaga Sosial, Kesehatan dan Keagamaan	a.	Persentase Penanganan aliran keagamaan / kepercayaan masyarakat yang menyimpang	Persen	-	-	100	52,827,000	100	125,000,000	KESBANGPOL
SASARAN											
1.1.2	<b>MENINGKATNYA DISIPLIN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT</b>	a.	<b>Indeks Rasa Aman</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>87.53</b>	-	<b>64</b>	-	-
PROGRAM											
1.1.2.1	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	a.	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat yang Terantisipasi	Persen	-	-	100	199,231,000			KESBANGPOL
1.1.2.2	Program Peningkatan Kewaspadaan, Antisipasi dan Kondusifitas di daerah	a.	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat yang Terantisipasi	Persen					100	232,645,500	KESBANGPOL
1.1.2.3	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	a.	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat yang Tertangani	Persen	100	-	100	756,283,500	100	394,645,000	SATPOL PP

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TUJUAN										
1.2	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN	a. Angka Harapan Hidup	Angka	71.95	72	72.26	-	72.10	-	-
SASARAN										
1.2.1	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	a. Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.177	0.177	0.276	-	0.26	-	-
PROGRAM										
1.2.1.1	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (Keluarga Mandiri Level IV)	Angka	20	22	25	9,866,736,200	30	1,196,873,000	DINKES
1.2.1.2	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	a. Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	116.5	116.5	125	679,355,000	125	751,045,000	DINKES
1.2.1.3	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	a. Angka Kematian Bayi	per 100.000 KH	6.82	6.82	9	79,205,000	9	33,205,000	DINKES
1.2.1.4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	a. Persentase balita stunting	Persen	23.1	-	23	290,134,050	22.5	156,050,000	DINKES
1.2.1.5	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	a. Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan	Persen	36.24	-	100	157,630,000	100	100,939,000	DINKES
1.2.1.6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	a. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Persen	100	-	100	3,237,259,000	100	3,870,737,180	DINKES
1.2.1.7	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	a. Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC)	Persen	95	95	100	42,327,498,260	100	41,738,453,239	DINKES
1.2.1.8	Program Pengembangan lingkungan sehat	a. Persentase rumah sehat	Persen	51	51	100	1,023,853,250	100	1,066,318,250	DINKES
1.2.1.9	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	a. Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar	Persen	-	-	100	609,190,000	100	306,625,500	DINKES
1.2.1.10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	a. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan	Persen	-	-	100	3,159,921,750	100	1,773,079,130	DINKES
1.2.1.11	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit ternak/hewan	a. Presentase peningkatan pelayanan kesehatan hewan	Persen	-	-	-	106,675,000	-	77,791,000	DKP3

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)		SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1.12	Program Peningkatan Dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)							324,459,687,398		270,849,030,921	RSUD R Syamsudin
		a.	Persentase Pencapaian nilai akreditasi rumah sakit sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	Persen	65	65	70	-	75	-	RSUD R Syamsudin
		b.	Persentase Contact Rate Pasien dengan usia > 72 tahun	Persen	-	31.09	32	-	34	-	RSUD R Syamsudin
1.2.1.13	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kecamatan	a.	Persentase tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Persen	-	57.17	61	3,562,544,350	62	2,522,281,500	DP2KBP3APM
TUJUAN											
1.3	<b>MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN SERTA MENUMBUHKAN MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA</b>	a.	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>Angka</b>	<b>69.8</b>	<b>69.8</b>	<b>88.29</b>	-	<b>69.81</b>	-	-
SASARAN											
1.3.1	<b>MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERMUTU</b>	a.	<b>Angka Rata-Rata Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>9.52</b>	<b>9.79</b>	<b>9.79</b>	-	<b>9.58</b>	-	-
PROGRAM											
1.3.1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	a.	APK PAUD	Persen	67.72	63.4	68.7	1,732,455,000	70.2	1,956,541,000	DISDIK
1.3.1.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							36,698,701,500		25,025,567,092	DISDIK
		a.	APM SD	Persen	96.7	99.4	99.5	-	99.6	-	DISDIK
		b.	APM SMP	Persen	96.5	96.4	97	-	97.5	-	DISDIK
1.3.1.3	Program Pendidikan Non Formal	a.	Persentase Penurunan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah	Persen	58	58	47	4,067,946,000	35	2,184,463,000	DISDIK
1.3.1.4	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	a.	Persentase Terselenggaranya Pendidikan Vokasi	Persen	-	-	3	508,000,000		-	DISNAKER
1.3.1.5	Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Ekonomi Kreatif	a.	Persentase Terselenggaranya Pendidikan Vokasi	Persen	-	-	-	-	75	269,600,000	DISNAKER
1.3.1.6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a.	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional	Persen	-	54.80	56.69	1,324,754,400	58.17	521,005,500	DISDIK
1.3.1.7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	a.	Persentase SMP Negeri yang melaksanakan PPDB Online	Persen	100	100	100	3,156,287,000	100	589,097,000	DISDIK

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)		SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.8	Program Pendidikan Karakter	a.	Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Pelajar	siswa	-	-	-	510.000.000		600,000,000	DISDIK
1.3.1.9	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	a.	Persentase Peningkatan Minat Baca	Persen	-	-	-	1,119,660,000		276,745,400	DISPUSIP
1.3.1.10	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	a.	Jumlah Budaya Lokal yang Dilestarikan	Budaya	-	3	N/A	962,100,000	10	110,412,000	DISDIK
1.3.1.11	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	a.	Jumlah Pengelolaan Keragaman Budaya	Kegiatan	-	4	4	304,506,500	5	418,651,841	DISDIK
<b>SASARAN</b>											
1.3.2	<b>MENINGKATNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN, MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI OLAHRAGA KOTA SUKABUMI</b>	a.	<b>Indeks Pembangunan Pemuda</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>49.95</b>	<b>-</b>	<b>51.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM</b>											
1.3.2.1	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	a.	Jumlah Peran serta Pemuda	Angka	8	-	9	-	12	543,553,000	DISPORA
1.3.2.2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	a.	Jumlah Raihan Medali pada Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	Angka	46	-	9	3,030,667,000	20	285,790,000	DISPORA
1.3.2.3	Program Pembentukan Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Di Sekolah	a.	Jumlah Kelas Olahraga yang Terbentuk	Angka	-	-	1	-	2	9,300,000	DISPORA
1.3.2.4	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	a.	Jumlah Wirausaha Muda Pemula	Angka	-	-	40	-	40	150,000,000	DISPORA
1.3.2.5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	a.	Persentase Kelurahan Sport Center	Persen	-	-	15.15	3,261,545,000	15.15	1,893,615,000	DISPORA
1.3.2.6	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	a.	Presentase Peningkatan Pengetahuan tentang Bahaya Narkoba	Angka	100	-	100	40,000,000	100	3,700,000	DISPORA

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TUJUAN										
1.4	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BAHAGIA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	a. Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67.76	67.76	76.63	-	67.86	-	-
SASARAN										
1.4.1	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	a. Indeks Pembangunan Gender	Angka	90.95	91.07	91.44	-	91.00	-	-
PROGRAM										
1.4.1.1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarurusan Gender dan Anak						682,339,328		122,767,125	DP2KBP3APM
		a. Persentase PD yang Melaksanakan PPRG	Persen	-	-	45.46	-	51.52	-	DP2KBP3APM
		b. Persentase Peningkatan Pelayanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	-	-	100	-	100	-	DP2KBP3APM
		c. Status Penilaian Kla	status	-	-	Madya	-	Madya	-	DP2KBP3APM
SASARAN										
1.4.2	MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	a. Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67.76	67.76	76.63	-	67.86	-	-
PROGRAM										
1.4.2.1	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	a. Presentase Keluarga Sejahtera II	Persen	-	-	76	329.409.800	76.5	271,012,000	DP2KBP3APM
1.4.2.2	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	a. Presentase Peningkatan Kelompok UPPKS yang Aktif	Persen	-	-	85	60,000,000	86	33,601,750	DP2KBP3APM

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)		SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.2.3	Program Keluarga Berencana	a.	Total Fertility Rate	Angka	-	-	2.4	1,669,804,000	2.4	1,413,943,000	DP2KBP3APM
1.4.2.4	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	a.	Persentase remaja siap menikah yang mendapat penyuluhan	Persen	-	18	20	212,794,250	20	19,866,700	DP2KBP3APM
1.4.2.5	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	a.	Jumlah Kampung KB yang Dibentuk dan dibina	Lokasi	-	16	16	1,075,197,000	17	1,383,174,321	DP2KBP3APM
1.4.2.6	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	a.	Persentase Masyarakat Miskin yang Tertangani	Persen	N/A	0,21	0,17	532,283,500	100	187,306,725	DPUPRPKP2
1.4.2.7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	a.	Persentase PSKS yang aktif dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persen	10	-	15	1,043,955,800			DINSOS
1.4.2.8	Program Peningkatan Nilai- Nilai Kesetiakawanan sosial	a.	Persentase PSKS yang aktif dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persen	-	-			20	938,370,000	DINSOS
1.4.2.9	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							322,769,000		496,555,000	DINSOS
		a.	Prosentase Tuna Sosial (terutama gelandangan dan Pengemis) terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM)	Persen	-	-	55	-	58	-	DINSOS
		b.	Prosentase Lanjut Usia Terlantar terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM)	Persen	-	-	55	-	58	-	DINSOS
		c.	Prosentase Disabilitas Terlantar terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM)	Persen	-	-	60	-	62	-	DINSOS
		d.	Prosentase anakTerlantar terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM)	Persen	-	-	55	-	58	-	DINSOS
1.4.2.10	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	a.	Persentase Disabilitas Terlantar Diluar Panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (spm)	Persen	-	-	60	32,231,000	62	95,000,000	DINSOS
1.4.2.11	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya.	a.	Prosentase Keluarga miskin BDT yang tertangani	persen	72	-	76	381,840,000	77	373,041,000	DINSOS

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>2 MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>											
TUJUAN											
2.1	MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR KOTA LAYAK HUNI YANG AMAN DAN NYAMAN	a.	Indeks Kota Layak Huni	Angka	N/A	N/A	49.25	-	46	-	-
SASARAN											
2.1.1	TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN										
		a.	Persentase penilaian Aspek Fisik Indeks Layak Huni	Persen	N/A	N/A	61.92		42		
		b.	Persentase penilaian Aspek Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	N/A	N/A	68.2		42		
		c.	Persentase penilaian Aspek transportasi	Persen	N/A	N/A	68.86		52		
		d.	Persentase penilaian Aspek Fasilitas	Persen	N/A	N/A	62.42		42		
		e.	Persentase penilaian Aspek Utilitas	Persen	N/A	N/A	74.87		52		
PROGRAM											
2.1.1.1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	a.	Persentase Kondisi Jalan yang Mantap	Persen	79.24	-	79	5,677,258,000	82.4	604,372,505	DISHUB
2.1.1.2	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	a.	Jumlah Kejadian Genangan	Kejadian	43	-	43	461,360,000	42	-	DISHUB
2.1.1.3	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	a.	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perengkapan Jalan	Persen	100	100	100	600,000,000	100	483,172,550	DISHUB
2.1.1.4	Program Pengelolaan RTH	a.	Persentase pemeliharaan PJU	Persen	100	100	100	2,280,674,550	100	5,814,212,850	DISHUB
2.1.1.5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan									1,631,202,400	DISHUB
		a.	Persentase Pencapaian Kawasan off street parking	Persen	-	-	-	-	50	-	DISHUB
		b.	Persentase pencapaian SAUM	Persen	-	-	-	-	-	-	DISHUB
2.1.1.6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan	Dokumen	N/A	N/A	1	2,410,333,600			DPUPRPKP2
2.1.1.7	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Negara serta Pengembangan Jasa Konstruksi							-		465,839,696	DPUPRPKP2
		a.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan	Dokumen	-	-			1	-	DPUPRPKP2
		b.	Persentase Pencapaian Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan	Persen	-	-			10	-	DPUPRPKP2
2.1.1.8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jar. Irigasi/Rawa dan Jar. Lainnya	a.	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik		-	-	1500 m'	6,938,677,500	1500 m'	5,225,084,310	DPUPRPKP2



KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)		SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.1.9	Program Pembangunan Talud/Turap/Bronjong	a.	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang terbangun dalam kondisi baik	unit	N/A	N/A	5	2,102,454,500	7 Unit	734,388,600	DPUPRPKP2
2.1.1.10	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh							998,555,950		920,000,000	BAPPEDA
		a.	Persentase Pencapaian Pemenuhan Program dan Kegiatan Infrastruktur dan Tata Ruang	Persen	90	90	90	-	91	-	BAPPEDA
		b.	Persentase Perangkat Daerah mitra Bidang Fisik dan Penataan Wilayah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	-	80	100	-	100	-	BAPPEDA
		c.	Persentase Perangkat Daerah mitra Bidang Fisik dan Penataan Wilayah yang memenuhi target program pembangunan daerah	Persen	95.54	94.83	91	-	92	-	BAPPEDA
2.1.1.11	Program Perencanaan Tata Ruang	a.	Persentase Tingkat Ketersediaan Pranata Penataan Ruang (RTRW, RDTR & RTBL KSK)	Persen	50	50	60	290,000,000	60	48,493,384	DPUPRPKP2
2.1.1.12	Program Pemanfaatan Ruang	a.	Persentase Kesesuaian dengan Dokumen Tata Ruang	Persen	95	95	95	7,555,000,000	95	29,466,000	DPUPRPKP2
2.1.1.13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	a.	Persentase Kesesuaian pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Persen	80	80	75	105,000,000	70	20,171,000	DPUPRPKP2
2.1.1.14	Program Ruang Publik Budaya	a.	Jumlah Ruang Publik Budaya	Lokasi	-	-	-	-	1	8,000,000,000	DISDIK
2.1.1.15	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	a.	Persentase Angkutan Umum yang melaksanakan Pengujian kendaraan bermotor	Persen	80	80	80.08	2,069,354,700	83.10	1,631,202,400	DISHUB
SASARAN											
2.1.2	<b>TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN</b>	a.	<b>Persentase Pengurangan Risiko Bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.25</b>	-	<b>1.5</b>	-	-
PROGRAM											
2.1.2.1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam							503,429,000		485,091,400	BPBD
		a.	Persentase Kesiapsiagaan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persen	1.22	1.22	1.51		1.8		
		b.	Jumlah Zona Tangguh Bencana	ztb	9	9	13		17		
		c.	Tertanganinya Korban dari Kejadian Bencana	Orang	100	100	100		100		
2.1.2.2	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	a.	Persentase Kesiagaan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Penanggulangan Kebakaran	Persen	90	90	90	344,983,000	90	206,865,190	BPBD

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
SASARAN											
2.1.3	<b>TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS</b>	a.	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Point</b>	<b>42.67</b>	<b>42.67</b>	<b>49.12</b>	-	<b>43.3</b>	-	-
PROGRAM											
2.1.3.1	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	a.	Persentase capaian kualitas udara ambien memenuhi baku mutu	%	60	60	60	133,861,500	60	91,691,600	DLH
2.1.3.2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup							1,209,694,150		434,706,400	DLH
		a.	Persentase peningkatan kualitas air sungai	Persen	3	3	3	-	7	-	DLH
		b.	Capaian penggunaan produk yang ramah lingkungan	Persen	100	100	100	-	100	-	DLH
2.1.3.3	Program Perlindungan Konservasi SDA							73,000,000		84,722,000	DLH
		a.	Persentase jumlah kampung iklim di wilayah Kota Sukabumi	%	4	4	5	-	5	-	DLH
		b.	Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	%	100	100	0	-	100	-	DLH
2.1.3.4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	a.	Luasan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)	Ha	21.3	21.3	21.3	7,650,000,000	21.35	958,807,500	DLH
2.1.3.5	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	a.	Luas Areal Pemakaman	Ha	34.6	34.6	34.7	185,000,000	34.8	438,632,200	DLH
2.1.3.6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & Lingkungan Hidup							181,485,000		102,651,000	DLH
		a.	Persentase Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan lingkungan hidup dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	-	100	-	DLH
		b.	Persentase Peran Serta Sekolah dalam Pengelolaan lingkungan hidup	Persen	16	16	18	-	20	-	DLH
2.1.3.7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	a.	Persentase Upaya Peningkatan Pelayanan Penanganan Sampah	Persen	0	18	20	11,262,787,221	22	1,718,269,402	DLH
2.1.3.8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	10,225,138,550	100	4,726,132,000	DLH

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN										
2.1.4	TERWUJUDNYA KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK	a. Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0.21	0.21	0.52	-	0.63	-	-
PROGRAM										
2.1.4.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah						1,200,000,000		859,680,000	DPUPRPKP2
		a. Persentase penduduk berakses air minum	Persen	68.17	68.17	68.77	-	68.77	-	DPUPRPKP2
		b. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (MCK)	Persen	87.57	87.57	-	-	88.77	-	DPUPRPKP2
2.1.4.2	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan						10,610,442,000		1,427,467,700	DPUPRPKP2
		a. Persentase Jalan Lingkungan yang Baik	Persen	81.99	81.99	84.192	-	87.794	-	DPUPRPKP2
		b. Pencapaian Targetan Penanganan kawasan DAS Cipelag	Persen	-	-	100	-	100	-	DPUPRPKP2
2.1.4.3	Program Pengembangan Perumahan	a. Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	96.12	96.12	96.41	802,698,000	96.70	2,867,970,139	DPUPRPKP2
2.1.4.4	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	a. Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0.21	0.21	0.17	-	0.13	187,306,725	DPUPRPKP2
2.1.4.5	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	a. Persentase pencapaian target pembangunan Drainase	M	196.547	N/A	198.047	2,173,837,700	100	4,590,000	DPUPRPKP2
2.1.4.6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	a. Persentase STBM	Persen	-	-	6.5		13	1,066,318,250	DINKES

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>3</b>	<b>MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR</b>										
TUJUAN											
3.1	MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN	a.	Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	persen	54.57	56.22373984	58.57	-	90.59	-	-
SASARAN											
3.1.1	MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	N/A	N/A	1.885,49917	-	1.763,30	-	-
PROGRAM											
3.1.1.1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							914,258,000		576,000,000	DISKOPDAGRIN
		a.	Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh penguatan permodalan	persen	-	-	70	-	80	-	DISKOPDAGRIN
		b.	Persentase Wirausaha Muda Baru yang terbentuk melalui Program Sukabumi KECE	persen	-	-	50	-	-	-	DISKOPDAGRIN
3.1.1.2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	a.	Persentase wirausaha muda baru yang terbentuk melalui program Sukabumi KECE	persen	-	-	-	54,953,000	50	799,157,000	DISKOPDAGRIN
3.1.1.3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	a.	Persentase pertumbuhan investor yang berinvestasi	persen	-	-	-	205,357,100	8.33	201,317,700	DPMPPTSP
3.1.1.4	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	a.	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. Milyar	-	-	200	235,353,000	210	5,200,000	DPMPPTSP
3.1.1.5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	a.	Presentase Aktifasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif	persen	31.25	-	31.25	438,000,000	31.25	771,672,500	DISPORAPAR
3.1.1.6	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	a.	Persentase IKM yang mendapat legalitas usaha	Persen	-	-	100	239,000,000	100	110,000,000	DISKOPDAGRIN
3.1.1.7	Program pengembangan industri kecil dan menengah	a.	pertumbuhan industri	Persen	2	-	0.2	218,000,000	0.3	9,950,000	DISKOPDAGRIN
3.1.1.8	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	a.	pertumbuhan industri	Persen	2	-	0.2		0.3	100,000,000	DISKOPDAGRIN
3.1.1.9	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	a.	Jumlah destinasi pariwisata berbasis kuliner dan sejarah	lokasi	3	-	-	255,000,000	1	127,340,000	DISPORAPAR
3.1.1.10	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	a.	Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Persen	80	80	80	461,776,300	80	179,551,700	EKBANG
3.1.1.11	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	a.	Presentase Peningkatan Penyerapan Pencari Kerja dalam Bursa Kerja/Job Fair	Persen	-	-	12.5	241,500,000	13.75	90,760,000	DISNAKER
3.1.1.12	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	a.	Persentase Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja	persen	-	-	2.5	508,000,000	3.75	7,500,000	DISNAKER

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN										
3.1.2	<b>MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN</b>	a. <b>Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB</b>	persen	39.435	39.435	38.92	-	28.64	-	-
PROGRAM										
3.1.2.1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	a. Jumlah Pengembangan dan Pembangunan Pusat-Pusat Perdagangan	unit	2	-	-	546,169,000	1	578,328,000	DISKOPDAGRIN
3.1.2.2	Program Pembinaan PKL dan Pedagang Asongan	a. Jumlah Kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan Pedagang	kawasan	3	-	-	220,000,000	1	76,907,125	DISKOPDAGRIN
SASARAN										
3.1.3	<b>MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN</b>									
		a. <b>Persentase Ketersediaan LP2B</b>	persen	1.9	1.9	3.6	-	3.89	-	-
		b. <b>Skor Pola Pangan Harapan</b>	persen	77.9	79.7	79.7	-	81.3	-	-
		c. <b>Persentase Keamanan Pangan</b>	persen	85.45	78	89.81	-	87	-	-
PROGRAM										
3.1.3.1	Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	a. Prosentase perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	persen	1.9	-	3.8	2,294,700,000	5.65	260,342,500	DKP3
3.1.3.2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan			-	-	-	645,948,500		289,660,000	DKP3
		a. Angka Kecukupan Energi	kkal/kap/ hari	2209	-	2209	-	2231.09	-	DKP3
		b. Angka Kecukupan Protein	gr/kap/hari	69.7	-	69.7	-	70.4	-	DKP3
		c. Prosentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	Persen	85.45	-	86	-	87	-	DKP3
3.1.3.3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	a. Prosentase Keamanan Pangan Produk Perikanan	Persen	10	-	20	621,597,000	25	70,003,100	DKP3
3.1.3.4	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Prosentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV Atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	25	-	30	77,070,000	35	11,594,000	DKP3

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF</b>										
TUJUAN										
4.1	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	a. Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	68.03	68.79	68.83	-	68.88	-	-
SASARAN										
4.1.1	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Nilai SAKIP	Skor	74.49	74.49	76.07	-	77	-	-
		b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	-	WTP	-	-
PROGRAM										
4.1.1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						2,618,341,100		1,316,266,150	BAPPEDA
		a. Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	-	80	100	-	100	-	BAPPEDA
		b. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP	Persen	100	100	100	-	100	-	BAPPEDA
		c. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	Persen	100	100	100	-	100	-	BAPPEDA
		d. Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah	Persen	95.53571429	94.83	100	-	100	-	BAPPEDA
4.1.1.2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						785,495,500		567,998,550	INSPEKTORAT
		a. Nilai Pengawasan Kinerja pada SAKIP	Persen	65.2	-	70.5	-	75	-	INSPEKTORAT
		b. Persentase SAKIP PD Bernilai Baik	Persen	70	-	80	-	85	-	INSPEKTORAT
		c. Tingkat Maturitas SPIP	Level	1	-	2	-	3	-	INSPEKTORAT
		d. Persentase Unit WBK/WBBM	Persen	0.062	-	5	-	N/A	-	INSPEKTORAT
		e. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	Persen	80.9	-	81	-	81.9	-	INSPEKTORAT
		f. Persentase Tindaklanjutan Temuan Hasil Pengawasan	Persen	70	-	85	-	90	-	INSPEKTORAT
4.1.1.3	Program Penataan Reformasi Birokrasi					0	-		2,500,000	INSPEKTORAT
		a. Persentase Tingkat pengawasan dalam penataan RB	Level	5,83	6,12	N/A	-	12	-	INSPEKTORAT
		b. Persentase Unit WBK/WBBM	Persen	2	2	N/A	-	5	-	INSPEKTORAT
		c. Level APIP	Level	1	1	2	-	3	-	INSPEKTORAT

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)		SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.1.4	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	a.	Persentase Pemenuhan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang Sesuai Peraturan dan Kebijakan Nasional	Persen	75	75	100	-	100	72,286,500	INSPEKTORAT
4.1.1.5	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah							2,586,297,800		1,854,420,688	TAPEM
		a.	Nilai Pelaporan Kinerja pada SAKIP	Nilai	11.15	-	11.5	-	12	-	TAPEM
		b.	Nilai hasil EKPPD	Nilai	3.39	-	3.4	-	3.42	-	TAPEM
4.1.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a.	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	Persen	100	100	100	904,799,250	100	1,306,595,100	SEMUA URUSAN (OPD)
4.1.1.7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	a.	Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persen	-	-	-	2,065,125,000	-	1,535,651,500	BKPSDM
4.1.1.8	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	a.	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Persen	N/A	95	95	257,280,000	95	461,083,250	BKPSDM
4.1.1.9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	a.	Persentase produk hukum yang harmonis	Persen	100	-	100	1,365,767,500	100	257,624,300	BAGIAN HUKUM
4.1.1.10	Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah							1,242,464,000		468,951,500	BAGIAN ORGANISASI
		a.	Persentase Perangkat Daerah dengan Peringkat Komposit 4 (P-4)	Persen	N/A	-	60	-	70	-	BAGIAN ORGANISASI
		b.	Persentase Perangkat Daerah dan BUMD yang Memiliki Proses Bisnis	Persen	N/A	-	25	-	50	-	BAGIAN ORGANISASI
		c.	Nilai Manajemen Perubahan	Angka	3.06	-	0.08	-	3.09	-	BAGIAN ORGANISASI
4.1.1.11	Program Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	a.	Nilai Manajemen Perubahan	Angka	3.06	-					BAGIAN ORGANISASI
4.1.1.12	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							5,349,095,425		3,770,704,150	BPKD
		a.	Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bln	31 Maret	31 Maret	31 Maret	-	31 Maret	-	BPKD
		b.	Penyampaian Raperda APBD Murni Tepat Waktu	bln	September	September	September	-	September	-	BPKD
		c.	Presentase Peningkatan Sumber Pendapatan Pajak daerah	Persen	15	15	5	-	5	-	BPKD
		d.	Pemanfaatan Informasi Teknologi dalam Pengelolaan Pendapatan	sistem	-	-	-	-	0	-	BPKD
		e.	Presentasee Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	0	85	86	2	-	2	-	BPKD
		f.	Presentase Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	Persen	15	15	3	-	3	-	BPKD
		g.	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Aset Sesuai Peraturan	SKPD	33	33	32	-	32	-	BPKD

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN										
4.1.2	<b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	a. <b>Indeks Pelayanan Publik</b>	Angka	N/A	N/A	2.61	-	2.71	-	-
		b. <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	Angka	79.28	79.28	83.27	-	80.5	-	-
PROGRAM										
4.1.2.1	Program Penataan Administrasi Kependudukan			-	-	-	1,420,264,000		1,438,177,200	DISDUKCAPIL
		a. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	94.41	-	100	-	100	-	DISDUKCAPIL
		b. Cakupan Kepemilikan KTP-el	Persen	99.08	-	100	-	100	-	DISDUKCAPIL
		c. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	96.63	-	100	-	100	-	DISDUKCAPIL
		d. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Persen	74.46	-	100	-	100	-	DISDUKCAPIL
		e. Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	N/A	9.68	100	-	100	-	DISDUKCAPIL
4.1.2.2	Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah	a. % Unit Pelayanan Publik yang memiliki Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan	Persen	N/A	-	20				BAGIAN ORGANISASI
4.1.2.3	Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah	a. % Unit Pelayanan Publik yang memiliki Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan	Persen	N/A	-			40	468,951,500	BAGIAN ORGANISASI
4.1.2.4	Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah	a. % Unit Pelayanan Publik yang memiliki nilai IKM Baik	Persen	68.57	-	71				BAGIAN ORGANISASI
4.1.2.5	Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah	a. % Unit Pelayanan Publik yang memiliki nilai IKM Baik	Persen	68.57	-					BAGIAN ORGANISASI
SASARAN										
4.1.3	<b>MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK PUBLIK</b>	a. <b>Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	Angka	2*	2*	2.43	-	2.2	-	-
PROGRAM										
4.1.3.1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	a. Persentase penerapan pengadaan Barang/Jasa di Kota Sukabumi melalui sarana aplikasi yang terintegrasi	Persen	-	-	90	210,842,000			BPBJ
4.1.3.2	Program Pelayanan dan Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa	a. Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang sesuai peraturan perundang-undangan serta pelaku pengadaan barang/jasa di Kota Sukabumi yang memahami regulasi	Persen	-	-		670,944,600	80	322,260,450	BPBJ



KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	Realiasi	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.3.3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Optimalnya Pengelolaan Aplikasi Pelayanan Publik	Persen	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	DISKOMINFO
4.1.3.4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa	a. Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa	Persen	-	-	-	619,905,700		1,432,593,000	DISKOMINFO
4.1.3.5	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	95	165,372,500	95	152,455,000	DISKOMINFO
TUJUAN										
4.2	<b>MENINGKATKAN INOVASI DAERAH</b>	a. <b>Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>52</b>	-	<b>550</b>	-	-
SASARAN										
4.2.1	<b>MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b>	a. <b>Presentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	-	<b>4.5</b>	-	-
PROGRAM										
4.2.1.1	Program Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Inovasi Daerah	a. Persentase Inovasi Daerah yang Terfasilitasi	Persen	-	-	56.52	680,256,000			BAPPEDA
4.2.1.2	Program Penelitian Pengkajian dan Penguatan Kondisi Pemerintahan Daerah	a. Presentase penelitian dan pengajian dengan melibatkan akademisi	Persen	-	-	57	300,000,000			BAPPEDA
4.2.1.3	Program Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Inovasi Daerah								-	BAPPEDA
		a. Persentase fasilitasi atas pengembangan inovasi	Persen	-	-			25	-	BAPPEDA
		b. Persentase keterlibatan aktor pembangunan dalam penelitian dan pengkajian	Persen	-	-			67.39	-	BAPPEDA
4.2.1.4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kecamatan	a. Persentase Posyantek Aktif di Kelurahan dan Kecamatan	Persen	-	-	20	-	40	-	DP2KBP3APM

**Tabel 6.7**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2021-2023**

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA</b>											
<b>TUJUAN</b>												
1.1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERKUALITAS YANG BERAKHLAK MULIA	Indeks Rasa Aman	Persen	64.3	-	64.6	-	64.9	-	64,9	-	-
		Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,45	-	74,60	-	74,75	-	74,75	-	-
<b>SASARAN</b>												
1.1.1	MENINGKATNYA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA, PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	74.08	-	78.02	-	80.09	-	80,09	-	-
<b>PROGRAM</b>												
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Persentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan ham serta dokumentasi hukum 3. Persentase kegiatan keagamaan swadaya masyarakat	1. persen 2. persen 3. persen	1. 90 2. 100 3. 80	14,734,980,883	1. 90 2. 100 3. 80	15,376,456,697	1. 90 2. 100 3. 80	15,717,848,119	1. 90 2. 100 3. 80	45,829,285,699	SETDA
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keterlibatan komponen masyarakat dan aparat dalam pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan	persen	100	333,561,000	100	341,900,025	100	344,840,365	100	1,020,301,390	BAKESBANGPOL
3	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	persen	100	1,019,232,000	100	1,044,712,800	100	1,053,697,330	100	3,117,642,130	SATPOL P3K
<b>SASARAN</b>												
1.1.2	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.287	-	0.317	-	0.367	-	0.367	-	-
<b>PROGRAM</b>												
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan 2. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular 3. Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna 4. Persentase pemenuhan logistik kesehatan sesuai standar 5. Persentase pencapaian program promotif preventif kesehatan masyarakat	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen 5. persen	1. 100 2. 100 3. 9.09 4. 90 5. 100	42,302,171,688	1. 100 2. 100 3. 11.36 4. 95 5. 100	46,532,388,857	1. 100 2. 100 3. 13.64 4. 100 5. 100	51,185,627,742	1. 100 2. 100 3. 13.64 4. 100 5. 100	140,020,188,287	DINKES

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SASARAN												
1.1.3	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN MERATA	Indeks Pendidikan	Angka	69.82	-	69.83	-	69.83	-	69.83	-	-
PROGRAM												
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar 2. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama 3. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 4. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan 5. Persentase GTK yang berkualifikasi DIV/S1 6. Persentase GTK yang bersertifikasi 7. Jumlah GTK berprestasi	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen 5. persen 6. persen 7. jumlah	1. 100 2. 100 3. 81 4. 87 5. 82.77 6. 51.09 7. 5	87,476,950,000	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100 5. 86.91 6. 53.65 7. 6	96,048,929,200	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100 5. 91.26 6. 56.33 7. 8	102,309,332,880	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100 5. 91.26 6. 56.33 7. 8	285,835,212,080	DISDIKBUD
SASARAN												
1.1.4	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA	Indeks Kota Kreatif (IKK)	Angka	27.2	-	48.8	-	63.6	-	63.6	-	-
PROGRAM												
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1. persen 2. persen	1. 26.88 2. 25.14	1,340,729,925	1. 28.99 2. 27.11	1,394,356,673	1. 31.26 2. 29.24	1,421,748,181	1. 31.26 2. 29.24	4,156,834,780	DISPORAPAR
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	-	-	77	160,020,000	78	161,396,172	78	321,416,172	DISDIKBUD

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SASARAN												
1.1.5	<b>MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>Angka</b>	<b>91.19</b>	-	<b>91.25</b>	-	<b>91.31</b>	-	<b>91,31</b>	-	-
PROGRAM												
8	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Penguatan dan Pengembangan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah dan Penyedia Layanan	persen	30	263,853,000	35	273,069,325	40	277,424,241	40	814,346,566	DP2KBP3A
9	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perlindungan perempuan	persen	85	152,150,000	100	167,365,000	100	184,101,500	100	503,616,500	DP2KBP3A
10	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase layanan perlindungan khusus anak	persen	85	52,150,000	85	53,453,750	85	53,913,452	85	159,517,202	DP2KBP3A
11	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	kategori/ting katan	madya	108,420,000	madya	111,130,500	madya	112,086,222	madya	331,636,722	DP2KBP3A
SASARAN												
1.1.6	<b>MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>Indeks Ketahanan Keluarga</b>	<b>Angka</b>	<b>67.91</b>	-	<b>67.96</b>	-	<b>68.01</b>	-	<b>68,01</b>	-	-
PROGRAM												
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera II	persen	75	603,400,000	75.5	618,485,000	76	623,803,971	76	1,845,688,971	DP2KBP3A
13	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Meningkatnya Cakupan Kesertaan Ber- KB 2. Usia Nikah Pertama 3. Meningkatnya Cakupan Peserta KB MKJP 4. Cakupan PUS yg Belum Ber KB (Unmetneed)	1. persen 2. tahun 3. persen 4. persen	1. 67,87 2. 21,32 3. 23.55 4. 11,15	3,781,480,240	1. 67,89 2. 21,32 3. 23.56 4. 11,13	3,876,017,246	1. 67,90 2. 21,32 3. 23.55 4. 11,12	3,909,350,994	1. 67,90 2. 21,32 3. 23.55 4. 11,12	11,566,848,480	DP2KBP3A

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS) 2. PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS) 3. Persentase peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial	1. persen 2. persen 3. persen	1. 35 2. 30 3. 10	954,500,000	1. 40 2. 35 3. 15	1,007,641,652	1. 45 2. 40 3. 20	1,035,856,703	1. 45 2. 40 3. 20	2,997,998,355	DINSOS
15	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial (gepeng/gelandangan) diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase PMKS lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA) diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	1,255,000,000	1. 100 2. 100	1,286,375,000	1. 100 2. 100	1,297,437,825	1. 100 2. 100	3,838,812,825	DINSOS
16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase anak terlantar yang mendapatkan layanan perlindungan sosial 2. Persentase data fakir miskin yang dikelola	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	240,000,000	1. 100 2. 100	246,000,000	1. 100 2. 100	248,115,600	1. 100 2. 100	734,115,600	DINSOS
17	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan penanganan sosial pasca bencana	persen	100	100,000,000	100	102,500,000	100	103,381,500	100	305,881,500	DINSOS

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2 MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>												
<b>TUJUAN</b>												
2.1	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	Indeks Kenyamanan	Angka	24.4	-	24	-	23.5	-	23.5	-	-
<b>SASARAN</b>												
2.1.1	TERWUJUDNYA PEMERATAAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKELANJUTAN	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	78	-	80	-	82	-	82	-	-
		Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	35	-	40	-	45	-	45	-	-
<b>PROGRAM</b>												
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Jalan dengan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai / Persentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan / Jumlah penyediaan kelengkapan jalan 2. Kenaikan jumlah kendaraan yang dapat pelayanan parkir / Jumlah kendaraan yang dapat ditampung pada lahan parkir / Gedung Parkir 3. Kenaikan jumlah kendaraan yang dapat dilayani pada uji keur / Memaksimalkan kualitas kendaraan yang laik operasi / Gedung pkb 4. Kenaikan jumlah penumpang SAUM / Jumlah Penumpang pada SAUM / Persentase pelaksanaan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) 5. Ketersediaan PJU / Jumlah Sarana dan Prasarana PJU dalam kondisi baik/ Jumlah penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen 5. persen	1. 82,52 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100	5,345,210,261	1. 82,85 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100	5,479,495,518	1. 83.21 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100	5,527,120,809	1. 83.21 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100	16,351,826,588	DISHUB
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Panjang jalan kota kondisi yang Mantap	persen	82.52	13,264,128,006	82.85	13,595,731,206	83.21	13,712,654,495	83.21	40,572,513,707	DPUTR
20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terbangun dan terpeliharanya drainase lingkungan permukiman	M	1500	2,172,176,782	1500	2,226,481,202	1500	2,245,628,940	4500	6,644,286,923	DPUTR

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah bangunan negara sesuai dengan standar kelayakan bangunan yang terbangun	persen	20	5,075,578,000	20	5,204,759,950	20	5,251,276,591	20	15,531,614,541	DPUTR
22	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Jumlah Turap/ Talud/Bronjong yang terbangun dalam kondisi baik 2. Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	1. Jumlah 2. M	1. 9 2. 1500	5,488,150,750	1. 9 2. 1500	5,625,354,519	1. 9 2. 1500	5,673,732,568	1. 27 2. 4500	16,787,237,836	DPUTR
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Persentase Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang 2. Persentase Jumlah Kesesuaian pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	1. persen 2. persen	1. 70 2. 30	297,000,000	1. 80 2. 40	305,080,000	1. 80 2. 50	308,205,318	1. 80 2. 50	910,285,318	DPUTR
24	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	98.32	2,277,733,200	98.61	2,334,676,530	98.9	2,354,754,748	98.9	6,967,164,478	DPUTR
<b>SASARAN</b>												
2.1.2	<b>TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>point</b>	<b>58.21</b>	<b>-</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>59.78</b>	<b>-</b>	<b>59.78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM</b>												
25	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase pencapaian perencanaan lingkungan hidup 2. Persentase ketersediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	212,095,000	1. 100 2. 100	217,397,375	1. 100 2. 100	219,266,992	1. 100 2. 100	648,759,367	DLH
26	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase pengendalian pencemaran air 2. Persentase pengendalian pencemaran udara	1. persen 2. persen	1. 10 2. 60	401,812,000	1. 14 2. 80	411,857,300	1. 17 2. 80	415,399,273	1. 17 2. 80	1,229,068,573	DLH
27	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	persen	100	75,944,000	100	77,842,600	100	78,512,046	100	232,298,646	DLH

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 pada sampah spesifik yang terkendali	persen	10	23,322,000	10	23,905,050	11	24,110,633	11	71,337,683	DLH
29	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	persen	100	290,629,000	100	297,894,725	100	300,456,620	100	888,980,345	DLH
30	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Persentase penanganan kebersihan 2. Persentase pengurangan sampah kota	1. persen 2. persen	1. 74 2. 24	5,362,716,662	1. 73 2. 26	5,496,784,579	1. 74 2. 27	5,544,056,926	1. 74 2. 27	16,403,558,166	DLH
SASARAN												
2.1.3	<b>TERWUJUDNYA KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA</b>	<b>Indeks Kapasitas Bencana Daerah</b>	<b>Point</b>	<b>0.51</b>	-	<b>0.53</b>	-	<b>0.55</b>	-	<b>0.55</b>	-	-
PROGRAM												
31	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. layanan informasi rawan bencana 2. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1. persen 2. persen 3. persen	1. 92 2. 92 3. 92	1,406,349,000	1. 93 2. 93 3. 93	1,441,507,725	1. 94 2. 94 3. 94	1,453,904,691	1. 94 2. 94 3. 94	4,301,761,416	BPBD
32	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Persentase Pengurangan Resiko Bahaya Kebakaran 2. Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran 3. Persentase Penyelamatan Non Kebakaran	1. persen 2. persen 3. persen	1. 30 2. 75 3. 60	589,260,000	1. 60 2. 90 3. 80	603,991,500	1. 100 2. 100 3. 100	609,185,827	1. 100 2. 100 3. 100	1,802,437,327	SATPOL P3K



KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>3 MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR</b>												
<b>TUJUAN</b>												
3.1	MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG KREATIF DAN BERKELANJUTAN	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,45	-	5,23	-	5,54	-	5,54	-	-
<b>SASARAN</b>												
3.1.1	MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	1851.46	-	1944.04	-	2041.24	-	2.041,24	-	-
<b>PROGRAM</b>												
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 2. UMK Naik Kelas; 3. Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menerima Penguatan Permodalan; 4. Persentase Dokumen Pemantauan, Dokumen Penyaluran Kredit Anyelir, Dokumen Pelaksanaan Sukabumi Kece yang Tepat Waktu 5. Persentase Wirausaha Muda baru yang memperoleh Penguatan Permodalan; 6. jumlah Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Pameran	1. persen; 2. UM; 3. UMK; 4. persen; 5. persen 6. produk	1. 84 2. 30 3. 100 4. 100 5. 80 6. 10	3,833,358,000	1. 86 2. 30 3. 100 4. 100 5. 80 6. 10	4,095,823,950	1. 88 2. 30 3. 100 4. 100 5. 80 6. 10	4,258,662,708	1. 88 2. 30 3. 100 4. 100 5. 80 6. 10	12,187,844,658	DISKUMINDAG
34	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Wirausaha Muda Baru yang terbentuk melalui Program Sukabumi KECE	orang	600	800,000,000	600	820,000,000	465	827,052,000	1665	2,447,052,000	DISKUMINDAG
35	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	milyar	210	187,657,100	215	192,348,528	220	194,002,725	645	574,008,352	DPMPTSP
36	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor yang Berinvestasi	investor	60	104,849,000	65	107,470,225	70	108,394,469	195	320,713,694	DPMPTSP
37	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair	persen	80	250,000,000	85	256,250,000	90	258,453,750	90	764,703,750	DISNAKER
38	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	persen	80	1,135,000,000	80	1,163,375,000	80	1,173,380,025	80	3,471,755,025	DISNAKER
39	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	persen	90	385,000,000	90	394,625,000	90	398,018,775	90	1,177,643,775	DISNAKER

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SASARAN												
3.1.2	<b>MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN DAERAH SEKITAR</b>	<b>Laju pertumbuhan sektor perdagangan</b>	<b>persen</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-
PROGRAM												
40	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Unggulan yang difasilitasi Pemasarannya melalui Pameran di Luar Kota Sukabumi	produk	10	100,000,000	10	102,500,000	10	103,381,500	30	305,881,500	DISKUMINDAG
41	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. Jumlah Pengembangan dan Pembangunan Pusat-pusat Perdagangan 2. Persentase Pemanfaatan Profil, Prognosa, Informasi Harga dan Pengawasan Barang Penting/ Strategis 3. Persentase Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	1. unit 2. persen 3. persen	1. 1 1. 100 2. 0	30,000,000	1. 0 1. 100 2. 100	30,750,000	1. 1 1. 100 2. 100	31,014,450	1. 2 1. 100 2. 100	91,764,450	DISKUMINDAG
42	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1. Jumlah Pengembangan dan Pembangunan Pusat-pusat Perdagangan; 2. Persentase Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita; 3. Jumlah Kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL ;	1. unit; 2. persen; 3.kawasan	1. 1 2. 100 3. 1	1,288,900,000	1. 0 2. 100 3. 1	1,359,178,000	1. 1 2. 100 3. 1	1,400,011,634	1. 2 2. 100 3. 3	4,048,089,634	DISKUMINDAG
SASARAN												
3.1.3	<b>Meningkatnya Sektor pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar</b>	<b>kontribusi pariwisata terhadap PDRB</b>	<b>persen</b>	<b>1-1.14</b>	-	<b>1.15-1.29</b>	-	<b>1.30-1.44</b>	-	<b>1,30-1,44</b>	-	-
PROGRAM												
43	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Subsektor ekonomi kreatif yang aktif	Jumlah	2	135,595,000	2	138,984,875	3	140,180,145	7	414,760,020	DISPORAPAR
44	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	persen	13	263,000,000	14.5	269,575,000	15	271,893,345	15	804,468,345	DISPORAPAR

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SASARAN												
3.1.4	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	persen	79.5	-	79.99	-	80.3	-	81,80	-	-
PROGRAM												
45	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Produksi padi 2. Luas panen 3. Persentase lembaga usaha tani yang menerapkan mekanisasi pertanian dengan baik 4. Tingkat pendayagunaan dan pemanfaatan fasilitas pengolahan hasil pertanian 5. Produksi daging 6. Luas lahan pertanian organik yang tersertifikasi 7. Jenis komoditas hortikultura yang didaftarkan registrasi kebun 8. Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha agribisnis di Kota Sukabumi	1. ton GKP 2. ha 3. persen 4. persen 5. ton 6. ha 7. jenis 8. persen	1. 20156 2. 2846 3. 60 4. 75 5. 5786.49 6. 6.03 7. 3 8. 10	598,826,500	1. 19143 2. 2703 3. 65 4. 75 5. 5844.35 6. 6.1 7. 5 8. 10	617,563,413	1. 18187 2. 2568 3. 70 4. 75 5. 5902.80 6. 6.15 7. 8 8. 10	625,758,831	1. 18187 2. 2568 3. 70 4. 75 5. 5902.80 6. 6.15 7. 8 8. 10	1,842,148,743	DKP3
46	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B 2. Persentase ketersediaan data ketahanan pangan /pertanian 3. Persentase prasarana yang digunakan 4. Persentase peningkatan peserta Sekolah Agro di KAC	1. ha 2. persen 3. persen 4. persen	1. 32 2. 100 3. 100 4. 5	285,750,000	1. 40 2. 100 3. 100 4. 5	292,893,750	1. 44 2. 100 3. 100 4. 5	295,412,636	1. 44 2. 100 3. 100 4. 5	874,056,386	DKP3
47	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok pemerintah 2. Angka kecukupan energi (kkal/kap/hari) dan Angka kecukupan protein (gram/kap /hari)	1. persen 2. kkal / kap / hari dan gram / kap / hari	1. 40 2. AKE : 2420 AKP : 107,1	319,284,800	1. 40 2.AKE : 2419 AKP : 107,1	332,179,420	1. 40 2.AKE : 2417 AKP : 107,1	338,798,389	1. 40 2.AKE : 2417 AKP : 107,1	990,262,609	DKP3
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase penggunaan KTI dalam pembelian pupuk bersubsidi 2. Persentase luas lahan pertanian yang mengikuti AOTP	1. persen 2. persen	1. 70 2. 20	17,325,000	1. 80 2. 25	17,758,125	1. 90 2. 30	17,910,845	1. 90 2. 30	52,993,970	DKP3
49	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Provitass Budidaya Perikanan	angka	24,83	244,825,500	24,89	255,203,638	24,95	260,658,984	24,95	760,688,122	DKP3
50	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka ketersediaan cadangan pangan di masyarakat	ton	8	186,645,000	10	191,311,125	10	192,956,401	10	570,912,526	DKP3
51	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Ketersediaan data kerawanan pangan	persen	90	60,006,000	90	61,506,150	90	62,035,103	90	183,547,253	DKP3

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>4.1 MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF</b>												
<b>TUJUAN</b>												
4.1	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	68.93	-	68.98	-	69.48	-	69,48	-	-
<b>SASARAN</b>												
4.1.1	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	Nilai SAKIP	Skor	78	-	79	-	80	-	80,00	-	-
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	-
<b>PROGRAM</b>												
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase layanan keprotokolanan 2. Persentase perangkat daerah yang mengikuti penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan memenuhi aspek penilaian 3. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja tepat waktu	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen	1. 100 2. 30 3. 80 4. 100	37,040,671,775	1. 100 2. 40 3. 80 4. 100	37,966,688,569	1. 100 2. 40 3. 80 4. 100	38,293,202,091	1. 100 2. 40 3. 80 4. 100	113,300,562,435	SETDA
53	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 2. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKP	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	1,089,000,500	1. 100 2. 100	1,116,225,513	1. 100 2. 100	1,125,825,052	1. 100 2. 100	3,331,051,064	BAPPEDA
54	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang perekonomian dan sumber daya alam 2. persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang infrastruktur dan kewilayahan 3. persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1. persen 2. persen 3. persen	1. 100 2. 100 3. 100	2,726,709,200	1. 100 2. 100 3. 100	2,794,876,930	1. 100 2. 100 3. 100	2,818,912,872	1. 100 2. 100 3. 100	8,340,499,002	BAPPEDA
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti 2. tindak lanjut temuan BPK RI 3. tindak lanjut temuan APIP	1. persen 2. persen 3. persen	1. 60 2. 35 3. 35	44,362,500	1. 65 2. 40 3. 40	45,471,563	1. 70 2.45 3. 45	45,862,618	1. 70 2.45 3. 45	135,696,680	INSPEKTORAT
56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	6,658,584,000	100	6,825,048,600	100	6,883,744,018	100	20,367,376,618	BKPSDM

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terselenggaranya Pelaksanaan APBD selama satu tahun, ketepatan waktu dalam penyampaian APBD dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	persen	93	3,432,855,500	93	3,776,141,050	93	4,153,755,155	93	11,362,751,705	BPKPD
58	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib	persen	90	2,400,000,000	90	2,460,000,000	90	2,481,156,000	90	7,341,156,000	BPKPD
SASARAN												
4.1.2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2.81	-	2.91	-	3.01	-	3.01	-	-
PROGRAM												
59	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100,000,000	100	150,000,000	100	200,000,000	100	450,000,000	DINKES
60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	247,000,000	100	253,175,000	100	255,352,305	100	755,527,305	DINSOS
61	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	persen	100	50,000,000	100	51,250,000	100	52,531,250	100	153,781,250	DINSOS
62	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	90	59,200,000	90	157,720,000	90	173,992,000	100	390,912,000	DPMPSTP
63	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Cakupan Kepemilikan KTP-el 2. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga 3. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	1. persen 2. persen 3. persen	1. 100 2. 100 3. 40	1,342,028,000	1. 100 2. 100 3. 60	1,375,578,700	1. 100 2. 100 3. 80	1,387,408,677	1. 100 2. 100 3. 80	4,105,015,377	DISDUKCAPIL
64	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 2. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian 3. Cakupan Kepemilikan akta Perkawinan 4. Cakupan Kepemilikan akta Perceraian	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen	1. 100 2. 100 3. 0 4. 0	152,141,000	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	155,944,525	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	157,285,648	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	465,371,173	DISDUKCAPIL
65	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	persen	100	222,567,000	100	228,131,175	100	230,093,103	100	680,791,278	DISDUKCAPIL
66	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Penerbitan Buku Profil Kependudukan	persen	100	30,150,000	100	30,903,750	100	31,169,522	100	92,223,272	DISDUKCAPIL
67	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	angka	58	178,500,000	58.4	500,000,000	59	750,000,000	59	1,674,000,000	DISPUSIPDA
68	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	persen	90	10,140,116,300	90	10,965,422,130	90	11,773,066,026	90	32,878,604,456	KECAMATAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SASARAN												
4.1.3	MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2.3	-	2.4	-	2.5	-	2.5	-	-
PROGRAM												
69	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya transparansi informasi publik dalam rangka penyelenggaraan pembangunan	persen	60	204,607,500	70	209,722,688	80	211,526,303	80	625,856,490	DISKOMINFO
70	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik	persen	90	222,588,800	90	228,153,520	90	230,115,640	90	680,857,960	DISKOMINFO
TUJUAN												
4.2	MENINGKATKAN INOVASI DAERAH	Skor Indeks Inovasi Daerah	predikat	terinovatif ( ≥ 1001 )	-	terinovatif ( ≥ 1001 )	-	terinovatif ( ≥ 1001 )	-	terinovatif ( ≥ 1001 )	-	-
SASARAN												
4.2.1	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Indeks Daya Saing Daerah	predikat	tinggi	-	tinggi	-	tinggi	-	tinggi	-	-
PROGRAM												
71	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase Inovasi Daerah yang Terfasilitasi 2. Presentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi	1. persen 2. persen	1.35 2. 60	656,700,500	1.40 2. 65	673,118,013	1.45 2. 70	678,906,827	1.45 2. 70	2,008,725,340	BAPPEDA

**Tabel 7.3**  
**Realisasi dan Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Daerah**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>									
<b>1.01.</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>									
<b>1.01.01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>									
<b>1.01.01.01</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>									DISDIK
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	10,051,248,085	100	9,518,738,310	DISDIK
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	2,275,588,815	100	453,075,000	DISDIK
1.01.1.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	100	100	146,910,000	100	144,525,000	DISDIK
1.01.1.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	46,865,000	100	21,185,000	DISDIK
1.01.1.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG JASA DAN ASSET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	29,400,000	100	6,120,000	DISDIK
1.01.1.01.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	100	100	43,886,000	100	24,040,000	DISDIK
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Angka partisipasi kasar PAUD	Persen	67,20	63,40	68,70	1,732,455,000	70,2	1,956,541,000	DISDIK
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN						36,698,701,500		25,025,567,092	DISDIK
		Angka partisipasi murni (APM) SD	Persen	99,40	99,40	99,50	-	99,60	-	DISDIK
		Angka partisipasi murni (APM) SMP	Persen	96,40	96,40	97,00	-	97,50	-	DISDIK
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase penurunan anak usia sekolah yang tidak sekolah	Persen	58	N/A	47	4,067,946,000	35	850,247,900	DISDIK
1.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional	persen	N/A	N/A	65	1,324,754,400	75	521,005,500	DISDIK
1.01.1.01.01.21.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase SMP negeri yang melaksanakan PPDB online	Persen	100	N/A	100	3,156,287,000	100	589,097,000	DISDIK
1.01.1.01.01.23	PROGRAM PENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PUSAT	Persentase jumlah sekolah yang menerima BOS pusat	Persen	100	100	100	36,929,064,572	100	37,125,572,938	DISDIK
1.01.1.01.01.24	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER	Persentase penurunan kasus kenakalan siswa	Persen	N/A	N/A	N/A	510.000.000	30	600,000,000	DISDIK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.01.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>									
<b>1.01.02.01.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>									DINKES
1.01.1.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	6,911,733,100	100	5,638,762,670	DINKES
1.01.1.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	N/A	100	2,462,051,220	100	1,230,166,648	DINKES
1.01.1.01.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	N/A	100	47,000,000	100	100,994,000	DINKES
1.01.1.01.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	N/A	100	46,000,000	100	10,000,000	DINKES
1.01.1.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	N/A	100	104,032,200	100	390,792,400	DINKES
1.01.1.01.02.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100	N/A	100	84,261,000	100	25,120,500	DINKES
1.01.1.01.02.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Dokumen	100	N/A	100	173,935,000	100	46,700,000	DINKES
1.01.02.1.01.02.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan	Persen	100	N/A	100	3,159,921,750	100	1,773,079,130	DINKES
1.01.02.1.01.02.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (keluarga mandiri level IV)	Persen	20	N/A	25	9,866,736,200	30	17,119,308,882	DINKES
1.01.02.1.01.02.17.	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan	Persen	20	25	100	266,746,250	100	101,920,000	DINKES
1.01.02.1.01.02.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar	Persen	N/A	N/A	100	609,190,000	100	306,625,500	DINKES
1.01.02.1.01.02.20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase BALITA stunting	Persen	23,1	23,1	23	290,134,050	22,5	156,050,000	DINKES
1.01.02.1.01.02.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase rumah sehat	Persen	51	51	100	1,023,853,250	100	1,066,318,250	DINKES
1.01.02.1.01.02.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (P2M)	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Persen	100	N/A	100	3,237,259,000	100	3,870,737,180	DINKES



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.1.01.02.23.	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna	Jumlah	1	1	1	2,959,701,700	2	1,357,652,298	DINKES
1.01.02.1.01.02.25.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	Persen	100	N/A	100	31,991,680,299	100	18,377,565,792	DINKES
1.01.02.1.01.02.28.	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC)	Persen	87,32	95	100	42,327,498,260	100	41,738,453,239	DINKES
1.01.02.1.01.02.29.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Angka kematian bayi	Per 100.000 KH	6,82	6,82	9	79,205,000	9	33,205,000	DINKES
1.01.02.1.01.02.30.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan	Persen	30,17	36	100	157,630,000	100	100,939,000	DINKES
1.01.02.1.01.02.32.	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Angka kematian ibu	Per 100.000 KH	116,5	116,5	125	679,355,000	125	751,045,000	DINKES
1.01.02.1.01.02.33.	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100	2,569,147,000	100	3,305,587,940	DINKES
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan	Persen	100	100	100		100		DINKES
1.01.02.1.01.02.35.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PPK-BLUD	Persentase masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan UPT BLUD	persen	N/A	N/A	50	12,576,457,650	60	12,795,551,709	DINKES
1.01.02.1.01.02.36.	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	Cakupan peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	persen	80	80	100	13,679,425,370	100	71,036,000	DINKES

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1.01.02.02.</b>	<b>RSUD R.SYAMSUDIN SH</b>									RSUD R. Syamsudin
1.01.02.1.01.02.26.	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT						46,064,633,051		46,862,496,535	RSUD R. Syamsudin
		Pengadaan alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Persen	N/A	N/A	100	-	100		RSUD R. Syamsudin
		Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran (pajak rokok)	Persen	N/A	N/A	100	-	25		RSUD R. Syamsudin
		peningkatan sarana dan prasarana RSUD R syamsudin SH DAK (pembangunan gedung 8 lantai)	Persen	N/A	N/A	100	-	100		RSUD R. Syamsudin
		Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional pembangunan gedung pusat penunjang (APBD I)	Persen	N/A	N/A	100	-	100		RSUD R. Syamsudin
		Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional pengadaan alat kedokteran (APBD I)	Persen	N/A	N/A	N/A	-			RSUD R. Syamsudin
1.01.02.1.01.02.33.	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL									RSUD R. Syamsudin
1.01.02.1.01.02.34.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BLUD						324,459,687,398		270,849,030,921	RSUD R. Syamsudin
		Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit dan pengembangan SDM	Persen	N/A	N/A	100		100		RSUD R. Syamsudin
		Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit bidang umum dan keuangan	Persen	N/A	N/A	100		100		RSUD R. Syamsudin
		Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit bidang pelayanan dan keperawatan	Persen	N/A	N/A	100		100		RSUD R. Syamsudin
		Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit bidang pendidikan dan bagian mutu	Persen	N/A	N/A	100		100		RSUD R. Syamsudin
		Peningkatan administrasi pengelolaan dan pengembangan SDM	Persen	N/A	N/A	100		100		RSUD R. Syamsudin

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM									
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									DPUPRKP2
1.01.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						2,410,333,600		880,541,589	DPUPRKP2
		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	N/A	N/A	100		100		DPUPRKP2
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan	Dokumen	N/A	N/A	1				DPUPRKP2
1.01.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						7,010,802,000	100	448,150,259	DPUPRKP2
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	N/A	N/A	100				DPUPRKP2
		Persentase bangunan sesuai dengan tata ruang kota	Gedung	N/A	N/A	3		1		DPUPRKP2
1.01.03.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						50,000,000	100	111,058,500	DPUPRKP2
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Kerja Pegawai untuk Peningkatan Disiplin Manajemen	Persen	100	100	100				DPUPRKP2
1.01.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						100.000.000	100	130,000,000	DPUPRKP2
		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100				DPUPRKP2
1.01.03.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN						20,742,000	100	16,000,000	DPUPRKP2
		Persentase Keteresuaian Perencanaan Anggaran Oleh Perangkat Daerah Dengan Dokumen RTRW, RPJMD dan RKPD	Persen	100	100	100				DPUPRKP2
1.01.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN						184,780,500	87.79	196,758,500	DPUPRKP2
		Persentase kondisi jalan lingkungan baik	Persen	N/A	N/A	84.19				DPUPRKP2
1.01.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG						2,173,837,700	199.547	4,590,000	DPUPRKP2
		Persentase pencapaian target pembangunan drainase	M	196.547	N/A	198.047				DPUPRKP2
1.01.03.01.17.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG						2,102,454,500	7	734,388,600	DPUPRKP2
		Persentase turap/talud/bronjong kondisi baik	Unit	N/A	N/A	5				DPUPRKP2
1.01.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN						184,780,800	3	196,758,800	DPUPRKP2
		Persentase kondisi jalan lingkungan baik	Dokumen	N/A	N/A	3				DPUPRKP2

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1.01.03.01.21.	TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN						2,405,725,000		2,206,297,500	DPUPRPKP2
		Persentase kondisi jalan lingkungan baik	Dokumen	N/A	N/A	10		10		DPUPRPKP2
		Persentase turap/talud/bronjong yang terbangun dalam kondisi baik	M3	N/A	N/A	500		500		DPUPRPKP2
		Persentase pencapaian target pembangunan drainase	Dokumen	N/A	N/A	10		10		DPUPRPKP2
1.01.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	M'	N/A	N/A	1.5	6,938,677,500	1.5	5,225,084,310	DPUPRPKP2
1.01.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH						1,200,000,000		859,680,000	DPUPRPKP2
		Persentase penduduk berakses air minum	Persen	68	68	69		69		DPUPRPKP2
		Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK)	Persen	88	88	86		89		DPUPRPKP2
1.01.03.01.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN/KECAMATAN						10,610,442,000		1,427,467,700	DPUPRPKP2
		Persentase jalan lingkungan yang baik	Persen	82	82	84.19		87.79		DPUPRPKP2
		Pencapaian targetan penanganan kawasan DAS Cipelang	Persen	N/A	N/A	3		3		DPUPRPKP2
		Persentase kepala keluarga dengan akses air bersih	Persen	68	68	69		69		DPUPRPKP2
1.01.03.01.31.	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI							40	1,573,000	DPUPRPKP2
1.01.03.01.32.	PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI							40	150,000,000	DPUPRPKP2
1.01.03.01.33.	PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya keunggulan dan kemandirian pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi	Persen	N/A	100	100	223,150,000	100	473,150,000	DPUPRPKP2
1.01.03.01.35.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG						290,000,000		48,493,384	DPUPRPKP2
		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persen	80	50	60		60		DPUPRPKP2
		Persentase tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (RTRW, RDTR & RTBL KSK)	Persen	50	N/A	N/A		1 Draft RDTR		DPUPRPKP2
1.01.03.01.36.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG						7,555,000,000		29,466,000	DPUPRPKP2
		Jumlah lapang milik pemerintah yang di tata	Lapang	N/A	N/A	1				DPUPRPKP2
		Persentase kesesuaian dengan dokumen tata ruang	Persen	95	95	95		95		DPUPRPKP2
1.01.03.01.37.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase kesesuaian pengendalian pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan tata ruang	Persen	80	80	75	105,000,000	70	20,171,000	DPUPRPKP2
1.01.03.01.38.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								465,839,696	DPUPRPKP2

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.02.05.01.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>									DLH
1.01.03.1.02.05.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Persentase cakupan wilayah pelayanan pengambilan lumpur tinja	Persen	N/A	N/A	35	100.000.000	-	-	DLH
<b>1.02.09.01.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>									DISHUB
1.01.03.1.02.09.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN						5,677,258,000		604,372,505	DISHUB
		Persentase kondisi jalan yang mantap	Persen	79,24	N/A	4,83		5,31		DISHUB
		Ruas jalan kota yang mantap	Km	91,72	N/A	-		95,12		DISHUB
		Panjang trotoar yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus	Km	N/A	N/A	2,92		3,21		DISHUB
		Revitalisasi pedestrian kawasan Jl. Ahmad Yani, Jl. Ir. H. Juanda, lapangan merdeka, Jl. Ciwangi, dan jl. Kapt. Harun Kabir	Ruas Jalan	N/A	N/A	2		3		DISHUB
1.01.03.1.02.09.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Jumlah kejadian genangan	Kejadian	43	N/A	43	461,360,000	-	2,897,458,400	DISHUB
1.01.03.1.02.09.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase kondisi jalan yang mantap	Persen	N/A	N/A	75	15,278,660,000	82	8,236,390,554	DISHUB
1.01.03.1.02.09.20.	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah data inspeksi kondisi jalan	Dokumen	N/A	N/A	1	50,000,000	1	49,762,500	DISHUB
1.01.03.1.02.09.21.	PROGRAM CEPAT TANGGAP JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah ruas jalan yang harus ditangani dalam situasi s	Ruas Jalan	N/A	N/A	10	6,806,611,910	5	1,202,496,150	DISHUB
1.01.03.1.02.09.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan	Persen	N/A	N/A	75	95,000,000	76	200,546,500	DISHUB
1.01.03.1.02.09.38.	PROGRAM PENEINGKATAN PEDESTIAN YANG LAYAK DAN LAHAN PARKIR							8,05	21,104,000,000	DISHUB
1.01.04	<b>PERUMAHAN RAKYAT</b>									
<b>1.01.03.01.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>									DPUPRKP2
1.01.04.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase jumlah rumah layak huni	Persen	96,12	96	96,41	802,698,000	96,70	2,867,970,139	DPUPRKP2
1.01.04.01.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Pemutahiran data base rumah tidak layak huni (RTLH) dan pemetaan kawasan kumuh di kota Sukabumi	Dokumen	N/A	N/A	1	261,092,500	1	46,409,000	DPUPRKP2
1.01.04.01.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	Persentase kawasan kumuh	Persen	N/A	0,21	0,17	532,283,500	0,13	187,306,725	DPUPRKP2
<b>1.01.06.01.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>									DINSOS
1.01.04.1.01.06.20	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Persentase area taman makam pahlawan yang dipelihara	Persen	N/A	N/A	82	30,000,000	84	20,000,000	DINSOS

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.02.05.01.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>									DLH
1.01.04.1.02.05.26.	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Luas areal pemakaman	Ha	34,60	35,00	34,70	185,000,000	34,80	438,632,200	DLH
1.01.05	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM &amp; PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									
<b>1.01.05.01.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>									SATPOL PP
1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	3,167,251,500	100	3,045,628,210	SATPOL PP
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	498,073,000	100	480,148,500	SATPOL PP
1.01.1.01.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	100	100	369,725,000	100	17,500,000	SATPOL PP
1.01.1.01.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	100	50	32,480,550	60	65,000,000	SATPOL PP
1.01.1.01.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	19,621,000	100	3,600,000	SATPOL PP
1.01.1.01.05.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketepatan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	100	100	4,530,000	100	10,710,000	SATPOL PP
1.01.05.1.01.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase pengamanan lingkungan pada hari-hari besar	Persen	100	N/A	100	390,702,500	100	520,822,000	SATPOL PP
1.01.05.1.01.05.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Persentase tingkat gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen	100	N/A	100	756,283,500	100	394,645,000	SATPOL PP

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1.01.05.02.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>									BPBD
1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	N/A	90	982,615,100	91	986,920,300	BPBD
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	90	N/A	90	201,856,000	91	81,788,000	BPBD
1.01.1.01.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	90	N/A	90	219,910,000	91	191,700,000	BPBD
1.01.1.01.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	90	N/A	90	103,377,000	91	117,048,700	BPBD
1.01.1.01.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase jumlah dokumen, laporan kinerja, dan laporan keuangan OPD yang tepat waktu	Persen	90	N/A	90	18,526,500	91	3,822,000	BPBD
1.01.1.01.05.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	90	N/A	90	52,640,000	91	29,340,000	BPBD
1.01.05.1.01.05.19.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM						503,429,000		485,091,400	BPBD
		Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	1,22	N/A	1,51		1,8		BPBD
		Jumlah zona tangguh bencana	Zotabe	9	N/A	13		17		BPBD
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi dari korban bencana	Persen	100	N/A	100	-	100		BPBD
1.01.05.1.01.05.21.	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL						161,571,000		253,460,000	BPBD
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam	Persen	90	N/A	90		90		BPBD
		Persentase perbaikan rumah korban akibat bencana alam	Persen	90	N/A	90		90		BPBD
1.01.05.1.01.05.22.	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN						344,983,000		206,865,190	BPBD
		Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran	Persen	1	N/A	2		1,8		BPBD
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan di evakuasi dari korban kebakaran	Persen	90	N/A	90		90		BPBD
<b>5.00.01.01.</b>	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>									KESBANGPOL
	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi	Persen	100	100	100	199,231,000			KESBANGPOL
1.01.05.5.00.01.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Persentase fasilitasi koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat	Persen	100	100	100	156,233,000			KESBANGPOL

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.01.06</b>	<b>SOSIAL</b>									
<b>1.01.06.01.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>									DINSOS
1.01.1.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	675,989,000	100	375,373,900	DINSOS
1.01.1.01.06.02	PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	2,041,989,000	100	306,941,000	DINSOS
1.01.1.01.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	100	100	22,000,000	100	16,500,000	DINSOS
1.01.1.01.06.05	PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	100	100	4,456,500	100	38,000,000	DINSOS
1.01.1.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	24,845,500	100	5,690,000	DINSOS
1.01.1.01.06.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG /JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri No.19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	2,290,000	100	3,345,000	DINSOS
1.01.1.01.06.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	80	80	82	25,098,500	84	27,000,000	DINSOS
1.01.06.1.01.06.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA						381,840,000		373,041,000	DINSOS
		Persentase masyarakat miskin BDT yang tertangani	Persen	72	N/A	76		77		DINSOS



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.06.1.01.06.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL						322,769,000		496,555,000	DINSOS
		Persentase tuna sosial (terutama gelandangan dan pengemis) terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	45	N/A	55		58		DINSOS
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	100	N/A	100		100		DINSOS
		Persentase lanjut usia terlantar terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	45	N/A	55		58		DINSOS
		Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	45	N/A	55		58		DINSOS
		Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	45	N/A	60		62		DINSOS
		Persentase PMKS lainnya yang tertangani	Persen	45	N/A	46		47		DINSOS
1.01.06.1.01.06.17	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR									DINSOS
1.01.06.1.01.06.18	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	45	N/A	60	32,231,000	62	95,000,000	DINSOS
1.01.06.1.01.06.19	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO							20	90,000,000	DINSOS
1.01.06.1.01.06.xx	PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI KESETIAKAWANAN SOSIAL								938,370,000	DINSOS
1.01.06.1.01.06.21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL						1,043,955,800		1,425,098,300	DINSOS
		Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial	Persen	10	N/A	15				DINSOS
		Persentase keluhan masyarakat miskin yang ditindaklanjuti dan selesai melalui UPT SLRT	Persen	100	N/A	82				DINSOS
		Persentase keluarga miskin BDT yang tertangani	Persen	72	N/A	76				DINSOS

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.02.</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>									
<b>1.02.01</b>	<b>TENAGA KERJA</b>									
<b>1.02.01.01.</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>									DISNAKER
1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	N/A	N/A	100	537,909,300	100	314,313,850	DISNAKER
1.02.1.02.01.02	PROGRAM SARANA PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	N/A	N/A	100	491,090,000	100	530,299,000	DISNAKER
1.02.1.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	N/A	N/A	100	59,500,000	100	30,000,000	DISNAKER
1.02.1.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	N/A	N/A	100	99,425,000	100	109,367,500	DISNAKER
1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	N/A	N/A	100	17,868,700	100	3,520,000	DISNAKER
1.02.1.02.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	N/A	N/A	100	18,011,200	100	30,000,000	DISNAKER
1.02.01.1.02.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persen	N/A	N/A	3	508,000,000	3,75	558,800,000	DISNAKER
1.02.01.1.02.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair	Orang	N/A	N/A	500	241,500,000	550	90,760,000	DISNAKER
1.02.01.1.02.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja	Persen	N/A	N/A	100	449,710,500	100	5,580,000	DISNAKER
1.02.01.1.02.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCT PRIORITAS DAERAH)	Persentase peningkatan keterampilan pencari kerja	Persen	N/A	N/A	N/A	550,000,000		550,000,000	DISNAKER
1.02.01.1.02.01.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH BERBASIS EKONOMI KREATIF							75	269,600,000	
<b>1.02.02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
<b>1.02.08.01.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>									DP2KBP3APM
1.02.02.1.02.08.15.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Persentase kapasitas perempuan dan anak dalam pembangunan	Persen	N/A	30	30	50.000.000	33	50,000,000	DP2KBP3APM
1.02.02.1.02.08.16.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase penguatan dan pengembangan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah dan penyedia layanan	Persen	N/A	75	75	682,339,328	80	122,767,125	DP2KBP3APM
1.02.02.1.02.08.17.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN							19	50,000,000	DP2KBP3APM
1.02.02.1.02.08.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Persentase pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan	Persen	N/A	30	30	40,622,500	33	53,870,400	DP2KBP3APM

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.02.03</b>	<b>PANGAN</b>									
<b>1.02.03.01.</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>									DKP3
1.02.1.02.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	81	N/A	100	1,538,620,000	100	763,503,600	DKP3
1.02.1.02.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	81	N/A	100	759,860,370	100	410,267,407	DKP3
1.02.1.02.03.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	81	N/A	90	94,000,000	90	-	DKP3
1.02.1.02.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							75	270,000,000	DKP3
1.02.1.02.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian laporan keuangan tepat waktu	Persen	81	N/A	90	31,460,000	90	28,151,500	DKP3
1.02.1.02.03.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri No.19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	81	N/A	90	13,680,000	90	20,000,000	DKP3
1.02.1.02.03.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketepatan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	81	N/A	90	24,400,000	90	21,650,000	DKP3
1.02.03.1.02.03.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN						645,948,500		289,660,000	DKP3
		Skor PPH	Poin	87	N/A	79		79		DKP3
		Angka kecukupan energi	KKAL/KAP/hari	2209	N/A	2423		2422		DKP3
		Angka kecukupan protein	GR/KAP/hari	69,70	N/A	107,1		107,1		DKP3
		Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan pangan asal hewan (PAH)	Persen	85	N/A	86		87		DKP3
		Angka ketersediaan cadangan pangan pokok pemerintah	Kg	N/A	N/A	15099		25000		DKP3
		Persentase ketersediaan data ketahanan pangan atau pertanian	Persen	100	N/A	100		100		DKP3
		Persentase penggunaan KTI dalam pembelian pupuk bersubsidi	Persen	N/A	N/A	25		50		DKP3
		Persentase luas lahan pertanian yang mengikuti AUTP	Persen	N/A	N/A	20		25		DKP3
		Persentase peningkatan luas lahan pertanian organik yang tersertifikasi	Persen	N/A	N/A	10		10		DKP3
		Persentase petani hortikultura yang memiliki sertifikat prima	Persen	N/A	N/A	10		15		DKP3

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1.02.04</b>	<b>PERTANAHAN</b>									
1.02.14.4.00.01.15.	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	Persen	80	80	80	44.400.000	80	48.840.000	BAG. TAPEM
<b>1.02.05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>									
<b>1.02.05.01.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>									DLH
1.02.1.02.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	10,496,178,725	100	10,986,793,150	DLH
1.02.1.02.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	10,225,138,550	100	4,726,132,000	DLH
1.02.1.02.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	100	100	200,000,000	100	277,391,000	DLH
1.02.1.02.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR *							100	198,313,500	DLH
1.02.1.02.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	34,870,000	100	12,120,000	DLH
1.02.1.02.05.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	9,670,000	100	7,000,000	DLH
1.02.1.02.05.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	100	100	31,373,500	100	35,560,000	DLH
1.02.05.1.02.05.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						11,262,787,221		1,718,269,402	DLH
		Persentase pengurangan sampah	Persen	N/A	18	20		22		DLH
		Persentase penanganan sampah	Persen	N/A	73	80		75		DLH
		Persentase pelayanan kebersihan	Persen	N/A	50	55		60		DLH
		persentase pemrosesan akhir sampah	Persen	N/A	100	100		100		DLH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1.02.05.1.02.05.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						1,209,694,150		434,706,400	DLH
		Persentase dokumen kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan	Persen	50	50	50		100		DLH
		Persentase usaha dan/atau kegiatan melaporkan hasil Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Persen	3	5	5		8		DLH
		Cakupan pelaksanaan program pelaporan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman	Persen	100	100	100		100		DLH
		Persentase peningkatan kualitas air sungai	Persen	3	0	3		7		DLH
		Persentase dokumen kajian dampak lingkungan digunakan dalam pengambilan keputusan	Persen	100	100	100		100		DLH
		Persentase capaian penggunaan produk yang ramah lingkungan	Persen	N/A	N/A	N/A		100		DLH
		Persentase peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persen	10	11	11		12		DLH
		Cakupan wilayah pelayanan pengambilan lumpur tinja	Persen	0	30	35		40		DLH
1.02.05.1.02.05.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM						73,000,000		84,722,000	DLH
		Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persen	100	100	N/A		100		DLH
		Persentase jumlah kampung iklim di wilayah kota sukabumi	Persen	4	4	5		5		DLH
1.02.05.1.02.05.19.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP						181,485,000		102,651,000	DLH
		Persentase penyediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	100	100	100		100		DLH
		Persentase jumlah peran serta sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persen	16	16	18		20		DLH
1.02.05.1.02.05.20.	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI						133,861,500		91,691,600	DLH
		Persentase capaian kualitas udara ambien memenuhi baku mutu	Persen	60	60	60		60		DLH
		Persentase ketaatan masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran	Persen	N/A	8	13		17		DLH
1.02.05.1.02.05.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						7,650,000,000	21,35	958,807,500	DLH
		Luasan pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP)	Ha	21,3	21,3	21,30				DLH
<b>1.02.09.01.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>									<b>DISHUB</b>
1.02.05.1.02.09.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						2,280,674,550	227	5,814,212,850	DISHUB
<b>1.02.11.01</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>									<b>DIDKOPDAGRIN</b>
1.02.11.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						11,050,000	100	5,000,000	DISKOPDAGRIN
		Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persen	100	100	100				DISKOPDAGRIN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.02.06</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
<b>1.02.06.01</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	N/A	100	1,740,668,000	100	1,528,933,800	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90	N/A	100	1,211,594,600	100	107,233,000	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	N/A	100	70,000,000	100	29,500,000	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	90	N/A	100	95,440,000	100	171,000,000	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	90	N/A	100	55,931,500	100	41,942,000	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri no.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100	N/A	100	5,000,000	100	1,054,000	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketepatan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	90	N/A	100	21,300,000	100	15,591,300	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						1,420,264,000		1,438,177,200	DISDUKCAPIL
		Cakupan kepemilikan KTP-el	Persen	99,08	N/A	100		100		DISDUKCAPIL
		Cakupan kepemilikan kartu keluarga	Persen	94,41	N/A	100		100		DISDUKCAPIL
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	96,63	N/A	100		100		DISDUKCAPIL
		Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	74,46	N/A	100		100		DISDUKCAPIL
		Cakupan pemanfaatan data kependudukan	Persen	N/A	9,7	100		100		DISDUKCAPIL
<b>1.02.07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									
<b>1.02.08.01.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>									DP2KBP3APM
1.02.07.1.02.08.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN/ KECAMATAN	- Persentase tingkat pemberdayaan masyarakat; - Persentase swadaya masyarakat	persen	N/A	- 40,76; - 49,28	-49; -49,3	3,562,544,350	- 60%; -49,4%	2,522,281,500	DP2KBP3APM
1.02.07.1.02.08.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	Persentase kelurahan cepat berkembang	persen	N/A	51	54	566,583,000	57	200,258,500	DP2KBP3APM

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp		
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									DP2KBP3APM	
1.02.1.02.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	778,014,988	100	507,312,600	DP2KBP3APM	
1.02.1.02.08.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	80	80	80	230,238,000	80	156,015,000	DP2KBP3APM	
1.02.1.02.08.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							100	32,500,000	DP2KBP3APM	
1.02.1.02.08.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	25,510,000	100	7,602,000	DP2KBP3APM	
1.02.1.02.08.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	100	100	100	8,635,000	100	37,430,000	DP2KBP3APM	
1.02.08.1.02.08.15.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	-CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -unmet need -MKPJ	Persen	N/A	67,80; 21,32; 23,55; 11,25;	67,80; 21,32; 23,55; 11,25;	1,669,804,000	67,86% ; 21,32; 23,55%; 11,20%;	1,413,943,000	DP2KBP3APM	
1.02.08.1.02.08.16.	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)	Rata-rata usia nikah pertama	Tahun	N/A	21.32	21.32	212,794,250	21.32	19,866,700	DP2KBP3APM	
1.02.08.1.02.08.17.	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	-CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -unmet need -MKPJ	Persen	N/A	67,80; 21,32; 23,55; 11,25;	67,80; 21,32; 23,55; 11,25;	31,063,784	67,86% 21,32; 23,55%; 11,20%;	37,276,540	DP2KBP3APM	
1.02.08.1.02.08.18.	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	-CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -unmet need -MKPJ	Persen	N/A	67,80; 21,32; 23,55; 11,25;	67,80; 21,32; 23,55; 11,25;	1,075,197,000	67,86%; 21,32; 23,55%; 11,20%;	1,383,174,321	DP2KBP3APM	
1.02.08.1.02.08.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR						368,000,000			DP2KBP3APM	
1.02.08.1.02.08.22.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	Persen	N/A	65%	70	88,149,000	75	29,939,000	DP2KBP3APM	
1.02.08.1.02.08.23.	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase keluarga sejahtera II	Persen	N/A	75	76	60,000,000	77	33,601,750	DP2KBP3APM	
1.02.08.1.02.08.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU	Jumlah kelompok bina keluarga (BKB-BKR-BKL)	KLP	280	N/A	280	429,409,800	301	458,600,000	DP2KBP3APM	
1.02.08.1.02.08.25	PROGRAM KETAHANAN KELUARGA (FAMILY STRENGTHENING)						76	329.409.800	76,5	1,075,000,000	DP2KBP3APM

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.02.09</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>									
<b>1.02.09.01.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>									DISHUB
1.02.1.02.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	4,513,915,338	100	4,149,802,444	DISHUB
1.02.1.02.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	N/A	N/A	100	1,927,577,404	100	2,071,713,900	DISHUB
1.02.1.02.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	N/A	N/A	100,00	415,843,250	100	290,500,000	DISHUB
1.02.1.02.09.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	N/A	N/A	5	172,421,350	5	66,623,750	DISHUB
1.02.1.02.09.08.	PROGRAM PERNECANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	N/A	N/A	1	19,690,500	1	12,650,000	DISHUB
1.02.1.02.09.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Program aplikasi PPTV visim	Dokumen	1	N/A	1	612,404,900		400,032,700	DISHUB
		Dokumen rencana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan	Dokumen	N/A	N/A	N/A				DISHUB
1.02.1.02.09.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui peralatan dan perlengkapan pengujian	N/A	N/A	N/A	N/A	418,260,000		389,689,700	DISHUB
1.02.1.02.09.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN						2,069,354,700		1,631,202,400	DISHUB
		Tingkat keselamatan dalam berlalu lintas meningkat	Persen	N/A	N/A	N/A				DISHUB
		Persentase angkutan umum yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	Persen	N/A	N/A	80,08		83,10		DISHUB
		Dokumen perencanaan dan evaluasi trayek angkutan umum dan saum	Dokumen	N/A	N/A	N/A		1,00		DISHUB
		SAUM	Dokumen	N/A	N/A	N/A		1,00		DISHUB
		DED gedung atau lahan parkir baru	Dokumen	N/A	N/A	N/A		1		DISHUB
		Jumlah gedung atau lahan parkir baru	Titik	N/A	N/A	N/A		1		DISHUB
1.02.1.02.09.19.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS						600,000,000		483,172,550	DISHUB
		Persentase ketersediaan fasilitas Perlengkapan jalan :								DISHUB
		1. Rambu	Buah	67,87	N/A	6,00		8		DISHUB
		2. ITS	Titik	66,12	N/A	N/A		5		DISHUB
		3. Warning light	Unit	100,00	N/A	2,00		10		DISHUB
		4. Cermin tikungan	Buah	81,67	N/A	14,00		40		DISHUB
		5. Marka	M'	43	N/A	5,7		5,7		DISHUB
		6. Pagar pengaman	Paket	68,95	N/A	N/A		1		DISHUB
		Jumlah pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Orang	200,00	N/A	200		200		DISHUB
1.02.1.02.09.20.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR						528,396,200		321,877,500	DISHUB
		Terpenuhinya kebutuhan PKB								DISHUB
		tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor	Persen	N/A	N/A	N/A				DISHUB



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.02.10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
<b>1.02.10.01.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									DISKOMINFO
1.02.1.02.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	N/A	N/A	90	1,330,558,300	90	1,237,782,300	DISKOMINFO
1.02.1.02.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	N/A	N/A	90	562,675,000	90	498,170,950	DISKOMINFO
1.02.1.02.10.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							90	62,000,000	DISKOMINFO
1.02.1.02.10.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR							90	100,000,000	DISKOMINFO
1.02.1.02.10.06.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	N/A	N/A	90	16,320,000	90	7,435,000	DISKOMINFO
1.02.1.02.10.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketepatan perencanaan anggaran oleh Perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPDP	Persen	N/A	N/A	90	32,355,500	90	118,190,500	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	Persen	N/A	N/A	90	619,905,700	90	1,432,593,000	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.16.	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI							N/A	N/A	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.17.	PROGRAM FASILITAS PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Peningkatan wawasan sdm dalam penyebarluasan informasi	Persen	N/A	N/A	90	165,372,500	90	152,455,000	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persen	N/A	N/A	90	518,943,000	90	306,890,150	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.19.	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT)	Persentase penyebaran informasi ketentuan bidang cukai tembakau yang tersampaikan	Persen	N/A	N/A	80	100,000,000	80	100,000,000	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.20.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							N/A	N/A	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.21.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							N/A	N/A	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.22.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH							N/A	N/A	DISKOMINFO
<b>4.00.01.01.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									BAG. HUMAS & PROTOKOL
1.02.10.1.02.10.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA		Persen	90	90	90	759,400,000		315,000,000	BAG. HUMAS & PROTOKOL

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN									DISKOPDAGRIN
1.02.1.02.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	932,804,150	100	795,245,700	DISKOPDAGRIN
1.02.1.02.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	161,404,350	100	133,262,950	DISKOPDAGRIN
1.02.1.02.11.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	100	100	20,400,000	100	39,600,000	DISKOPDAGRIN
1.02.1.02.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	100	100	150,000,000	100	165,000,000	DISKOPDAGRIN
1.02.1.02.11.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	100	100	29,403,000		50,025,000	DISKOPDAGRIN
1.02.11.1.02.11.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDISIF	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	85,53	N/A	85,00	150,000,000	84,50	250,000,000	DISKOPDAGRIN
1.02.11.1.02.11.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH						54,953,000		799,157,000	DISKOPDAGRIN
		UMKM naik kelas	Usaha Mikro	N/A	N/A	30		30		DISKOPDAGRIN
1.02.11.1.02.11.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH						914,258,000		576,000,000	DISKOPDAGRIN
		Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima penguatan permodalan	UMK	92	N/A	200		200		DISKOPDAGRIN
		Jumlah promosi produk usaha mikro kecil menengah melalui pameran	Produk	N/A	N/A	10		10		DISKOPDAGRIN
		Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh penguatan permodalan	Persen	N/A	N/A	70		80		DISKOPDAGRIN
1.02.11.1.02.11.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI						257,307,000		14,912,000	DISKOPDAGRIN
		Persentase peningkatan koperasi aktif	Persen	61,23	N/A	63		65		DISKOPDAGRIN
		Persentase peningkatan koperasi yang melaksanakan RAT	Persen	35,93	N/A	36		37		DISKOPDAGRIN
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH									BAG. EKBANG & KD
1.02.11.4.00.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	43,000,000		80,000,000	BAG. EKBANG & KD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.12	PENANAMAN MODAL									
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									DPMPTSP
1.02.1.02.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	80	N/A	80	749,377,400	80	539,157,600	DPMPTSP
1.02.1.02.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	80	N/A	80	126,970,000	80	86,650,000	DPMPTSP
1.02.1.02.12.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							80	20,000,000	DPMPTSP
1.02.1.02.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							80	1,333,500	DPMPTSP
1.02.1.02.12.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersediaan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	80	N/A	80	16,485,000	80	15,700,000	DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase pertumbuhan investor yang berinvestasi	persen	N/A	N/A	N/A	205,357,100		201,317,700	DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.16	PROGRAM PENINGLATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Persentase terkendalinya prosedur pelayanan perizinan secara berkala	Persen	95	N/A	70	235,353,000		5,200,000	DPMPTSP
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	N/A	N/A	200				DPMPTSP
		Realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah	N/A	N/A	200				DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.17	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH						21,525,000		46,092,128	DPMPTSP
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk pemanfaatan dan pengembangan potensi unggulan daerah	Persen	70	N/A	70	-	72		DPMPTSP
		Persentase potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah yang terinformasikan untuk investasi	persen	100	100	100	-	100		DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.18	PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PERIZINAN	Jumlah ijin yang diterbitkan	Persen	90	N/A	70	95,125,000	72	62,325,000	DPMPTSP

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.02.13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA</b>									
<b>1.02.13.01.</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>									DISPORAPAR
1.02.1.02.13.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	N/A	100	871,005,350	100	1,025,392,925	DISPORAPAR
1.02.1.02.13.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	100	N/A	100	877,000,000	100	498,261,300	DISPORAPAR
1.02.1.02.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	100	N/A	100	133,000,000	100	146,300,000	DISPORAPAR
1.02.1.02.13.05.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	N/A	100	8,500,000		2,500,000	DISPORAPAR
1.02.1.02.13.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							100	8,500,000	DISPORAPAR
1.02.1.02.13.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Dokumen	6	N/A	1	72,670,000	100	65,145,000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN							12	543,553,000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.17.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	Jumlah wirausaha muda pemula	Orang	N/A	N/A	40	100,000,000	40	150,000,000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.18.	PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	Persentase peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba	Persen	1	N/A	1	40,000,000	1	3,700,000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Jumlah raihan medali pada event olahraga tingkat provinsi dan nasional	Skor	46	N/A	9	3,030,667,000	20	285,790,000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.21.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA						3,261,545,000		1,893,615,000	DISPORAPAR
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga kota sukabumi	Unit	N/A	N/A	5		7		DISPORAPAR
		Persentase kelurahan sport center	Persen	N/A	N/A	15		21		DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.22	PROGRAM PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR DAERAH (PPLPD) DI SEKOLAH	Jumlah Kelas Olahraga yang Terbentuk						2	9,300,000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.xx	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	Jumlah Wirausaha Muda Pemula	Angka					40	150,000,000	DISPORAPAR
<b>1.02.14</b>	<b>STATISTIK</b>									
<b>1.02.10.01.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									DISKOMINFO
1.02.14.1.02.10.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH	Tingkat ketersediaan data pembangunan dan informasi statistik sektoral	Persen	N/A	N/A	100	85,600,000	100	85,600,000	DISKOMINFO
1.02.14.1.02.10.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							75	-	DISKOMINFO
<b>4.00.01.01.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									BAG. EKBANG & KD
1.02.14.4.00.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH						130,000,000		150,000,000	BAG. EKBANG & KD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.02.16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>									
<b>1.01.01.01.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>									DISDIK
1.02.16.1.01.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	Jenis	5	5	5	149,900,000	6	134,400,000	DISDIK
1.02.16.1.01.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	Kegiatan	4	5	3	962,100,000	5	110,412,000	DISDIK
1.02.16.1.01.01.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah pengelolaan keragaman budaya	Kegiatan	4	4	4	304,506,500	5	418,651,841	DISDIK
<b>1.02.13.01.</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>									DISPORAPAR
1.02.16.1.02.13.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah destinasi pariwisata berbasis kuliner dan sejarah	Lokasi	3	N/A	N/A	255,000,000	4	127,340,000	DISPORAPAR
<b>1.02.17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>									
<b>1.02.17.01.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH</b>									DISPUSIP
1.02.1.02.17.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	N/A	90	484,327,250	95	470,305,400	DISPUSIP
1.02.1.02.17.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	85	N/A	90	2,178,552,000	92	404,508,000	DISPUSIP
1.02.1.02.17.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							90	21,000,000	DISPUSIP
1.02.1.02.17.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								70,000,000	DISPUSIP
1.02.1.02.17.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	90	N/A	90	16,725,000	95	3,500,000	DISPUSIP
1.02.1.02.17.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG JASA DAN ASSET								7,300,000	DISPUSIP
1.02.1.02.17.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	80	N/A	N/A	2,950,000	80	28,775,000	DISPUSIP
1.02.1.02.17.15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan minat baca	Persen	3	N/A	3	1,119,660,000	6	276,745,400	DISPUSIP
1.02.1.02.17.xx	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA LITERASI BERBASIS KOMUNITAS DAN WILAYAH	Persentase Peningkatan Minat Baca	Persen					6	1,400,000,000	DISPUSIP
<b>1.02.18</b>	<b>KEARSIPAN</b>									
<b>1.02.17.01.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH</b>									DISPUSIP
1.02.18.1.02.17.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Meningkatnya tertib arsip	SKPD	N/A	N/A	33	156,000,000	33	116,964,500	DISPUSIP
1.02.18.1.02.17.17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	Jmh arsip	N/A	N/A	500	94,000,000	500	19,597,000	DISPUSIP
1.02.18.1.02.17.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kearsipan	Persen							DISPUSIP
1.02.18.1.02.17.18	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Terwujudnya Pemeliharaan dan Pelestarian dokumen arsip bernilai bersejarah						N/A	N/A	DISPUSIP

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.00.01</b>	<b>URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
<b>1.02.03.01.</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>									DKP3
2.00.01.1.02.03.20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Provitas perikanan budidaya	Ton/ha	24,59	N/A	24,71	352,147,000	24,77	188,544,000	DKP3
2.00.01.1.02.03.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan						621,597,000		70,003,100	DKP3
		Persentase keamanan pangan produk perikanan	Persen	10	N/A	20		22		DKP3
		Angka konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	39,47	N/A	41,07		41,48		DKP3
<b>2.00.02</b>	<b>PARIWISATA</b>									
<b>1.02.13.01.</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>									DISPORAPAR
2.00.02.1.02.13.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah event yang diselenggarakan		6	N/A	5	442,000,000	6	750,000,000	DISPORAPAR
2.00.02.1.02.13.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah pengunjung ke destinasi wisata		N/A	N/A	5,00	429,200,000	5	668,660,000	DISPORAPAR
2.00.02.1.02.13.17.	Program Pengembangan Kemitraan								344,050,000	
2.00.02.1.02.13.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang aktif		3	N/A	3	438,000,000	4	771,672,500	DISPORAPAR
2.00.02.1.02.13.19.	Program Kampung Kreatif Tematik							7	85.000.000	DISPORAPAR
2.00.02.1.02.13.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KULINER DAN SEJARAH	Jumlah Pengembangan pariwisata berbasis Kuliner dan Sejarah					100.000.000		250,000,000	DISPORAPAR
<b>2.00.03</b>	<b>PERTANIAN</b>									
<b>1.02.03.01.</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>									DKP3
2.00.03.1.02.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum	Persen	N/A	N/A	5	129,890,000		142,900,000	DKP3
		Persentase lembaga usaha tani dengan kategori kelas utama	Persen	N/A	N/A	5	-	7		DKP3
2.00.03.1.02.03.16	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	Tingkat konsumsi buah dan sayuran	Gr/kap/hari	N/A	N/A	195,15	65,938,000	197,49	13,045,000	DKP3
2.00.03.1.02.03.17	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN						95,310,000		43,805,000	DKP3
		Persentase lembaga usaha tani yang menerapkan mekanisasi pertanian dengan baik	Persen	79,52	N/A	50		55		DKP3
		Tingkat pendayagunaan dan pemanfaatan fasilitas pengolahan hasil pertanian	Persen	N/A	N/A	75		75		DKP3

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00.03.1.02.03.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	Provitas padi	Ton/ha GKG	7,1	N/A	6,16	29,153,000	6,28	22,500,000	DKP3
2.00.03.1.02.03.19.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh dalam melakukan metode penyuluhan	Persen	N/A	N/A	80	176,662,500	80	43,505,000	DKP3
2.00.03.1.02.03.20.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Persen	90	N/A	100	106,675,000	100	77,791,000	DKP3
2.00.03.1.02.03.21.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Produksi daging	Ton	N/A	N/A	5.561,79	132,130,000	5.673,03	182,420,900	DKP3
2.00.03.1.02.03.22.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Tingkat konsumsi pangan hewani	(gr/kap /hr)	N/A	N/A	68	1,061,981,000	70	281,455,000	DKP3
2.00.03.1.02.03.24.	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS						497,890,000		720,000,000	DKP3
		a. Persentase peningkatan peserta sekolah agro di KAC	Persen	10	N/A	10		10		DKP3
		b. Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha agribisnis dalam Sukabumi Agrokreatif Expo (SAE)	Persen	10	N/A	10		10		DKP3
2.00.03.1.02.03.25	Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan						2,294,700,000		260,342,500	DKP3
		a. Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	1,90	N/A	54,00		80		DKP3
		b. Persentase peningkatan LP2B milik Pemerintah Daerah	Persen	N/A	N/A	3,6		3,5		DKP3
2.00.03.1.02.03.26	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner						77,070,000		11,594,000	DKP3
		Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat PRA-NKV atau NKV (nomor kontrol veteriner)	Persen	25	N/A	30		35		DKP3
		Persentase penerapan SOP pemotongan hewan kurban di masyarakat	Persen	N/A	N/A	20		30		DKP3
<b>2.00.04</b>	<b>KEHUTANAN</b>									
<b>2.00.05</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>									
<b>2.00.06</b>	<b>PERDAGANGAN</b>									
<b>1.01.05.01.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>									<b>SATPOL PP</b>
2.00.06.1.01.05.20.	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT)	Cakupan penurunan penggunaan barang kena cukai ilegal	Persen	100	N/A	100	250,000,000			SATPOL PP

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN									DISKOPDAGRIN
2.00.06.1.02.11.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN						160,841,600		127,160,000	DISKOPDAGRIN
		Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera dan di tera ulang	UTTP	188	N/A	100	-	200		DISKOPDAGRIN
		Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi metrologi legal	Orang	N/A	N/A	120	-	-		DISKOPDAGRIN
2.00.06.1.02.11.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR								50,000,000	DISKOPDAGRIN
2.00.06.1.02.11.18	PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI						546,169,000		578,328,000	DISKOPDAGRIN
		Jumlah draft rancangan peraturan walikota	Dokumen	N/A	N/A	1	-	1		DISKOPDAGRIN
		Jumlah pengembangan dan pembangunan pusat-pusat perdagangan	Unit	2	N/A	N/A	-	1		DISKOPDAGRIN
		Persentase pemanfaatan, prognosa, informasi harga, dan pengawasan barang penting atau strategis	Persen	-	N/A	80	-	80		DISKOPDAGRIN
		Jumlah produk unggulan yang difasilitasi pemasarannya melalui pameran di luar kota sukabumi	Produk	15	N/A	10	-	10		DISKOPDAGRIN
		Persentase pengawasan pembangunan pasar pelita	Persen	-	N/A	100	-	100		DISKOPDAGRIN
2.00.06.1.02.11.19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN						220,000,000		76,907,125	DISKOPDAGRIN
		Jumlah kawasan penataan PKL dan pemberdayaan pedagang	Kawasan	3	N/A	N/A	-	1		DISKOPDAGRIN
		Jumlah pengembangan dan pembangunan pusat-pusat perdagangan	Unit	N/A	N/A	N/A	-	1		DISKOPDAGRIN
2.00.07	PERINDUSTRIAN									
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN									DISKOPDAGRIN
2.00.07.1.02.11.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	Pertumbuhan industri	Persen	2	N/A	0,2	200,000,000	0,3	5,783,000	DISKOPDAGRIN
2.00.07.1.02.11.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Pertumbuhan industri	Persen	2	N/A	0,2	218,000,000	0,3	9,950,000	DISKOPDAGRIN
2.00.07.1.02.11.17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan legalitas usaha	Persen	N/A	N/A	100	239,000,000	100	110,000,000	DISKOPDAGRIN
2.00.07.1.02.11.19	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL							0,3	100,000,000	DISKOPDAGRIN
2.00.08	TRANSMIGRASI									
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA									DISNAKER
2.00.08.1.02.01.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	terlaksananya mou kerjasama antar wilayah transmigrasi dan terkirimnya calon transmigrasi ke wilayah transmigrasi		N/A	N/A	N/A	215,535,000		237,088,500	DISNAKER
2.00.08.1.02.01.17	Program Transmigrasi Regional								20,516,500	DISNAKER



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3.00.01</b>	<b>3 PENUNJANG URUSAN INSPEKTORAT</b>									
<b>3.00.01.01.</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>									INSPEKTORAT
3.00.3.00.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	N/A	90	675,388,178	90	541,772,450	INSPEKTORAT
3.00.3.00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	90	N/A	90	569,847,500	90	691,494,400	INSPEKTORAT
3.00.3.00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							90	19,665,000	INSPEKTORAT
3.00.3.00.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan OPD yang sesuai aturan dan tepat waktu	Persen	90	N/A	90	21,612,500	90	5,886,700	INSPEKTORAT
3.00.3.00.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran opd dengan daerah	Persen	90	N/A	90	14,485,000	90	2,000,000	INSPEKTORAT
3.00.01.3.00.01.15	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH						785,495,500		567,998,550	INSPEKTORAT
		Nilai pengawasan kinerja pada saki	Persen	65,2	N/A	70,5		75		INSPEKTORAT
		Persentase SAKIP PD bernilai baik	Persen	70	N/A	80		85		INSPEKTORAT
		Tingkat maturitas SPIP	Level	1	N/A	2		3		INSPEKTORAT
		Persentase unit WBK/WBBM	Persen	0,06	N/A	5		5		INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut temuan BPK	Persen	81	N/A	81		82		INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persen	70	N/A	85		90		INSPEKTORAT
3.00.01.3.00.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	Orang	15	N/A	18	807,000,000	20	214,205,000	INSPEKTORAT
3.00.01.3.00.01.17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pemenuhan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang sesuai peraturan dan kebijakan nasional	Persen	75	75	100	100,000,000	100	72,286,500	INSPEKTORAT
3.00.01.3.00.01.18	PROGRAM PENATAAN REFORMASI BIROKRASI							90	2,500,000	INSPEKTORAT
<b>4.00.01.01.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									BAG. EKBANG & KD
3.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Meningkatnya mutu pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi	Persen	80	90	90	161,000,000	90	200,000,000	BAG. EKBANG & KD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3.00.02</b>	<b>PERENCANAAN</b>									
<b>3.00.02.01.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>									BAPPEDA
3.00.3.00.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	N/A	85	85	960,966,000	85	937,600,700	BAPPEDA
3.00.3.00.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	N/A	85	85	2,816,695,000	85	1,848,761,825	BAPPEDA
3.00.3.00.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							85	161,798,350	BAPPEDA
3.00.3.00.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	N/A	80	80	224,000,000	80	300,000,000	BAPPEDA
3.00.3.00.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	N/A	85	85	87,000,000	85	301,575,000	BAPPEDA
3.00.3.00.02.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketepatan perencanaan anggaran oleh PD dengan dok. RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	N/A	N/A	100	114,370,000	100	536,825,100	BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Jumlah data pembangunan dan indikator RPJMD yang	Persen	100	100	100	805,781,500			BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.16.	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Persentase cakupan layanan data pembangunan	Persen	N/A	N/A	85	200,000,000	85	200,000,000	BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.18.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Persentase pencapaian pemenuhan program dan kegiatan infrastruktur dan tata ruang	Persen	90	90	90	998,555,950	91	739,386,150	BAPPEDA
		Persentase Perangkat Daerah mitra Bidang Fisik dan Penataan Wilayah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	N/A	80	100		100		BAPPEDA
		Persentase Perangkat Daerah mitra Bidang Fisik dan Penataan Wilayah yang memenuhi target program pembangunan Daerah	Persen	95,54	94,83	91		92		BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	N/A	80	100	2,618,341,100	100	1,316,266,150	BAPPEDA
		Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100		100		BAPPEDA
		Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100		100		BAPPEDA
		Persentase perangkat daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah	Persen	95,54	94,83	91		100		BAPPEDA
		- % partisipasi masyarakat dalam forum perenc.pembangunan	- Persen	- N/A	- N/A	- 100		100		BAPPEDA
		- Dok. perencanaan pemb. Daerah yg ditetapkan tepat waktu	- Dokumen	- N/A	- 1 Perwal RKPD/RKPD	- 1 Perwal RKPD/RKPD		1 Perwal RKPD/RKPD		BAPPEDA

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
3.00.02.3.00.02.22.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	- % PD lingkup ekonomi yang memenuhi target program pembangunan daerah	- Persen	- N/A	- N/A	-100	675,577,900	-100	253,013,000	BAPPEDA
		- % tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah	- Persen	- N/A	- N/A	-100		-100		
		- Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Lingkup Ekonomi yang ditetapkan dalam dok. perencanaan	- Persen	- N/A	- N/A	-100		-100		
3.00.02.3.00.02.23.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD	Persen	N/A	N/A	90	745,651,500	100	583,362,700	BAPPEDA
		Persentase keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang Sosbud	Persen	N/A	N/A	80		100		BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.26.	PROGRAM PENELITIAN PENGKAJIAN DAN Penguatan kondisi pemerintahan daerah	Persentase penelitian dan pengajian dengan melibatkan akademisi	Persen	N/A	N/A	57	300,000,000			BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.27.	PROGRAM PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH	Persentase inovasi daerah yang terfasilitasi	Persen	N/A	N/A	56,52	680,256,000	67	414,559,400	BAPPEDA
<b>3.00.03</b>	<b>KEUANGAN</b>									
<b>3.00.03.02.</b>	<b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>									BPKD
<b>3.00.03.01.</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>									BPKD
3.00.3.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	90	90	1,091,208,667	90	1,057,659,548	BPKD
3.00.3.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90	90	90	16,240,065,000	90	5,304,609,459	BPKD
3.00.3.00.03.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	90	90	90	75,200,000	90	188,768,500	BPKD
3.00.3.00.03.04.	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	Persentase fasilitasi pindah atau purna tugas pns	Persen	90	90	90	274,282,075		-	BPKD
3.00.3.00.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	90	90	90	151,914,000	90	16,685,500	BPKD
3.00.3.00.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								10,000,000	BPKD
3.00.3.00.03.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	90	90	90	155,414,000	90	105,413,500	BPKD
3.00.3.00.03.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	persentase ketepatan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	90	90	90	50,409,000	90	264,355,812	BPKD
3.00.03.3.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Dinas unit kerja dapat mengerjakan tugas PERDA APBD serta dapat mengendalikan program kegiatan pengendalian anggaran 2. Tersusunnya buku PERDA tentang jawaban laporan organisasi laporan realisasi anggaran semester prognosis, buku pertanggung jawaban semester, 3. Persentase ketepatan waktu laporan pertanggung jawaban apbd laporan keuangan SKPD lebih efisien dan tepat waktu 4. Meningkatnya PAD non PBBP2 dan bphbt		N/A	N/A		5,349,095,425	1. laporan 32 SKPD. 2. Raperda, Perda 3. Bulan Oktober 4. 15 %	3,770,704,150	BPKD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah	5. Bln	5. 31 Maret	5. 31 Maret	5. 31 Maret				BPKD
		6. Penyampaian RAPERDA APBD murni tepat waktu	6. Bln	6. September	6. Sept	6. September				
		7. Presentase peningkatan sumber pendapatan pajak daerah	7. Persen	7. 0,15	7. 0,15	7. 0,05				
		8. Pemanfaatan informasi teknologi dalam pengelolaan pendapatan	8	8. 0	8. 0	8. 0				
		9. Presentasee tingkat kepatuhan wajib pajak	9. Sistem	9. 0,85	9. 0,86	9. 0,02				
		10. Presentase tingkat pemahaman wajib pajak	10. Persen	10. 0,15	10. 0,15	10. 0,03				
		11. Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan aset sesuai peraturan	11. SKPD	11. 33	11. 33	11. 32				
3.00.03.3.00.03.16.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA	1. Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kota	1. SKPD	33	N/A	33	452,643,500	33	147,801,300	BPKD
		2. Koordinasi penyusunan hasil evaluasi gubernur tentang raperda APBD dan PERKADA penjabaran APBD	2. Persen	100	N/A	100		100		BPKD
		3. Verifikasi dan koordinasi bantuan keuangan provinsi	3. Dokumen	dokumen		dokumen		dokumen		BPKD
3.00.03.3.00.03.XX	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	1. Persentase Peningkatan Potensi Sumber Pendapatan Pajak Daerah 2. Persentase Pemanfaatan Informasi Teknologi dalam Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	persen					15	3,770,704,150	BPKD
3.00.03.3.00.03.XX	PROGRAM OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH SERTA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK	1. Persentase Peningkatan Capaian Pajak Daerah 2. Persentase Peningkatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	persen					5 5	291,844,000	BPKD
3.00.03.3.00.03.XX	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD	waktu					31 maret	147,801,300	BPKD
3.00.03.3.00.03.XX	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Aset Sesuai dengan Peraturan	Persen					100	630,861,000	BPKD
3.00.03.3.00.03.XX	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN APBD	penyampaian RAPERDA APBD tepat waktu	OPD					1. 33 SKPD 2. 100% 3. Dokumen		BPKD
<b>4.00.01.01.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									BAG. EKBANG & KD
3.00.03.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		N/A	N/A	N/A	N/A	497,000,000		360,000,000	BAG. EKBANG & KD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3.00.04</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>									
<b>3.00.04.01.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>									BKPSDM
3.00.3.00.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase meningkatnya administrasi perkantoran	Persen	88,26	88,26	88,26	649,486,000	88,26	472,675,300	BKPSDM
3.00.3.00.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase meningkatnya kinerja sarana dan prasarana	Persen	89,98	89,98	89,98	858,850,000	89,98	98,681,000	BKPSDM
3.00.3.00.04.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							90,00	95,900,000	BKPSDM
3.00.3.00.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sdm aparatur	Persen	90,00	90,00	90,00	257,280,000	90,00	114,923,500	BKPSDM
3.00.3.00.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	Persen	85,57	85,57	85,57	55,000,000	85,57	18,500,000	BKPSDM
3.00.3.00.04.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase meningkatnya pengembangan sistem perencanaan program kegiatan	Persen	81,44	81,44	81,44	22,527,000	81,44	37,550,000	BKPSDM
3.00.04.3.00.04.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	Persen	91,87	91,87	91,87	2,065,125,000	91,87	1,535,651,500	BKPSDM
<b>3.00.05</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
<b>3.00.04.01.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>									BKPSDM
3.00.05.3.00.04.15	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan	Persen	95,19	95,19	95,19	987,897,700	95,19	187,155,150	BKPSDM
3.00.05.3.00.04.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sdm aparatur	Persen	95	95	95	1,638,951,500	95	461,083,250	BKPSDM
<b>4</b>	<b>PENDUKUNG</b>									
<b>4.00.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
4.00.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	90	90	10,767,139,500	90	11,343,851,135	BAG. KEU & KEPEG
4.00.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	90	90			11,343,851,135	BAG. HUMAS & PROTOKOL
4.00.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	90	90			11,343,851,135	BAG. PERLENGKAPAN
4.00.4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	90	90	90	6,866,923,100	90	3,160,757,465	BAG. PERLENGKAPAN
4.00.4.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	90	90	90	1,000,811,000	90	495,557,000	BAG. PERLENGKAPAN
4.00.4.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas sdm	Persen	90	90	90	160,230,000	80	63,060,000	BAG. KEU & KEPEG
4.00.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	90	90	90	35,700,000	90	63,995,000	BAG. KEU & KEPEG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.00.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	80	80	80			63,995,000	BAG. ORGANISASI
4.00.4.00.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan program berkualitas	Persen	90	90	90	161,967,000	90	111,190,000	BAG. PERLENGKAPAN
4.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terfasilitasinya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	80	80	80	6,114,002,200	80	6,192,568,000	BAG. TAPEM
4.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terfasilitasinya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	80	80	80			6,192,568,000	BAG. KEU & KEPEG
4.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terfasilitasinya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	90	90	90			6,192,568,000	BAG. HUMAS & PROTOKOL
4.00.01.4.00.01.16.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase penerapan pengadaan barang atau jasa di daerah melalui sarana aplikasi yang terintegrasi	Persen	60	60	90	210,842,000		192,842,000	BAG. BARANG/JASA
4.00.01.4.00.01.xx	PROGRAM ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA							90	275,000,000	BAG. BARANG/JASA
4.00.01.4.00.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Kerjasama Daerah terus meningkat	Persen	100	100	100	461,776,300	100	179,551,700	BAG. EKBANG & KD
4.00.01.4.00.01.19.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase produk hukum yang harmonis	Persen	100	100	100	1,365,767,500	100	257,624,300	BAG. HUKUM
4.00.01.4.00.01.21.	PROGRAM KETATALAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH						1,242,464,000		468,951,500	BAG. ORGANISASI
		Persentase perangkat daerah dengan peringkat komposit 4 (P-4)	Persen	N/A	N/A	60	-	70		BAG. ORGANISASI
		Persentase perangkat daerah dan BUMD yang memiliki proses bisnis	Persen	N/A	N/A	25	-	50		BAG. ORGANISASI
		Nilai manajemen perubahan	Angka	3,06	N/A	0,08	-			BAG. ORGANISASI
		Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan	Persen	N/A	N/A	20,00	-	40		BAG. ORGANISASI
		Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai IKM baik	Persen	68,57	N/A	71,00	-	72		BAG. ORGANISASI

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.00.01.4.00.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH						2,586,297,800		1,854,420,688	BAG. TAPEM
		Nilai pelaporan kinerja pada SAKIP	Nilai	11,15	N/A	11,50	-	12,00		BAG. TAPEM
		Nilai hasil EKPPD	Nilai	3,39	N/A	3,40	-	3,42		BAG. TAPEM
4.00.01.4.00.01.xx.	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI		angka					3	80,000,000	BAG. ORGANISASI
4.00.01.4.00.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM	Penyebarluasan Nilai-nilai HAM kepada Masyarakat	Persen	95	95	100	109,070,000	100	10,800,000	BAG. HUKUM
4.00.01.4.00.01.24.	PROGRAM LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT)	Keterpaduan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT) di Kota Sukabumi terus meningkat	Persen	100	100	100	21,000,000	100	1,073,000	BAG. EKBANG & KD
4.00.01.4.00.01.25.	PROGRAM PELAYANAN DAN PENANGANAN MASALAH BARANG DAN JASA	Persentase Penyelesaian masalah barang/jasa	Persen	100	100	100	81,522,000	100	29,230,000	BAG. BARANG/JASA
4.00.01.4.00.01.26.	PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PENGADAAN BARANG/JASA	Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang sesuai peraturan perundang-undangan serta pelaku pengadaan barang/jasa di Kota Sukabumi yang memahami regulasi	Persen				670,944,600	80	322,260,450	BAG. BARANG/JASA
<b>4.00.01.02.</b>	<b>KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>									SETDA
<b>1.02.08.01.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>									DP2KBP3APM
4.00.01.1.02.08.22.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pelayanan kepada masyarakat ditingkat kelurahan dan kecamatan se-Kota Sukabumi	Persen	39	N/A	50	32,794,000	60	1,854,420,688	DP2KBP3APM
<b>4.00.01.01.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									SETDA
<b>4.00.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									
<b>4.00.02.02.</b>	<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>									SETWAN
<b>4.00.02.01.</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									SETWAN
4.00.4.00.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	N/A	90	2,450,230,400	95	2,072,064,400	SETWAN
4.00.4.00.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	100	N/A	90	1,642,483,000	95	274,175,900	SETWAN
4.00.4.00.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	100	N/A	90	455,810,000	95	135,845,000	SETWAN
4.00.4.00.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas sdm	Persen	100	N/A	90	1,118,980,600	95	809,497,260	SETWAN
4.00.4.00.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	N/A	90	18,867,000	95	40,450,600	SETWAN
4.00.4.00.02.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN									SETWAN
4.00.4.00.02.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	Meningkatnya kinerja DPRD	Persen	100	N/A	100	18,717,618,500	100	20,851,895,810	SETWAN



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>									
5.00.01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>									
4.00.01.01.	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									BAG. KESRA
5.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase kegiatan keagamaan swadaya masyarakat	Persen	N/A	N/A	80	7,670,447,630			BAG. KESRA
5.00.01.4.00.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Persentase peningkatan jamaah mesjid jami kelurahan	Persen	N/A	N/A	N/A	1,256,543,370			BAG. KESRA
5.00.01.4.00.01.27.	PROGRAM PEMBINAAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN KEAGAMAAN							80	6,326,574,800	BAG. KESRA
5.00.01.4.00.01.28.	PROGRAM LAYANAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							100	1,103,856,450	BAG. KESRA
5.00.01.4.00.01.29.	PROGRAM PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							100	144,526,850	SETDA
5.00.01.4.00.01.30.	PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							80	277,094,100	SETDA
5.00.01.01.	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>									KESBANGPOL
5.00.5.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	N/A	100	232,075,000	100	147,981,800	KESBANGPOL
5.00.5.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	N/A	100	84,557,000	100	39,325,000	KESBANGPOL
5.00.5.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	N/A	100	11,550,000	100	30,000,000	KESBANGPOL
5.00.5.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							100	50,000,000	KESBANGPOL
5.00.5.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	N/A	100	11,000,000	100	3,000,000	KESBANGPOL
5.00.5.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketepatan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	N/A	100	3,140,000	100	12,445,000	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik antar dan inter umat beragama	Persen	≤ 10	≤ 10	≤ 10	143,455,000	≤ 10	220,000,000	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.16.	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase keterlibatan komponen masyarakat dan aparat dalam pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan	Persen	N/A	N/A	100	301,877,100	100	665,000,000	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pendidikan politik	Persen	100	100	100	87,757,000	100	300,000,000	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.18.	PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU							100	N/A	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Persentase penanganan aliran keagamaan atau kepercayaan masyarakat yang menyimpang	Persen	100	N/A	100	52,827,000	100	125,000,000	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN, ANTISIPASI DAN KONDUSIVITAS DI DAERAH							100	232,645,500	KESBANGPOL



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.01.05.01.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>									SATPOL PP
5.00.01.1.01.05.18.	PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU	Persentase keamanan pemilu	Persen	N/A	N/A	100	172,160,000			SATPOL PP
<b>6</b>	<b>KEWILAYAHAN</b>									
<b>6.00.01</b>	<b>KECAMATAN</b>									
<b>6.00.01.01.</b>	<b>KECAMATAN CIKOLE</b>									KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	98	N/A	98	1,367,977,000	98	1,126,005,110	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	93	N/A	95	250,039,500	95	271,337,499	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	98	N/A	98	22,616,000	98	52,250,000	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas sdm	Persen	97	N/A	98	19,657,000	98	8,000,000	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	N/A	100	32,115,000	88	7,755,000	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	100	N/A	100	4,060,000	89	11,500,000	KEC. CIKOLE
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	100	N/A	80	127,885,000	85	109,708,000	KEC. CIKOLE
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persen	98	N/A	80	2,545,690,650	85	2,368,999,000	KEC. CIKOLE
<b>6.00.01.02.</b>	<b>KECAMATAN GUNUNG PUYUH</b>									KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	94,50	N/A	90	1,247,848,700	90	922,260,000	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	85,00	N/A	90	322,369,900	90	165,480,062	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							90	22,000,000	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	98,30	N/A	90	26,540,000	90	5,100,000	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	100	N/A	90	3,140,000	90	10,000,000	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	85	N/A	90	85,860,000	90	67,093,000	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	87,30	N/A	90	1,834,624,000	90	1,635,993,625	KEC. GUNUNG PUYUH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>6.00.01.03.</b>	<b>KECAMATAN CITAMIANG</b>									KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	1,103,042,600	100	934,469,700	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	80	85	84	413,187,000	86	303,488,386	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	80	85	100	45,000,000	100	39,600,000	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	80	85	84	27,348,000	86	30,000,000	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	9,070,000	100	3,500,000	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersediaan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	100	100	12,220,000	100	10,000,000	KEC. CITAMIANG
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	80	80	84	205,690,000	86	169,200,000	KEC. CITAMIANG
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	65	65	84	2,108,492,000	86	1,973,505,000	KEC. CITAMIANG
<b>6.00.01.04.</b>	<b>KECAMATAN WARUDOYONG</b>									KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	85			1,061,606,720		851,549,740	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	85	N/A	N/A	425,409,861		166,373,242	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	85	N/A	N/A	16,250,000		19,500,000	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	85	N/A	N/A	88,388,000		5,200,000	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	85	N/A	N/A	16,995,000		1,395,000	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET *	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan program berkualitas	Persen	85	N/A	N/A	260,000		273,000	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	85	N/A	N/A	1,455,000		10,180,000	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN & PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	N/A	N/A	N/A	321,397,500		166,986,500	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	N/A	N/A	N/A	2,050,587,500		1,960,438,000	KEC. WARUDOYONG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
<b>6.00.01.05.</b>	<b>KECAMATAN BAROS</b>									KEC. BAROS
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	80	N/A	100	890,857,500	100	669,439,670	KEC. BAROS
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	80	N/A	100	1,709,374,500	100	832,495,000	KEC. BAROS
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	90	N/A	100	106,900,000	100	54,450,000	KEC. BAROS
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	90	N/A	100	8,986,000	100	9,884,600	KEC. BAROS
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	80	N/A	100	13,480,000	100	2,000,000	KEC. BAROS
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	80	N/A	100	14,710,000	100	14,000,000	KEC. BAROS
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	100	N/A	100	126,888,200	100	57,347,979	KEC. BAROS
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	N/A	100	1,734,620,265	100	1,565,331,500	KEC. BAROS
<b>6.00.01.06.</b>	<b>KECAMATAN LEMBUR SITU</b>									KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	N/A	N/A	100	1,156,465,000	100	883,103,500	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	N/A	N/A	100	465,038,000	100	254,162,027	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	N/A	N/A	100	50,970,000	100	29,250,000	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	N/A	N/A	100	36,347,250	100	39,981,975	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	N/A	N/A	100	28,223,000	100	4,378,350	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	N/A	N/A	100	4,325,000	100	10,000,000	KEC. LEMBURSITU
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	N/A	N/A	100	144,400,000	100	96,610,000	KEC. LEMBURSITU
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	N/A	N/A	100	2,109,887,500	100	1,962,367,000	KEC. LEMBURSITU

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		REALISASI PROGRAM DAN TAHUN 2019		PROYEKSI PROGRAM DAN TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
<b>6.00.01.07.</b>	<b>KECAMATAN CIBEUREUM</b>									KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,80	N/A	90	945,319,825	90	778,705,240	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	88,05	N/A	90	414,424,000	90	276,109,492	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	96,67	N/A	90	34,500,000	90	20,000,000	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	97,80	N/A	90	31,242,000	90	5,988,000	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	96,73	N/A	90	19,200,000	90	2,803,000	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	97,97	N/A	90	6,238,000	90	12,878,000	KEC. CIBEUREUM
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	98,84	N/A	90	115,661,000	90	124,477,100	KEC. CIBEUREUM
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	99,24	N/A	90	1,775,400,000	90	1,571,865,000	KEC. CIBEUREUM

**Tabel 7.4**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Daerah Tahun 2021-2023**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>											
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	194,778,267,517	100	199,652,964,205	100	201,373,992,737	100	595,805,224,459	DISDIKBUD
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar 2. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama 3. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 4. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan 5. Persentase GTK yang berkualifikasi DIV/S1 6. Persentase GTK yang bersertifikasi 7. Jumlah GTK berprestasi	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen 5. persen 6. persen 7. jumlah	1. 100 2. 100 3. 81 4. 87 5. 82.77 6. 51.09 7. 5	88,563,671,521	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100 5. 86.91 6. 53.65 7. 6	91,788,218,709	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100 5. 91.26 6. 56.33 7. 8	93,351,451,958	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100 5. 91.26 6. 56.33 7. 8	273,703,342,189	DISDIKBUD
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Satuan Pendidikan PAUD yang Menerapkan Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	persen	-	-	100	303,789,426	100	306,402,015	100	610,191,441	DISDIKBUD
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rata-Rata Indeks Pemerataan Guru	indeks	0.2	163,849,900	0.175	167,946,148	0.15	169,390,484	0.15	501,186,532	DISDIKBUD
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	penerbitan Izin Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah	-	-	3	120,015,000	3	121,047,129	6	241,062,129	DISDIKBUD
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Hasil publikasi Bahasa dan Sastra Daerah yang di Apresiasi	persen	-	-	75	400,050,000	90	403,490,430	90	803,540,430	DISDIKBUD
	<b>DINAS KESEHATAN</b>											
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	373,899,848,664	100	383,247,344,881	100	386,543,272,047	100	1,143,690,465,591	DINKES
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan 2. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular 3. Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna 4. Persentase pemenuhan logistik kesehatan sesuai standar 5. Persentase pencapaian program promotif-preventif kesehatan masyarakat	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen 5. persen	1. 100 2. 100 3. 9.09 4. 90 5. 100	82,907,838,240	1. 100 2. 100 3. 11.36 4. 95 5. 100	85,009,681,696	1. 100 2. 100 3. 13.64 4. 100 5. 100	85,763,087,494	1. 100 2. 100 3. 13.64 4. 100 5. 100	253,680,607,430	DINKES

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	persen	45	8,119,453,415	50	8,327,679,750	55	8,403,310,836	55	24,850,444,002	DINKES
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1. Persentase pengawasan legalitas dan keamanan obat dan makanan 2. Persentase pengawasan tempat pengolahan pangan	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	4,361,158,173	1. 100 2. 100	4,470,187,127	1. 100 2. 100	4,508,630,737	1. 100 2. 100	13,339,976,037	DINKES
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelayanan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai standar	persen	100	114,000,000	100	118,815,000	100	121,341,699	100	354,156,699	DINKES
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>												
<b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>												
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	90	8,250,851,067	90	8,457,122,344	90	8,529,853,596	90	25,237,827,007	DPUTR
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Jumlah Turap/ Talud/Bronjong yang terbangun dalam kondisi baik 2. Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	1. Jumlah 2. M	1. 9 2. 1500	5,488,150,750	1. 9 2. 1500	5,625,354,519	1. 9 2. 1500	5,673,732,568	1. 27 2. 4500	16,787,237,836	DPUTR
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Persentase Jumlah penduduk berakses air minum yang layak 2. Persentase Jumlah KK Akses Air minum aman	1. persen 2. persen	1. 100 2. 36,00	2,834,455,025	1. 100 2. 37,00	2,905,316,401	1. 100 2. 38,00	2,930,302,122	1. 100 2. 38,00	8,670,073,547	DPUTR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1. Persentase Jumlah Rumah Tinggal Bersanitasi 2. Persentase Jumlah KK lumpur tinja yang terlayani	1. persen 2. persen	1. 51,00 2. 32,00	1,196,000,000	1. 53,00 2. 35,00	1,227,210,000	1. 55,00 2. 38,00	1,238,767,266	1. 55,00 2. 38,00	3,661,977,266	DPUTR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terbangun dan terpeliharanya drainase lingkungan permukiman	M	1500	2,172,176,782	1500	2,226,481,202	1500	2,245,628,940	4500	6,644,286,923	DPUTR
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik	persen	46	7,942,940,350	47	8,151,142,359	48	8,228,616,144	48	24,322,698,853	DPUTR
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah bangunan negara sesuai dengan standar kelayakan bangunan yang terbangun	persen	20	5,075,578,000	20	5,204,759,950	20	5,251,276,591	20	15,531,614,541	DPUTR
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Kondisi Taman yang baik	persen	86.20	1,054,628,000	86.22	1,080,993,700	86.24	1,090,290,246	86.24	3,225,911,946	DPUTR
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Panjang jalan kota kondisi yang Mantap	persen	82.52	13,264,128,006	82.85	13,595,731,206	83.21	13,712,654,495	83.21	40,572,513,707	DPUTR
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya keunggulan dan kemandirian jumlah pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi	orang	40	302,860,000	40	310,431,500	45	313,101,211	125	926,392,711	DPUTR
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Persentase Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang 2. Persentase Jumlah Kesesuaian pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	1. persen 2. persen	1. 70 2. 30	297,000,000	1. 80 2. 40	305,080,000	1. 80 2. 50	308,205,318	1. 80 2. 50	910,285,318	DPUTR

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah RUSUNAWA yang dipelihara	jumlah	2	53,715,000	2	55,057,875	2	55,531,373	6	164,304,248	DPUTR
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	98.32	2,277,733,200	98.61	2,334,676,530	98.90	2,354,754,748	98.90	6,967,164,478	DPUTR
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Fasilitasi penanganan kawasan kumuh perkotaan	persen	-	-	96	360,045,000	98	363,141,387	98	723,186,387	DPUTR
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	100	65,000,000	100	69,245,000	100	71,847,027	100	206,092,027	DPUTR
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>											
1.05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	11,205,069,219	100	11,485,195,949	100	11,583,968,635	100	34,274,233,803	SATPOLP3K
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtramtimas yang dapat diselesaikan	persen	100	1,019,232,000	100	1,044,712,800	100	1,053,697,330	100	3,117,642,130	SATPOLP3K
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Persentase Pengurangan Resiko Bahaya Kebakaran 2. Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran 3. Persentase Penyelamatan Non Kebakaran	1. persen 2. persen 3. persen	1. 30 2. 75 3. 60	589,260,000	1. 60 2. 90 3. 80	603,991,500	1. 100 2. 100 3. 100	609,185,827	1. 100 2. 100 3. 100	1,802,437,327	SATPOLP3K
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>											
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	4,587,476,928	100	4,702,163,851	100	4,742,602,460	100	14,032,243,240	BPBD
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. layanan informasi rawan bencana 2. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1. persen 2. persen 3. persen	1. 92 2. 92 3. 92	1,406,349,000	1. 93 2. 93 3. 93	1,441,507,725	1. 94 2. 94 3. 94	1,453,904,691	1. 94 2. 94 3. 94	4,301,761,416	BPBD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DINAS SOSIAL</b>											
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>											
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	4,900,622,595	100	5,023,138,160	100	5,066,337,148	100	14,990,097,903	DINSOS
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS) 2. PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS) 3. Persentase peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial	1. persen 2. persen 3. persen	1. 35 2. 30 3. 10	1,004,500,000	1. 40 2. 35 3. 15	1,058,891,652	1. 45 2. 40 3. 20	1,087,547,453	1. 45 2. 40 3. 20	3,150,939,105	DINSOS
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	persen	100	-	100	16,002,000	100	16,139,617	100	32,141,617	DINSOS
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial (gepeng/gelandangan) diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase PMKS lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA) diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	1,255,000,000	1. 100 2. 100	1,286,375,000	1. 100 2. 100	1,297,437,825	1. 100 2. 100	3,838,812,825	DINSOS
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase anak terlantar yang mendapatkan layanan perlindungan sosial 2. Persentase data fakir miskin yang dikelola	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	240,000,000	1. 100 2. 100	246,000,000	1. 100 2. 100	248,115,600	1. 100 2. 100	734,115,600	DINSOS
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan penanganan sosial pasca bencana	persen	100	100,000,000	100	102,500,000	100	103,381,500	100	305,881,500	DINSOS
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	persen	100	35,000,000	100	35,875,000	100	36,183,525	100	107,058,525	DINSOS



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung	
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>												
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>												
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	4,101,501,452	100	4,204,038,988	100	4,240,193,724	100	12,545,734,164	DISNAKER	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penyusunan rencana tenaga kerja secara makro	persen	-	-	80	20,002,500	80	20,174,522	80	40,177,022	DISNAKER	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	persen	80	1,135,000,000	80	1,163,375,000	80	1,173,380,025	80	3,471,755,025	DISNAKER	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair	persen	80	250,000,000	85	256,250,000	90	258,453,750	90	764,703,750	DISNAKER	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	persen	90	385,000,000	90	394,625,000	90	398,018,775	90	1,177,643,775	DISNAKER	
	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK</b>												
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>												
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	6,496,041,904	100	6,658,442,952	100	6,715,705,561	100	19,870,190,417	DP2KBP3A	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Penguatan dan Pengembangan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah dan Penyedia Layanan	persen	30	263,853,000	35	273,069,325	40	277,424,241	40	814,346,566	DP2KBP3A	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perlindungan perempuan	persen	85	301,350,000	100	317,045,050	100	326,021,947	100	944,416,997	DP2KBP3A	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	persen	85	608,354,000	85	623,562,850	85	628,925,491	85	1,860,842,341	DP2KBP3A	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	5	31,580,000	5	32,369,500	5	32,647,878	15	96,597,378	DP2KBP3A	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	kategori/tingkatan	madya	108,420,000	madya	111,130,500	madya	112,086,222	madya	331,636,722	DP2KBP3A	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase layanan perlindungan khusus anak	persen	85	52,150,000	85	53,453,750	85	53,913,452	85	159,517,202	DP2KBP3A	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>											
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>											
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	10,890,193,406	100	11,162,448,241	100	11,258,445,296	100	33,311,086,943	DKP3
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka ketersediaan cadangan pangan di masyarakat	ton	8	186,645,000	10	191,311,125	10	192,956,401	10	570,912,526	DKP3
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok pemerintah 2. Angka kecukupan energi (kkal/kap/hari) dan Angka kecukupan protein (gram/kap /hari)	1. persen 2. kkal / kap / hari dan gram / kap / hari	1. 40 2. AKE : 2420 AKP : 107,1	319,284,800	1. 40 2.AKE : 2419 AKP : 107,1	332,179,420	1. 40 2.AKE : 2417 AKP : 107,1	338,798,389	1. 40 2.AKE : 2417 AKP : 107,1	990,262,609	DKP3
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Ketersediaan data kerawanan pangan	persen	90	60,006,000	90	61,506,150	90	62,035,103	90	183,547,253	DKP3
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	persen	88	18,000,000	89	18,450,000	90	18,608,670	90	55,058,670	DKP3
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>											
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>											
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	30,799,591,455	100	31,569,581,241	100	31,841,079,640	100	94,210,252,336	DLH
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase pencapaian perencanaan lingkungan hidup 2. Persentase ketersediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	212,095,000	1. 100 2. 100	217,397,375	1. 100 2. 100	219,266,992	1. 100 2. 100	648,759,367	DLH
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase pengendalian pencemaran air 2. Persentase pengendalian pencemaran udara	1. persen 2. persen	1. 10 2. 60	401,812,000	1. 14 2. 80	411,857,300	1. 17 2. 80	415,399,273	1. 17 2. 80	1,229,068,573	DLH
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	persen	100	75,944,000	100	77,842,600	100	78,512,046	100	232,298,646	DLH
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 pada sampah spesifik yang terkendali	persen	10	23,322,000	10	23,905,050	11	24,110,633	11	71,337,683	DLH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	persen	100	290,629,000	100	297,894,725	100	300,456,620	100	888,980,345	DLH
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mengikuti diklat dan penyuluhan LH	persen	19	25,000,000	20	25,625,000	21	25,845,375	21	76,470,375	DLH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	persen	12	56,000,000	13	57,400,000	14	57,893,640	14	171,293,640	DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	persen	100	115,040,000	100	117,916,000	100	118,930,078	100	351,886,078	DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Persentase penanganan kebersihan 2. Persentase pengurangan sampah kota	1. persen 2. persen	1. 74 2. 24	5,362,716,662	1. 73 2. 26	5,496,784,579	1. 74 2. 27	5,544,056,926	1. 74 2. 27	16,403,558,166	DLH
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>											
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>											
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	5,463,945,197	100	5,600,543,827	100	5,648,708,504	100	16,713,197,528	DISDUKCAPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Cakupan Kepemilikan KTP-el 2. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga 3. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	1. persen 2. persen 3. persen	1. 100 2. 100 3. 40	1,342,028,000	1. 100 2. 100 3. 60	1,375,578,700	1. 100 2. 100 3. 80	1,387,408,677	1. 100 2. 100 3. 80	4,105,015,377	DISDUKCAPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 2. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian 3. Cakupan Kepemilikan akta Perkawinan 4. Cakupan Kepemilikan akta Perceraian	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen	1. 100 2. 100 3. 0 4. 0	152,141,000	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	155,944,525	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	157,285,648	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	465,371,173	DISDUKCAPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	persen	100	222,567,000	100	228,131,175	100	230,093,103	100	680,791,278	DISDUKCAPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Penerbitan Buku Profil Kependudukan	persen	100	30,150,000	100	30,903,750	100	31,169,522	100	92,223,272	DISDUKCAPIL

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK</b>											
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>											
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan	persen	80	210,000,000	82	215,250,000	85	217,101,150	85	642,351,150	DP2KBP3A
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Meningkatnya Cakupan Kesertaan Ber-KB 2. Usia Nikah Pertama 3. Meningkatnya Cakupan Peserta KB MKJP 4. Cakupan PUS yg Belum Ber KB (Unmetneed)	1. persen 2. tahun 3. persen 4. persen	1. 67,87 2. 21,32 3. 23.55 4. 11,15	3,781,480,240	1. 67,89 2. 21,32 3. 23.56 4. 11,13	3,876,017,246	1. 67,90 2. 21,32 3. 23.55 4. 11,12	3,909,350,994	1. 67,90 2. 21,32 3. 23.55 4. 11,12	11,566,848,480	DP2KBP3A
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera II	persen	75	603,400,000	75.5	618,485,000	76	623,803,971	76	1,845,688,971	DP2KBP3A
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>											
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>											
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	19,365,695,317	100	19,849,837,700	100	20,020,546,304	100	59,236,079,321	DISHUB
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Jalan dengan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai / Persentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan / Jumlah penyediaan kelengkapan jalan 2. Kenaikan jumlah kendaraan yang dapat pelayanan parkir / Jumlah kendaraan yang dapat ditampung pada lahan parkir / Gedung Parkir 3. Kenaikan jumlah kendaraan yang dapat dilayani pada uji keur / Memaksimalkan kualitas kendaraan yang laik operasi / Gedung pkb 4. Kenaikan jumlah penumpang SAUM / Jumlah Penumpang pada SAUM / Persentase pelaksanaan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) 5. Ketersediaan PJU / Jumlah Sarana dan Prasarana PJU dalam kondisi baik/ Jumlah penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen 5. persen	1. 82,52 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100	5,345,210,261	1. 82,85 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100	5,479,495,518	1. 83.21 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100	5,527,120,809	1. 83.21 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100	16,351,826,588	DISHUB

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	80	4,415,674,592	80	4,536,218,957	80	4,583,005,705	80	13,534,899,254	DISKOMINFO
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya transparansi informasi publik dalam rangka penyelenggaraan pembangunan	persen	60	204,607,500	70	209,722,688	80	211,526,303	80	625,856,490	DISKOMINFO
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik	persen	90	222,588,800	90	228,153,520	90	230,115,640	90	680,857,960	DISKOMINFO
	<b>DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>											
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>											
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	9,127,713,960	100	9,355,906,809	100	9,436,367,608	100	27,919,988,377	DISKUMINDAG
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Dokumen yang difasilitasi	persen	-	-	100	80,010,000	100	80,698,086	100	160,708,086	DISKUMINDAG
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kebutuhan Monitoring dan Evaluasi Perkoperasian	persen	-	-	100	144,018,000	100	145,256,555	100	289,274,555	DISKUMINDAG
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Dokumen yang difasilitasi	persen	-	-	100	72,009,000	100	72,628,277	100	144,637,277	DISKUMINDAG
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif	persen	62	224,000,000	63	229,600,000	64	231,574,560	64	685,174,560	DISKUMINDAG
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	persen	15	99,300,000	17	101,782,500	19	102,657,830	19	303,740,330	DISKUMINDAG
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 2. UMK Naik Kelas; 3. Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menerima Penguatan Permodalan; 4. Persentase Dokumen Pemantauan, Dokumen Penyaluran Kredit Anyelir, Dokumen Pelaksanaan Sukabumi Kece yang Tepat Waktu 5. Persentase Wirausaha Muda baru yang memperoleh Penguatan Permodalan; 6. jumlah Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Pameran	1. persen; 2. UMK; 3. UMK; 4. persen; 5. persen 6. produk	1. 100 2. 30 3. 100 4. 100 5. 80 6. 10	3,833,358,000	1. 100 2. 30 3. 100 4. 100 5. 80 6. 10	4,095,823,950	1. 100 2. 30 3. 100 4. 100 5. 80 6. 10	4,258,662,708	1. 100 2. 90 3. 300 4. 100 5. 80 6. 30	12,187,844,658	DISKUMINDAG
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Wirausaha Muda Baru yang terbentuk melalui Program Sukabumi KECE	jumlah	600	800,000,000	600	820,000,000	465	827,052,000	1665	2,447,052,000	DISKUMINDAG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>											
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>											
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	90	4,573,741,748	90	4,688,085,292	90	4,728,402,825	90	13,990,229,865	DPMPTSP
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola UMKM dan Pemenuhan Kepatuhan Legalias Perizinan UMKM	peserta	189	422,712,000	189	433,279,800	189	437,006,006	567	1,292,997,806	DPMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor yang Berinestasi	investor	60	104,849,000	65	107,470,225	70	108,394,469	195	320,713,694	DPMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin yang Diterbitkan	jumlah	1000	68,195,000	1000	69,899,875	1000	70,501,014	3000	208,595,889	DPMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	milyar	210	187,657,100	215	192,348,528	220	194,002,725	645	574,008,352	DPMPTSP
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah yang Terinformasikan untuk Investasi	eksemplar	400	42,000,000	400	43,050,000	400	43,420,230	1200	128,470,230	DPMPTSP
	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>											
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>											
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	6,061,494,892	100	6,213,032,264	100	6,266,464,342	100	18,540,991,498	DISPORAPAR
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1. persen 2. persen	1. 26.88 2. 25.14	1,340,729,925	1. 28.99 2. 27.11	1,394,356,673	1. 31.26 2. 29.24	1,421,748,181	1. 31.26 2. 29.24	4,156,834,780	DISPORAPAR
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga	jumlah	40	3,860,119,400	100	4,020,615,885	75	4,104,202,433	215	11,984,937,718	DISPORAPAR
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	organisasi kepramukaan yang dibina	jumlah	20	26,000,000	30	26,650,000	34	26,879,190	84	79,529,190	DISPORAPAR
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>											
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Termanfaatkannya Data dan informasi statistik sektoral pemerintah daerah	persen	40	102,795,000	60	105,364,875	80	106,271,013	80	314,430,888	DISKOMINFO
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>											
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya indeks keamanan informasi pemerintah daerah	persen	60	69,099,000	60	70,826,475	60	71,435,583	60	211,361,058	DISKOMINFO

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>											
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>											
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan di kembangkan	Jumlah	13	199,504,730	15	204,492,348	17	206,250,982	30	610,248,061	DISDIKBUD
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1. Persentase Komunitas Seni yang berbadan Hukum 2. jumlah Kesenian Daerah yang dilestarikan 3. persentase komunitas seni berbadan hukum yang mendapatkan hibah	1. persen 2. jumlah 3. persen	1. 41 2. 3 3.5.5	209,100,000	1. 50 2. 3 3. 13.6	214,327,500	1. 69 2. 3 3. 18.5	216,170,717	1. 69 2. 3 3. 18.5	639,598,217	DISDIKBUD
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan Sejarah Lokal	persen	-	-	65	168,021,000	70	169,465,981	70	337,486,981	DISDIKBUD
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	-	-	77	160,020,000	78	161,396,172	78	321,416,172	DISDIKBUD
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Museum Kota Sukabumi yang Representatif	persen	-	-	75	3,600,450,000	80	3,631,413,870	80	7,231,863,870	DISDIKBUD
	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>											
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>											
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	4,730,121,121	100	4,848,374,149	100	4,890,070,167	100	14,468,565,437	DISPUSIPDA
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	angka	58	1,476,529,766	58.4	1,513,443,010	59	1,526,458,620	59	4,669,372,146	DISPUSIPDA
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Koleksi budaya etnis dan naskah kuno yang dimiliki	persen	0.017	100,000,000	0.067	102,500,000	0.117	103,381,500	0.117	305,881,500	DISPUSIPDA

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>											
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	persen	70	283,007,000	77.5	290,082,175	80	292,576,882	80	865,666,057	DISPUSIPDA
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa untuk kepentingan negara dan pemerintah.	point	58	-	72	80,010,000	88	80,698,086	88	160,708,086	DISPUSIPDA
	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>											
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>											
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Provitas Budidaya Perikanan	angka	24,83	244,825,500	24,89	255,203,638	24,95	260,658,984	24,95	760,688,122	DKP3
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Angka Konsumsi Ikan (AKI) 2. Persentase Keamanan Pangan Produk Perikanan	1.kg/kap/ tahun 2. persen	1. 41,89 2. 88	107,842,000	1. 42,31 2. 89	110,538,050	1. 42,73 2. 90	111,488,677	1. 42,73 2. 90	329,868,727	DKP3
	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>											
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>											
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	persen	13	263,000,000	14.5	269,575,000	15	271,893,345	15	804,468,345	DISPORAPAR
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	event yang diselenggarakan	jumlah	4	2,055,004,000	6	2,107,689,100	7	2,126,818,486	17	6,289,511,586	DISPORAPAR
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi)	Jumlah	300	350,000,000	350	358,750,000	400	361,835,250	1050	1,070,585,250	DISPORAPAR
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Subsektor ekonomi kreatif yang aktif	Jumlah	2	135,595,000	2	138,984,875	3	140,180,145	7	414,760,020	DISPORAPAR



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>											
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>											
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Produksi padi 2. Luas panen 3. Persentase lembaga usaha tani yang menerapkan mekanisasi pertanian dengan baik 4. Tingkat pendayagunaan dan pemanfaatan fasilitas pengolahan hasil pertanian 5. Produksi daging 6. Luas lahan pertanian organik yang tersertifikasi 7. Jenis komoditas hortikultura yang didaftarkan registrasi kebun 8. Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha agribisnis di Kota Sukabumi	1. ton GKP 2. ha 3. persen 4. persen 5. ton 6. ha 7. jenis 8. persen	1. 20156 2. 2846 3. 60 4. 75 5. 5786.49 6. 6.03 7. 3 8. 10	598,826,500	1. 19143 2. 2703 3. 65 4. 75 5. 5844.35 6. 6.1 7. 5 8. 10	617,563,413	1. 18187 2. 2568 3. 70 4. 75 5. 5902.80 6. 6.15 7. 8 8. 10	625,758,831	1. 18187 2. 2568 3. 70 4. 75 5. 5902.80 6. 6.15 7. 8 8. 10	1,842,148,743	DKP3
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B 2. Persentase ketersediaan data ketahanan pangan /pertanian 3. Persentase prasarana yang digunakan 4. Persentase peningkatan peserta Sekolah Agro di KAC	1. ha 2. persen 3. persen 4. persen	1. 32 2.100 3. 100 4.5	285,750,000	1. 40 2.100 3. 100 4.5	292,893,750	1. 44 2.100 3. 100 4.5	295,412,636	1. 44 2.100 3. 100 4.5	874,056,386	DKP3
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) 2. Presentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	1. persen 2. persen	1. 100 2. 40	190,205,000	1. 100 2. 45	194,960,125	1. 100 2. 50	196,636,782	1. 100 2. 50	581,801,907	DKP3
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase penggunaan KTI dalam pembelian pupuk bersubsidi 2. Persentase luas lahan pertanian yang mengikuti AUTP	1. persen 2. persen	1. 70 2. 20	17,325,000	1. 80 2. 25	17,758,125	1. 90 2. 30	17,910,845	1. 90 2. 30	52,993,970	DKP3
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum 2. Persentase lembaga usaha tani dengan katagori kelas utama	1. persen 2. persen	1. 7 2. 7	203,389,000	1. 7 2. 7	208,473,725	1. 7 2. 7	210,266,599	1. 7 2. 7	622,129,324	DKP3

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>											
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>											
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pengawasan Penerbitan TDG, Pengawasan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Penerbitan SKA	persen	-	-	100	104,013,000	100	104,907,512	100	208,920,512	DISKUMINDAG
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1. Jumlah Pengembangan dan Pembangunan Pusat-pusat Perdagangan; 2. Persentase Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita; 3. Jumlah Kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL	1. unit; 2. persen; 3.kawasan	1. 1 2. 100 3. 1	1,288,900,000	1. 0 2. 100 3. 1	1,359,178,000	1. 1 2. 100 3. 1	1,400,011,634	1. 1 2. 100 3. 3	4,048,089,634	DISKUMINDAG
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. Jumlah Pengembangan dan Pembangunan Pusat-pusat Perdagangan 2. Persentase Pemanfaatan Profil, Prognosa, Informasi Harga dan Pengawasan Barang Penting/ Strategis 3. Persentase Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	1. unit 2. persen 3. persen	1. 1 1. 100 2. 0	30,000,000	1. 0 1. 100 2. 100	30,750,000	1. 1 1. 100 2. 100	31,014,450	1. 2 1. 100 2. 100	91,764,450	DISKUMINDAG
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	jumlah( \$ )	2210505.58	-	2298925.8	560,070,000	2390882.83	564,886,602	6900314.21	1,124,956,602	DISKUMINDAG
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1. Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku 2. Persentase Peserta yang mendapatkan Sosialisasi Metrologi Legal	1. persen 2. persen	1. 25 2. 100	260,000,000	1. 27 2. 100	266,500,000	1. 29 2. 100	268,791,900	1. 29 2. 100	795,291,900	DISKUMINDAG
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Unggulan yang difasilitasi Pemasarannya melalui Pameran di Luar Kota Sukabumi	produk	10	100,000,000	10	102,500,000	10	103,381,500	30	305,881,500	DISKUMINDAG
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>											
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP 2. Cakupan bina kelompok pengrajin 3. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota.	1. persen 2. persen 3. persen	1. 10 2. 2.86 3. 0.40	578,000,000	1. 10 2. 2.86 3. 0.50	616,881,500	1. 10 2. 2.86 3. 0.60	640,897,480	1. 10 2. 2.86 3. 0.60	1,835,778,980	DISKUMINDAG
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	1. Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota 2. Persenatse IKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	1. persen 2. persen	1. 0.40 2. 100	180,000,000	1. 0.50 2. 100	184,500,000	1. 0.60 2. 100	186,086,700	1. 0.60 2. 100	550,586,700	DISKUMINDAG
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	buku	1	200,000,000	1	205,000,000	1	206,763,000	3	611,763,000	DISKUMINDAG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung	
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>												
<b>3.32</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>												
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase perencanaan kawasan pengiriman calon transmigrasi	persen	-	-	80	40,005,000	85	40,349,043	85	80,354,043	DISNAKER	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pelaksanaan MOU/ kerjasama antar wilayah transmigrasi dan terkirimnya calon transmigrasi ke wilayah transmigrasi	persen	90	115,840,000	90	118,736,000	90	119,757,130	90	354,333,130	DISNAKER	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pemahaman animo masyarakat tentang transmigrasi	persen	90	73,160,000	90	74,989,000	90	75,633,905	90	223,782,905	DISNAKER	
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>												
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>												
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase layanan keprotokolan 2. Persentase perangkat daerah yang mengikuti penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan memenuhi aspek penilaian 3. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja tepat waktu	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen	1. 100 2. 30 3. 80 4. 100	37,040,671,775	1. 100 2. 40 3. 80 4. 100	37,966,688,569	1. 100 2. 50 3. 80 4. 100	38,293,202,091	1. 100 2. 50 3. 80 4. 100	113,300,562,435	SETDA	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Persentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan ham serta dokumentasi hukum 3. Persentase kegiatan keagamaan swadaya masyarakat	1. persen 2. persen 3. persen	1. 90 2. 100 3. 80	14,734,980,883.00	1. 90 2. 100 3. 80	15,376,456,697	1. 90 2. 100 3. 80	15,717,848,119	1. 90 2. 100 3. 80	45,829,285,699	SETDA	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase pengendalian pelaksanaan apbd 2. Persentase koordinasi perumusan kebijakan pengembangan perekonomian daerah 3. Level maturitas pelayanan pbj	1. persen 2. persen 3. level	1. 100 2. 100 3. 2	1,309,262,600	1. 100 2. 100 3. 2	1,341,994,165	1. 100 2. 100 3. 3	1,353,535,315	1. 100 2. 100 3. 3	4,004,792,080	SETDA	
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>												
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>												
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	33,319,364,386	100	34,152,348,496	100	34,423,320,504	100	101,895,033,385	SETWAN	
4.02.01	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Tugas & Fungsi DPRD	persen	100	19,176,613,998	100	19,656,029,348	100	19,825,071,200	100	58,657,714,546	SETWAN	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>											
	<b>5.01 PERENCANAAN</b>											
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	7,487,515,937	100	7,674,703,835	100	7,740,706,288	100	22,902,926,061	BAPPEDA
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 2. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	1,089,000,500	1. 100 2. 100	1,116,225,513	1. 100 2. 100	1,125,825,052	1. 100 2. 100	3,331,051,064	BAPPEDA
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang perekonomian dan sumber daya alam 2. persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang infrastruktur dan kewilayahan 3. persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1. persen 2. persen 3. persen	1. 100 2. 100 3. 100	2,726,709,200	1. 100 2. 100 3. 100	2,794,876,930	1. 100 2. 100 3. 100	2,818,912,872	1. 100 2. 100 3. 100	8,340,499,002	BAPPEDA
	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>											
	<b>5.02 KEUANGAN</b>											
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	30,393,167,443	100	31,152,996,629	100	31,420,912,400	100	92,967,076,472	BPKPD
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terselenggaranya Pelaksanaan APBD selama satu tahun, ketepatan waktu dalam penyampaian APBD dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	persen	93	5,932,855,500	93	7,018,676,888	93	8,048,937,509	93	21,000,469,896	BPKPD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib	persen	90	2,400,000,000	90	2,460,000,000	90	2,481,156,000	90	7,341,156,000	BPKPD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah	persen	5	2,390,572,000	5	2,450,336,300	5	2,471,409,192	5	7,312,317,492	BPKPD
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>											
	<b>5.03 KEPEGAWAIAN</b>											
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	6,658,584,000	100	6,825,048,600	100	6,883,744,018	100	20,367,376,618	BKPSDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pelayanan ASN	persen	90	1,563,180,000	90	1,602,259,500	90	1,616,038,932	90	4,781,478,432	BKPSDM
	<b>5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>											
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Meningkatnya Kompetensi ASN	persen	90	2,631,850,000	90	2,697,646,250	90	2,720,846,008	90	8,050,342,258	BKPSDM

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>											
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>											
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase Inovasi Daerah yang Terfasilitasi 2. Presentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi	1. persen 2. persen	1.35 2. 60	656,700,500	1.40 2. 65	673,118,013	1.45 2. 70	678,906,827	1.45 2. 70	2,008,725,340	BAPPEDA
	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>											
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>											
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	60	6,931,089,050	65	7,104,366,276	70	7,165,463,826	70	21,200,919,152	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti 2. tindak lanjut temuan BPK RI 3. tindak lanjut temuan APIP	1. persen 2. persen 3. persen	1. 60 2. 35 3. 35	44,362,500	1. 65 2. 40 3. 40	45,471,563	1. 70 2.45 3. 45	45,862,618	1. 70 2.45 3. 45	135,696,680	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. angka 2. angka	1. 2 2. 2	64,215,000	1. 3 2. 3	65,820,375	1. 3 2. 3	66,386,430	1. 3 2. 3	196,421,805	INSPEKTORAT
	<b>7.01 KECAMATAN</b>											
<b>7.01.01</b>	<b>KECAMATAN CIKOLE</b>											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	9,197,634,653	100	9,427,575,519	100	9,508,652,669	100	28,133,862,841	KEC. CIKOLE
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	persen	90	1,979,026,000	91	2,154,143,750	92	2,268,892,053	92	6,402,061,803	KEC. CIKOLE
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	persen	65	2,368,568,000	70	2,427,782,200	75	2,448,661,127	75	7,245,011,327	KEC. CIKOLE
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	persen	85	18,600,000	90	19,065,000	95	19,228,959	95	56,893,959	KEC. CIKOLE
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persen	100	69,449,000	100	71,185,225	100	71,797,418	100	212,431,643	KEC. CIKOLE
<b>7.01.02</b>	<b>KECAMATAN GUNUNG PUYUH</b>											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	6,649,100,293	100	6,815,327,800	100	6,873,939,619	100	20,338,367,713	KEC. GUNUNG PUYUH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	persen	84	1,406,083,000	85	1,530,956,975	85.5	1,612,836,483	85.5	4,549,876,458	KEC. GUNUNG PUYUH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	persen	30	1,613,953,000	31	1,654,301,825	32	1,668,528,821	32	4,936,783,646	KEC. GUNUNG PUYUH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	persen	50	2,400,000	60	2,460,000	70	2,481,156	70	7,341,156	KEC. GUNUNG PUYUH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persen	100	179,097,500	100	183,574,938	100	185,153,682	100	547,826,119	KEC. GUNUNG PUYUH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung	
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>7.01.03</b>	<b>KECAMATAN CITAMIANG</b>												
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	7,280,059,520	100	7,462,061,008	100	7,526,234,733	100	22,268,355,261	KEC. CITAMIANG	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	persen	81	1,359,443,000	82	1,472,749,575	83	1,546,162,614	83	4,378,355,189	KEC. CITAMIANG	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	persen	56	1,997,400,000	57	2,047,335,000	59	2,064,942,081	59	6,109,677,081	KEC. CITAMIANG	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	persen	77	11,390,000	79	11,674,750	80	11,775,153	80	34,839,903	KEC. CITAMIANG	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persen	100	57,079,500	100	58,506,488	100	59,009,643	100	174,595,631	KEC. CITAMIANG	
<b>7.01.04</b>	<b>KECAMATAN WARUDOYONG</b>												
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	85	7,483,241,597	90	7,670,322,637	90	7,736,287,412	90	22,889,851,646	KEC. WARUDOYONG	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	persen	83	1,646,275,000	85	1,791,079,075	87	1,885,860,286	87	5,323,214,361	KEC. WARUDOYONG	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	persen	35	1,980,046,000	40	2,029,547,150	40	2,047,001,255	40	6,056,594,405	KEC. WARUDOYONG	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	persen	55	4,345,000	60	4,453,625	65	4,491,926	65	13,290,551	KEC. WARUDOYONG	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persen	100	86,657,000	100	88,823,425	100	89,587,306	100	265,067,731	KEC. WARUDOYONG	
<b>7.01.05</b>	<b>KECAMATAN BAROS</b>												
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	6,558,272,296	100	6,722,229,103	100	6,780,040,274	100	20,060,541,673	KEC. BAROS	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	persen	83.81	1,211,970,000	90	1,311,568,250	93	1,375,920,191	93	3,899,458,441	KEC. BAROS	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	persen	30	1,550,420,000	30	1,589,180,500	37	1,602,847,452	37	4,742,447,952	KEC. BAROS	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	persen	55	5,698,500	65	5,840,963	75	5,891,195	75	17,430,657	KEC. BAROS	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persen	100	21,672,500	100	22,214,313	100	22,405,356	100	66,292,168	KEC. BAROS	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>7.01.06</b>	<b>KECAMATAN LEMBURSITU</b>											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	7,111,696,321	100	7,289,488,729	100	7,352,178,332	100	21,753,363,382	KEC. LEMBURSITU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	persen	84	1,489,985,000	85	1,617,375,725	86	1,700,319,477	86	4,807,680,202	KEC. LEMBURSITU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	persen	30	2,002,217,500	31	2,052,272,938	32	2,069,922,485	32	6,124,412,922	KEC. LEMBURSITU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	persen	75	42,266,000	85	43,322,650	90	43,695,225	90	129,283,875	KEC. LEMBURSITU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persen	100	48,739,000	100	49,957,475	100	50,387,109	100	149,083,584	KEC. LEMBURSITU
<b>7.01.07</b>	<b>KECAMATAN CIBEUREUM</b>											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	6,454,737,150	100	6,616,105,579	100	6,673,004,087	100	19,743,846,815	KEC. CIBEUREUM
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	persen	79	1,228,449,000	80	1,332,808,425	81	1,400,673,855	81	3,961,931,280	KEC. CIBEUREUM
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	persen	30	1,650,734,000	30.5	1,692,002,350	31	1,706,553,570	31	5,049,289,920	KEC. CIBEUREUM
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	persen	75	19,788,000	76	20,282,700	77	20,457,131	77	60,527,831	KEC. CIBEUREUM
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persen	100	72,000,200	100	73,800,205	100	74,434,887	100	220,235,292	KEC. CIBEUREUM

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>											
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>											
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	2,572,107,338	100	2,636,410,021	100	2,659,083,148	100	7,867,600,507	BAKESBANGPOL
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keterlibatan komponen masyarakat dan aparat dalam pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan	persen	100	333,561,000	100	341,900,025	100	344,840,365	100	1,020,301,390	BAKESBANGPOL
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Perwakilan Kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pendidikan politik	persen	100	2,312,560,039	100	2,514,863,637	100	2,647,148,436	100	7,474,572,112	BAKESBANGPOL
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Akurasi data ormas/OKP/LSM	persen	100	63,000,000	100	67,522,500	100	70,360,529	100	200,883,029	BAKESBANGPOL
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik antar dan inter umat beragama, persentase penanganan konflik antar umat beragama	persen	100	675,323,000	100	726,915,049	100	759,748,293	100	2,161,986,342	BAKESBANGPOL
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi	persen	100	402,620,000	100	412,685,500	100	416,234,595	100	1,231,540,095	BAKESBANGPOL



**Tabel 8.5**  
**Indikator Kinerja Kunci Realisasi 2019 dan Target 2020**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ASPEK DAYA KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>							
	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skala	73,03	73,60	74,17	74.31	74.20
2	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan ((Pendapatan perkapita (ribu rupiah))	Rupiah	10,188	10,339	10,492	11,204	10,648
3	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,43	5,54	5,65	5.49	(1,50)
4	Persentase penduduk miskin	Persen	8,48	8,31	8,14	6,67	7,90
5	Indeks gini	Angka	0,40	0,40	0,39	0.408	0.412
6	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	8,00	7,84	7,68	8.44	10,25
7	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,79	10,06	9,58	9,58
8	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,95	72,00	72,05	72,25	72,10
9	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,1	N/A	<1	1333	<1
10	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	5,41	N/A	<10	<10	<10
11	Cakupan kelurahan siaga aktif	Persen	100	N/A	100	100	100
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Angka	N/A	67,76	66,55	95.79	67.57
13	Rasio penduduk yang bekerja	Angka	47,00	49,00	49,00	59.79	51
14	Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	54,57	56,22	57,85	91,56	90,59
15	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	79,28	79,28	80,00	83,27	80,50
16	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	23,92	N/A	24,14	27	24
17	Peningkatan PAD	Persen	21,59	0,92	15	9	15
18	Opini BPK	Opini	WTP	N/A	WTP	WTP	WTP
19	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	77,90	79,70	78,70	79,70	81,30
20	Angka ketersediaan cadangan pangan pokok pemerintah	Kg	N/A	N/A	15.099	15099	25000
21	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	39,44	39,44	39485	38920	28,64
22	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	5,14	N/A	5,34	5.08	3.74

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
Aspek pelayanan umum							
	Pelayanan Urusan Wajib						
	Layanan Urusan Wajib Dasar						
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>						
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	67,72	63,4	68,7	73	70.2
1.2.	Angka Partisipasi Murni						
1.2.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	96,7	99,4	99,5	97.5	99.6
1.2.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	96,5	96,4	97	95	97.5
1.3.	Angka partisipasi sekolah						
1.3.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	104	107	100	105.5	100
1.3.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	117	118	100	108.3	100
1.4.	Angka Putus Sekolah:						
1.4.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,003	0	0	0	0
1.4.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,07	0	0	0	0
1.5.	Angka Kelulusan:						
1.5.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
1.5.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100
1.6.	Angka Melanjutkan (AM):						
1.6.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	112,4	110,2	100	103.57	100
1.6.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	141,4	141,4	100	103	100
1.7.	Fasilitas Pendidikan:						
1.7.1.	Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	96	96	97	95	98
1.7.2.	Persentase sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	97	94	95	89	96
1.8.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	100	100	100	100	100
1.9.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	92	93	93,5	93	95

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>						
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	6,82	5,94	9	16	9
2.2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	7,82	6,5	12	1	11,5
2.3.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	4,49	4,5	9	18	9
2.4.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka	116,5	116,7	125	12	125
2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Angka	0,16	0,16	0,16	56	0,16
2.6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Angka	0,017	0,017	0,017	6	0,017
2.7.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Angka	0,84	0,84	0,84	2746	0,84
2.8.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Persen	96,69	98,42	83	96.97	83,5
2.9.	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen	97,44	97,9	100	100.7	100
2.10.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	94,48	100,6	100	105.75	100
2.11.	Persentase pelayanan kesehatan anak BALITA sesuai standar	Persen	78,91	84,63	100	78.53	100
2.12.	persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	97,55	96,67	100	100	100
2.13.	Persentase pelayanan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59 Thn)	Persen	83,21	10,09	100	44169	100
2.14.	Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan	Persen	30,17	38,74	100	19.98	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.	persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	100	112,37	100	98.71	100
2.16.	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen	99,72	99,86	100	9.6	100
2.17.	Persentase pelayanan kesehatan penderita DM	Persen	65,37	94,49	100	10.76	100
2.18.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persen	100	100	100	83.23	100
2.19.	Persentase orang yang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart	Persen	150	83,35	100	100	100
2.20.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	79,6	87	88	86.29	90
2.21.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun atau BALITA.	Persen	N/A	23,1	23	8	22,5
2.22.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	100	100	100	100	100
2.23.	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah	0	0	0	0	1
2.24.	Prevalensi balita stunting	Persen	N/A	23.1	23	8	22.5
2.25.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	86	85,9	86	50.97	87
2.26.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100
2.27.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiolog I < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100
2.28.	Akreditasi Rumah Sakit sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	Persen	87,7	87,7	75	95	80
2.29.	Persentase contact rate pasien dengan usia > 72 tahun	Persen	N/A	31,09	32	31.9	34

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
3.1.	Pekerjaan Umum:						
3.1.1.	Persentase jalan lingkungan yang baik	Persen	81,99	81,99	84,192	102.25	87,794
3.1.2.	Jumlah kejadian genangan	Kali	43	0	42	42	41
3.1.3.	Panjang trotoar yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus	Km	2,653	N/A	2,92	2,92	3.21
3.1.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	87,57	87,57	71.55	71.55	72.30
3.1.5.	Persentase pencapaian target pembangunan drainase	M	196547	196547	198047	1005235	199,547
3.1.6.	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	M'	N/A	N/A	1500	1500	600
3.1.7.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	68,17	68,17	68,77	68.77	68.77
3.1.8.	Persentase KK yang menggunakan air bersih	Persen	68,17	68,17	68,77	68.77	68.77
3.1.9.	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	0,21	0,21	0,17	22.62	9.61
3.1.10.	Persentase luasan kumuh	Persen	0,21	0,21	0,17	22.62	9.61
3.2.	Penataan Ruang:						
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	1,16	1,16	1,17	1.74	1.17
3.2.2.	Persentase tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (RTRW, RDTR & RTBL KSK)	Persen	50	50	0	50	0
3.2.3.	Persentase kesesuaian ruang dengan dokumen tata ruang	Persen	95	95	95	95	95
3.2.4.	Luasan kawasan lindung	Ha	12,18	12,18	12,68	510.3	13.18
3.2.5.	Jumlah ruang publik budaya	Unit	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>						
4.1.	Persentase rumah layak huni	Persen	96,12	96,12	96,41	97.62	98.63
4.2.	Persentase jalan lingkungan yang baik	Persen	81,99	81,99	84,192	102.25	87,294
4.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK)	Persen	87,57	87,57	71.55	71.55	87,294
4.4.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	0,21	0,21	0,17	22.62	72.30
4.5.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	68,17	68,17	68,77	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>						
5.1	Trantibumlinmas						
5.1.1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100
5.1.2.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Orang	1380	2075	420	450	0
5.1.3.	Persentase penegakan PERDA	Persen	75	80	80	80	85
5.1.4.	Cakupan pengendalian keamanan lingkungan	Persen	100	100	100	100	100
5.1.5	Persentase unjuk rasa terkendali	Persen	100	100	100	100	100
5.2	Kebencanaan						
5.2.1.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi bencana sesuai ancaman bencana	Persen	1,22	1,51	1,51	100	100
2.2.2.	Persentase jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapatkan pelatihan	Persen	90	90	91	100	100
5.2.3.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	Persen	90	90	91	100	100
5.3.	Kebakaran						
5.3.1.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban kebakaran	Persen	90	90	91	100	100
<b>6</b>	<b>Sosial</b>						
6.1.	Persentase masyarakat miskin basis data terpadu yang tertangani	Persen	70	72	76	77.9	77
6.2.	Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial	Persen	10	10	15	100	20
6.3.	Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	40	45	55	100	58
6.4.	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	45	52	55	100	58

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
6.5.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)	Persen	100	100	100	100	100
6.6.	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	33	45	60	100	62
6.7.	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	40	45	55	100	58
Layanan urusan wajib non dasar							
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>						
1.1.	Besaran mediasi perselisihan pengusaha-pekerja per tahun	Angka	20	20	25	20	30
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Angka	20	18	20	20	25
1.3	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	65	70	75	52.73	80
1.4	Besaran pembinaan perusahaan	Angka	100	100	150	126	170
1.5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Angka	5.107	5.246	6	5239	1500
1.6	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat	Persen	4	2	3	3	0

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
2.1	Rasio kekerasan terhadap anak	Angka	N/A	N/A	0,005	0,005	0,004
2.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Angka	N/A	N/A	0,0005	0,005	0,005
2.3	Persentase anggaran Responsif Gender pada belanja langsung atau tidak langsung APBD	Persen	N/A	N/A	45,46	25	0
2.4	Status capaian kota layak anak	Status	Nindya	Nindya	Nindya	Madya	Madya
2.5	Penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah	N/A	N/A	250	250	200
2.6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	N/A	17,18	20	15	15
2.7.	Rasio KDRT	Persen	0,05	0,04	0,03	0,03	0.02
2.8	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	34,52	35,5	35,55	35,55	35,61
2.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100
2.1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	75	100	100	100	100
2.12	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	80	100	100	100	100
2.13	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	80	100	100	100	100
2.14	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	50	100	100	100	100



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Pangan</b>						
3.1	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kal/Hari	N/A	N/A	AKE 2423 kkal/kap/ hari, AKP 107,1 gr/kap/hari	AKE 2418 kkal/kap/ hari, AKP 107,1 gr/kap/hari	AKE 2400 kkal/kap/ hari, AKP 107,1 gr/kap/hari
3.2	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	Persen	N/A	N/A	86	86	86
<b>4</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>						
4.1	Jumlah dokumen RPPLH Kota yang disusun	Dokumen	0	0	1	1	0
4.2	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk K/R/P tingkat kota yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1
4.3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	0	37,95	38,28	58.51	58.51
4.4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	0	74,44	74,84	75.39	75.39
4.5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	0	22,38	22,39	22.38	22.38
4.6	Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	20	20	20	20	13
4.7	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jenis	3	3	3	3	3
4.8	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
4.9	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	5,91	5,86	20	14	22
4.1	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	84,04	84,30	80	82	75

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						
5.1	Cakupan kepemilikan KTP elektronik	Persen	98	99,08	100	98.08	100
5.2	Cakupan kepemilikan KK	Persen	97	94,41	100	99.16	100
5.3	Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun	Persen	96	96,63	100	97.84	100
5.4	Cakupan kepemilikan akte kematian	Persen	81	74,46	100	99.31	100
5.5	Cakupan pemanfaatan data kependudukan	Persen	N/A	9,7	100	35.48	100
<b>6</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
6.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kel	2006	2006	2008	2008	2010
6.2	Persentase LPM aktif	Persen	68	68	70	100	72
6.3	Persentase PKK aktif	Persen	67	67	75	100	80
6.4	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	100	100
6.5	Presentase Posyandu mandiri	Persen	57,17	57,17	61	57	58
6.6	Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	47	47,8	55	69	40
6.7	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
6.8	Jumlah inovasi wilayah (satu kelurahan satu unggulan)	Kel	0	0	0	1	1
<b>7</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,4	1,4	1,4	0	1,39
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,26	2,26	2,21	2.32	2.4
7.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	0	0	10	10	15
7.4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan (sekolah siaga kependudukan)	Angka	0	0	4	4	4
7.5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2,26	2,26	2,21	2,21	2,2
7.6	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi atau CPR semua cara pada Pasangan Usia Subur atau PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	0	67,7	67,8	67,8	67,86
7.7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persen	0	41,7	40	40	39,5

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
7.8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0	22,22	21	21	20,7
7.9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi atau unmet need	Persen	0	0	11,75	10.12	11,5
7.1	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	0	0	23,55	23.55	23,55
7.11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	67,7	67,7	67,8	67.8	67,86
7.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	0	87,75	88	88	85
7.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	0	80,52	80,75	80.75	81
7.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	N/A	61,8	62	62	62.2
7.15	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Angka	N/A	1	1	1	1
7.16	Cakupan PKB atau PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk/Rasio petugas lapangan KB/penyuluhan KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	Persen	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57
7.17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	N/A	85	85	85	85,71
7.18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100	100	100
7.19	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
7.2	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	80	80	80	80	80
7.21	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	Persen	N/A	60	60	72.73	25
7.22	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Angka	N/A	21,32	21,32	23,31	21.32

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8</b>	<b>Perhubungan</b>						
8.1	Rasio ijin trayek	Unit	1531	2092	2092	2092	2092
8.2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	2194	1864	1964	7706	2014
8.3	Persentase layanan angkutan darat	Persen	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48
8.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	95.14	78.18	79.06	392.36	79.47
8.5	Pemasangan rambu-rambu	Persen	67,87	N/A	80	72.31	80
8.6	Persentase pencapaian kawasan off street parking	Persen	0	0	0	33.34	50
8.7	Persentase pencapaian SAUM	Persen	0	0	0	0	0
8.8	Jumlah orang atau barang yang terangkut angkutan umum	Pnp/ jam	175638	175638	193201,8	1985965	193201,8
<b>9</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
9.1	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Poin	2*	2*	2,1	2.43	2.2
9.2	Indeks keterbukaan informasi publik	Persen	N/A	N/A	38.84	38.84	38.84
9.3	Persentase penyelesaian sengketa informasi	Persen	N/A	N/A	100	100	80
<b>10</b>	<b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>						
10.1	Persentase koperasi aktif	Persen	61,15	61,23	63	61.45	65.00
10.2	Persentase UKM non BPR atau LKM aktif	Persen	54	56	58	58	58
10.3	Persentase BPR atau LKM aktif	Persen	1	1	1	1	1
10.4	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	85,53	85,66	85	83.41	84.50
<b>11</b>	<b>Penanaman Modal</b>						
11.1	Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	N/A	N/A	60	60	65
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp	30,63	N/A	200	1.239	205
11.3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar Rp	N/A	N/A	5	5	5
<b>12</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>						
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	N/A	21	25	25	28
12.2	Jumlah pemuda berprestasi atau pelopor	Angka	N/A	3	5	0	8
12.3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	N/A	75	80	80	85
12.4	Jumlah pembinaan atlet muda	Persen	N/A	0	0	0	25
12.5	Jumlah atlet berprestasi	Orang	N/A	105	105	105	105
12.6	Jumlah prestasi olahraga	Cabang	N/A	27	27	27	27
12.7	Gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta)	Unit	N/A	1	1	1	1
12.8	Lapangan olahraga	Unit	N/A	1	1	10	1

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>13</b>	<b>Statistik</b>						
13.1	Persentase data/informasi/ statistik yang terintegrasi	Persen	N/A	N/A	60	0	50
13.2	Tingkat ketersediaan data pembangunan dan informasi statistik sektoral	Persen	N/A	N/A	60	60	70
<b>14</b>	<b>Persandian</b>						
14.1	Indeks keamanan informasi daerah	Persen	N/A	N/A	40	40	15
<b>15</b>	<b>Kebudayaan</b>						
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	10	8	5	7	5
15.2	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	67	50	55	55	55
15.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	N/A	1	0	2	2
15.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	8	8	8	10	18
15.5	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah	31	4	4	0	4
<b>16</b>	<b>Perpustakaan</b>						
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	105.276	181.03	185	188047	45000
16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	76.702	78.647	83.497	84104	83497
16.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Persen	0,092	0,093	0,095	0,077	0,067
16.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	8.733	15.086	15.416	188048	50000
16.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Eks	38.351	39.323	41.748	41748	41748
16.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	0	4	4	4
<b>17</b>	<b>Kearsipan</b>						
17.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	PD	33	33	33	33	33
17.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	50	50	50	50	50
Layanan urusan pilihan							
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>						
1.1	Lama kunjungan wisata	Hari	2	2	2	2	1
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>						
2.1	Provitas padi	Ton/ha GKG	40.88 ton/Ha	7,03	6,16	6.3	6,28
2.2	Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum	Persen	N/A	N/A	5	6.4	5

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Perdagangan</b>						
3.1	Ekspor bersih perdagangan	US \$	1.298.243,73	1.965.131,41	2.043.736,67	2,043,736.67	2,125,486.13
3.2	Cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal	Persen	N/A	N/A	19	2.86	2.86
<b>4</b>	<b>Perindustrian</b>						
4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	2,94	2,94	2,94	2.86	2.86
4.2	Pertumbuhan industri	Persen	2	2	0,2	0.55	0.30
<b>5</b>	<b>Transmigrasi</b>						
5.1	Besaran pengerahan penempatan calon transmigrasi ke wilayah daerah transmigrasi	Angka kepala keluarga	0	2	2	1	3
5.2	Memonitoring wilayah transmigrasi	Angka	0	0	1	1	1
<b>6</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>						
6.1	Provitas budidaya perikanan	Ton/ha	85,21	24,59	24,71	24.7	24.77
6.2	Angka konsumsi ikan	Kg/tahun /kapita	164,32	41,07	41,07	43.1	41.48
Penunjang urusan							
<b>1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>						
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA atau PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3.	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5.	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	90	90	90	90	75
1.8	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah	Persen	95,54	94,83	100	100	92
<b>2</b>	<b>Keuangan</b>						
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA	Persen	<5	<5	<5	<5	<5
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	6,93	11	<10	6.9	<10
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0	0	0	0	41.34
2.5.	Persentase belanja pendidikan (>20%)	Persen	21,78	23,10	21,61	6.86	>20
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	38,18	45,12	37,24	30.7	>10
2.7.	Penetapan APBD	Bulan	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember
<b>3</b>	<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>						
3.1.	Rata-rata lama pejabat ASN mendapatkan pendidikan dan pelatihan struktural setelah menduduki jabatan struktural	Tahun	2 - 5	2 - 5	2 - 5	3	5
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	90	121	0	0	80
3.3.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	5,8	5,9	6,94	2.06	3
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	29	21	29	24	27
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	117	115	117	117	116
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2077	1853	1853	1936	1872
<b>4</b>	<b>Penelitian dan pengembangan</b>						
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	85	85	80	80	90
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	70	90	90	90	95
	Penerapan SIDA:						
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	20	20	30	30	40
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	10	10	20	20	30

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5</b>	<b>Pengawasan</b>						
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	105	80,98	81	72	72
5.2.	Jumlah temuan BPK	Temuan	16	16	15	4	10
5.3.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Rasio	0	0	0,5	0.5	0.5
5.4.	Tingkat maturitas SPIP	Level	1	1	2	3	3.1
5.5.	Jumlah unit WBK atau WBBM	Unit	1	2	5	2	0
5.6.	Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN atau LHKSN	Persen	0	53,42	60	92.31	90
<b>6</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>						
6.1.	Integrasi dan sinkronisasi program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen perencanaan (Pemda/PD) ( Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan Dewan)	Ada	100	100	100	90	90
6.2.	Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran Setwan	Ada	100	100	100	90	90
6.3.	Tingkat kesesuaian target dan realisasi anggaran	Ada	100	100	100	90	85
6.4.	Tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Setwan	Persen	60	65	70	90	75
<b>7</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>						
7.1	Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik antar dan inter umat beragama	Persen	0	0	≤ 10%	0	≤ 10%
7.2	Persentase penanganan aliran keagamaan atau kepercayaan masyarakat yang menyimpang	Persen	100	100	100	100	100
7.3	Persentase keterlibatan komponen masyarakat dan aparat dalam pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100
7.4	Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi	Persen	100	100	100	100	45
7.5	Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pendidikan politik	Persen	100	100	100	100	59.23
7.6	Persentase TPS yang melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara dengan tertib dan aman	Persen	0	100	100	76.92	0



**Tabel 8.6**  
**Indikator Kinerja Kunci Target 2021 s.d 2023**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	1) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
	a) Pendidikan					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	81	83	85	85
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100	100	100	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	87	90	93	93
	b) Kesehatan					
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Angka	0.38	0.39	0.40	0.40
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	25.93	25.93	25.93	25.93
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	19.3	19.3	19.3	19.3
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	51	53	55	55
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	80	82	85	85
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	82.52	82.85	83.21	83.21
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	10	10	10	10
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100
	d) Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	10	10	10	10
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	94	96	98	98
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	98.32	98.61	98.9	98.9
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	4.5	5.5	6.5	6.5
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	60	75	90	90
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15
	f) Sosial					
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	2) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
	a) Tenaga Kerja					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	70	75	80	80
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	70	75	80	80
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	66	67	68	68
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	77	78	79	79
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	70	75	80	80
	b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	20	23	25	25
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
	c) Pangan					
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	110	109	108.5	108.5

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	d) Pertanahan					
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	80	82	85	85
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100	100	100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	100	100	100	100
	e) Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	62.64	63.5	64.36	64.36
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kot	Persen	74	73	72	72
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	17	20	25	25
	f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	100	100	100	100
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	40	60	80	80
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	100	100	100
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	100	100	100
	g) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2.3	2.3	2,29	2,29
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	23.55	23.56	23.57	23.57
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11.15	11.13	11.12	11.12

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	h) Perhubungan					
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	angka	2000	2200	2420	2420
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	angka	0.57	0.61	0.63	0.63
	i) Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	35	35	35	35
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	35	35	35	35
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	62	63	65	65
	j) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	15	17	19	19
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	100	100	100	100
	k) Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	75	75	75	75
	l) Kepemudaan dan Olahraga					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	26.88	28.99	31.26	31.26
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	25.14	27.11	29.24	29.24
3	Peningkatan prestasi olahraga	jenis	50	100	75	75

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	m) Statistik					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	50	50	50	50
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	50	50	50	50
	n) Persandian					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	50	60.77	60.77	60.77
	o) Kebudayaan					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	77	77	78	78
	p) Perpustakaan					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58	58.4	59	59
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	55.25	55.5	55.75	55.75
	q) Kearsipan					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	72.5	83.75	90	90
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	73	82	92	92



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>3) Urusan Pilihan</b>					
	a) Kelautan dan Perikanan					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	jumlah	1365.65	1368.95	1372.25	1372.25
	b) Pariwisata					
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	3	3.5	4	4
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	13	14.5	15	281129
3	Tingkat hunian akomodasi	hari	26500	30000	33000	122210
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	1 – 1,14	1,15-1,29	1,30 – 1,44	1,30 – 1,44
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	21,541,807,315	23,695,988,046	26,065,586,850	26,065,586,850
	c) Pertanian					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	6.41	6.54	6.6	6.6
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	20	20	20	20
	d) Perdagangan					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	1	1	1	1
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	90	90	90	90
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	25	27	29	37

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	e) Perindustrian					
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	0.40	0.50	0.60	0.006
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	10	10	10	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	50	50	50	50
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	20	20	20	20
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Buku	1	1	1	4

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>					
	<b>a) Perencanaan dan Keuangan</b>					
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	59.01	59.01	59.01	59.01
2	Rasio PAD	Persen	25.3	25.3	25.3	25.3
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	3	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	Persen	94.00	94.00	94.00	94.00
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
	<b>b) Pengadaan</b>					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	2	3	4	4
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	1.2	1.3	1.4	1.4
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	76	77	78	78
	<b>c) Kepegawaian</b>					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	215	220	226	226
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	4	5	5	5
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	84	86	87	89

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	d) Manajemen Keuangan					
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	1	1	1	1
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	1	1	1	1
3	Manajemen Aset	Persen	90	90	90	90
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	7	7	7	7
	e) Transparansi dan Partisipasi Publik					
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	100	100	100	100
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100



## **BAB VII**

# **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
2. berbasis permasalahan serta isu strategis Daerah;
3. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal atau SPM;
4. peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan kualitas lingkungan hidup; dan
5. penerapan sub urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Rencana program Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, serta fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD.

Kerangka pendanaan dan realisasi pembangunan Daerah tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2. Adapun indikasi dan realisasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Daerah tahun 2019-2020 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya

berdasarkan .....

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disajikan pada Tabel 7.3. Sedangkan kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai Tahun 2021 telah menerapkan prinsip dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 7.4. Penerapan dari peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi salah satu alasan utama dari perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023. Adapun lebih rinci mengenai program perangkat daerah yang disertai realisasi pendanaan Tahun 2019 serta pendanaan indikatif Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Buku II.

**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2020**

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI	PROYEKSI
		2019	2020
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,498,836,943,637</b>	<b>1,289,768,301,514</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>562,938,219,283</b>	<b>570,506,179,397</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	514,420,107,304	499,265,179,828
2.1.2	Belanja Subsidi		
2.1.3	Belanja Hibah	36,989,617,370	35,496,930,170
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	7,292,000,000	7,729,600,000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan dan Kelurahan	736,494,609	766,064,039
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	27,248,405,360
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>935,898,724,354</b>	<b>719,262,122,117</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	55,559,420,842	57,450,854,217
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	603,895,281,871	502,156,523,210
2.2.3	Belanja Modal	276,444,021,641	159,654,744,690

Tabel 7.2 .....

**Tabel 7.2**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023**

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	PROYEKSI (Rp)		
		2021	2022	2023
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,354,648,450,759</b>	<b>1,394,860,179,169</b>	<b>1,406,831,344,426</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1,063,714,959,810</b>	<b>1,098,004,773,806</b>	<b>1,104,803,423,477</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	482,864,608,777	490,975,267,187	495,975,267,187
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa*	542,192,609,624	564,871,765,210	564,370,414,881
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	32,878,141,409	35,878,141,409	37,878,141,409
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5,779,600,000	6,279,600,000	6,579,600,000
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal*</b>	<b>288,433,490,949</b>	<b>293,355,405,363</b>	<b>297,527,920,949</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>3,500,000,000</b>	<b>4,500,000,000</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja transfer</b>			
2.4.1	belanja bagi hasil			
2.4.2	belanja bantuan keuangan			



## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Berdasarkan program prioritas dan pendanaan program pembangunan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja pembangunan dan indikator penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagai ukuran keberhasilan pembangunan Daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi aspek kesejahteraan umum, aspek pelayanan yang meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan, juga daya saing daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama atau IKU Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci atau IKK pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja *outcomes* atau *impact* yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran. Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Menyikapi perkembangan keadaan khususnya setelah pandemi COVID-19 dan beberapa kebijakan nasional terkait percepatan penanganannya, serta kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan dalam RPJMD Kota Sukabumi. Penyesuaian ini menyusul penyesuaian target

pembangunan .....

pembangunan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang terlebih dahulu telah dilakukan. Penyesuaian target kinerja pembangunan dalam indikator makro daerah, IKU Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan pada Tabel 8.1, Tabel 8.2, Tabel 8.3, Tabel 8.4, Tabel 8.5 dan Tabel 8.6. Penyesuaian target indikator dilakukan mulai Tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagai respon terhadap perkembangan keadaan akibat Pandemi COVID-19. Adapun lebih rinci mengenai Tabel 8.5 dan Tabel 8.6. tentang Indikator Kinerja Kunci disajikan pada Buku II.

**Tabel 8.1**  
**Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2019 s.d 2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET
			2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,03	73,60	74,31	74,20
	a. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,79	9,79	9,58
	b. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,39	13,47	13,46	13,46
	c. Angka Harapan Hidup	Angka	71,95	72,00	72,26	72,10
	d. Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan ((Pendapatan perkapita (ribu rupiah))	Rupiah	10,188	10,339	11,204	10.648
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,48	7,12	6,67	7,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,00	8,57	8,49	10,25
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,43	5,51	5,49	(1,50)
5	Indeks Gini	Angka	0,40	0,40	0,408	0,412

Sumber : Bappeda, diolah 2020

Tabel 8.2 .....

**Tabel 8.2**  
**Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2021 s.d 2023**

No	Indikator	Satuan	Target			Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,45	74,60	74,75	74,75
2	Pendapatan per kapita	Rupiah (Juta)	26,370	27,314	28,430	28,430
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,80	7,70	7,50	7,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,81	9,70	9,59	9,59
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,45	5,23	5,54	5,54
6	Indeks Gini / Gini Rasio	Angka	0,410	0,405	0,400	0,400

Sumber : Bappeda, diolah 2020

Tabel 8.3 .....

**Tabel 8.3**  
**Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2019 s.d 2020**

No.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		2019		2020
			2017	2018	TARGET	REALISASI	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	94.68	94.68	94.98	73.35	73.35
2	Indeks Rasa Aman	Persen	N/A	N/A	63.7	87.53	64.00
3	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.177	0.177	0.207	0.276	0.26
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.52	9.79	9.75	9.79	9.58
5	Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	N/A	N/A	53.63	49,95	51.65
6	Indeks Pembangunan Gender	Angka	90.95	91.07	91.07	91.44	91.00
7	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67.76	67.76	67.81	76.63	67.86
8	Persentase penilaian Aspek Fisik Indeks Layak Huni	Persen	N/A	N/A	41.00	61.92	42
9	Persentase penilaian Aspek Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	N/A	N/A	41.00	68.20	42
10	Persentase penilaian Aspek transportasi	Persen	N/A	N/A	51.00	68.86	52
11	Persentase penilaian Aspek Fasilitas	Persen	N/A	N/A	41.00	62.42	42
12	Persentase penilaian Aspek Utilitas	Persen	N/A	N/A	51.00	74.87	52
13	Persentase Pengurangan Risiko Bencana	Persen	1.00	1.00	1.25	1.25	1.50

No.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		2019		2020
			2017	2018	TARGET	REALISASI	TARGET
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	42.67	42.67	42.83	49.12	43.30
15	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0.21	0.21	0.17	0.52	0.63
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	N/A	N/A	100.00	1.885,49917	1.763,30
17	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	39.44	39.44	39.485	38.920	28.64
18	Persentase Ketersediaan LP2B	persen	1.90	1.90	3.80	3.60	3.89
19	Skor Pola Pangan Harapan	persen	77.90	79.70	78.70	79.70	81.30
20	Persentase Keamanan Pangan	persen	85.45	78.00	86.00	89.81	87.00
21	Nilai SAKIP	Skor	74.49	74.49	80	76.07	77.00
22	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Indeks Pelayanan Publik	Angka	N/A	2.62	2.60	2.61	2.71
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79.28	79.28	80.00	83.27	80.50
25	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2*	2*	2.10	2.43	2.20
26	Presentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah	Persen	25	57	60	57	4.50

Tabel 8.4 .....

**Tabel 8.4**  
**Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021 s.d 2023**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Target			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	74,08	78,02	80,09	80,09
2	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.287	0.317	0.367	0.367
3	Indeks Pendidikan	Angka	69,82	69,83	69,83	69,83
4	Indeks Kota Kreatif (IKK)	Angka	27,2	48,8	63,6	63,6
5	Indeks pembangunan gender	Angka	91,19	91,25	91,31	91,31
6	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67,91	67,96	68,01	68,01
7	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Angka	78	80	82	82
8	Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	35	40	45	45
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	point	58.21	59.00	59.78	59.78
10	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	point	0,51	0,53	0,55	0,55
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	1.851,46	1.944,04	2.041,24	2.041,24
12	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	persen	1	2	3	3

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Target			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
13	kontribusi pariwisata terhadap PDRB	persen	1 – 1,14	1,15-1,29	1,30 – 1,44	1,30 – 1,44
14	Skor Pola Pangan Harapan	persen	79.50	79.99	80.30	80.30
15	Nilai SAKIP	Skor	78,00	79,00	80,00	80,00
16	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,81	2,91	3,01	3,01
18	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2.3	2.4	2,50	2,50
19	Indeks Daya Saing Daerah	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi



## **BAB IX**

### **PENUTUP**

RPJMD memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, arah kebijakan keuangan Daerah, program Perangkat Daerah, dan program lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya, pelaksanaan RPJMD perlu memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan serta pedoman transisi yang mengatur perencanaan tahunan pada akhir periode RPJMD.

#### **9.1. KAIDAH PELAKSANAAN**

Perkembangan kondisi nasional dan daerah akibat pandemi Covid-19 menunjukkan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga telah merambat ke seluruh sendi kehidupan lainnya. Untuk itu, telah ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Maret Tahun 2020 ini. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terbit setelah penetapan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018- 2023 telah diterapkan dan diselaraskan ke dalam Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 ini.

Dokumen Perubahan RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, serta merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. perangkat .....

1. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat serta masyarakat termasuk dunia usaha;
2. Wali Kota, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah;
3. Wali Kota berkewajiban menyebarluaskan Perubahan RPJMD kepada masyarakat;
4. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap Perubahan RPJMD;
5. Penyusunan Perubahan RKPDP tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kota Sukabumi sampai dengan Tahun 2023; dan
6. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

## **9.2. PEDOMAN TRANSISI**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Daerah, diperlukan adanya pedoman penyusunan RKPDP Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD. Penyusunan RKPDP Tahun 2024 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada arah kebijakan RPJPD, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2024, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya RKPDP tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024. Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyusunan RKPDP Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani atau terselesaikan sampai dengan tahun 2023, untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2024, baik nasional maupun provinsi.

Sukabumi,

WALI KOTA SUKABUMI

ttd

ACHMAD FAHMI